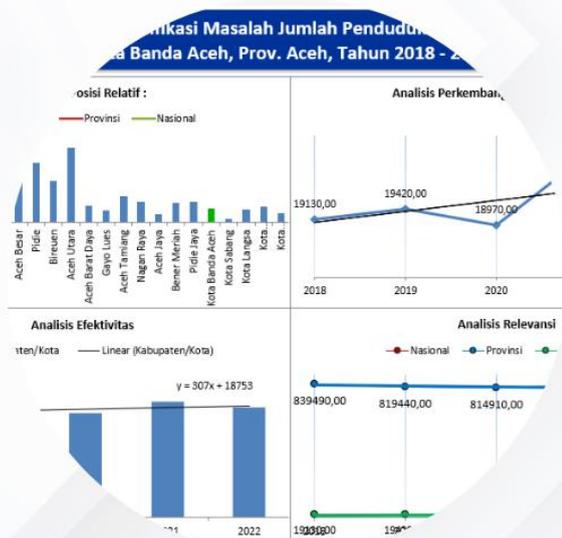




RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA BANDA ACEH 2023-2026



**TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN (TKPK)
KOTA BANDA ACEH**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami Panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan KaruniaNya, penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 dapat diselesaikan dengan baik oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang dibentuk Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2023, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 merupakan Dokumen Perencanaan khusus Bidang Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang menjadi salah satu bagian dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Perangkat Daerah khususnya yang berkaitan langsung dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh sesuai dengan Matriks Program di bidang penanggulangan kemiskinan. Dokumen ini juga dijadikan sebagai pedoman untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program-program penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh.

Semoga Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 dapat terintegrasi dalam dokumen Perubahan RPD Kota Banda Aceh, selanjutnya dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah sehingga seluruh program kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan untuk melaksanakan tugas dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Kota Banda Aceh.

Banda Aceh, September 2023

TKPK

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	20
1.3. Maksud Dan Tujuan	23
1.4. Sistematika Rpkd Kabupaten Keerom	23
BAB II KONDISI UMUM DAERAH DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KEEROM	
2.1. Geografi.....	25
2.2. Demografi.....	31
2.3. Pertumbuhan Ekonomi.....	34
2.4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	69
2.5. Sosial	75
2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	87
2.7. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	101
2.8. Pertanian.....	102
2.9. Kelautan dan Perikanan	105
2.10. Pariwisata.....	106
2.11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	106
BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH	
3.1. Konsep Kemiskinan	108
3.1.1. Pengertian Kemiskinan.....	108
3.1.2. Definisi Kemiskinan Secara Umum.....	109
3.1.3. Skema Terbentuknya Perangkat Kemiskinan.....	111
3.1.4. Bentuk dan Definisi Kemiskinan.....	113
3.1.5. Indikator-Indikator Mengenai Kemiskinan.....	116
3.1.6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin.....	119
3.2. Kondisi Kemiskinan Daerah.....	122
3.3. Identifikasi Kemiskinan Multidimensi di Kota Banda Aceh.....	136
3.3.1. Bidang Pendidikan.....	136
3.3.2. Bidang Kesehatan.....	141
3.3.3. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	157
3.3.4. Bidang Ketenagakerjaan.....	164
3.3.5. Isu Strategis Kemiskinan dalam Bidang Lainnya.....	170
3.1.6. Kemiskinan Ekstrem.....	170

BAB IV PRIORITAS PROGRAM

4.1 Penyusunan Teori Perubahan (Theory of Change) atau Logika Program	177
4.2 Analisis Anggaran Untuk Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh.....	185

BAB V PRIORITAS WILAYAH

5.1. Isu Strategis	206
5.2. Analisis Kuadran Prioritas Wilayah	207
5.2.1. Wilayah Prioritas Kemiskinan Kabupaten Keerom.....	210
5.3. Rekomendasi Kebijakan.....	223
5.3.1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	223
5.3.2. Kebijakan Pendidikan.....	224
5.3.3. Kebijakan Kesehatan	225
5.3.4. Kebijakan Infrastruktur Dasar	227
5.3.5. Kebijakan Pertanian dan Perkebunan.....	228
5.3.6. Kebijakan UMKN.....	228

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Matriks Kebijakan Dan Sasaran , Indikator Sasaran Serta Target Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.....	9
Tabel 1. 2	Matriks Prioritas Program Dan Program Pendukung Serta Target Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026	13
Tabel 2. 1	Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan Kota Banda Aceh.....	25
Tabel 2. 2	Nama Sungai dan Panjang Alirannya di Kota Banda Aceh.....	30
Tabel 2. 3	Kondisi Klimatologi Kota Banda Aceh Tahun 2022.....	31
Tabel 2. 4	Indikator Kependudukan Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022.....	32
Tabel 2. 5	Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022.....	34
Tabel 2. 6	Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Tahun 2018 s/d 2022 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Banda Aceh (juta).....	38
Tabel 2. 7	Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Tahun 2018 s/d 2022 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Banda Aceh (juta).....	40
Tabel 2. 8	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018 s/d 2022 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Banda Aceh.....	43
Tabel 2. 9	Distribusi PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran.....	44
Tabel 2.10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022	48
Tabel 2.11	Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2018-2022	48
Tabel 2.12	Persentase Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022	53
Tabel 2.13	Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022	55
Tabel 2.14	Jenis Pelatihan yang Dilakukan Disnaker Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022	56
Tabel 2.15	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022	58
Tabel 2.16	Persentase Pengeluaran Non Makanan Kelompok Pengeluaran Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022	59
Tabel 2.17	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022 (Rupiah)	59
Tabel 2.18	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022	60
Tabel 2.19	Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022	60

Tabel 2.20	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022.	64
Tabel 2.21	Perkembangan Rasio Pelayanan Posyandu Per Satuan Balita di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022.	66
Tabel 2.22	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022.	67
Tabel 2.23	Perkembangan Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022.	68
Tabel 2.24	Perkembangan Rasio Dokter Per 100.000 Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022.	69
Tabel 2.25	Status Kondisi Jalan Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022.	70
Tabel 2.26	Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase Tahun 2018-2022.	71
Tabel 2.27	Rumah Layak Huni Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022.	72
Tabel 2.28	Persentase Luas Permukiman Tertata Tahun 2018-2022.....	73
Tabel 2.29	Luas Kawasan Kumuh Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022.	74
Tabel 2.30	Indikator Kinerja Daerah Bidang Sosial Tahun 2018-2022.	75
Tabel 2.31	Indikator Kinerja Daerah Bidang Tenaga Kerja Tahun 2018-2022.	76
Tabel 2.32	Indikator Kinerja Daerah Pangan Tahun 2018-2022.	79
Tabel 2.33	Rasio Kepemilikan KTP di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022	80
Tabel 2.34	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022.....	81
Tabel 2.35	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Mukim yang Baik di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022.....	83
Tabel 2.36	Kelompok Binaan LPM Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022..	85
Tabel 2.37	Kelompok Binaan PKK Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022..	88
Tabel 2.38	PKK Aktif Tahun 2018-2022 Kota Banda Aceh.....	89
Tabel 2.39	Jumlah Posyandu dalam Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022....	90
Tabel 2.40	Strata Posyandu dalam Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022.....	91
Tabel 2.41	Daftar Partisipasi Masyarakat Dalam Pilchiksung Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022.....	92
Tabel 2.42	Data Mukim dalam Kota Banda Aceh.....	93
Tabel 2.43	Fasilitasi Dana Pembangunan Untuk Gampong di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022.....	94
Tabel 2.44	Capaian Pengelolaan Keuangan Gampong yang Baik Tahun 2018-2022.....	95
Tabel 2.45	Realisasi Penyaluran BLT Tahun 2020-2022.....	96
Tabel 2.46	Realisasi Penyaluran Paket Bantuan Anak Kurang Mampu Tahun 2020-2022.....	96
Tabel 2.47	Realisasi Bantuan Tanggap Darurat Tahun 2020-2022.....	96
Tabel 2.48	Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil Melalui Program PUEM di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022.....	97
Tabel 2.49	Capaian Pengelolaan Aset Gampong yang Baik Tahun 2018-2022 (dalam persen).....	100

Tabel 2.50	Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/Gampong Yang Baik Tahun 2018-2022 (dalam persen).....	101
Tabel 2.51	Persentase Koperasi Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022.....	101
Tabel 2.52	Jumlah UMKN dan BPR/LKM di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022.....	102
Tabel 2.53	Luas Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas Padi di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022.....	103
Tabel 2.54	Cakupan Bina Kelompok Pertanian Tahun 2018-2022.....	103
Tabel 2.55	Data Kelistrikan Banda Aceh Tahun 2018-2022.....	104
Tabel 2.56	Cakupan Binaan Kelompok Nelayan Tahun 2018-2022.....	105
Tabel 2.57	Produksi Ikan Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022.....	106
Tabel 2.58	Indikator Kinerja Daerah Bidang Pariwisata Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022.....	106
Tabel 2.59	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tahun 2018-2022.....	107
Tabel 2.60	Indikator Kota Layak Anak (KLA) yang Dicapai Tahun 2018-2022.....	107
Tabel 3. 1	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem, Miskin dan Rentan (Desil 1-4) Kota Banda Aceh Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh Tahun 2022.....	127
Tabel 3. 2	Jumlah anak usia sekolah, 7-12 Tahun (SD/MI), 13-15 Tahun (SMP/MTs) dan 16-18 tahun (SMA/MA), yang bersekolah dan tidak bersekolah, menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh Tahun 2022.....	138
Tabel 3. 3	Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022.....	146
Tabel 3. 4	Perkembangan Rasio Pelayanan Posyandu Per Satuan Balita di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022.....	147
Tabel 3. 5	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022.....	148
Tabel 3. 6	Perkembangan Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022.....	149
Tabel 3. 7	Perkembangan Rasio Dokter Per 100.000 Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022.....	150
Tabel 3. 8	Data Sebaran Kasus DBD Tahun 2018-202.....	154
Tabel 3. 9	Jumlah Kasus Baru HIV Tahun 2021.....	155
Tabel 3.10	Rumah Layak Huni Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022.....	158
Tabel 3.11	Persentase Luas Permukiman Tertata Tahun 2018-2022.....	159
Tabel 3.12	Luas Kawasan Kumuh Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022....	160
Tabel 3.13	Jumlah Rumah tangga di Kota Banda Aceh Berdasarkan Sumber Air Minum Yang Dapat Dikonsumsi Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022.....	163
Tabel 3.14	Persentase Rumah Tangga di Kota Banda Aceh Berdasarkan Sumber Penerangan Menurut Kecamatan Tahun 2022.....	163
Tabel 3.15	Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Status Bekerja Tidak Bekerja Menurut Kecamatan Tahun 2022.....	170

Tabel 3.16	Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Jenis Pekerjaan Menurut Kecamatan Tahun 2022	171
Tabel 4. 1	Akses Fasilitas Kesehatan, Tahun 2020 (%).....	185
Tabel 4. 2	Infrastruktur Dasar, Tahun 2020 (%).....	187
Tabel 4. 3	Status Pekerjaan Kepala Keluarga 40% Penduduk Miskin Ekstrem Tahun 2022	190
Tabel 4. 4	Status Bekerja Penduduk Miskin Ekstrem (Usia 15+ dalam persen), 2020	190
Tabel 4. 5	Informasi 40% Penduduk Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Berdasarkan Pekerjaan Individu Menurut Kecamatan Di Kota Banda Aceh Tahun 2022.....	191
Tabel 4. 6	Alokasi Anggaran Kemiskinan Program Prioritas Dan Pendukung Kota Banda Aceh Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.....	196

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Peta Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Banda Aceh.....	26
Gambar 2. 2	Peta Keiringan Lereng Kota Banda Aceh.....	27
Gambar 2. 3	Kondisi Geologi Kota Banda Aceh.....	28
Gambar 2. 4	Peta Hidrologi Kota Banda Aceh.....	30
Gambar 2. 5	Jumlah Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022 (jiwa)	32
Gambar 2. 6	Piramida Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2022.....	33
Gambar 2. 7	Pertumbuhan Ekonomi Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022....	35
Gambar 2. 8	Grafik Laju Inflasi Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022.....	45
Gambar 2. 9	PDRB Perkapita Banda Aceh Tahun 2017-2021 (Juta).....	46
Gambar 2. 10	Indeks Gini Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022.....	47
Gambar 2. 11	Angka Kematian Ibu di Kota Banda Aceh 2018-2022.....	50
Gambar 2. 12	Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Banda Aceh dan Aceh Tahun 2018-2022.....	51
Gambar 2. 13	Grafik Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021.....	56
Gambar 2. 14	Jumlah Pencari Kerja Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022.....	57
Gambar 2. 15	Rasio Guru/Murid Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021.....	62
Gambar 2. 16	Perkembangan Angka Partisipasi Murni Kota Banda Aceh Tahun 2019-2022.....	63
Gambar 2. 17	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kota Banda Aceh Tahun 2019-2022.....	65
Gambar 2. 18	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022.....	71
Gambar 3. 1	IPM Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022	123
Gambar 3. 2	Analisis Identifikasi Masalah Persentase Penduduk Miskin (%) Kota Banda Aceh, Prov. Papua, Tahun 2017-2022	124
Gambar 3. 3	Analisis Identifikasi Masalah Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Tahun 2018-2022.....	126
Gambar 3. 4	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Kelompok Makanan Dan Non Makanan di Kota Banda Aceh (dalam rupiah), 2022	129
Gambar 3. 5	Persentase Pengeluaran Perkapita Perbulan Komoditas Makanan Terpilih di Kota Banda Aceh, 2012-20122.....	131
Gambar 3. 6	Persentase Pengeluaran Perkapita Perbulan Komoditas Makanan Terpilih di Kota Banda Aceh, 2012-2022.....	132
Gambar 3. 7	Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kota Banda Aceh Tahun 2022 dan Perkembangan Kemiskinan Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022.....	133
Gambar 3. 8	Analisis Identifikasi Masalah Indeks Kedalamam Kemiskinan (P1) (Indeks) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Tahun 2018-2022.....	134
Gambar 3. 9	Analisis Identifikasi Masalah Indeks Keperahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Tahun 2018-2022.....	135

Gambar 3.10	Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Tahun 2016-2022.....	137
Gambar 3.11	Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Tahun 2016-2022.....	139
Gambar 3.12	Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Tahun 2016-2022.....	140
Gambar 3.13	Angka Kematian Ibu di Kota Banda Aceh, Tahun 2016-2020.	142
Gambar 3.14	Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Banda Aceh, Tahun 2016-2020.....	144
Gambar 3.15	Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kota Banda Aceh, Tahun 2017-2021.....	145
Gambar 3.16	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk di Kota Banda Aceh, Tahun 2018-2021.....	151
Gambar 3.17	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) di Kota Banda Aceh, Tahun 2016-2020.....	152
Gambar 3.18	Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan	153
Gambar 3.19	Analisis Identifikasi Masalah Penduduk Dengan Pengobatan Sendiri (%) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Tahun 2018-2022.....	156
Gambar 3.20	Analisis Identifikasi Morbiditas (%) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Tahun 2016-2022.....	157
Gambar 3.21	Analisis Identifikasi Proporsi Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak (%) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Tahun 2016-2022.....	161
Gambar 3.22	Analisis Identifikasi Proporsi Rumah Tangga Dengan Air Minum Layak (%) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Tahun 2018-2022.....	162
Gambar 3.23	Analisis Identifikasi Masalah Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Tahun 2017-2022.....	166
Gambar 3.24	Analisis Identifikasi Masalah Tingkat Kesempatan Kerja (%) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Tahun 2017-2022.....	167
Gambar 3.25	Analisis Identifikasi Masalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Tahun 2017-2022	168
Gambar 3.26	Analisis Identifikasi Masalah Setengah Pengangguran (%) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Tahun 2016-2020.....	169
Gambar 3.27	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Menurut Provinsi Tahun 2022.....	174
Gambar 3.28	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2022.....	175
Gambar 3.29	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Kota Banda Aceh Tahun 2021-2022.....	176

Gambar 4. 1	Theory of Change untuk peningkatan partisipasi dan akses pendidikan dasar di Kota Banda Aceh.....	179
Gambar 4. 2	Theory of Change untuk meningkatnya kesehatan ibu dan bayi Kota Banda Aceh.....	182
Gambar 4. 3	Theory of Change untuk meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman Kota Banda Aceh.....	186
Gambar 4. 4	Theory of Change untuk menurunnya tingkat pengangguran terbuka.....	188
Gambar 4. 5	Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin (%) dan Derajat Otonomi Fiskal (%) Provinsi Aceh Tahun 2021	194
Gambar 4. 6	Relevansi Persentase Penduduk Miskin (%) dan Derajat Otonomi Fiskal (%) Kota Banda Aceh Tahun 2015-2021	195
Gambar 4. 7	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin (%) dan Ruang Fiskal (%) Aceh Tahun 2021	195
Gambar 4. 8	Relevansi Persentase Penduduk Miskin (%) dan Ruang Fiskal (%) Kota Banda Aceh Tahun 2015-2021.....	196
Gambar 4. 9	Komposisi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2015-2021.....	197
Gambar 4.10	Rincian Pendapatan (Semua Belanja) Kota Banda Aceh Tahun 2015-2020 (%)......	198
Gambar 4.11	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Penduduk Miskin (%) dan Belanja Modal (%) dan Perkembangan Belanja Modal Kota Banda Aceh Tahun Tahun 2015-2021.....	198
Gambar 4.12	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Penduduk Miskin (%) dan Belanja Tidak Langsung (%) Aceh Tahun 2020 dan Perkembangan Belanja Tidak Langsung Kota Banda Aceh Tahun Tahun 2015-2021.....	199
Gambar 4.13	Posisi Relatif Belanja Kesejahteraan (%) Aceh 2020, Perkembangan di Kota Banda Aceh Tahun 2015-2020 Serta Relevansi Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin Kota Banda Aceh Tahun 2015-2020.	200
Gambar 4.14	Posisi Relatif Belanja Pendidikan (%) Aceh 2020, Perkembangan di Kota Banda Aceh Tahun 2015-2020 Serta Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kota Banda Aceh Tahun 2015-2020.....	201
Gambar 4.15	Posisi Relatif Belanja Kesehatan (%) Aceh 2020, Perkembangan di Kota Banda Aceh Tahun 2015-2020 Serta Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) dan Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) dan Penduduk Dengan Keluhan Kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2015-2020.....	202

Gambar 4.16	Posisi Relatif Belanja Infrastruktur (%) Aceh 2020, Perkembangan di Kota Banda Aceh Tahun 2015-2020 Serta Relevansi Proporsi Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak (%) dan Proporsi Rumah Tangga Dengan Air Minum Layak (%) Kota Banda Aceh Tahun 2015-2020.....	204
Gambar 4.17	Posisi Relatif Belanja Sosial (%) Aceh 2020, Perkembangan di Kota Banda Aceh Tahun 2015-2020 Serta Relevansi Relevansi Penduduk Miskin (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Kota Banda Aceh Tahun 2015-2021.....	205
Gambar 5.1	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Provinsi Aceh Tahun 2022.....	208
Gambar 5.2	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin Ekstrem (%) dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (jiwa) Provinsi Aceh Tahun 2022.....	209
Gambar 5.3	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Individu Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Persentase Keluarga Desil 1 Terhadap 40% P3KE) Kota Banda Aceh Tahun 2022.....	209
Gambar 5.4	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Individu Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Persentase Anak Usia 7-12 Tahun Tidak Bersekolah Kota Banda Aceh Tahun 2022.....	211
Gambar 5.5	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Individu Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Persentase Anak Usia 13-15 Tahun Tidak Bersekolah Kota Banda Aceh Tahun 2022.....	212
Gambar 5.6	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Individu Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Persentase Anak Usia 16-18 Tahun Tidak Bersekolah Kota Banda Aceh Tahun 2022.....	213
Gambar 5.7	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Individu Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan 60 Tahun Keatas Kota Banda Aceh Tahun 2022.....	214
Gambar 5.8	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Individu Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Persentase Penduduk Usia 15=59 Tidak Bekerja Kota Banda Aceh Tahun 2022.....	215
Gambar 5.9	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Individu Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Persentase Penduduk 40% P3KE Bekerja Sebagai Wiraswasta Kota Banda Aceh Tahun 2022.....	216

Gambar 5.10	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Individu Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Persentase Rumah Tangga 40% P3KE Dengan Rumah Milik Sendiri Kota Banda Aceh Tahun 2022.....	217
Gambar 5.11	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Individu Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Persentase Rumah Tangga Jamban Bersama Kota Banda Aceh Tahun 2022.....	218
Gambar 5.12	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Individu Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Persentase Rumah Tangga 40% P3KE Tanpa Septic Tank Kota Banda Aceh Tahun 2022.....	219
Gambar 5.13	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Individu Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Persentase Rumah Tangga 40% P3KE Dengan Air Minum Tidak Terlindungi Kota Banda Aceh Tahun 2022.....	220
Gambar 5.14	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Individu Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Persentase Rumah Tangga 40% P3KE Penerangan Listrik Non PLN dan Bukan Listrik Kota Banda Aceh Tahun 2022	221
Gambar 5.15	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Individu Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Persentase 40% Data P3KE Dengan Persentase Penduduk Lansia Perempuan Usia 60-69 Kota Banda Aceh Tahun 2022	222
Gambar 5.16	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Individu Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Persentase 40% P3KE Dengan Penduduk Lansia Laki-Laki Usia 60-69 Kota Banda Aceh Tahun 2022.....	223

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan (*poverty*) merupakan permasalahan mendasar yang sejak dahulu hingga saat ini masih dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Permasalahan kemiskinan harus ditangani melalui implementasi langkah-langkah penanggulangan dengan pendekatan yang terarah, sistematis, dan masif. Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mengurangi beban rakyat miskin dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Besarnya dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan, menjadikan masalah tersebut sebagai isu global, bahkan ditetapkan sebagai target pertama dari 17 tujuan dalam *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)* yang terdiri atas 169 target, dimana salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Pengurangan jumlah penduduk miskin di dunia menjadi salah satu kesepakatan global yang dinyatakan dalam tujuan TPB yang harus dicapai secara signifikan. Begitu pentingnya masalah kemiskinan sehingga penanggulangannya menjadi gerakan bersama yang dilakukan oleh seluruh dunia baik oleh lembaga pemerintahan, dunia usaha, LSM, serta berbagai pihak terkait lainnya.

Di Indonesia, kemiskinan juga merupakan salah satu permasalahan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan menjadi prioritas yang paling utama dalam melaksanakan pembangunan. Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan mencegah bertambahnya kemiskinan baru. Bentuk komitmen Pemerintah terhadap penduduk miskin berupa program penanggulangan kemiskinan telah menjadi bagian dari rencana pembangunan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, baik melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan upaya terus menerus dalam akselerasi penanggulangan kemiskinan yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang percepatan Program Penanggulangan Kemiskinan. Aturan yang dimaksud berisikan penajaman program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lainnya, diantaranya Program Perlindungan Sosial yang meliputi Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat.

Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa: “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban meningkatkan kesejahteraan rakyat”. Hal ini secara implisit menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan harus diupayakan demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Hasil pembangunan hendaknya dapat dinikmati secara merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Persentase Penduduk Miskin (P0) di Banda Aceh pada tahun 2022 (7,13%) mengalami penurunan sekitar 0,48% dibandingkan kondisi pada tahun 2021 (7,61%). Sementara Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Banda Aceh pada tahun 2022 (1,52%) mengalami kenaikan sekitar 0,4% dibandingkan kondisi pada tahun 2021 (1,12%). Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Banda Aceh pada tahun 2022 (0,48%) mengalami kenaikan sekitar 0,12% dibandingkan kondisi pada tahun 2021 (0,36%). Hal-hal yang memicu fluktuatifnya persentase data diatas diantaranya kenaikan harga bahan bakar minyak juga karena adanya pandemi Covid-19.

Seluruh Kabupaten/Kota di Propinsi Aceh juga mengalami penurunan persentase penduduk miskin termasuk Provinsi Aceh yang mengalami penurunan Persentase Penduduk Miskin (P0) dari 15,33% (2021) menjadi 14,64 (2022). Sementara Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Provinsi Aceh pada tahun 2022 (2,49%) mengalami penurunan sekitar 0,37% dibandingkan kondisi pada tahun 2021 (2,86%). Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Aceh pada tahun

2022 (0,61%) mengalami penurunan sekitar 0,14% dibandingkan kondisi pada tahun 2021 (0,75%).

Sebagai ibukota provinsi dan pusat pemerintahan di Aceh, Kota Banda Aceh, memiliki tanggung jawab yang besar dalam penurunan tingkat kemiskinan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin dan pengurangan resiko bencana dengan berpedoman pada penerapan Syariah Islam melalui program-program dari lembaga keistimewaan Aceh seperti Baitul Mal serta lembaga pemerintahan terkait lainnya.

Isu Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh tahun 2017 – 2022, Kemiskinan merupakan salah satu agenda pemerintah yang menjadi prioritas pembangunan. Untuk mengurangi kemiskinan di Kota Banda Aceh maka pemerintah perlu menyusun prioritas kebijakan dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan kota. yang berpedoman pada Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ektrim melalui strategi:

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat
2. Peningkatan pendapatan masyarakat
3. Penurunan jumlah kantong – kantong kemiskinan

Visi Kota Banda Aceh sesuai RPJMD tahun 2017 – 2022 adalah “Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah”, dengan 7 Misi pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah dan akhlak.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Secara tegas, strategi penanggulangan kemiskinan difokuskan pada misi ke-3, yaitu “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat”, namun secara tidak langsung juga didukung oleh misi-misi lainnya. Peningkatan akses pendidikan, kesehatan, penyediaan infrastruktur yang layak bagi seluruh kelompok masyarakat, serta pemberdayaan perempuan dan anak, turut memberikan dampak positif terhadap penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh. Selain itu, berbagai program Syariah Islam juga dilaksanakan secara intensif di Kota Banda Aceh yang diharapkan dapat memperkuat mental dan mendorong peningkatan zakat sehingga dapat disalurkan ke masyarakat miskin.

Pada saat yang sama pemerintah Kota Banda Aceh masih menghadapi beberapa permasalahan internal dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini diakibatkan kurang terintegrasinya program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan. Beberapa isu kemiskinan yang menjadi permasalahan di Kota Banda Aceh antara lain tumpang tindih bantuan terhadap fakir miskin, bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran, kaum disabilitas tidak memiliki akses terhadap bantuan, dan kemiskinan kultural yang muncul akibat budaya yang tidak produktif seperti kebiasaan merokok, narkoba dan lain-lain.

Selain itu posisi Kota Banda Aceh sebagai pusat Pemerintahan Provinsi Aceh membuat tantangan yang dihadapi Kota Banda Aceh relatif berbeda dengan daerah lain di Aceh. Sebagai pusat aktivitas pendidikan, kesehatan, sekaligus pusat pemerintahan dan pusat perekonomian, Banda Aceh menjadi daya tarik bagi penduduk daerah lain untuk bermigrasi ke Kota Banda Aceh. Akibatnya, tingkat persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di Kota Banda Aceh menjadi sangat ketat. Persaingan tenaga kerja di sektor informal juga semakin ketat, sehingga Kota Banda Aceh menghadapi masalah pengangguran dan kemiskinan pada kelompok usia kerja produktif.

Jumlah pengangguran dan penduduk miskin yang meningkat tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap beban ekonomi yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kota Banda Aceh harus menyediakan anggaran yang cukup untuk membangun sarana dan prasarana bagi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi warga yang kurang mampu. Berbagai program dan kegiatan yang dapat mendorong pertumbuhan aktivitas perekonomian

untuk menciptakan lapangan kerja baru juga menjadi salah satu fokus dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Banda Aceh.

Isu lainnya yang perlu diperhatikan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan adalah mendorong terciptanya sinergi yang lebih baik dengan sektor swasta. Koordinasi yang lebih intensif perlu didorong untuk memastikan program-program sosial yang dilakukan oleh pihak swasta memiliki keselarasan dengan berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu pemerintah juga harus meningkatkan sinkronisasi dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan yang ada, baik yang bersumber dari Pusat, Provinsi, Daerah, maupun sumber-sumber lainnya seperti dana dari Pihak Swasta dan LSM.

Selanjutnya, hal lain yang penting mendapatkan perhatian adalah isu penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) baik peningkatan SDM pada OPD pelaksana maupun pada TKPK. Pendampingan dan sosialisasi kepada OPD terkait juga masih perlu dilakukan agar penyusunan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan memberikan hasil yang maksimal. Penyusunan rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan dengan memperhatikan jumlah, lokasi, dan sasaran rumah tangga/penduduk miskin yang akan diintervensi (*by name, by address*) untuk memudahkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan.

Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2019 memberikan dampak negatif terhadap banyak pihak termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berbagai pembatasan aktivitas di ruang publik menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi sehingga banyak UMKM yang mengalami kebangkrutan. Akibatnya banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan sehingga mempengaruhi taraf hidup masyarakat tersebut. Hal ini berdampak kepada meningkatnya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran Kota Banda Aceh sehingga pemerintah perlu membuat berbagai kebijakan yang dapat membantu masyarakat yang terkena dampak COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peran dan Fungsi TKPK di Daerah

Dalam rangka meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam peraturan presiden tersebut

diamanatkan untuk membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya sedangkan di level provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk menjalankan Tugas dan Fungsi TKPK di daerah, Walikota Banda Aceh mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 235 Tahun 2022 tentang “Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh Tahun 2022”. Pembentukan tim TKPK ini dilakukan dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan serta mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh sesuai dengan Kebijakan Nasional.

Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Banda Aceh tersebut, TKPK Kota Banda Aceh mempunyai tugas :

1. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh, dengan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Banda Aceh sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. Pengkoordinasian OPD bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal Penyusunan Rencana Strategis OPD;
 - c. Pengkoordinasian OPD bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - d. Pengkoordinasian OPD bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Kerja OPD;
 - e. Pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
2. Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh, dengan fungsi :

- a. Pengendalian, pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program serta kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. Pengendalian dan pemantauan terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah oleh OPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dan kendala yang dihadapi;
- c. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- d. Evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- e. Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan;
- f. Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan untuk disampaikan kepada Walikota Banda Aceh dan TKPK Provinsi.

Dengan adanya instruksi presiden tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, maka digunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang menjadi dasar program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi oleh seluruh OPD dan instansi terkait lainnya sehingga target-target penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh dapat tercapai. Laporan ini akan menyajikan secara menyeluruh profil kemiskinan di Kota Banda Aceh, berbagai kebijakan yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut termasuk kelembagaan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh.

Untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penanggulangan kemiskinan pada level provinsi dan kabupaten/kota, maka dibutuhkan dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah, dokumen ini bertujuan untuk menjadi bagian dalam RPD dalam mengintegrasikan penanggulangan kemiskinan, serta dalam penyusunan arah kebijakan dan program dalam rencana strategis Perangkat Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan, Selain menjadi bagian dalam RPD untuk tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan, dokumen tersebut juga bermanfaat menjadi wadah untuk menguraikan permasalahan kemiskinan yang kompleks di daerah. Kemiskinan juga berkaitan erat dengan permasalahan lokal, di mana di setiap daerah

memiliki masalah kemiskinan yang berbeda-beda dan akar masalah yang beda, sehingga kebijakan dan intervensi yang disiapkan pun berbeda.

Penyusunan dokumen RPKD ini dikoordinasikan oleh Bappeda secara bersama-sama oleh Perangkat Daerah yang tergabung di dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dengan melibatkan sekurang-kurangnya pejabat dan/atau personel terkait di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pusat Statistik, Dinas Informasi dan Komunikasi, Bagian Perencanaan pada Sekretariat Daerah, Bagian Ekonomi, Keuangan Daerah, OPD terkait lainnya, perwakilan masyarakat, perwakilan dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan dengan menyusun Tujuan dan Sararan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Banda Aceh kurun waktu 2021-2025 yang di sinkronkan dengan RPJMD Kota Banda Aceh yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah serta Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan yang tertaung dalam SDG's sebagai program Nasional, sebagaimana tertuang dalam Matriks dibawah ini :

Tabel 1.1 MATRIKS KEBIJAKAN DAN SASARAN, INDIKATOR SASARAN SERTA TARGET PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023-2026

Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline	Target Kinerja				
			2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan, kesehatan serta mendorong pengembangan pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia	86,28	86,59	87,03	87,47	87,91	
		Koefisien Gini	0,391	0,337	0,332	0,327	0,322	
		Persentase Penduduk Miskin	7,13	7,25	7,07	6,89	6,71	
		Angka Melek Huruf usia 15 tahun ke atas	100	100	100	100	100	
		Rata-rata lama sekolah	12,83	13,03	13,10	13,15	13,20	
	Meningkatnya pemerataan pendidikan	Angka Harapan Hidup	72	72	72	72	72	
		Jumlah Penerima Beasiswa Miskin (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA)	3.003	3.003	3.003	3.003	3.003	
		Jumlah Penerima Beasiswa Santri Miskin	55	55	55	55	55	
	Tersedianya dukungan perlengkapan pasca bersalin, tersedianya bantuan makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita kurang gizi dalam rangka pencegahan stunting	Angka Stunting	18,4	16	14			
		Angka kematian Ibu	205/ 100.000 KH	194/ 100.000 KH	183/ 100.000 KH			
	Meningkatnya pemberdayaan sosial ekonomi, kelompok rumah tangga yang tergolong dibawah garis kemiskinan	Persentase pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin						
		Pemenuhan Layanan SPM Sosial	85	100	100	100	100	

Meningkatkan penyediaan rumah layak huni	Tersedianya rumah baru layak huni bagi RT miskin	Jumlah rumah RT yang memiliki rumah layak huni	50.574	51.873	52.003	52.133	52.263
		Jumlah Rumah layak huni yang dibangun	181	155	100	100	100
		Jumlah rumah layak huni yang direhab	33	51	30	30	30
		Jumlah Rumah Dhuafa yang dibangun	30	30	30	30	30
		Jumlah rumah Dhuafa yang direhab	10	10	10	10	10
Meningkatkan produktifitas pangan dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya jumlah produksi ternak dan pendapatan peternak miskin ekstrem	Peningkatan produksi peternakan	690 ton	299,86 ton	308,86 ton	318,13 ton	327,67 ton
	Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan miskin ekstrem	Peningkatan produksi perikanan budidaya	248 ton	917,06 Ton	981,26 Ton	1049,95 Ton	1123,44 Ton
	Meningkatnya ketahanan pangan keluarga miskin ekstrem	Jumlah kelompok wanita tani	12	10	0	0	0
	Meningkatnya nilai tambah pertumbuhan	PDRB ADHB per kapita (juta rupiah)	83,67	82,16	84,16	86,16	88,16
		Tingkat Pengangguran Terbuka	8,62	8,00	7,75	7,50	7,00
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	NA	83 %	85 %	87 %	90 %
	Ekonomi inklusif, terhadap daya saing masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	58,93	61,88	64,97	68,21	71,62
Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	62,89	63,09	63,29	63,49	63.69	

Mengoptimalkan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya kapasitas perempuan pada Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	16	48	64	80	96
Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan masyarakat	Meningkatnya pendayagunaan potensi sektoral, dalam memperkokoh sumber pertumbuhan	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektoral	14,62	15,68	16,45	16,81	17,05
		Laju Pertumbuhan ekonomi	5,23	4	4,4	4,8	5,2
	Meningkatnya bantuan modal usaha masyarakat faqir miskin	Jumlah fakir miskin yang mendapat modal usaha	50	50	50	50	50
	Meningkatnya jumlah kemandirian desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,758	0,788	0,803	0,818	0,833
	Berkurangnya beban pengeluaran masyarakat	Garis kemiskinan (rupiah)	737.016				
	Meningkatnya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						
Meningkatnya Usaha Mikro yang Produktif dan Bernilai Tambah		Persentase peningkatan usaha mikro yang produktif dan bernilai tambah	NA	7	12	17	22
		Jumlah Industri Kecil Menengah Produktif	1,323	1,336	1,349	1,362	1,375
		Cakupan bina kelompok pengrajin	16,24	30,4	33,3	35,5	37,1

	Persentase jumlah IKM yang terdaftar di SIINas	1,8	3,7	5,5	7,3	9,1
	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	NA	55,56	61,23	67,35	67,35
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	NA	19,22	21,14	23,26	25,58

Tabel 1.2. Matrik Prioritas Program dan Program Pendukung Serta Target Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Kode	Program	Subkegiatan	Sumber Pembiayaan	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Alokasi Anggaran (Rp)			
									2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Pendapatan	DP2KP	3.25.03.2.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	APBD Kab/Kota	Kota Banda Aceh	Kelompok/masyarkat Nelayan	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000
2	Meningkatkan Pendapatan	DP2KP	3.25.03.2.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	APBA / OTSUS	Kota Banda Aceh	Kelompok/masyarkat Nelayan	500.000.000	550.000.000	605.000.000	665.500.000
3	Meningkatkan Pendapatan	DP2KP	3.25.04.2.02.01	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	APBD Kab/Kota	Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Kelompok/masyarakat Pembudidaya Ikan	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000
4	Meningkatkan Pendapatan	DP2KP	3.25.04.2.02.01	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	APBD Kab/Kota	Kota Banda Aceh	Kelompok/masyarakat Pembudidaya Ikan	100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000
5	Meningkatkan Pendapatan	DP2KP	3.27.02.2.05.05	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	APBD Kab/Kota	Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam	Kelompok Ternak (4 - 10 Orang)	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000
6	Meningkatkan Pendapatan	DP2KP	3.27.02.2.05.05	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	APBD Kab/Kota	Merduati, Kutaraja	Kelompok Ternak (4 - 10 Orang)	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000
7	Meningkatkan Pendapatan	DP2KP	2.09.03.2.01.02	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	APBA / OTSUS	Gp. Jawa, Gp. Cot Lamkeuweh, Gp. Lueng Bata, Gp. Keudah, Gp. Surien, Gp. Lamdingin, Gp. Ateuk Pahlawan	7 Kelompok Wanita Tani	500.000.000	550.000.000	605.000.000	665.500.000

8	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	DP2KP	2.09.04.2.02.02	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	APBA / OTSUS	Kota Banda Aceh	Masyarakat Kota Banda Aceh	500.000.000	550.000.000	605.000.000	665.500.000
9	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Tenaga Kerja	3.31.02.2.01.03	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Sumber Daya Industri	APBD Kab/Kota	Seluruh Gampong di Banda Aceh	Diberikan kepada 660 IKM yang tergabung di 65 kelompok Pelaku Usaha	5.346.939.880	5.881.633.868	6.469.797.255	7.116.776.980
10	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Tenaga Kerja	3.31.02.2.01.04	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	APBD Kab/Kota	Seluruh Gampong di Banda Aceh	Diberikan kepada 20 perajin yang tergabung di 9 Kecamatan	400.708.941	440.779.835	484.857.819	533.343.600
11	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Tenaga Kerja	2.07.03.2.01	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari Kerja berdasarkan klaster Kompetensi	APBD Kab/Kota	Seluruh Gampong di Banda Aceh	Pencari kerja sebanyak 16 orang	97.100.375	106.810.413	117.491.454	129.240.599
12	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Tenaga Kerja	2.07.03.2.01	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari Kerja berdasarkan klaster Kompetensi	APBN Kab/Kota	Seluruh Gampong di Banda Aceh	Pencari kerja sebanyak 240 orang	1.162.124.000	1.278.336.400	1.406.170.040	1.546.787.044
13	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Perkim	1.04.03.2.03.02	Program Kawasan Permukiman	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Pemukiman Kumuh	DAK	Kec. Syiah Kuala.	RT Miskin Ekstem	6.270.000.000	6.897.000.000	7.586.700.000	8.345.370.000
14	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Perkim	1.04.03.2.03.02	Program Kawasan Permukiman	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Otsus	Kec. Syiah Kuala. Kec. Lueng Bata Kec. Ulee Karen, Kec Banda Raya	RT Miskin Ekstem	2.168.000.000	2.384.800.000	2.623.280.000	2.885.608.000
15	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Perkim	1.04.03.2.03.02	Program Kawasan Permukiman	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Pemukiman Kumuh	DAK	Kec. Syiah Kuala.	RT Miskin Ekstem	4.466.366.968	4.913.003.665	5.404.304.031	5.944.734.434

16	Mengurangi Beban Pengeluaran	DPMG	5.3.0.5.4.1	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Gampong	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Dana Desa/APBN	90 Gampong	Diberikan kepada 3.926 KPM untuk 90 Gampong	14.133.600.000	15.546.960.000	17.101.656.000	18.811.821.600
17	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	DPMG	2.1.10.5.2	Bidang Pembangunan Pelaksanaan gampong	Dukungan Pendidikan Bagi Siswa/Berprestasi	Dana Desa/APBN	24 Gampong	1.222 Anak Sekolah	818.737.103	900.610.813	990.671.895	1.089.739.084
18	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	DPMG	2.4.1.5.2	Bidang Pembangunan Pelaksanaan gampong	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab rumah Tidak Layak Huni	Dana Desa/APBN	90 Gampong	Diberikan kepada 16 rumah di 4 desa	540.338.100	594.371.910	653.809.101	719.190.011
19	Mengurangi Beban Pengeluaran	Diskop UK&Dag	5,1,04,03,01,000,1	Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kab/kota	Otsus dan APBK	seluruh kecamatan dalam wilayah kota banda aceh	masyarakat kota banda aceh	1.986.000.000	2.184.600.000	2.403.060.000	2.643.366.000
20	Meningkatkan Pendapatan	Diskop UK&Dag	2.17.05.2.01.01	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	DAK NF	Kecamatan dalam wilayah kota banda aceh	Pelaku UMKM kota banda aceh	420.370.000	462.407.000	508.647.700	559.512.470
21	Meningkatkan Pendapatan	Diskop UK&Dag	2.17.07.2.01.01	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	APBK	seluruh kecamatan dalam wilayah kota banda aceh	Pelaku UMKM kota banda aceh	11.214.766.000	12.336.242.600	13.569.866.860	14.926.853.546
22	Mengurangi Beban Pengeluaran	Disdikbud	1.01.02.2.01.17.	Program Bantuan Siswa Kurang Mampu	Pengadaan Perlengkapan Siswa SD (Baju Seragam, Sepatu, Tas dan Topi)	DAU - DBH (DTU)	Kecamatan Baiturrahman dan Kecamatan Lueng Bata	Diberikan kepada 125 Siswa	100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000
23	Mengurangi Beban Pengeluaran	Disdikbud	1.01.02.2.01.17.	Program Bantuan Siswa Kurang Mampu	Bantuan Peralatan Sekolah (Tas dan Seragam Sekolah)	DAU - DBH (DTU)	SD Negeri 52 Banda Aceh	Diberikan kepada 85 Siswa	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000

24	Mengurangi Beban Pengeluaran	Disdikbud	1.01.02.2.01.17.	Beasiswa PIP SD	Beasiswa PIP SD	Kementrian	Siswa Jenjang SD	Diberikan kepada 3003 Siswa	1.226.700.000	1.349.370.000	1.484.307.000	1.632.737.700
25	Mengurangi Beban Pengeluaran	Disdikbud	1.01.02.2.01.17.	Beasiswa Yatim, Piatu dan Yatim Piatu	Beasiswa Yatim, Piatu dan Yatim Piatu SD	Kementrian	Siswa Jenjang SD	1010 Siswa selama 12 bulan	2.424.000.000	2.666.400.000	2.933.040.000	3.226.344.000
26	Mengurangi Beban Pengeluaran	Disdikbud	1.01.02.2.01.28.	Program Bantuan Siswa Kurang Mampu	Pengadaan Perlengkapan Siswa SMP (Baju Seragam, Sepatu, Tas dan Topi)	DAU - DBH (DTU)	Kecamatan Baiturrahman dan Kecamatan Lueng Bata	Diberikan kepada 120 Siswa	100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000
27	Mengurangi Beban Pengeluaran	Disdikbud	1.01.02.2.01.28.	Program Bantuan Siswa Kurang Mampu	Bantuan Peralatan Perlengkapan masuk SMP untuk anak dari keluarga Miskin	DAU - DBH (DTU)		Diberikan kepada	178.875.000	196.762.500	216.438.750	238.082.625
28	Mengurangi Beban Pengeluaran	Disdikbud	1.01.02.2.01.28.	Beasiswa PIP SMP	Beasiswa PIP SMP	Kementrian	Siswa Jenjang SMP	Diberikan kepada 1834 Siswa	1.121.625.000	1.233.787.500	1.357.166.250	1.492.882.875
29	Mengurangi Beban Pengeluaran	Disdikbud	1.01.02.2.01.28.	Beasiswa Yatim, Piatu dan Yatim Piatu	Beasiswa Yatim, Piatu dan Yatim Piatu SMP		Siswa Jenjang SMP	958 Siswa	2.299.200.000	2.529.120.000	2.782.032.000	3.060.235.200
30	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos	1 06 05 2.02 02	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	APBN (PKH)	Kota Banda Aceh	3454 KPM	11.421.625.000	12.563.787.500	13.820.166.250	15.202.182.875
31	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos	1 06 05 2.02 02	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	APBN (BPNT)	Kota Banda Aceh	9392 KPM	23.023.200.000	25.325.520.000	27.858.072.000	30.643.879.200
32	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos	1 06 05 2.02 04	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (DOKA)	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dana OTSUS	Kota Banda Aceh	192 KPM	800.000.000	880.000.000	968.000.000	1.064.800.000
33	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos	1 06 05 2.02 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	APBK (Anggaran POKIR)	Kota Banda Aceh	1920 KK	460.000.000	506.000.000	556.600.000	612.260.000

34	Mengurangi Beban Pengeluaran	Baitul Mal	9.01.0.7.03	PROGRAM BAITUL MAL	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZISWAF Senif Faqir	Pendapatan Zakat	9 Kecamatan (90 gampong)	1. Faqir konsumtif sebanyak 1.800 orang. 2. Faqir uzur sebanyak 640 orang. 3. Faqir perseorangan sebanyak 300 orang 4. Pendamping medis sebanyak 1 tahun	5.520.000.000	6.072.000.000	6.679.200.000	7.347.120.000
35	Mengurangi Beban Pengeluaran	Baitul Mal	9.01.0.7.03	PROGRAM BAITUL MAL	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZISWAF Senif Miskin	Pendapatan Zakat	9 Kecamatan (90 gampong)	1. Miskin konsumtif sebanyak 3.490 orang 2. Modal Usaha sebanyak 50 orang 3. Bantuan biaya pembangunan rumah sebanyak 30 orang 4. Bantuan pelatihan sebanyak 48 orang 5. Bantuan Disabilitas dan lumpuh layu sebanyak 170 orang 6. Miskin perseorangan sebanyak 285 orang	7.059.300.000	7.765.230.000	8.541.753.000	9.395.928.300
36	Mengurangi Beban Pengeluaran	Baitul Mal	9.01.0.7.03	PROGRAM BAITUL MAL	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZISWAF Senif Fisabilillah	Pendapatan Zakat	9 Kecamatan (90 gampong)	1. Beasiswa 1/2 penuh sebanyak 300 orang 2. Beasiswa santri sebanyak 55 orang 3. Bantuan beasiswa biasa sebanyak 2.100 orang 4. Bantuan pendidikan anak keluarga miskin/ orang disesuaikan dengan kebutuhan	6.791.500.000	7.470.650.000	8.217.715.000	9.039.486.500

37	Mengurangi Beban Pengeluaran	Baitul Mal	9.01.0.7.03	PROGRAM BAITUL MAL	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZISWAF Senif Gharim	Pendapatan Zakat	9 Kecamatan (90 gampong)	1. Bantuan musibah kebakaran sebanyak 30 orang	90.000.000	99.000.000	108.900.000	119.790.000
38	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Baitul Mal	9.01.0.7.03	PROGRAM BAITUL MAL	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZISWAF Senif Infaq	Pendapatan Zakat	9 Kecamatan (90 gampong)	1. Bantuan biaya renovasi rumah sebanyak 10 unit	600.000.000	660.000.000	726.000.000	798.600.000
39	Mengurangi Beban Pengeluaran	DP3AP2KB	2.08.02.2.02.01	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian Program KKBPK	APBK	Banda Aceh	1. Perempuan yang Aktif di organisasi 2. Petuha Peut Perempuan 3. Perempuan yang mempunyai Usaha	225.606.025	248.166.628	272.983.290	300.281.619
40	Mengurangi Beban Pengeluaran	DP3AP2KB	2.14.03.2.01.08	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian Program KKBPK	APBN (BOKB)	Banda Aceh (9 Kecamatan (15 Gampong KB)	1. Keluarga yang mempunyai balita 2. Ibu hamil dan menyusui; 3. Keluarga yang mempunyai remaja usia 10-24 tahun yang belum menikah; 4. Remaja dengan usia 10-24 tahun yang belum menikah; 5. Remaja dengan usia 10-24 tahun yang belum menikah; 6. Remaja dengan usia 10-24 tahun yang belum menikah; 7. Kader; 8. Penyuluh KB/PLKB; dan 9. Pengelola DASHAT.	187.500.000	206.250.000	226.875.000	249.562.500

41	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Kesehatan	01.02.02.2.02.15	DOKA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Bumil KEK dan Balita Kurus	90 Gampong di Kota Banda Aceh	58 Ibu hamil KEK, 41 Ibu Menyusui KEK, 294 Balita gizi kurang dan 18 balita gizi buruk dan 74 Balita Stunting	783.828.458	862.211.304	948.432.434	1.043.275.678
42	Meningkatkan Pendapatan	PT LKMS MAHIRAH MUAMALAH		DANA PUEM-G	Pembiayaan		9 Kecamatan (90 gampong)	485 individu	20346229256	22.380.852.182	24.618.937.400	27.080.831.140
43	Meningkatkan Pendapatan	PT LKMS MAHIRAH MUAMALAH		DANA PUEM-K	Pembiayaan		10 Kecamatan (90 gampong)	167 individu	2436000000	2.679.600.000	2.947.560.000	3.242.316.000
44	Meningkatkan Pendapatan	PT LKMS MAHIRAH MUAMALAH		DANA PIP	Pembiayaan		11 Kecamatan (90 gampong)	177 individu	2300000000	2.530.000.000	2.783.000.000	3.061.300.000

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Banda Aceh antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant On Civil and Politic Right (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukandan Pembangunan Keluarga;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan;
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
21. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor

- 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 23. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
 24. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif;
 25. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19;
 26. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional;
 27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Perlindungan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus;
 28. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
 29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
 30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
 32. Surat Edaran KPK Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat;

33. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023 – 2026;
34. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah:

1. Sebagai referensi dalam memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah daerah untuk menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai arus utama (mainstreaming) dalam penyusunan program kerja tahun 2023-2026 di Kota Banda Aceh;
2. Sebagai pedoman dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan peran perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh;
3. Sebagai pedoman dalam menentukan target yang harus dicapai Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menanggulangi kemiskinan.

Tujuan dari disusunnya Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah:

1. Menggambarkan kondisi umum kemiskinan Kota Banda Aceh saat ini dan memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai 4 (empat) tahun;
2. Menegaskan komitmen dan mendorong sinergi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengatasi kemiskinan di Kota Banda Aceh;
3. Menjadi salah satu tolok ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dari dokumen Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota adalah:

BAB I. PENDAHULUAN, memuat mengenai latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Banda Aceh.

BAB II. KONDISI UMUM DAERAH, memuat aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat meliputi fokus kesejahteraan dan pemertaan ekonomi termasuk didalamnya situasi Pandemi COVID-19 di tingkat Nasional, Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh, serta fokus kesejahteraan sosial.

BAB III. PROFIL KEMISKINAN DAERAH, memuat mengenai kondisi kemiskinan konsumsi, dan upaya penanggulangan kemiskinan bagi penduduk terdampak COVID-19 di Kota Banda Aceh, serta kondisi kemiskinan non konsumsi Kota Banda Aceh meliputi Bidang Ketenagakerjaan, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dasar, Ketahanan Pangan dan Sosial, termasuk didalamnya faktor/determinan permasalahan kemiskinan dari sisi penyedia layanan (supply side) dan penerima manfaat (demand side), serta dampak pandemi COVID-19 tiap bidang.

BAB IV. PRIORITAS PROGRAM, memuat tinjauan kebijakan penanggulangan kemiskinan secara Nasional, Propinsi Aceh dan Kota Banda Aceh, analisis APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan, isu strategis dan rencana aksi tahunan penanggulangan kemiskinan Kota Banda Aceh tahun 2021-2024, serta sistem monitoring dan evaluasi.

BAB V. LOKASI PRIORITAS, memuat analisis prioritas wilayah intervensi berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, meliputi Bidang Ketenagakerjaan, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dasar, Ketahanan Pangan dan Sosial.

BAB VI. PENUTUP, memuat mengenai harapan dukungan dan komitmen Bappeda dan Litbang, serta perangkat daerah terkait dalam implementasi Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021- 2026.

BAB II
KONDISI UMUM DAERAH DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN
KOTA BANDA ACEH

2.1. Geografis

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

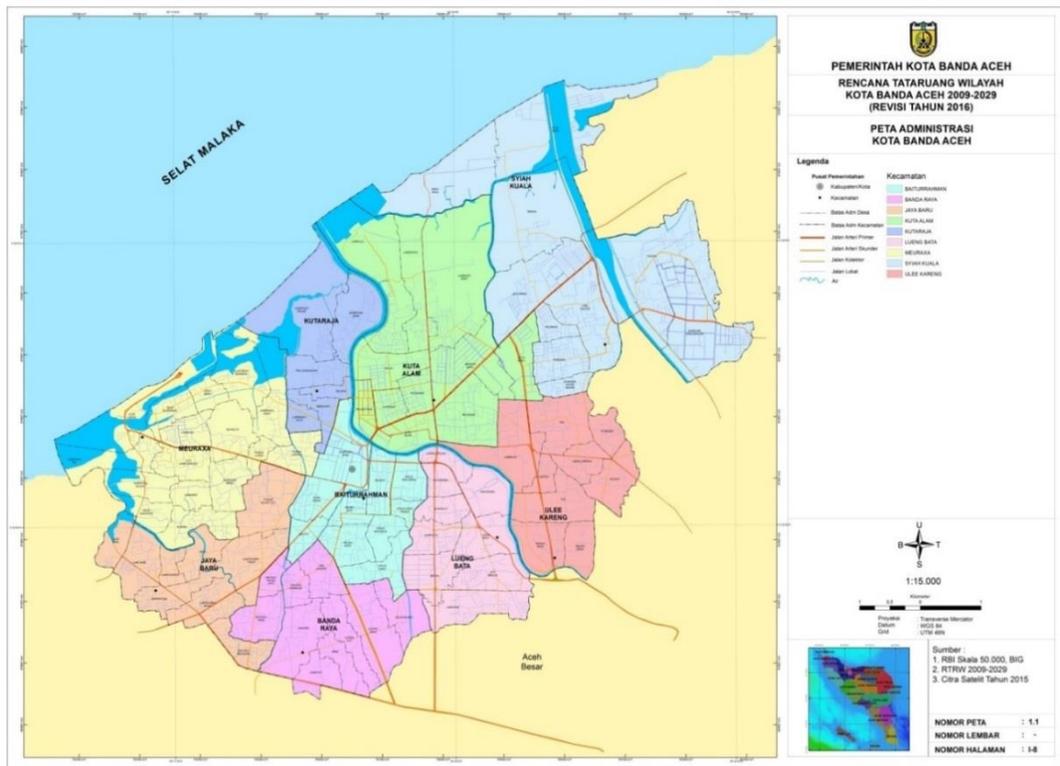
Secara geografis, letak Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh sangat strategis. Kota Banda Aceh berada di bagian barat Indonesia dengan letak geografis berada antara 05°30' – 05°35' LU dan 95°30' – 99°16' BT. Kota ini terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan dengan 90 Gampong. Luas wilayah Kota Banda Aceh secara administratif adalah 61,36 km² atau 6136 Ha, namun berdasarkan hasil digitasi GIS Citra Satelit Resolusi Tinggi pada Tahun 2015, luas wilayah Kota Banda Aceh secara spasial mengalami perubahan luas wilayah yaitu menjadi 59,002 km². Berkurangnya luas wilayah tersebut akibat adanya bagian daratan di pesisir sepanjang garis pantai Kota Banda Aceh yang masuk ke area perairan laut dan penyesuaian tapal batas gampong setelah terjadinya bencana Tsunami 2004. Luas wilayah administrasi Kota dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2. 1
Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	Luas Secara administrasi		Luas secara Digitasi Spasial	
		(Km ²)	Persentase	(Km ²)	Persentase
1	Kec. Meuraxa	7,260	11,83	8,459	14,34%
2	Kec. Baiturrahman	4,540	7,40	4,142	7,02%
3	Kec. Kuta Alam	10,050	16,38	9,587	16,25%
4	Kec. Syiah Kuala	14,240	23,21	13,591	23,03%
5	Kec. Ulee Kareng	6,150	10,02	5,182	8,78%
6	Kec. Banda Raya	4,790	7,81	4,949	8,39%
7	Kec. Kuta Raja	5,210	8,49	3,889	6,59%
8	Kec. Lueng Bata	5,340	8,7	4,445	7,53%
9	Kec. Jaya Baru	3,780	6,16	4,759	8,07%
Jumlah		61,360	100,00	59,002	100,00

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka 2021

Luas Wilayah Kota Banda Aceh berdasarkan RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018) dapat dilihat pada Gambar 2.1 dibawah ini



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Banda Aceh

Secara administrasi batas-batas wilayah Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

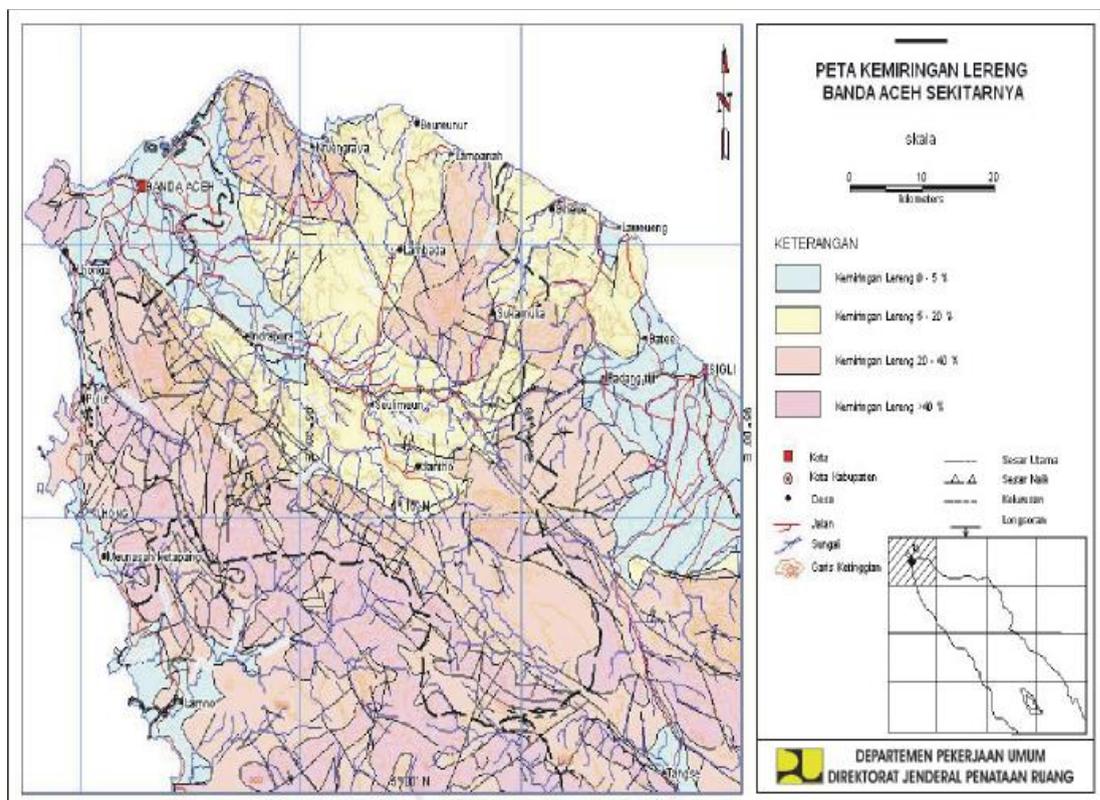
- Sebelah Utara : Selat Malaka
- Sebelah Timur : Kecamatan Barona Jaya dan Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar
- Sebelah Selatan : Kecamatan Darul Imarah dan Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar
- Sebelah Barat : Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar

b. Topografi

Kondisi topografi (ketinggian) Kota Banda Aceh berkisar antara -0,45 m sampai dengan +1,00 m di atas permukaan laut (dpl), dengan rata-rata ketinggian 0,80 m dpl. Bentuk permukaan lahannya (fisiografi) relatif datar dengan kemiringan

(lereng) antara 2-8%. Bentuk permukaan ini menandakan bahwa tingkat erosi relatif rendah, namun sangat rentan terhadap genangan khususnya pada saat terjadinya pasang dan gelombang air laut terutama pada wilayah bagian Utara atau pesisir pantai.

Dalam lingkup makro, Kota Banda Aceh dan sekitarnya secara topografi merupakan dataran banjir Krueng Aceh dan 70% wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 5 meter dpl. Ke arah hulu dataran ini menyempit dan bergelombang dengan ketinggian hingga 50 meter dpl. Dataran ini diapit oleh perbukitan terjal di sebelah Barat dan Timur dan ketinggian lebih dari 500 m, sehingga mirip kerucut dengan mulut menghadap ke laut. Kondisi topografi dan fisiografi lahan sangat berpengaruh terhadap sistem drainase. Kondisi drainase di Kota Banda Aceh cukup bervariasi, yaitu jarang tergenang seperti pada wilayah Timur dan Selatan kota, kadang-kadang tergenang dan tergenang terus-menerus seperti pada kawasan rawa-rawa/genangan air asin, tambak dan atau pada lahan dengan ketinggian di bawah permukaan laut baik pada saat pasang maupun surut air laut. Lebih jelasnya gambaran kondisi topografi kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 2
Peta Kemiringan Lereng Banda Aceh

Berdasarkan Gambar 2.2 di atas dapat dilihat bahwa Kota Banda Aceh terletak pada dataran rendah dengan kemiringan 0-5%.

c. Geologi

Secara geologis, Pulau Sumatera dilalui oleh patahan aktif yang memanjang dari Banda Aceh di utara hingga Lampung di selatan, yang dikenal sebagai Sesar Semangko (*Semangko Fault*). Oleh karenanya daerah yang terlintasi patahan ini rentan terhadap gempa dan longsor. Berada pada pertemuan Plate Euroasia dan Australia berjarak ± 130 km dari garis pantai barat sehingga daerah ini rawan terhadap Tsunami. Litologi Kota Banda Aceh merupakan susunan batuan yang kompleks, terdiri dari batuan sedimen, meta sedimen, batu gamping, batuan hasil letusan gunung api, endapan alluvium, dan intrusi batuan beku, dan secara umum dibagi atas 4 (empat) kelompok, yaitu :

- Alluvium
- Batuan Kuarter (sedimen dan vulkanik)
- Batuan Tersier (sedimen dan vulkanik)
- Batuan metasedimen, malihan, dan terobosan Pra-Tersier

Untuk mengetahui kondisi geologi Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.3 di bawah ini.



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2.3
Kondisi Geologi Kota Banda Aceh

Pada Gambar 2.3 di atas menunjukkan ruas-ruas patahan Semangko di Pulau Sumatera dan juga kedudukan-nya terhadap Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh diapit oleh dua patahan di Barat dan Timur kota, yaitu patahan Darul Imarah dan Darussalam, dan kedua patahan yang merupakan sesar aktif tersebut diperkirakan bertemu pada pegunungan di Tenggara Kota.

d. Geomorfologi

Secara umum geomorfologi wilayah Kota Banda Aceh terletak di atas formasi batuan vulkanis tertier (sekitar Gunung Seulawah dan Pulau Breueh), formasi batuan sedimen, formasi endapan batu (di sepanjang Kr. Aceh), formasi batuan kapur (di bagian timur), formasi batuan vulkanis tua terlipat (dibagian selatan), formasi batuan sedimen terlipat dan formasi batuan dalam. Geomorfologi daerah pesisir Kota Banda Aceh secara garis besar dibagi menjadi dataran yang terdapat di pesisir pantai utara dari Kecamatan Kuta Alam hingga sebagian Kecamatan Kuta Raja, dan pesisir pantai yang terletak di wilayah barat atau sebagian Kecamatan Meuraxa. Daerah dataran di pesisir Kota Banda Aceh secara umum terbentuk dari endapan sistim marin yang merupakan satuan unit yang berasal dari bahan endapan (aluvial) marin yang terdiri dari pasir, lumpur dan kerikil. Kelompok ini dijumpai di dataran pantai yang memanjang sejajar dengan garis pantai dan berupa jalur-jalur beting pasir resen dan subresen. Beting pasir resen berada paling dekat dengan laut dan selalu mendapat tambahan baru yang berupa endapan pasir, sedangkan beting pasir subresen dibentuk oleh bahan-bahan yang berupa endapan pasir tua, endapan sungai, dan bahan-bahan aluvial/ koluvial dari daerah sekitarnya.

e. Hidrologi

Terdapat 7 (tujuh) sungai yang melalui Kota Banda Aceh yang berfungsi diantaranya sebagai daerah aliran sungai dan sumber air baku dan kegiatan perikanan. Wilayah Kota Banda Aceh memiliki air tanah yang bersifat asin, payau dan tawar. Daerah dengan air tanah asin terdapat pada bagian utara dan timur kota sampai ke tengah kota. Air payau berada di bagian tengah kota membujur dari timur ke barat. Sedangkan wilayah yang memiliki air tanah tawar berada di bagian selatan kota membentang dari Kecamatan Baiturrahman sampai Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan

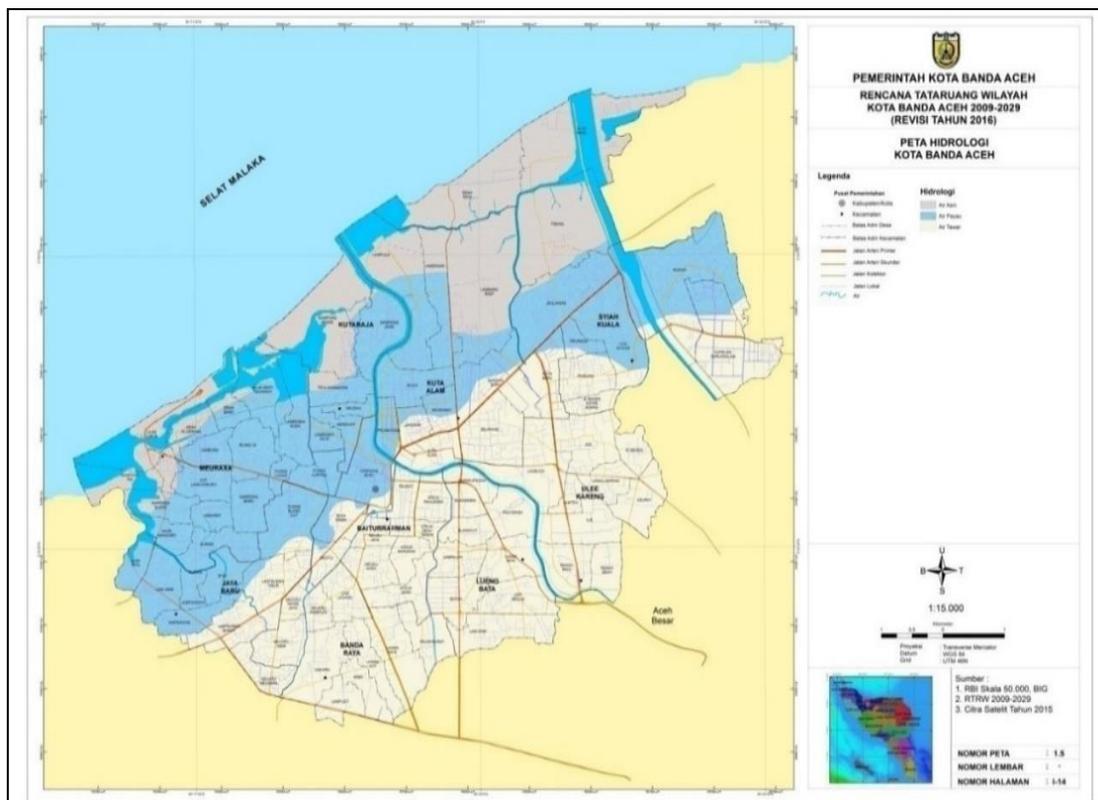
Lueng Bata, Kecamatan Ulee Kareng dan Kecamatan Banda Raya. Untuk mengetahui nama sungai dan panjang alirannya, dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2. 2
Nama Sungai dan Panjang Alirannya di Kota Banda Aceh

No	Nama Sungai	Panjang (Km)
1	Krueng Aceh	723,60
2	Krueng Daroy	3,60
3	Krueng Doy	2,00
4	Krueng Neng	4,10
5	Krueng Lueng Paga	26,33
6	Krueng Tanjong	2,25
7	Krueng Titi Panjang	1,60
8	Krueng Kon Keumeh	3,27
9	Krueng Geunasen	1,25

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Peta Hidrologi di Kota Banda Aceh dapat di lihat pada Gambar 2.4 berikut ini.



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 4
Peta Hidrologi Kota Banda Aceh

f. Klimatologi

Menurut Schmidt dan Ferguson, untuk menentukan tipe iklim adalah dengan menghitung angka perbandingan antara rata-rata bulan kering (BK) dengan bulan basah (BB) dikali 100%. Bulan kering ditandai dengan jumlah curah hujan kurang dari 60 mm, sedangkan bulan basah adalah jumlah curah hujan di atas 100 mm. Kondisi iklim Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3
Kondisi Klimatologi Kota Banda Aceh Tahun 2022

No	Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Suhu (°C)	Kelembaban (%)
1	Januari	68	20	28.4	80
2	Februari	119	21	28.0	82
3	Maret	218	23	28.1	82
4	April	116	23	29.0	78
5	Mei	112	9	29.9	72
6	Juni	76	19	28.9	73
7	Juli	120	22	29.7	68
8	Agustus	126	22	28.9	72
9	September	67	23	29.2	70
10	Oktober	210	23	28.0	78
11	November	266	23	27.8	81
12	Desember	335	26	27.2	82
Jumlah		1833	254	-	-
Rata-rata		152,75	21,17	28,6	76,5

Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2022

Tabel 2.3 di atas menunjukkan bahwa curah hujan Kota Banda Aceh terbesar pada Tahun 2022 terjadi pada Bulan Desember yaitu sebesar 335 mm dan curah hujan terendah terjadi pada Bulan Januari sebesar 68 mm. Hari hujan terlama terjadi pada bulan Desember, yaitu selama 26 hari. Secara keseluruhan, Jumlah curah hujan selama tahun 2022 yaitu sebesar 1833 mm, dengan rata-rata 152,75 mm/bulan. Rata-rata suhu udara pada Tahun 2022 adalah 28,6 °C dengan kelembaban rata-rata sebesar 76,5%. Dari hasil perbandingan BK dan BB didapatkan nilai Q sebesar 0 yang menunjukkan tipe iklim pada Kota Banda Aceh termasuk iklim tipe B (iklim basah).

2.2. Demografi

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk adalah penduduk yang tercatat sebagai warga Kota Banda Aceh. Jumlah penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2022 sebanyak 257.630

jiwa. Dibawah ini adalah jumlah penduduk di Kota Banda Aceh dalam 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2018-2022.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2022

Gambar 2. 5
Jumlah Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022 (Jiwa)

Jumlah penduduk di Kota Banda Aceh mengalami tahun 2019 mengalami peningkatan. Akan tetapi berdasarkan hasil sensus 2020, jumlah penduduk kota Banda Aceh tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 252.890 jiwa. Jumlah penduduk ini kemudian mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar 0,84 persen menjadi 255.020 jiwa dan di tahun 2022 meningkat menjadi 257.630.

b. Struktur dan Indeks Ketergantungan Penduduk

Selain dari jumlah penduduk, struktur kependudukan lainnya adalah pertumbuhan jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan ratio jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Pertumbuhan jumlah penduduk adalah perubahan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk ini digunakan untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu. Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk suatu satuan wilayah yang dibagi dengan luas daerah tersebut. Kepadatan penduduk dinyatakan sebagai penduduk per km². Sedangkan ratio jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) dalam suatu daerah dengan periode waktu tertentu. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2. 4
Indikator Kependudukan Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022

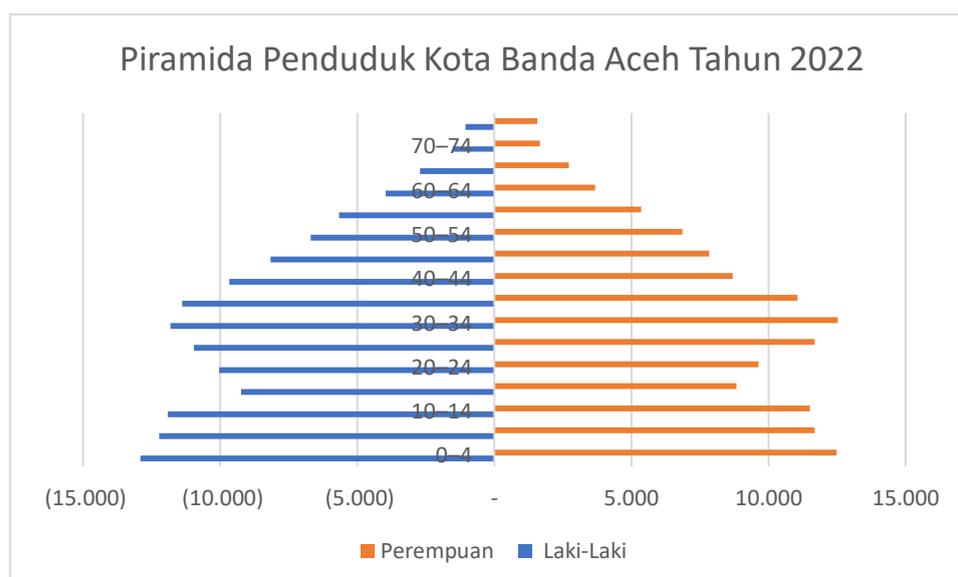
Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah	Jiwa	244.686	233.46	252.899	255.029	257.635
Pertumbuhan	%	2,00	1,97	1,21	1,72	1,64
Kepadatan	Ribu Jiwa/km	3,99	4,01	4,06	4,10	4,17
Sex Ratio	%	105,93	105,84	102	100,24	99,96

Sumber : Disdukcapil Kota Banda Aceh, 2023

Laju pertumbuhan penduduk Kota Banda Aceh mengalami penurunan dari tahun ke tahun dari 2,00% di tahun 2018 menjadi 1,64% di tahun 2022. Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh mencapai 3.990 jiwa per km² di tahun 2018 dan terus bertambah sampai dengan tahun 2022 menjadi 4.170 jiwa per km².

Ratio penduduk Kota Banda Aceh berdasarkan jenis kelamin masih didominasi oleh penduduk laki-laki dibandingkan dengan perempuan dari tahun 2018 hingga 2021 dengan tren yang terus menurun. Namun di tahun 2022 jumlah penduduk perempuan menjadi lebih banyak dari laki-laki dengan sex ratio 99,96.

Piramida penduduk adalah suatu metode untuk mengilustrasikan komposisi penduduk di suatu wilayah berdasarkan usia dan jenis kelamin. Piramida ini terdiri dari dua diagram batang, pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan pada sisi lainnya menunjukkan jumlah penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.6 berikut.



Sumber : Statistik Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023

Gambar 2. 6
Piramida penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2022

Bila dilihat dari piramida penduduk pada gambar atas, Kota Banda Aceh didominasi penduduk dengan jenis kelamin laki-laki dan usia anak-anak. Jumlah penduduk terbesar berada pada kelompok umur 0-4 tahun yaitu sebanyak 25.384 jiwa, kemudian diikuti oleh penduduk umur 30-34 tahun sebanyak 24.331 jiwa dan penduduk umur 5-9 tahun sebanyak 23.921 jiwa.

Indeks ketergantungan penduduk menjelaskan tentang gambaran perbandingan antara jumlah penduduk produktif dengan jumlah penduduk tidak produktif. Kondisi indeks ketergantungan penduduk Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 5
Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Banda Aceh 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Penduduk Usia < 15 Tahun	169.031	167.582	75.845	75.667	72.718
2	Penduduk Usia > 64 Tahun	9.867	9.969	9.873	10.051	11.215
3	Penduduk Usia Tidak Produktif (< 15 tahun dan > 64 Tahun)	85.522	88.166	85.718	85.718	83.933
4	Penduduk Usia 15 – 64 Tahun	152.750	151.201	163.174	165.570	173.702
5	Rasio Ketergantungan	55,99	58,31	52,53	51,77	48,32

Sumber: BPS Pusat, BPS Propinsi Aceh dan BPS Kota Banda Aceh, 2022

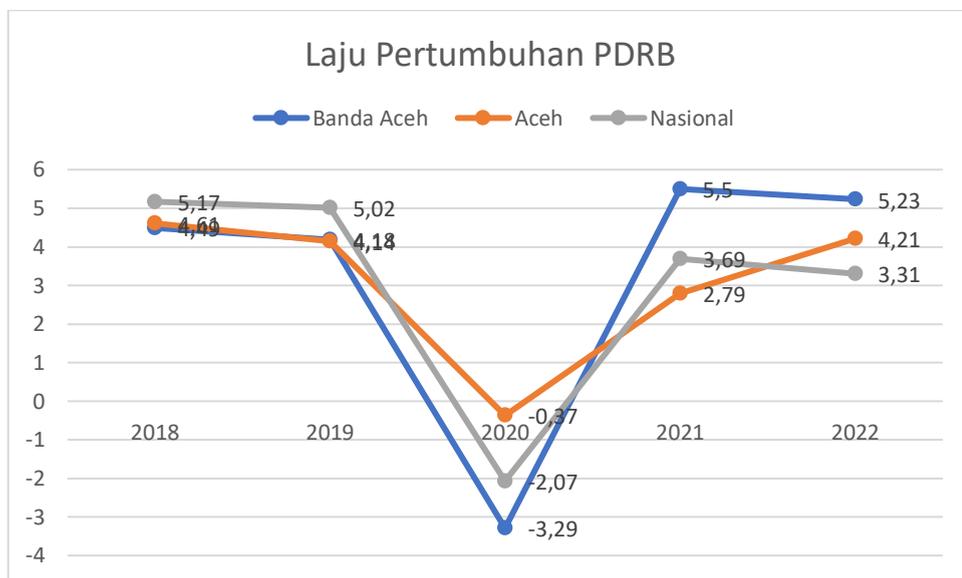
Rasio ketergantungan penduduk di Kota Banda Aceh pada tahun 2018 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan, yang artinya jumlah penduduk produktif semakin berkurang. Namun, pada tahun 2020 sampai dengan 2022, jumlah ini mengalami penurunan yang berarti jumlah penduduk produktif semakin bertambah. Jika dilihat dari struktur piramida penduduk di Kota Banda Aceh, diperkirakan Kota Banda Aceh akan mendapatkan bonus demografi dimana penduduk usia 15-64 tahun menjadi lebih banyak. Bonus demografi ini tentunya memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai daya saing melalui berbagai keahlian dan ketrampilan.

2.3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh dapat dilihat melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan komponen untuk melihat jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan

perekonomian di daerah. Penghitungan PDRB menggunakan dua jenis harga yaitu harga berlaku dan harga konstan, yang mana untuk pengukuran pertumbuhannya lebih jauh dapat dipisahkan untuk Kota Banda Aceh tanpa tambang dan dengan tambang. Pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh dengan menyertakan sektor pertambangan (DP) tampak perbedaannya tidak terlalu signifikan sepanjang tahun 2018-2022.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui laju pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh selama periode 2018-2022, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber : Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2023

Gambar 2. 7
Pertumbuhan Ekonomi Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022

Perekonomian Kota Banda Aceh sebagai kesatuan ekonomi yang menyeluruh digambarkan dengan PDRB menunjukkan trend yang fluktuatif. Setelah sempat mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun 2016, namun perekonomian Kota Banda Aceh pada tahun 2018 mengalami pelambatan dari 6,31 menjadi 4,49. Kemudian pada tahun 2019 mulai turun 0,31 persen menjadi 4,18 persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh mengalami pelambatan yang cukup signifikan tahun 2020 menjadi -3,29 persen akibat dari pandemi COVID-19 yang menghambat berbagai

kegiatan ekonomi di Kota Banda Aceh. Seluruh sektor mengalami pelambatan yang pada akhirnya menurunkan secara drastis pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh. Namun walau demikian, pasca pandemic COVID-19, pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh kembali meningkat menjadi 5,53 persen pada tahun 2021 yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik. Di tahun 2022 pertumbuhan PDRB kembali turun sebesar 0,3 persen menjadi 5,23 persen.

Menurunnya nilai PDRB menunjukkan penurunan kinerja perekonomian. Pandemi *Covid-19* telah mengakibatkan penurunan perekonomian Kota Banda Aceh yang dilihat dari nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku selama lima tahun terakhir. PDRB ADHB secara rata-rata mengalami kenaikan sebesar Rp 984,274 milyar per tahun selama kurun waktu 2018-2022. Pada tahun 2022 PDRB meningkat sebesar Rp 3,937 triliun dari tahun 2018. Kenaikan PDRB selama 4 tahun terakhir disebabkan adanya peningkatan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Selanjutnya sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Kota Banda Aceh adalah pusat ibukota Provinsi Aceh menjadi tempat beraktivitas pemerintahan Provinsi Aceh. Struktur Kota Banda Aceh hingga tahun 2022 masih didominasi oleh sektor jasa yakni Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Kedua kategori tersebut memiliki peranan yang besar hingga 50,66 persen terhadap pembentukan PDRB (masing-masing 25,99 persen dan 24,67 persen). Namun peranan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor cenderung berkurang dari tahun ke tahun selama empat tahun terakhir (2018-2022).

Real estate dan jasa pendidikan mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir mengalahkan sektor konstruksi yang mengalami pelambatan akibat pandemi *Covid-19*. Pengerjaan beberapa proyek infrastruktur berskala besar seperti Trans Studio Mall yang terhenti akibat pandemi *Covid-19* menjadi kegagalan dalam kegiatan ekonomi sebagai penyumbang nilai tambah yang besar sekaligus meningkatkan percepatan laju pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh secara keseluruhan.

Terdapat tiga sektor yang tumbuh di atas 10 persen (dua digit) pada tahun 2022 yakni sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (25,99 persen), perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor (24,67 persen) dan sektor transportasi dan pergudangan (10,42 persen) Sedangkan sektor lainnya masih dibawah 10 persen.

Tabel 2. 6
Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Tahun 2018 s.d 2022 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Kota Banda Aceh (Juta)

No	Sektor	2018		2019		2020		2021		2022	
		(Rp)	%								
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	196.534,68	1,12	219.587,40	1,18	246.291,97	1,33	253.952,91	1,37	274.739,62	1,48
2	Pertambangan dan Penggalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Industri Pengolahan	397.586,03	2,26	391.352,91	2,11	395.970,93	2,14	436.742,75	2,36	480.547,17	2,60
4	Pengadaan Listrik dan Gas	62.381,39	0,35	68.619,20	0,37	70.812,82	0,38	71.844,48	0,39	74.607,86	0,40
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22.666,94	0,13	30.672,74	0,17	30.268,36	0,16	30.020,48	0,16	33.340,24	0,18
6	Konstruksi	1.109.652,61	6,30	1.123.549,33	6,05	1.175.724,80	6,35	1.194.854,01	6,46	1.280.418,15	6,92
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.736.127,84	21,20	3.877.084,41	20,88	3.875.509,40	20,95	4.208.231,83	22,75	4.563.755,27	24,67
8	Transportasi dan Pergudangan	1.698.411,74	9,64	1.685.943,91	9,08	1.352.987,57	7,31	1.714.524,96	9,27	1.928.397,79	10,42
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	755.782,47	4,29	831.088,61	4,48	785.438,32	4,25	769.869,70	4,16	1.022.315,56	5,53
10	Informasi dan Komunikasi	910.508,03	5,17	910.234,03	4,90	960.394,57	5,19	999.344,14	5,40	1.107.863,14	5,99
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	530.561,65	3,01	608.614,93	3,28	611.614,75	3,31	621.348,14	3,36	653.528,79	3,53
12	Real Estate	1.439.289,06	8,17	1.598.126,99	8,61	1.545.839,00	8,36	1.604.639,22	8,67	1.719.396,43	9,29

13	Jasa Perusahaan	425.150,50	2,41	463.428,00	2,50	464.110,00	2,51	475.346,61	2,57	534.019,60	2,89
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.131.531,33	23,45	4.280.948,72	23,05	4.326.810,00	23,39	4.729.948,02	25,57	4.808.655,36	25,99
15	Jasa Pendidikan	1.212.461,40	6,88	1.375.476,67	7,41	1.473.452,80	7,96	1.548.024,82	8,37	1.631.465,55	8,82
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	650.140,74	3,69	724.413,63	3,90	796.385,26	4,30	881.691,63	4,77	990.932,80	5,36
17	Jasa lainnya	341.068,20	1,94	380.133,73	2,05	390.017,58	2,11	403.011,48	2,18	452.967,95	2,45
	PDRB	17.619.854,62	100	18.569.275,19	100	18.501.628,13	100	19.943.395,17	100	21.556.951,29	100

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2022

Dalam perubahan nilai PDRB atas dasar harga berlaku masih terdapat pengaruh perubahan harga sehingga dapat memberikan pengertian yang salah akan perkembangan perekonomian. Untuk itu agar dapat melihat perkembangan riil PDRB maka digunakan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2022. Nilai PDRB ADHK Kota Banda Aceh pada tahun 2022 telah mencapai sebesar Rp 16,257 triliun, naik sebesar 808 milyar dari tahun 2021.

Bila dibandingkan untuk setiap lapangan usaha/sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 pada masing-masing lapangan usaha ada yang meningkat namun ada juga yang mengalami penurunan dibandingkan di tahun 2018. Peningkatan laju pertumbuhan terbesar dialami sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Sektor ini mengalami peningkatan laju pertumbuhan sebesar 21,86 persen di banding tahun 2020. Terdapat dua kategori berdasarkan PDRB ADHB dan ADHK yang tumbuh di atas 10 persen (dua digit) pada tahun 2022. Untuk PDRB ADHB, dua sektor tersebut yakni administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (25,99 persen) dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (24,67 persen). Sedangkan untuk PDRB ADHK juga hanya dua sektor dengan nilai persentase yang berbeda administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (21,63 persen) dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (21,19 persen).

Tabel 2.7
Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Tahun 2018 s.d 2022 Atas Dasar Harga Konstan ADHK) Kota Banda Aceh (Juta)

No	Sektor	2018		2019		2020		2021		2022	
		(Rp)	%								
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	148.509,89	1,02	162.470,76	1,07	170.013,74	1,16	170.112,36	1,10	177.654,25	1,15
2	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Industri Pengolahan	316.357,08	2,17	322.743,91	2,13	305.463,39	2,08	315.963,67	2,05	323.946,27	2,10
4	Pengadaan Listrik dan Gas	59.366,07	0,41	65.084,77	0,43	68.836,54	0,47	68.643,45	0,44	70.211,44	0,45
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.760,07	0,09	18.293,41	0,12	17.816,63	0,12	16.668,64	0,11	18.300,38	0,12
6	Konstruksi	964.615,81	6,63	965.826,09	6,37	1.049.201,14	7,15	1.019.217,92	6,60	1.022.538,79	6,62
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.020.064,45	20,75	3.099.741,43	20,44	2.890.617,62	19,71	3.073.180,80	19,89	3.274.162,78	21,19
8	Transportasi dan Pergudangan	1.778.835,45	12,22	1.816.923,93	11,98	1.281.757,15	8,74	1.717.308,91	11,12	1.821.864,69	11,79
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	498.013,96	3,42	528.232,09	3,48	464.693,46	3,17	451.620,51	2,92	581.059,56	3,76
10	Informasi dan Komunikasi	1.131.419,50	7,77	1.137.489,77	7,50	1.288.756,98	8,79	1.350.921,96	8,74	1.476.557,71	9,56
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	361.944,70	2,49	406.394,70	2,68	415.505,15	2,83	400.824,63	2,59	395.095,93	2,56
12	Real Estate	1.038.134,38	7,13	1.133.057,86	7,47	1.127.917,00	7,69	1.135.074,09	7,35	1.183.768,77	7,66
13	Jasa Perusahaan	340.959,76	2,34	359.843,18	2,37	345.917,00	2,36	348.240,96	2,25	375.404,47	2,43
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.162.532,67	21,73	3.257.167,17	21,48	3.206.042,00	21,86	3.326.178,79	21,53	3.341.836,47	21,63
15	Jasa Pendidikan	896.333,17	6,16	984.078,93	6,49	1.068.331,84	7,28	1.065.121,62	6,89	1.102.626,04	7,14

16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	543.850,28	3,74	597.275,19	3,94	654.528,10	4,46	675.862,65	4,37	740.260,29	4,79
17	Jasa lainnya	282.220,03	1,94	310.354,93	2,05	310.890,33	2,12	315.030,51	2,04	352.642,49	2,28
	PDRB	14.556.917,28	100	15.164.978,10	100	14.666.288,07	100	15.449.971,48	100	16.257.930,33	100

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2022

Tabel 2. 8
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018 s.d 2022 Atas
Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Kota Banda Aceh

No	Sektor	2018		2019		2020		2021		2022	
		HB (%)	HK (%)								
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,12	1,02	1,18	1,07	1,29	1,16	1,37	1,10	1,48	1,15
2	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Industri Pengolahan	2,26	2,17	2,11	2,13	2,05	2,08	2,36	2,05	2,60	2,10
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,35	0,41	0,37	0,43	0,39	0,47	0,39	0,44	0,40	0,45
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,13	0,09	0,17	0,12	0,17	0,12	0,16	0,11	0,18	0,12
6	Konstruksi	6,30	6,63	6,05	6,37	6,98	7,15	6,46	6,60	6,92	6,62
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,20	20,75	20,88	20,44	20,04	19,71	22,75	19,89	24,67	21,19
8	Transportasi dan Pergudangan	9,64	12,22	9,08	11,98	6,75	8,74	9,27	11,12	10,42	11,79
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,29	3,42	4,48	3,48	4,22	3,17	4,16	2,92	5,53	3,76
10	Informasi dan Komunikasi	5,17	7,77	4,90	7,50	5,44	8,79	5,40	8,74	5,99	9,56
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,01	2,49	3,28	2,68	3,40	2,83	3,36	2,59	3,53	2,56
12	Real Estate	8,17	7,13	8,61	7,47	8,72	7,69	8,67	7,35	9,29	7,66
13	Jasa Perusahaan	2,41	2,34	2,50	2,37	2,48	2,36	2,57	2,25	2,89	2,43
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	23,45	21,73	23,05	21,48	23,11	21,86	25,57	21,53	25,99	21,63
15	Jasa Pendidikan	6,88	6,16	7,41	6,49	8,39	7,28	8,37	6,89	8,82	7,14

16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,69	3,74	3,90	3,94	4,43	4,46	4,77	4,37	5,36	4,79
17	Jasa lainnya	1,94	1,94	2,05	2,05	2,17	2,12	2,18	2,04	2,45	2,28
	PDRB	100									

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2022

Untuk Distribusi PDRB berdasarkan pengeluaran dipengaruhi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yang menunjukkan kontributor terbesar pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Komponen ini terlihat mendominasi dalam PDRB yang melebihi 50 persen.

Tabel 2. 9
Distribusi PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Menurut Pengeluaran dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh Atas
Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran,
2018-2022

Komponen	2018		2019		2020		2021		2022	
	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	60,31	3,27	59,75	3,74	N/A	N/A				
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,59	3,89	1,67	9,19	N/A	N/A				
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	42,78	1,15	42,67	4,84	N/A	N/A				
Pembentukan Modal Tetap Bruto	27,28	0,94	26,67	1,01	N/A	N/A				
Perubahan Inventori	0,87	-	0,49	-	N/A	N/A				
Net Ekspor	(15,93)	-	(15,23)	-	N/A	N/A				
P D R B	100	4,49	100	4,18	N/A	N/A				

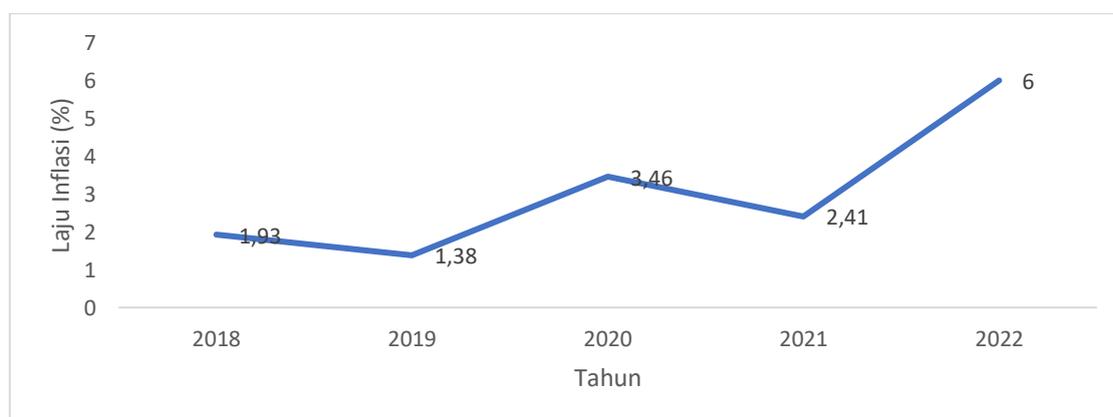
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2022

Di tahun 2018 sampai dengan 2019 peningkatan PDRB juga dipengaruhi oleh pengeluaran konsumsi pemerintah. Kenaikan kontribusi dalam komponen pengeluaran pemerintah mencapai 40-an persen. Komponen pembentukan modal tetap bruto

mencapai 20-an persen. Namun, kontribusi net ekspor naik dari negatif 15,93 persen menjadi negatif 15,23 persen. Pengeluaran pemerintah selain belanja modal juga mengalami refocusing anggaran akibat dari Pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan rendahnya serapan anggaran sehingga kontribusi komponen pengeluaran pemerintah terhadap pembentukan PDRB hanya sebesar 42,67 persen di tahun 2019. Kontribusi ini sangat menurun sedikit dari tahun sebelumnya yang mencapai 42,78 persen dimana tahun 2018. Penurunan kontribusi juga dialami komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang turun menjadi 59,75 persen dari tahun sebelumnya yaitu 60,31 persen.

Laju Inflasi

Laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun. Laju inflasi di Kota Banda Aceh tahun 2018 – 2022 mengalami fluktuasi. Laju Inflasi kota Banda Aceh dari tahun 2018-2022 ditunjukkan gambar berikut:



Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2022

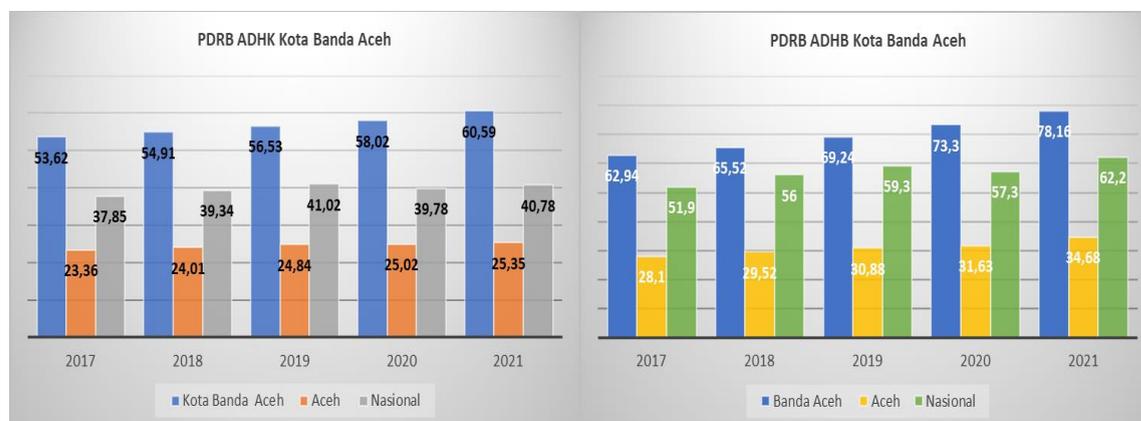
Gambar 2. 8
Grafik Laju Inflasi Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022

Gambar di atas menunjukkan laju inflasi Kota Banda Aceh pada tahun 2018-2022 dimana trend yang ada cenderung menunjukkan peningkatan. Jika dibandingkan tahun 2018 dan 2019, laju inflasi mengalami penurunan sebesar 0,55 persen. Tahun 2020 inflasi kembali naik dan turun kembali ditahun 2021. Lonjakan inflasi yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2022 hingga mencapai 6%. Tingginya lonjakan

laju inflasi Kota Banda Aceh penyebabnya adalah kenaikan harga BBM. Fluktuasi dari laju inflasi yang terjadi di Kota Banda Aceh menunjukkan adanya kejutan/shock yang disebabkan faktor-faktor penyebab inflasi baik dari sisi permintaan (masyarakat) atau yang lebih dikenal dengan istilah tarikan dari sisi permintaan (*demand pull inflation*) ataupun dari sisi penawaran (pelaku usaha) atau dikenal dengan istilah dorongan dari sisi penawaran (*cost push inflation*).

PDRB Per Kapita

Pendapatan perkapita yang dihitung dari PDRB perkapita sering digunakan sebagai indikator awal untuk mengukur kesejahteraan penduduk suatu daerah. Untuk perbandingan antar waktu, penggunaan PDRB Perkapita atas Dasar Harga Konstan (ADHK) lebih tepat, sedangkan untuk kondisi terkini dapat dilihat dari PDRB Perkapita atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Perkembangan PDRB per kapita Kota Banda Aceh ADHK dan ADHB tercatat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini bisa dilihat pada gambar dibawah:



Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2022

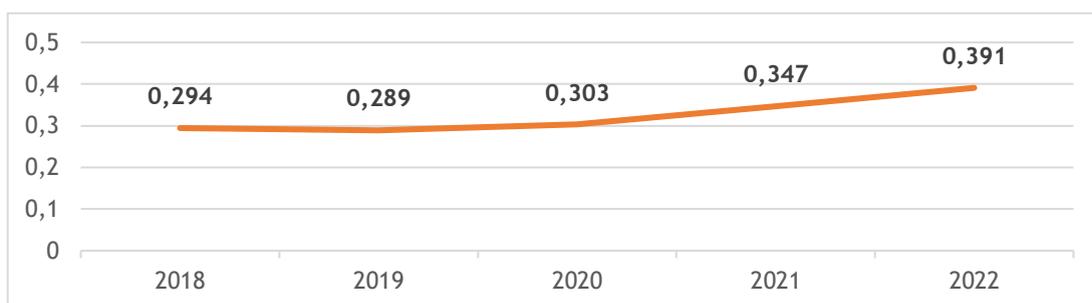
Gambar 2. 9
PDRB Perkapita Banda Aceh Tahun 2017-2021 (Juta)

Apabila dihitung berdasarkan harga konstan PDRB perkapita Kota Banda Aceh pada tahun 2017 sebesar 53,62 juta rupiah, selanjutnya pada tahun 2018 54, 91 juta rupiah, tahun 2019 sebesar 56, 53 juta rupiah, tahun 2020 sebesar 58,02 juta rupiah

dan tahun 2021 sebesar 60, 59 juta rupiah. Semntara itu, Pendapatan per kapia berdasarkan harga berlaku menunjukkan nilai yang lebih besar yaitu 62,94 juta rupiah tahun 2017 dan meningkat menjadi 62, 2 juta rupiah pada tahun 2021 (Sumber Banda Aceh dalam Angka Tahun 2022)

Indeks Gini Rasio

Indeks Gini adalah ukuran statistik yang menunjukkan distribusi pengeluaran per kapita penduduk suatu daerah. Nilai Indeks kndeks Gini ini biasanya digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan nilainya berkisar antara 0 hingga 1. Indeks Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Namun apabila mendekati 1, maka semakin nyata ketimpangan yang terjadi. Indeks Gini Kota Banda Aceh dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2023

Gambar 2. 10
Indeks Gini Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022

Indeks Gini Kota Banda Aceh pada tahun 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan trend kenaikan. Indeks gini Kota Banda Aceh menunjukkan angka yang terus meningkat, artinya kesenjangan pendapatan di Kota Banda Aceh semakin tinggi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/ penduduk). Dengan kata lain, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM dapat digunakan sebagai data strategis untuk mengukur kinerja Pemerintah. Di Indonesia, IPM juga merupakan salah satu faktor penentu Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM digunakan dengan mengukur 3 dimensi, yaitu kesehatan, pengetahuan dan standar hidup layak. Ada 4 indikator yang digunakan yaitu angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita disesuaikan. IPM juga dapat digunakan untuk membandingkan kualitas pembangunan manusia lintas daerah dan tingkat administrasi. IPM Kota Banda Aceh dibandingkan dengan Propinsi Aceh dan nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 10
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	IPM Nasional	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91
2	IPM Propinsi Aceh	71,19	71,90	71,99	72,18	72,80
3	IPM Kota Banda Aceh	84,37	85,07	85,41	85,71	86,28
4	Pertumbuhan IPM Kota Banda Aceh	0,50	0,83	0,40	0,35	0,57

Sumber: Banda Aceh Dalam Angka dan BPS Pusat, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa IPM Kota Banda Aceh menunjukkan trend yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kota Banda Aceh terus membaik seiring berjalannya waktu. IPM Kota Banda Aceh telah melewati IPM Aceh dan Nasional. Kesenjangan IPM antara Banda Aceh dan Propinsi Aceh menunjukkan adanya kesenjangan kualitas pembangunan manusia antara Kota Banda Aceh dan kabupaten lainnya di Propinsi Aceh. Kesenjangan ini adalah salah satu pemicu tingginya migrasi penduduk terutama tenaga kerja ke Kota Banda Aceh.

Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis. Angka Melek Huruf menjadi acuan pengembangan pendidikan di suatu daerah. Upaya pembangunan dan pengembangan pendidikan pada umumnya lebih diarahkan pada usaha memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan. Untuk mencapai hal

tersebut pemerintah berupaya menyediakan sarana wajib belajar 6 tahun yang dicanangkan tahun 1984 menjadi wajib belajar 9 tahun yang dimulai tahun 1994. Dengan demikian diharapkan tingkat pendidikan penduduk menjadi lebih baik dan jumlah penduduk buta huruf akan berkurang terutama pada usia sekolah (7-18 tahun). Gambaran angka melek huruf di Kota Banda Aceh, Aceh dan Nasional dapat dilihat pada Tabel 2.11 berikut:

Tabel 2. 11
Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2018–2022

Uraia	Angka Melek Huruf				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Banda Aceh	99,69	99,79	99,84	100	100
Provinsi Aceh	98,21	98,25	98,24	98,25	98,25
Nasional	95,90	96,00	96,04	96,35	96,35

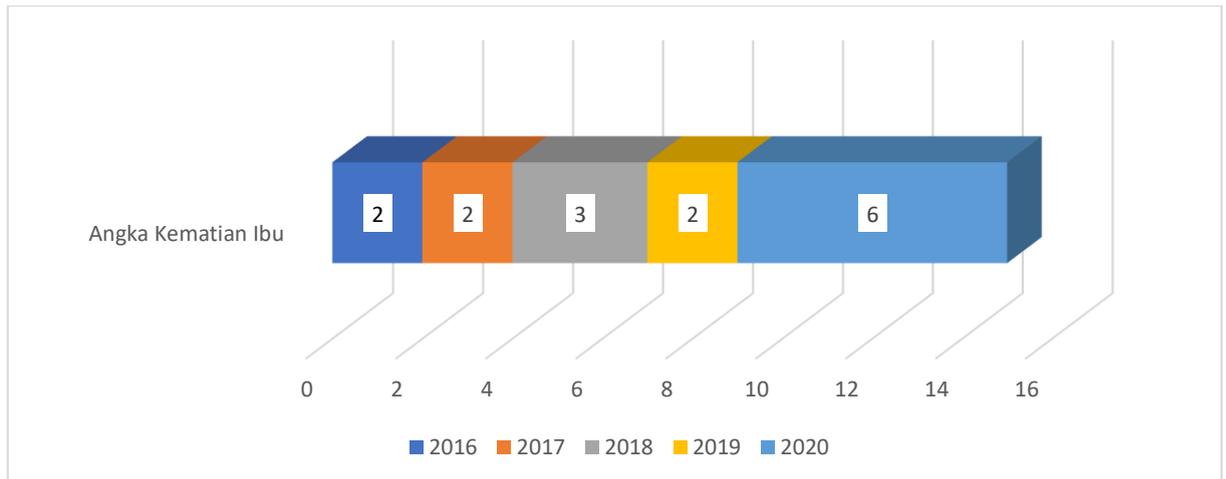
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, 2023

Berdasarkan tabel 2.11 di atas, dapat dilihat persentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang mampu baca tulis di Kota Banda Aceh pada tahun 2018-2022 terus meningkat. Secara rata-rata, perkembangan angka melek huruf di Kota Banda Aceh sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas masyarakat Kota Banda Aceh sudah sangat baik dari sisi literasi. Nyaris tidak ada penduduk Kota Banda Aceh yang tidak mampu baca tulis. Ini menunjukkan sistem pendidikan dasar yang dijalankan di Kota Banda Aceh telah berjalan efektif. Jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan Nasional, Kota Banda Aceh memiliki angka melek huruf yang lebih tinggi daripada keduanya.

Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita

Angka Kematian Ibu Melahirkan yang dilaporkan pada tahun 2020 cukup tinggi yakni sejumlah 6 kasus dari 100.000 kelahiran hidup. Hal ini dipengaruhi faktor masih kurangnya ibu-ibu yang memeriksakan kesehatan pasca melahirkan, sehingga berbagai faktor penyebab tidak terpantau dan dukungan suplemen yang tersedia tidak

diakses. Hal ini juga dipengaruhi oleh adanya tata cara adat yang memberikan larangan atau pantangan-pantangan makanan bagi ibu pasca melahirkan sehingga menyebabkan suplai gizi yang sangat dibutuhkan untuk pemulihan ibu serta kesiapan menyusui menjadi kurang. Gambaran angka kematian ibu di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Profil Kesehatan Aceh, 2020

Gambar 2. 11
Angka Kematian Ibu di Kota Banda Aceh, 2018-2022

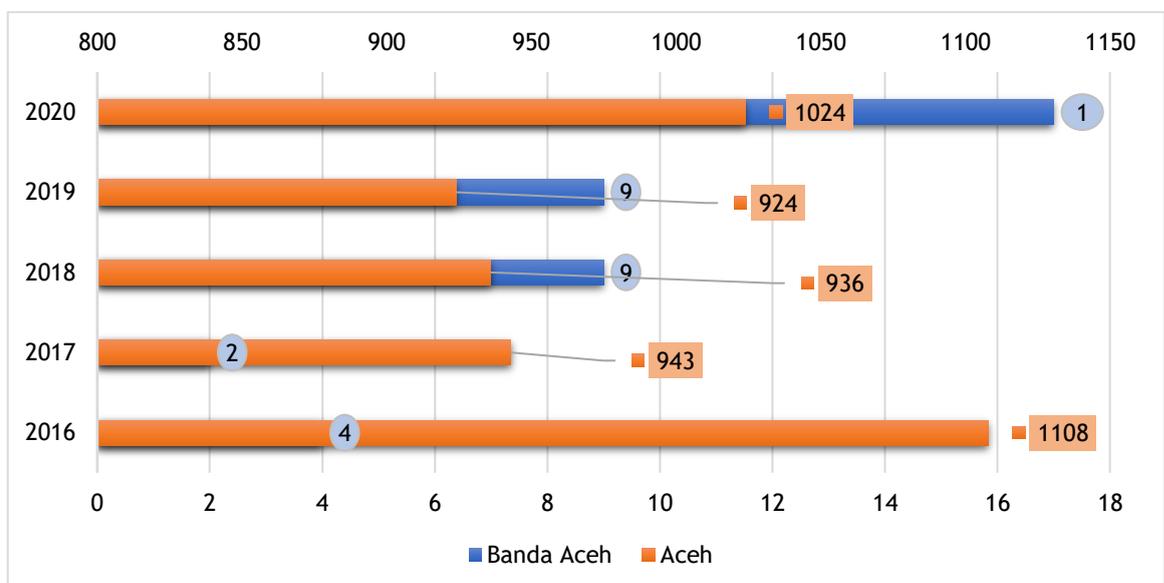
Gambar di atas menunjukkan angka kematian ibu di Kota Banda Aceh menunjukkan peningkatan dari 2016 sampai dengan 2020. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pihak terkait agar angka kematian ibu ini bisa menurun.

Salah satu indikator utama kesehatan adalah Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB). Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan naik turunnya angka kematian bayi, diantaranya:

- 1) masih ada ibu dengan penyakit penyerta yang ingin hamil tanpa direncanakan dengan baik;
- 2) masih rendahnya kepedulian dan keterampilan petugas dalam penatalaksanaan ibu hamil dan bayi;

- 3) kurangnya kepedulian keluarga terhadap ibu hamil dan masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perawatan bayi;
- 4) wanita usia subur (WUS) yang menderita Kurang Energi Kronis (KEK) dan anemia kurang mendapat perhatian sehingga saat hali akan menimbulkan risiko bagi janin yang dikandung.

Sampai dengan akhir tahun 2020 Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Banda Aceh sebanyak 17 bayi per 1000 kelahiran hidup. Jumlah ini meningkat dibandingkan kasus kematian bayi tahun 2016 dimana AKB sebesar 4 per 1000 kelahiran hidup. Ada banyak faktor yang mempengaruhi AKB tetapi tidak mudah untuk menemukan faktor yang paling dominan. Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor aksesibilitas dan pelayanan kesehatan dengan tenaga medis yang terampil, serta kesediaan masyarakat untuk merubah kehidupan tradisional ke norma kehidupan modern dalam bidang kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat AKB.



Sumber; Profil Kesehatan Aceh, 2021

Gambar 2. 12

Perkembangan AKB Banda Aceh dan Aceh Tahun 2016 – 2020

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan angka kematian bayi di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan. Walaupun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan angka kematian bayi di Provinsi Aceh, namun angka trend yang meningkat ini

perlu mendapat perhatian dari pihak terkait. Diperlukan usaha dari pihak terkait untuk terus berupaya menurunkan angka kematian bayi.

Indikator Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang melingkupi banyak faktor termasuk ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Arti kemiskinan lebih dari sekedar rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari indikator kesejahteraan terukur seperti garis kemiskinan, namun berkaitan juga dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek di luar pendapatan (*non-income factors*) seperti akses kebutuhan dasar, misalnya kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi. Mengingat multidimensionalnya permasalahan kemiskinan, penanganannya memerlukan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh.\

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin yang dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu. Dalam hal ini, perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin” yang ditetapkan misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/ pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti “orang miskin selalu hadir bersama kita”. dengan menggunakan definisi ini, penduduk miskin di suatu negara kaya dapat dikategorikan sebagai penduduk sejahtera di negara berkembang seperti Indonesia. (Ravallion, 1998 : 26).

Selain itu, juga dikenal terminologi kemiskinan lain seperti kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Soetandyo Wignjosuebrotto dalam “Suyanto (1995:59) mendefinisikan bahwa “Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan”. Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya

menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat.

Kemiskinan kultural disebabkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang sehingga ia tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Dalam hal ini, faktor-faktor adat dan budaya justru menyebabkan seseorang tetap dalam kemiskinan. Hal ini seperti yang dialami oleh suku terasing yang terikat dengan tradisi sosio-kultural seperti suku Badui, suku Dayak di pedalaman Kalimantan dan lain-lain. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan demikian, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan dapat diinterpretasikan sebagai jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Tabel 2. 12
Persentase Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan Garis Kemiskinan
di Kota Banda Aceh 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Banda Aceh (persen)	7,25	7,22	6,90	6,77	7,13
2	Provinsi Aceh (persen)	15,97	15,32	14,99	15,33	10,31
3	Nasional (persen)	9,82	9,41	9,78	10,14	7,50
4	Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	19,13	19,42	18,97	20,95	19,90
5	Garis Kemiskinan (Rp.)	607.391	628.493	674.977	698.617	737.016

Sumber: BPS Pusat, BPS Propinsi Aceh dan BPS Kota Banda Aceh, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin di Kota Banda Aceh selama 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan dari 7,44 persen

di tahun 2017 menjadi 6,77 persen pada tahun 2021. Ini merupakan perkembangan yang sangat menggembirakan karena Kota Banda Aceh terus menuju pemberantasan kemiskinan. Namun pada tahun 2022 persentase penduduk miskin di Kota Banda Aceh naik menjadi 7,13% (19.900 jiwa). Dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, angka kemiskinan Kota Banda Aceh masih lebih rendah dibandingkan keduanya.

Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin yang ada di Kota Banda Aceh, jumlahnya masih menunjukkan peningkatan. Walaupun jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, namun pada tahun 2021 dan 2021 mengalami kenaikan. Peningkatan jumlah penduduk miskin di 2 tahun tersebut tidak terlepas dari adanya pandemi *Covid-19* yang menghantam Kota Banda Aceh dan sangat berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat.

Garis kemiskinan di Kota Banda Aceh terus menunjukkan peningkatan. Jika dilihat dari trend sejak tahun 2017 sampai dengan 2022, di tahun 2022 garis kemiskinan mengalami peningkatan sebesar Rp. 38.399 dimana rata-rata peningkatan per tahun adalah Rp 31.744.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

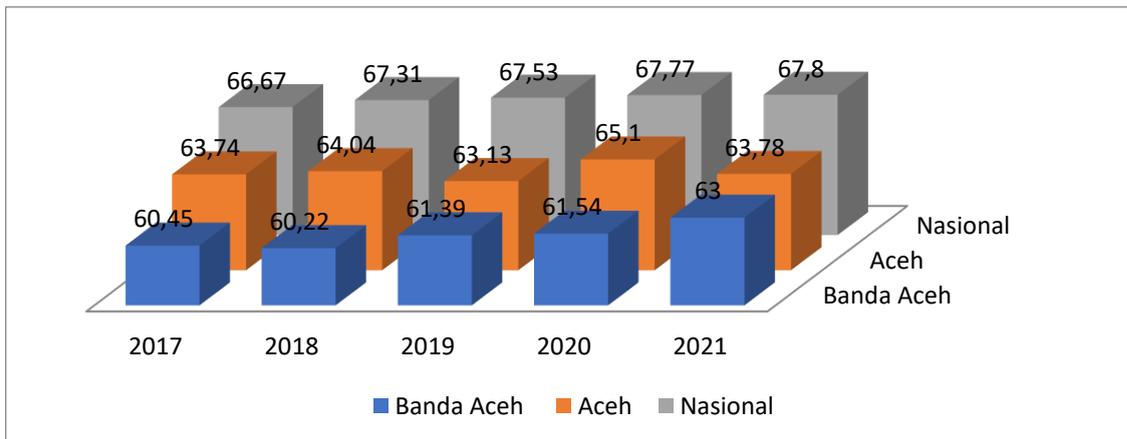
Tenaga kerja yang merupakan modal dasar dalam menggerakkan roda pembangunan pada suatu negara ataupun daerah. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mempercepat pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih tinggi. Permasalahan ketenagakerjaan menjadi isu disetiap daerah sehingga harus mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah pokok yang harus merangkul swasta untuk bersama-sama mengurangi dan menuntaskan masalah ketenagakerjaan di Indonesia khususnya di Banda Aceh. Banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan ketenagakerjaan. Kebijakan-kebijakan tersebut diwujudkan dalam usaha konkret, yaitu memperluas kesempatan kerja dan lapangan kerja serta meningkatkan mutu tenaga kerja. Gambaran kondisi ketenagakerjaan Kota Banda Aceh pada tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 13
Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Banda Aceh Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angkatan Kerja (jiwa)	122.810	126.580	131.147	136.675	130.089
	- Bekerja	114.342	117.822	118.637	124.460	118.876
	- Pengangguran	8.925	8.758	12.510	12.215	11.213
2	Bukan Angkatan Kerja (jiwa)	78.934	79.605	79.605	80.277	90.660
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	60,22	61,39	61,54	63	58,93
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,29	6,92	9,54	8,94	8,62

Sumber : BPS Kota Banda Aceh 2023

Data BPS untuk jumlah angkatan kerja di Kota Banda Aceh pada tahun 2018 tercatat 122.810 jiwa, pada tahun 2019 hingga 2021 terus meningkat menjadi 136.675 jiwa, meskipun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 130.089 jiwa. Peningkatan jumlah angkatan kerja atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tersebut tidak dibarengi dengan perluasan lapangan kerja atau kapasitas produksi, akibatnya jumlah pengangguranpun meningkat seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Jumlah pengangguran merupakan masalah yang sangat serius dan sangat mempengaruhi kondisi daerah, karena jumlah pengangguran merupakan indikator majunya perekonomian suatu daerah yang dapat menunjukkan tingkat distribusi pendapatan yang merata atau tidak di daerah tersebut. Selain masih terbatasnya lapangan pekerjaan, pengangguran di kota Banda Aceh disebabkan juga oleh beberapa faktor seperti arus urbanisasi dari daerah kabupaten lain ke Kota Banda Aceh untuk mencari pekerjaan, skill yang masih kurang dari pencari kerja yang tidak sesuai dengan standar dunia kerja dan masih kurangnya minat pencari kerja untuk berwirausaha secara mandiri.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2.13
Grafik Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2017 – 2021

Dari Gambar 2.22 di atas, perkembangan TPAK setiap tahunnya semakin meningkat di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Nasional. TPAK Kota Banda Aceh selama beberapa tahun terakhir selalu lebih rendah daripada Provinsi Aceh dan Nasional. Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh sebagai dinas yang berhubungan langsung dengan pengangguran telah melakukan usaha-usaha pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja setiap tahunnya melalui BLK Kota Banda Aceh. Pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

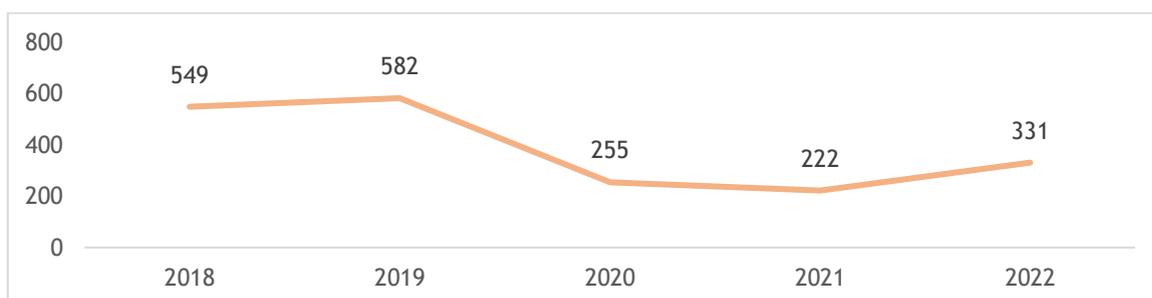
Tabel 2.14
Jenis Pelatihan yang dilakukan Disnaker Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022

Kejuruan Pelatihan	Tahun					Jumlah
	2018	2019	2020	2021	2022	
Menjahit	102	96	80	32	32	342
Teknisi Cooling System	32	32	16	0	0	89
Teknisi Sepeda Motor	48	48	32	16	16	100
Las Listrik	32	32	32	36	16	148
Kewirausahaan Membuat Kue	102	102	32	32	32	300

Tata Rias dan Kecantikan	32	32	0	0	32	96
Operator Alat Berat	0	0	0	0	0	0
Pangkas	0	0	0	0	0	0
English for Tour Guides	20	20	0	0	0	40
Penggambaran Auto CAD	0	0	0	16	0	16
Estimator Bangunan Gedung	0	0	0	0	16	16
Juru Gambar Arsitektur	0	0	0	0	16	16
Pengolahan Ikan	0	0	0	0	16	16
Jumlah	368	362	192	132	176	1.230

Sumber: Disnaker Kota Banda Aceh, 2022

Tabel 2.14 menunjukkan secara rata-rata dalam 5 tahun terakhir (2018-2022), Pemerintah Kota Banda Aceh hanya mampu memberikan pelatihan untuk pengangguran/pencari kerja sebanyakorang per tahun. Jika dibandingkan dengan rata-rata jumlah pencari kerja yang mencapai 388 orang per tahun, maka Kota Banda Aceh belum bisa memenuhi keseluruhan pencari kerja untuk mengikuti pelatihan yang diberikan. Jumlah pencari kerja di Kota Banda Aceh untuk periode 2018-2022 terlihat dalam gambar berikut:



Sumber: BPS Banda Aceh, 2023

Gambar 2. 14
Jumlah Pencari Kerja Tahun 2018 – 2022

Pemerintah Kota Banda Aceh terus meningkatkan perbandingan antara jumlah pencari kerja terdaftar dengan pelatihan yang diberikan. Walaupun persentase antara para pencari kerja dengan pelatihan yang diberikan persentasenya masih belum

mencapai 50 persen, namun jumlah capaian yang telah mencapai **47,5 persen** menjadi keberhasilan Kota Banda Aceh.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap APBD

Pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh dari tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan. Tahun 2019 PAD Kota Banda Aceh adalah sebesar Rp. 235,123 miliar menurun dari tahun 2018 sebesar Rp.11,15 miliar dan terus menurun hingga tahun 2021. Namun tahun 2022 kembali naik menjadi 314,92 miliar. Sementara itu, APBD Kota Banda Aceh mengalami fluktuasi dari tahun 2018-2022. Hal tersebut berdampak kepada rasio PAD Kota Banda Aceh juga yang fluktuasi, sampai dengan tahun 2022 rasio PAD Kota Banda Aceh adalah sebesar 23,23 persen dari total APBD. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 15 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap APBD Kota Banda Aceh 2018-2022

Uraian	PAD	APBK	Kontribusi (%)
REALISASI 2018	246.272.150.484	1.135.914.599.521	21,68
REALISASI 2019	235.123.074.164	1.215.834.088.158	19,34
REALISASI 2020	227.747.620.343	1.258.996.719.879	18,09
REALISASI 2021	224.364.761.635	1.209.597.173.418	18,55
REALISASI 2022	314.917.421.916	1.355.675.342.907	23,23

Sumber: *Badan Pengelola Keuangan Kota Banda Aceh, 2023*

Persentase Pengeluaran Non Makanan

Persentase pengeluaran non makanan menurut Bank Dunia pada masing-masing golongan pendapatan sangat bervariasi dalam dua tahun terakhir. Jika dilihat secara keseluruhan pada tahun 2018-2022 rata-rata pengeluaran non makanan baik pada pendapatan rendah, sedang dan tinggi adalah sebesar 57,93%.

Pengeluaran non makanannya mencapai 56,18 persen untuk tahun 2018 dan terus meningkat hingga tahun 2021 menjadi 59,37 persen. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 58,93 persen. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.16 Persentase Pengeluaran Non Makanan Kelompok Pengeluaran Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Makanan (%)	43,92	43,03	41,78	40,63	41,07
Pengeluaran Non Makanan (%)	56,18	56,97	58,22	59,37	58,93

Sumber : *BPS Kota Banda Aceh, 2023*

Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan

Sepanjang tahun 2018-2022 rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat di Kota Banda Aceh dalam sebulan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah sebesar Rp. 2.200.303 yang menurun dari tahun sebelumnya. Rata-rata pendapatan yang diperoleh lebih dominan dikeluarkan untuk belanja non makanan dibandingkan makanan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 17 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Kota Banda Aceh Tahun 2018- 2022 (rupiah)

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Makanan (Rp)	890.272	848.046	839.685	973.988	903.779
Pengeluaran Non Makanan (Rp)	1.136.833	1.122.766	1.161,846	1.423.313	1.296.525
Jumlah (Rp)	2.027.105	1.970.813	2.009.893	2.397.301	2.200.303

Sumber: *BPS Kota Banda Aceh, 2023*

Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Penggunaan moda angkutan darat sangat dipengaruhi oleh jalan yang tersedia di wilayah Kota Banda Aceh. Sebagai barang publik yang merupakan bagian dari layanan public pemerintah Kota Banda Aceh, jalan raya mempunyai kapasitas tertentu agar dapat dilalui dengan nyaman. Berikut perkembangan panjang jalan dan kendaraan di Kota Banda Aceh.

Tabel 2. 18
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Banda Aceh
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Panjang Jalan (km)	765,66	765,66	676,13	676,13	676,13
2	Jumlah kendaraan	271.625	280.967	281.698	294.244	
	Rasio	0,29	0,27	0,24	0,22	

Sumber: Dinas Perhubungan, 2022

Peningkatan pendapatan dan aktifitas ekonomi menyebabkan jumlah kendaraan yang melalui jalan-jalan di Kota Banda Aceh bertambah dari tahun ke tahun sementara penambahan jalan sulit dilakukan mengingat luas area kota tidak mungkin bertambah. Hal ini dapat menyebabkan kemacetan di jalan-jalan utama dalam kota. Oleh karena itu, kemacetan menjadi permasalahan yang mempunyai urgensi tinggi untuk diselesaikan dalam urusan perhubungan di Kota Banda Aceh.

Rasio Ketergantungan Penduduk

Indeks ketergantungan penduduk menjelaskan tentang gambaran perbandingan antara jumlah penduduk produktif dengan jumlah penduduk tidak produktif. Kondisi indeks ketergantungan penduduk Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 19
Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Banda Aceh 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Penduduk Usia < 15 Tahun	75.655	78.197	75.845	75.667	72.718
2	Penduduk Usia > 64 Tahun	9.867	9.969	9.873	10.051	11.215
3	Penduduk Usia Tidak Produktif (< 15 tahun dan > 64 Tahun)	85.522	88.166	85.718	85.718	83.933

4	Penduduk Usia Produktif (15 – 64 Tahun)	152.750	151.201	163.174	165.570	173.702
5	Rasio Ketergantungan	55,99	58,31	52,53	52,83	48,32

Sumber: BPS Propinsi Aceh dan BPS Kota Banda Aceh, 2023

Rasio ketergantungan penduduk di Kota Banda Aceh pada tahun 2019 sampai mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang artinya jumlah penduduk non produktif semakin banyak. Namun, pada tahun 2020 sampai dengan 2022, jumlah ini mengalami penurunan. Jika dilihat dari struktur piramida penduduk di Kota Banda Aceh, diperkirakan Kota Banda Aceh akan mendapatkan bonus demografi dimana penduduk usia 15-64 tahun menjadi lebih banyak. Bonus demografi ini tentunya memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai daya saing melalui berbagai keahlian dan ketrampilan.

2.4. Pendidikan

1. Rasio Guru/ Murid Sekolah Pendidikan Dasar

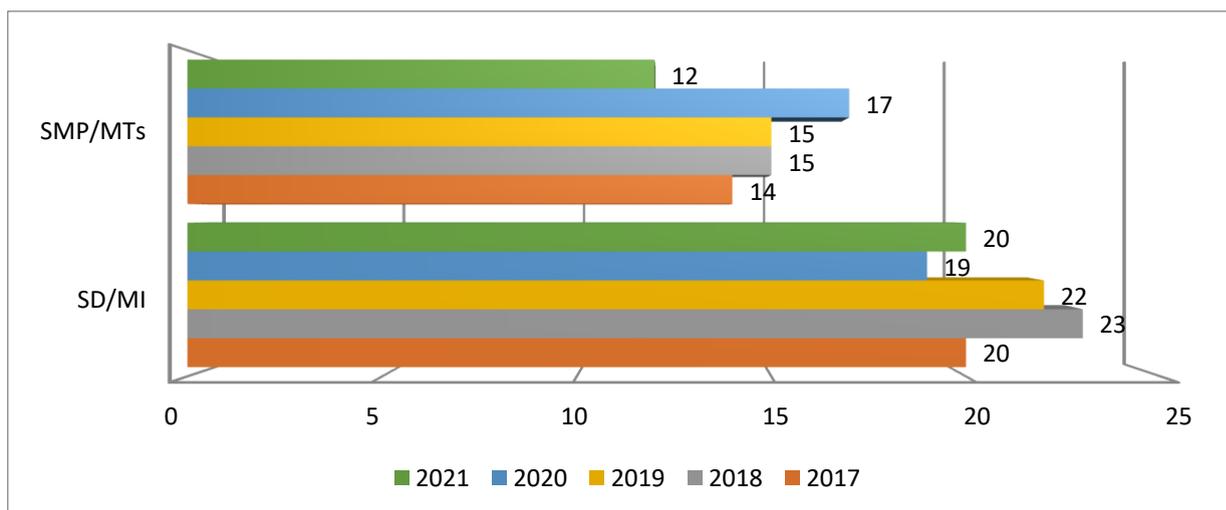
Pelayanan pendidikan dapat diamati dari rasio guru terhadap murid. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per 1.000 jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru adalah sebagai berikut :

Pasal 8 ayat 2 menyebutkan bahwa: Jumlah Peserta Didik per rombongan belajar ditetapkan dengan ketentuan paling banyak:

- a. 10 (sepuluh) Peserta Didik untuk pendidikan anak usia dini dari usia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun;
- b. 12 (dua belas) Peserta Didik untuk pendidikan anak usia dini dari usia di atas 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun;

- c. 15 (lima belas) Peserta Didik untuk pendidikan anak usia dini dari usia di atas 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
- d. 28 (dua puluh delapan) Peserta Didik untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah;
- e. 32 (tiga puluh dua) Peserta Didik untuk sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah;
- f. 36 (tiga puluh enam) Peserta Didik untuk sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan;
- g. 5 (lima) Peserta Didik untuk sekolah dasar luar biasa;
- h. 8 (delapan) Peserta Didik untuk sekolah menengah pertama luar biasa dan sekolah menengah atas luar biasa;
- i. 20 (dua puluh) Peserta Didik untuk program paket A atau bentuk lain yang sederajat;
- j. 25 (dua puluh lima) Peserta Didik untuk program paket B atau bentuk lain yang sederajat; dan
- k. 30 (tiga puluh) Peserta Didik untuk program paket C atau bentuk lain yang sederajat.

Untuk rasio guru terhadap murid SD/MI dan SMP/MTs yang ada di Kota Banda Aceh pada tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber Profil Pendidikan Kota Banda Aceh, 2021

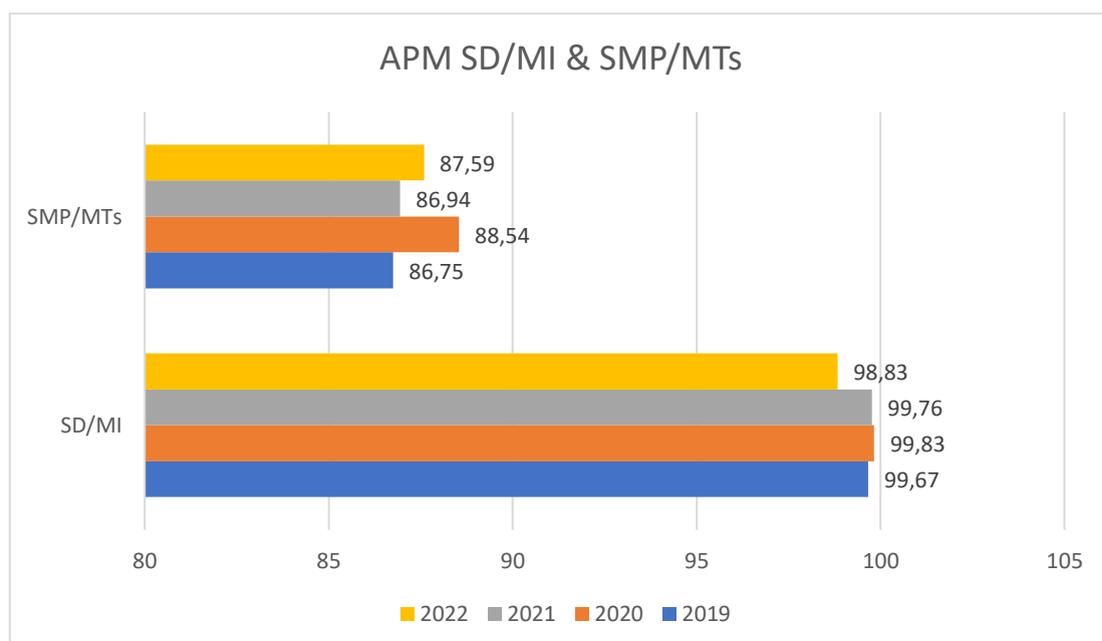
Gambar 2. 15

Rasio Guru/Murid Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021

Selama tahun 2017 hingga tahun 2021, dibandingkan standar nasional terlihat bahwa rasio guru terhadap siswa pada per-jenjang sekolah sudah memenuhi standar minimal. Pencapaian ini sangat menggembirakan. Sudah saatnya Kota Banda Aceh tidak hanya melihat rasio jumlah kuantitas guru terhadap murid saja namun perlu melihat rasio jumlah ketersediaan guru menurut mata pelajaran yang ada di SD/MI dan SMP/MTs. Hal ini untuk mendapatkan pemerataan yang proporsional di setiap sekolah dan bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Banda Aceh.

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun, SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun, dan SMA untuk penduduk usia 16-18 tahun. APM tahun 2022 di Kota Banda Aceh untuk tingkat SD/MI adalah 98,83 persen dan SMP/MTs 87,59 persen. Penyebaran sekolah untuk jenjang SD/MI sampai SMP/MTs sudah merata dan menjangkau seluruh wilayah Kota Banda Aceh sampai ke daerah pinggiran kota. Grafik berikut menggambarkan perkembangan APM Kota Banda Aceh Tahun 2019 – 2022.



Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2023

Gambar 2. 16
Perkembangan Angka Partisipasi Murni Kota Banda Aceh Tahun 2019–2022

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan rasio anak yang masih sekolah pada usia tertentu (usia sekolah) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sama tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang dijalani. APS juga merupakan indikator yang digunakan sebagai petunjuk keberhasilan program wajib belajar. Program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai APS umur 7 – 12 tahun lebih dari 98,58 persen dan APS umur 13 – 15 tahun lebih dari 70 persen. Berdasarkan tabel dibawah ini diketahui bahwa pada tahun ajaran 2022 APS usia 7 – 12 tahun sebesar 99,58 persen. Sedangkan untuk APS usia 13 – 15 tahun di tahun 2022 mencapai 98 persen. Angka tersebut menunjukkan pencapaian APS usia 13 – 15 tahun dan APS usia 7 – 12 tahun sudah melebihi standar yang ditetapkan.

Tabel 2. 20
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Banda Aceh Tahun 2018 – 2022

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	APS SD/MI (usia 7 -12 tahun)	100	99,95	99,99	99,98	99,58
2	APS SMP/MTs (usia 13 – 15 tahun)	100	100	99,89	99,99	98,00

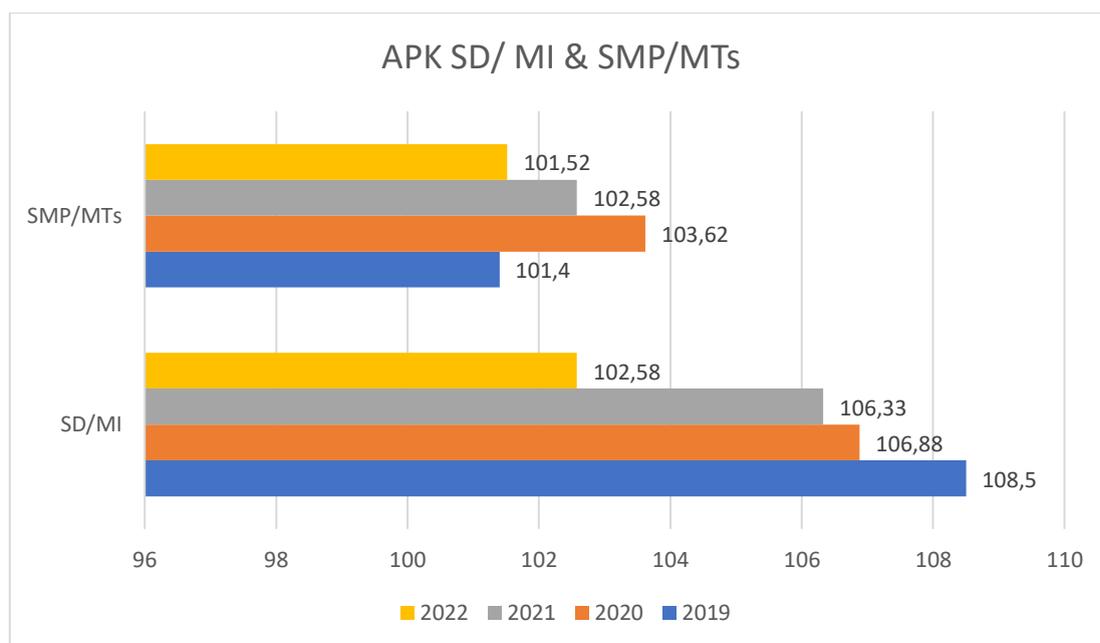
Sumber BPS Kota Banda Aceh, 2023

4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar merupakan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK yang tinggi menandakan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya.

Berdasarkan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang tercatat pada tahun 2022, APK tertinggi di Kota Banda Aceh terdapat di tingkat SD/MI/Sederajat yaitu 102,58 persen dan yang terendah di tingkat SMP/MTs/Sederajat yaitu 101,52 persen. Pada

tahun 2022, baik tingkat SD dan SMP mengalami kenaikan Tingginya APK adalah akibat banyaknya siswa usia di luar usia sekolah yang berada di jenjang tersebut ditambah dengan siswa lain penduduk luar Kota Banda Aceh yang bersekolah di Kota Banda Aceh. Berikut grafik penjelasan perkembangan APK Kota Banda Aceh tahun 2019 – 2022.



Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2022

Gambar 2. 17
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kota Banda Aceh Tahun 2019 – 2022

2.3. Kesehatan

1) Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak balita. Jadi posyandu adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat. Posyandu dibentuk bertujuan untuk :

1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas)
2. Membudayakan NKKBS.

3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Tujuan pembentukan posyandu tersebut didukung dengan 5 kegiatan pokok posyandu, yaitu :

1. KIA
2. KB
3. Imunisasi
4. Gizi
5. Penanggulangan Diare.

Tabel 2. 21
Perkembangan Rasio Pelayanan Posyandu Per-Satuan Balita di Kota Banda Aceh Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio
2018	113	21.739	1 : 192
2019	114	20.838	1 : 182
2020	114	27.572	1 : 241
2021	114	11.323	1 : 99
2022	114	24.677	1 : 216

Sumber: BPS Banda Aceh, 2023

Perkembangan rasio pelayanan posyandu di Kota Banda Aceh untuk per-satuan balita terus meningkat. Dari tahun 2018 yang hanya bisa melayani 1 posyandu untuk 192 balita, maka pada tahun 2022 sudah bisa melayani 1 posyandu untuk 216 balita. Jumlah ini sangat menggembirakan karena setiap gampong semakin sadar untuk berperan aktif untuk memantau dan menjaga terus kesehatana balita yang ada di lingkungannya melalui layanan Posyandu.

2) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk

Sistem pelayanan kesehatan di Indonesia meliputi pelayanan rujukan yang berupa:

1. Pelayanan Kesehatan Dasar

Pada umumnya pelayanan dasar dilaksanakan di puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan Pelayanan lainnya di wilayah kerja puskesmas selain rumah sakit.

2. Pelayanan Kesehatan Rujukan

Pada umumnya dilaksanakan di rumah sakit. Pelayanan keperawatan diperlukan, baik dalam pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan rujukan.

Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Pelayanan kesehatan dasar yang diterapkan di Indonesia memegang peranan penting dalam pemberian layanan kesehatan yang dapat menjangkau wilayah-wilayah pedesaan. Untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang terjangkau, maka sarana dan prasarana pelayanan kesehatan harus tersedia atau tersebar di setiap kecamatan. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang lebih baik. Kota Banda Aceh saat ini telah memiliki 11 puskesmas, 27 puskesmas pembantu, 34 polindes/poskedes, 114 posyandu, 54 klinik/balai kesehatan, dan 7 puskesmas keliling yang tersebar di 9 kecamatan dan 90 gampong. Gambaran fasilitas kesehatan di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 22
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Banda Aceh Tahun 2018 - 2022

Fasilitas Kesehatan	2018	2019	2020	2021	2022
Rumah Sakit Umum	13	13	13	14	14
Rumah Bersalin	7	7	7	7	7
Puskesmas	11	11	11	11	11
Puskesmas Pembantu	27	27	27	27	27
Polindes/Poskedes	34	34	34	34	34
Posyandu	113	114	114	114	114
Klinik/Balai Kesehatan	33	39	39	54	54
Puskesmas Keliling	7	7	7	7	7

Sumber: BPS Banda Aceh, 2023

3) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan kesehatan dibidang pelayanan langsung seperti Rumah sakit, bertujuan untuk meningkatkan mutu, cakupan dan efisiensi pelaksanaan rujukan medik dan rujukan kesehatan secara terpadu serta meningkatkan dan memantapkan manajemen pelayanan kesehatan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian.

Pelayanan kesehatan rumah sakit di Kota Banda Aceh telah menunjukkan kinerja yang baik. Ketersediaan rumah sakit baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta sudah tersebar dan mencukupi untuk pelayanan kesehatan rujukan. Dengan adanya program BPJS dan JKA pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat sudah memberikan pelayanan yang maksimal.

Tabel 2. 23
Perkembangan Rasio Rumah Sakit Per-Satuan Penduduk di Kota Banda Aceh
Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Rumah Sakit (Umum + Khusus)	13	13	13	15	15
Jumlah Penduduk	265,111	268,156	252,899	276,223	257,635
Rasio per satuan penduduk	1:20.393	1:20.627	1:21.254	1:18.415	1:18.415

Sumber: BPS Banda Aceh, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pelayanan kesehatan rumah sakit masih memenuhi standar rasio rumah per-satuan penduduk. Idealnya satu rumah sakit melayani seratus ribu penduduk, sementara data diatas menunjukkan rata-rata rumah sakit melayani dibawah 20.000 penduduk. Namun over capacity pelayanan dapat terjadi apabila banyaknya pasien dari luar wilayah Kota Banda Aceh yang dirujuk ke rumah sakit di Banda Aceh terutama rumah sakit pemerintah.

4) Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio Dokter per 100.000 Penduduk adalah Dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di suatu wilayah (di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain) per 100.000 penduduk. Ketersediaan jumlah dokter memberikan gambaran pelayanan kesehatan dari sisi kuantitas tenaga medis terhadap masyarakat. Pola hidup yang semakin berubah terutama diperkotaan menjadikan masyarakat rentan terhadap gejala penyakit maupun keluhan kesehatan lainnya yang membutuhkan penanganan dokter. Kota Banda Aceh sebagai pusat pelayanan kesehatan di Provinsi Aceh memiliki beban besar dalam pelayanan kesehatan terutama penyediaan tenaga medis. Tabel berikut menggambarkan kondisi pelayanan dokter terhadap penduduk di Kota Banda Aceh.

Tabel 2. 24
Perkembangan Rasio Dokter Per 100.000 Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Dokter (rumah sakit dan puskesmas)	585	637	469	697	665
Jumlah Penduduk	265,111	268,156	276,304	276,223	276,223
Rasio/100.000 penduduk	220,66	237,55	169,74	252,33	240,75

Sumber BPS Kota Banda Aceh dan Profil Kesehatan Kota Banda Aceh, 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah dokter yang tersedia di Kota Banda Aceh cenderung fluktuatif sejak tahun 2018 sampai dengan 2022. Penurunan jumlah dokter terbesar terjadi pada tahun 2020 yang diakibatkan karena pandemi *Covid-19*. Namun, pada tahun 2021 jumlah dokter kembali meningkat. Jika dilihat dari rasio dokter per satuan penduduk di Kota Banda Aceh pada tahun 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan jumlah dokter yang ada di Kota Banda Aceh sudah sangat cukup dalam melayani 100.000 penduduk. Bahkan rasio ini jauh diatas rasio provinsi Aceh (48 pada tahun 2021) dan Nasional (24,786 pada tahun 2021).

2.4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Kondisi Jalan

Pembangunan infrastruktur jalan di Kota Banda Aceh mutlak diperlukan, mengingat peran dan kontribusinya terhadap pertumbuhan Kota Banda Aceh. Dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang

Jalan, disebutkan bahwa jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, artinya infrastruktur jalan merupakan urat nadi perekonomian suatu wilayah, hal ini disebabkan perannya dalam menghubungkan serta meningkatkan pergerakan manusia, dan barang. Kota Banda Aceh pada tahun 2021 ini memiliki jalan nasional 32,56 Km, jalan provinsi 22,61 Km, dan jalan kota 620,96 Km. Untuk kondisi jalan Kota Banda Aceh bisa dilihat pada tabel berikut:

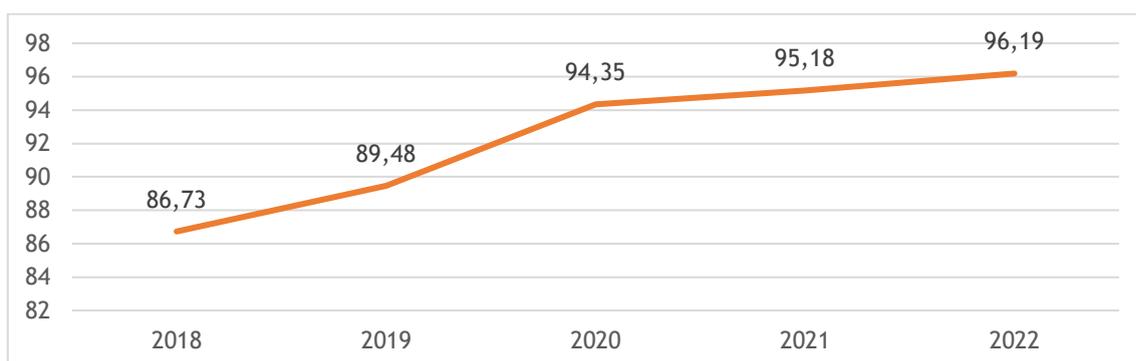
Tabel 2. 25
Status Kondisi Jalan Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022

Tahun	Panjang Jalan (km) (SK No. 221A Thn 2010)	Kondisi Ruas Jalan							
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
2018	707,343	542,712	76,73	97.596	13,80	61.297	8,67	5.738	0,81
2019	707,343	558,634	78,98	101.646	14,37	42.365	5,99	4.698	0,66
2020	620,960	585,890	94,35	22.329	3,59	10.795	1,74	1.949	0,31
2021	620,960	591,030	95,18	18.891	3,04	9.112	1,47	1.926	0,31
2022	620,960	579,338	96,19	15,891	2,56	6,805	1,09	0,926	0,15

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, 2023

Tabel 2.23 menunjukkan menunjukkan status kondisi jalan Kota Banda Aceh pada tahun 2022, dimana 96,19 persen dalam kondisi baik, 2,56 persen dalam kondisi sedang, 1,09 persen dalam kondisi rusak ringan, dan hanya 0,15 persen dalam keadaan rusak berat.

Pertumbuhan sosial, ekonomi, dan pembangunan di kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan infrastruktur jalan yang memperlancar, merangsang dan memacu aktifitas pembangunan. Saat ini panjang jalan di Kota Banda Aceh 620,960 km dengan kondisi baik 96,19 persen.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh

Gambar 2. 18

Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Banda Aceh Tahun 2018 - 2022

Gambar di atas terlihat bahwa trend panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 terus menunjukkan peningkatan.

Dari total jalan yang ada di Kota Banda Aceh, panjang jalan yang memiliki trotoar mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang sebelumnya 23,753 km menjadi 59,435 km di tahun 2022. Walaupun mengalami peningkatan namun jika melihat persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase di Kota Banda Aceh masih sangat kecil. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Banda Aceh untuk menyediakan trotoar dan drainase untuk menciptakan Kota Banda Aceh yang bebas dari banjir. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.24.

Tabel 2.26

Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (km)	59,435	59,435	59,435	59,435	59,435
Panjang seluruh jalan kota (km)	707,343	707,343	620,960	620,960	620,960
Persentase	8,40	8,40	9,57	9,57	9,57

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, 2023

Perumahan dan Kawasan Pemukiman

- 1) Rasio Rumah Layak Huni

Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memenuhi perumahan layak huni makin besar seiring dengan meningkatnya jumlah pembangunan perumahan yang merupakan dampak dari meningkatnya jumlah penduduk. Dalam lingkungan perumahan harus terdapat fasilitas-fasilitas yang menunjang berkegiatan sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk menjamin kelayakan perumahan yang dihuni sehingga dapat memberikan rasa nyaman, aman, tentram dan sejahtera bagi penghuninya. Peran tersebut telah sesuai dengan peran pemerintah sebagai stabilisator, inovator, dan katalisator. Dalam mewujudkan perumahan yang layak huni, dukungan dan bantuan dari pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni menjadi penting. Gambaran jumlah rumah layak huni dari tahun 2017 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 27
Rumah Layak Huni Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Rumah	66.024	67.613	68.507	54.689	54.689
2	Jumlah Rumah Layak Huni	64.144	65.852	64.314	50.424	50.574
Persentase		97,88	98,13	93,88	92,20	92,47

Sumber: Dinas Perkim Kota Banda Aceh, 2023

Jumlah rumah layak huni pada tahun 2018 telah mencapai 64.144 unit. Namun, jumlah rumah layak huni pada tahun 2022 menurun menjadi 50.574 unit. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan dalam mengidentifikasi rumah layak huni sebelum tahun 2020. Namun, ini tetap menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan oleh pemerintah melalui dinas terkait dimana jika dibandingkan antara jumlah rumah dengan jumlah rumah layak huni yang ada di tahun 2022, masih ada 7,53 persen lagi rumah yang belum layak huni di Kota Banda Aceh.

2) Persentase Permukiman yang Tertata

Pemukiman yang tertata adalah permukiman yang dibangun menurut tata ruang yang tepat dengan memperhatikan hal dasar dalam sebuah permukiman, seperti akses jalan, sanitasi, air bersih, dan sebagainya. Persentase permukiman yang tertata dapat diukur dari perbandingan luas permukiman yang tertata dengan jumlah permukiman

keseluruhan. Persentase luas permukiman yang tertata di Kota Banda Aceh bisa dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2. 28
Persentase Luas Permukiman Tertata Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas Area Permukiman tertata (Ha)	464,23	480,39	620,56	1.485,83	1.546,04
2	Luas Area Permukiman Keseluruhan (Ha)	2.635,99	2.635,99	2.635,99	1.936,83	1.936,83
	Persentase	17,61	18,22	23,54	76,71	79,82

Sumber: Dinas Perkim Kota Banda Aceh, 2023

Persentase permukiman yang tertata di Kota Banda Aceh terus meningkat sejak 2018 sampai dengan 2022. Pada tahun 2018, jumlah permukiman yang tertata adalah 17,61 persen, kemudian meningkat menjadi 18,22 persen di tahun 2019. Peningkatan terus terjadi di tahun 2020 dan 2021 sebesar 23,54% dan 76,71%. Tahun 2022 peningkatan luas permukiman tertata mencapai 79,82%.

3) Kawasan Permukiman Kumuh

Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi Aceh belum sepenuhnya terlepas dari permasalahan lingkungan bersih yang bebas dari kawasan kumuh. Keluhan yang paling sering disampaikan mengenai permukiman kumuh yang umumnya terjadi pada masyarakat miskin adalah rendahnya kualitas lingkungan dan kesehatan yang dianggap sebagai bagian kota yang harus disingkirkan. Terbentuknya permukiman kumuh, yang sering disebut sebagai *slump area* sering dilihat berpotensi menimbulkan banyak masalah perkotaan, karena bisa menjadi sumber timbulnya berbagai masalah lingkungan, kesehatan, dan perilaku menyimpang, seperti kejahatan, serta sumber penyakit sosial lainnya.

Tertatanya kawasan permukiman kumuh akan memberikan manfaat terhadap lingkungan, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan mengurangi kekumuhan

2. Mengurangi dampak pencemaran lingkungan
3. Mengurangi tingkat bahaya pada saat bencana
4. Mengurangi dampak banjir yang kerap terjadi karena tidak tersedianya drainase lingkungan yang layak

Berdasarkan hasil Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) di Tahun Anggaran 2021, luas area permukiman kumuh mengalami penurunan dari 461,48 ha menjadi 451 ha. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan yang telah dilakukan di berbagai wilayah permukiman kumuh sudah baik. Namun perlu juga dilakukan upaya pencegahan agar tidak ada penambahan lokasi kumuh di Kota Banda Aceh. Diharapkan Kota Banda Aceh bisa mewujudkan terciptanya kotaku (kota tanpa kumuh) sehingga target 0% daerah kumuh dapat terwujud.

Tabel 2. 29
Luas Kawasan Kumuh Kota Banda Aceh Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	608,25	608,25	461,48	451,40	451,40
2	Luas Wilayah (Ha)	59.002	59.002	59.002	59.002	59.002
3	Luas Penanganan (Ha)	464,23	16,16	4,90	N/A	60,61
4	Sisa Luas Kawasan (Ha)	21,06	4,90	456,58	451,40	390,79

Sumber: Dinas Perkim Kota Banda Aceh, 2023

Tabel 2.27 menunjukkan luas kawasan kumuh yang ada di Kota Banda Aceh sejak tahun 2018 sampai dengan 2019 terus menurun. Pada tahun 2020, luas kawasan kumuh meningkat yang disebabkan karena perbedaan dalam penilaian kawasan kumuh. Sejak tahun 2020, luas kawasan kumuh dihitung tidak hanya dalam penanganan kawasan kumuh saja, namun telah menambahkan luas kawasan yang yang berpotensi kumuh dan perlu dicegah menjadi kawasan kumuh.

Pembangunan kawasan permukiman kumuh yang perlu ditekankan adalah pada penanganan 7 indikator kumuh, diantaranya pembangunan rumah layak huni pembangunan sarana prasarana dasar permukiman seperti jalan, drainase, pengelolaan sampah dan lampu jalan. Tentunya hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena kebutuhan dasar dari sarana prasarana permukiman merupakan hal utama terkait

dengan kegiatan sehari-hari masyarakat, yaitu meningkatnya akses masyarakat dari kawasan permukiman ke pusat aktifitas perekonomian berupa pertokoan dan pasar.

2.5. Sosial

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial meliputi kegiatan Rehabilitasi Penyandang Masalah Sosial (PMKS) dan Pembinaan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Berikut indikator yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Tabel 2.30
Indikator Kinerja Daerah Bidang Sosial Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase PMKS yang Mampu Memiliki Kemandirian Ekonomi	%	0,02	0,04	5,07	50,86	
2	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi Dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	0	37	8,33	8,33	
3	Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Tersertifikasi Dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	0	58	0	0	
4	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	36,88	36	40	50,86	
5	Persentase PMKS yang Tertangani	%	36,88	36	84,94	90,39	
6	Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	46	36	99,83	51,68	
7	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat	%	18	21	30	0	

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	(WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial						
8	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	8	15	27	66,94	
10	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan uang duka	Jiwa	365	637	746	253	

Sumber : Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 2023

Tenaga Kerja

Untuk mengukur keberhasilan Indikator kinerja daerah di bidang tenaga kerja ada 17 indikator yang telah ditetapkan dan menjadi tanggungjawab dinas tenaga kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 31
Indikator Kinerja Daerah Bidang Tenaga Kerja Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,29	6,92	9,54	8,94	8,62

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Jumlah Industri Kecil Menengah Produktif	Unit	2457	2560	2594	2620	2646
3	Jumlah Penetapan Sentra Industri	unit	0	0	0	1	1
4	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	%	69,40	57,04	41,18	52,25	40
5	Persentase penyelesaian perselisihan buruh dengan pengusaha	%	93	140	135	113	
6	Jumlah Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek/BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan aktif	Naker	16253 (Jlh Naker)	18828	19930	29744	
		Naker	8675 (BPJS Kes Aktif))	9,074			
7	Rasio daya serap tenaga kerja	%	-	-	Tidak Ada Data	-	-
8	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun		100	93	94	65	
9	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	-	-	92	65	
10	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	78,48	79,81	75,29	60,82	
11	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	0,00	86,15	0,00	0,00	
12	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan	%	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	2.25	2.26	2,13	2,18	2,6
14	Kontribusi Rumah Tangga terhadap PDRB sektor Industri	%	17,03	16,45	16,78	15,62	14,62
15	Pertumbuhan Industri	%	2.16	4.02	1.31	0,99	0,98
16	Besaran pekerja/buruh yang menjadi program JAMSOSTEK	%	23,38	22,31	23,33	23,24	
17	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	%	64	25	80	71	59

Sumber : Disnaker Kota Banda Aceh, 2023

Urusan Pangan

Untuk mengembangkan potensi pertanian yang ada di Kota Banda Aceh, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan pembinaan/pelatihan bagi aparatur penyuluh pertanian dan petani. Dengan keterbatasan lahan pertanian di Kota banda aceh salah satu cara yang dilakukan agar ketersediaan pangan keluarga terpenuhi adalah mengoptimalkan lahan pekarangan masyarakat untuk dimanfaatkan sebagai lahan budidaya tanaman pangan (jagung, ubi dan lain-lain), Hortikultura (sayur, buah dan lain-lain) dan Biofarmaka (tanaman obat-obatan). Untuk mengukur keberhasilan dibidang pangan, dapat dilihat dari indikator keberhasilan yang dapat dicapai dalam tabel berikut:

Tabel 2. 32
Indikator Kinerja Daerah Bidang Pangan Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	kg	109,5	100,6	116,3	121,31	112,12
2	Persentase Keanekaragaman Pangan	persen	60,38	61,59	81,7	-	0
	a. Sapi	ton	409	507	1021	2,27	324,56
	b. Unggas	ton	886	1166	1572	716,8	1.329,50
	c. Kambing	ton	112	55	59,1	1,3	14,74
4	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton	235	251	0,73	399	883
5	Jumlah Produksi Hasil Perikanan Tangkap	ton	9825	10715	28.498,6	27.203,63	22.665
6	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	ton	52,1	54,81	174,71	-	349,97

Sumber : DP2KP Kota Banda Aceh, 2023

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Kepemilikan KTP

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan identitas resmi bagi warga negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kartu identitas ini dapat dimiliki apabila warga sudah mencapai umur 17 tahun atau sudah menikah. Menurut peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal, 1 point 14 bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Kartu Tanda Penduduk Elektronik

(KTP-el) adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) diproses secara komputerisasi dan dilengkapi cip yang berfungsi untuk menyimpan biodata, sidik jari dan tanda tangan. KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang berumur di bawah 17 tahun tetapi sudah menikah. Dengan memiliki KTP penduduk dapat diakui secara legal keberadaannya dan bermanfaat sebagai alat keamanan sekaligus untuk pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya. Sebagai contoh urusan dengan Bank, mengurus BPJS, passport, untuk mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, Pendidikan, bisnis dan lain sebagainya.

Tabel 2. 33
Rasio Kepemilikan KTP di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah KTP Elektronik yang diterbitkan	157.664	162.919	165.307	168.067	169.083
Jumlah Wajib KTP Elektronik	165.473	163.765	165.415	171.676	174.140
Rasio	95,30	99,48	99,93	97,90	97,10

Sumber Disdukcapil Kota Banda Aceh, 2023

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa Kota Banda Aceh sudah menyelesaikan perekaman KTP-el 169.083 orang dari 174.140 orang wajib KTP yaitu sebesar hingga 97,10 persen pada tahun 2022. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh terus melakukan upaya jemput bola perekaman KTP-el pemula ke sekolah-sekolah dalam wilayah Kota Banda Aceh.

2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Sarana dan prasarana perkantoran desa merupakan pendukung seluruh aktifitas pemerintahan di desa/gampong. Kondisi sarana dan prasarana yang baik akan sangat mempengaruhi layanan yang diberikan oleh aparat gampong bagi masyarakat. Berikut cakupan sarana dan prasarana perkantoran gampong yang baik di gampong-gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh dalam periode 2018-2022.

Tabel 2. 34
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik Kota
Banda Aceh Tahun 2018-2022

No	Kec.	Jml. Gampong	2018		2019		2020		2021		2022	
			Jlh. Kantor Pemrt. Desa yang baik	Cakupan Sarpras Perktr. Pemrt. Desa yang baik	Jlh. Kantor Pemrt. Desa yang baik	Cakupan Sarpras Perktr. Pemrt. Desa yang baik	Jlh. Kantor Pemrt. Desa yang baik	Cakupan Sarpras Perktr. Pemrt. Desa yang baik	Jlh. Kantor Pemrt. Desa yang baik	Cakupan Sarpras Perktr. Pemrt. Desa yang baik	Jlh. Kantor Pemrt. Desa yang baik	Cakupan Sarpras Perktr. Pemrt. Desa yang baik
(1)	(2)	(3)	(6)	$(7=6/3 *100)$	(8)	$(9=8/3*100)$	(10)	$(11=10/3 *100)$	(12)	$(13=12/3 *100)$	(14)	$(15=14/3 *100)$
1	Baiturrahman	10	10	100	10	100	10	100	10	90	10	90
2	Kuta Alam	11	10	90,91	10	90,91	10	90,91	11	100	11	100
3	Meuraxa	16	16	100	16	100	16	100	16	100	16	100
4	Syiah Kuala	10	9	90	9	90	9	90	10	100	10	100
5	Lueng Bata	9	9	100	9	100	9	100	9	100	9	100
6	Kutaraja	6	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100
7	Banda Raya	10	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100
8	Jaya Baru	9	8	88,89	9	100	9	100	9	100	9	100
9	Ulee Kareng	9	9	100	9	100	9	100	9	100	9	100
	Jumlah se-Kota Banda Aceh	90	87	96,67	88	97,78	88	97,78	90	100	90	100

Sumber: DPMG Kota Banda Aceh, 2023

Berdasarkan informasi dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan cakupan sarana dan prasarana di gampong-gampong di Kota Banda Aceh. Pada tahun 2018 masih terdapat 3 gampong yang kondisi sarana dan prasarannya belum baik. Namun, pada tahun 2019 dan 2020 hanya 2 gampong saja yang belum baik kondisi sarana dan prasarannya. Pada tahun 2021 seluruh gampong sudah mempunyai sarana dan prasarana yang baik kondisinya sehingga cakupan sarana dan prasarana perkantoran gampong sudah mencapai 100 persen. Cakupan yang sudah sangat baik ini haruslah diikuti oleh layanan yang juga dapat memuaskan keperluan

masyarakat gampong. Sarana dan prasaran yang dimaksud adalah berupa bangunan fisik perkantoran dan juga sarana seperti mobile, peralatan kantor dan akses internet.

Permasalahan yang dialami sebelumnya antara lain untuk kecamatan Kuta Alam, Gampong Peunayong, kantor geuchiek adalah ruko milik pemko. Kecamatan Syiah Kuala Gampong Kopelma Darussalam, terjadi perselisihan kepemilikan dengan pihak lain dan saat ini digunakan gedung pkk bersama. Pada kecamatan Lueng Bata Kantor Keuchik Gampong Lampaloh pada Tahun 2022 mengalami kebakaran hal ini mengakibatkan seluruh sarana prasarana Kantor Keuchik hangus terbakar, dan untuk saat ini pelayanan untuk masyarakat menggunakan gedung serba guna Gampong. Sedangkan di Kecamatan Baiturahman, Gampong Peuniti Kantor Keuchik berstatus sewa disebabkan tidak tersedia lahan untuk pembangunan kantor Keuchik..

2) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Mukim yang Baik

Mukim merupakan bentuk keistimewaan Aceh yang diterapkan dalam pemerintahan. Kota Banda Aceh secara khusus menuangkan peran mukim dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 tahun 2021 tentang Pemerintahan Mukim. Dalam qanun ini dituangkan bahwa terdapat fungsi mukim diantaranya pengoordinasian penyelenggaraan pemerintah gampong dalam mukim, penyelenggaraan pelaksanaan Syariat Islam, pengoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara inklusif dan berkeadilan gender, penyelesaian sengketa adat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat gampong, dan juga termasuk pengawasan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam dalam mukim. Fungsi ini dapat dilaksanakan dengan apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang baik. Cakupan sarana dan prasarana pada tingkat mukim di Kota Banda Aceh ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel 2. 35
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Mukim yang Baik Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	Jumlah mukim	2018		2019		2020		2021		2022	
			jumlah kantor mukim yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran mukim yang baik	jumlah kantor mukim yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran mukim yang baik	jumlah kantor mukim yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran mukim yang baik	jumlah kantor mukim yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran mukim yang baik	jumlah kantor mukim yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran mukim yang baik
(1)	(2)	(3)	(6)	(7=6/3 *100)	(8)	(9=8/3*100)	(10)	(11=10/3 *100)	(12)	(13=12/3*100)	(14)	(15=14/3*100)
1	Baiturrahman	2	0	0	2	100	2	100	2	100	2	100
2	Kuta Alam	2	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50
3	Meuraxa	2	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50
4	Syiah Kuala	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Lueng Bata	1	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100
6	Kutaraja	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Banda Raya	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Jaya Baru	2	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50
9	Ulee Kareng	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	17	4	23,53	6	35,29	6	35,29	6	35,29	6	35,29

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh Tahun 2023

Cakupan sarana dan prasarana perkantoran mukim pada tahun 2018 adalah 23,53 persen yang berarti baru 4 mukim yang memiliki sarana dan prasarana perkantoran yang baik. Namun, kondisi ini terus diperbaiki sehingga tahun 2022 sudah menjadi 35,29 persen.

3) Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga/ wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah gampong dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Sedangkan kelompok binaan LPM adalah kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah gampong dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, misalnya kelompok pemuda/ karangtaruna, remaja mesjid dan lain-lain. Jumlah Kelompok binaan LPM dalam Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 36
Kelompok Binaan LPM Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	2018			2019			2020			2021			2022		
		Jlh. LPM	Jlh. Klp. Binaan	Rata-rata Jumlah LPM	Jlh. LPM	Jlh. Klp. Binaan	Rata-rata Jumlah LPM	Jlh. LPM	Jlh. Klp. Binaan	Rata-rata Jumlah LPM	Jlh. LPM	Jlh. Klp. Binaan	Rata-rata Jumlah LPM	Jlh. LPM	Jlh. Klp. Binaan	Rata-rata Jumlah LPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=13/12)	15	16	(17=16/15)
1	Baiturrahman	10	21	2,1	10	21	2,1	10	21	2,1	10	21	2,1	10	21	2,1
2	Kuta Alam	11	25	2,27	11	25	2,27	11	25	2,27	11	25	2,27	11	25	2,27
3	Meuraxa	16	30	1,88	16	30	1,88	16	30	1,88	16	30	1,88	16	30	1,88
4	Syiah Kuala	10	22	2,2	10	22	2,2	10	22	2,2	10	22	2,2	10	22	2,2
5	Lueng Bata	9	22	2,44	9	22	2,44	9	22	2,44	9	22	2,44	9	22	2,44
6	Kutaraja	6	14	2,33	6	14	2,33	6	14	2,33	6	14	2,33	6	14	2,33
7	Banda Raya	10	22	2,2	10	22	2,2	10	22	2,2	10	22	2,2	10	22	2,2
8	Jaya Baru	9	20	2,22	9	20	2,22	9	20	2,22	9	20	2,22	9	20	2,22
9	Ulee Kareng	9	20	2,22	9	20	2,22	9	20	2,22	9	20	2,22	9	20	2,22
	Jumlah	90	196	2,18	90	196	2,18	90	196	2,18	90	196	2,18	90	196	2,18

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh Tahun 2023

Data di atas menggambarkan bahwa sejak tahun 2018 sampai saat ini tiap gampong mempunyai 1 LPM dan setiap LPM mempunyai rata-rata 2 kelompok binaan. Hal ini mencerminkan aktifitas dalam gampong tersebut. Apabila dapat ditingkatkan lagi jumlah kelompok binaannya maka akan menunjukkan penambahan aktifitas yang terorganisir dengan baik di setiap gampong.

4) Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 5/2007 Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Tugas Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan basil Rakerda Kabupaten/Kota;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
- h. membuat laporan basil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan

- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kota Banda Aceh melaksanakan pembinaan secara berjenjang dari TP. PKK Kecamatan sampai TP. PKK Gampong. Selanjutnya TP. PKK Gampong membina kelompok PKK Dusun dan Kelompok Dasa Wisma. Kelompok binaan PKK merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Gampong yang terdiri dari Kelompok PKK Dusun, Kelompok Dasa Wisma, Kelompok UP2K dan lain-lain. Jumlah Kelompok PKK Dusun dan Dasawisma adalah sesuai dengan jumlah dusun dan dasawisma yang ada di gampong.

Tabel 2. 37
Kelompok Binaan PKK Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	2018			2019			2020			2021			2022		
		Jlh. PKK	Jlh. Klp. Binaan	Rata-rata Jlh. Klp. Binaan PKK	Jlh. PKK	Jlh. Klp. Binaan	Rata-rata Jlh. Klp. Binaan PKK	Jlh. PKK	Jlh. Klp. Binaan	Rata-rata Jlh. Klp. Binaan PKK	Jlh. PKK	Jlh. Klp. Binaan	Rata-rata Jlh. Klp. Binaan PKK	Jlh. PKK	Jlh. Klp. Binaan	Rata-rata Jlh. Klp. Binaan PKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=13/12)	15	16	(17=16/15)
1	Baiturrahman	11	470	42,73	11	424	38,55	11	412	37,45	11	412	37,45	11	403	36,64
2	Kuta Alam	12	460	38,33	12	431	35,92	12	341	28,42	12	341	28,42	12	440	36,67
3	Meuraxa	17	266	15,65	17	312	18,35	17	361	21,24	17	361	21,24	17	431	25,35
4	Syiah Kuala	11	428	38,91	11	407	37	11	321	29,18	11	321	29,18	11	382	34,73
5	Lueng Bata	10	269	26,9	10	310	31	10	405	40,5	10	405	40,5	10	351	35,10
6	Kutaraja	7	153	21,86	7	166	23,71	7	324	46,29	7	324	46,29	7	241	34,43
7	Banda Raya	11	270	24,55	11	336	30,55	11	239	21,73	11	239	21,73	11	441	40,09
8	Jaya Baru	10	318	31,8	10	310	31	10	309	30,9	10	309	30,9	10	335	33,50
9	Ulee Kareng	10	328	32,8	10	347	34,7	10	350	35	10	350	35	10	293	29,30
	Jumlah	99	2,962	29,92	99	3,043	30,74	99	3,062	30,93	99	3,062	30,93	99	3.317	33,51

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh Tahun 2023

TP PKK Kota Banda Aceh terdiri dari 90 TP PKK gampong, 9 TP PKK kecamatan sehingga jumlah TP PKK adalah 99 yang dibina oleh TP PKK kota. Kelompok binaan TP sehingga berjumlah 100 untuk kota. TP PKK membina Dasawisma, UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga), Posyandu balita & lansia), Posbindu, Jumantik (Juru Mantau Jentik). Sesuai tabel di atas dapat dilihat pada Tahun 2022 terdapat 3.317 kelompok binaan yang ada di seluruh Kota Banda Aceh. Jumlah kelompok binaan ini dapat berubah karena karena ada peleburan di tingkat desa tergantung kondisi desa.

5) Persentase PKK aktif

Berdasarkan pembinaan, jumlah PKK aktif meningkat setiap tahun, karena dukungan dari pemerintah gampong melalui Dana ADG dan Dana Desa. Jumlah PKK Aktif dari tahun 2018 s/d 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 38
PKK Aktif Tahun 2018-2022 Kota Banda Aceh

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah TP. PKK	100	100	100	100	100
2	Jumlah TP. PKK tidak aktif	-	-	-	-	-
3	Jumlah TP. PKK aktif (1-2)	100	100	100	100	100
4	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh Tahun 2023

Keaktifan TP PKK menunjukkan bahwa tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada TP PKK telah dilaksanakan dengan baik terutama dalam membantu mewujudkan keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan

6) Persentase Posyandu aktif

Posyandu merupakan bentuk kegiatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan pada tingkat gampong dan kegiatan ini diawasi oleh petugas kesehatan di gampong tersebut. Keaktifan kegiatan Posyandu dapat menjadi indikator kualitas kesehatan pada tingkat gampong. Berikut adalah gambaran jumlah Posyandu aktif yang ada di Kota Banda Aceh.

Tabel 2. 39
Jumlah Posyandu dalam Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	Jumlah Posyandu Aktif				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Baiturrahman	18	19	19	19	19
2	Kuta Alam	15	15	15	15	15
3	Meuraxa	18	18	18	18	18
4	Syiah Kuala	12	12	12	12	12
5	Lueng Bata	9	9	9	9	9
6	Kutaraja	6	6	6	6	6
7	Banda Raya	10	10	10	10	10
8	Jaya Baru	16	16	16	16	16
9	Ulee Kareng	9	9	9	9	9
	Jumlah se-Kota Banda Aceh	113	114	114	114	114

Sumber: DPMG Kota Banda Aceh, 2023

Pada tahun 2018 jumlah Posyandu aktif adalah 113 unit dan setelah itu menjadi 114 unit mulai 2019 sampai 2022. Pada tahun 2019 terjadi penambahan posyandu aktif di kecamatan Baiturrahman. Keaktifan posyandu diklasifikasikan berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh posyandu tersebut. Posyandu Pratama adalah posyandu yang masih belum memiliki kegiatan rutin, Posyandu Madya adalah posyandu yang memiliki kegiatan rutin lebih dari 8 kali per tahun dengan minimal 5

orang kader tetapi cakupan kegiatan utama masih di bawah 50%. Selanjutnya, Posyandu Purnama merupakan posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan kegiatan pengembangan, serta telah memperoleh dana sehat yang berasal dari swadaya masyarakat dipergunakan untuk upaya kesehatan di Posyandu. Peringkat tertinggi yang ingin dicapai adalah Posyandu Mandiri, yaitu Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan kegiatan pengembangan, serta telah memperoleh dana sehat yang berasal dari swadaya masyarakat dan kelompok usaha bersama (usaha dikelola oleh masyarakat) yang dipergunakan untuk upaya kesehatan di Posyandu.

Posyandu dalam Kota Banda Aceh memiliki strata yang berbeda-beda, tergantung pada pencapaian indikator tingkat perkembangan posyandu. Strata Posyandu dalam Kota Banda Aceh selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 40
Strata Posyandu Tahun 2018 – 2022 di Kota Banda Aceh

No	Strata Posyandu	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pratama	3	4	0	1	1
2	Madya	89	89	90	88	88
3	Purnama	22	22	24	25	25
4	Mandiri	0	0	0	0	0
	Jumlah	114	115	114	114	114

Sumber: DPMG Kota Banda Aceh, 2023

Pada awal periode yaitu tahun 2018 Kota Banda Aceh mempunyai 3 Posyandu Pratama, 89 Posyandu Madya, dan 22 Posyandu Purnama, sedangkan pada akhir periode yaitu tahun 2022 jumlah posyandu dengan peringkat Pratama hanya tinggal 1 posyandu dan Posyandu Madya dan Posyandu Purnama telah bertambah menjadi 88 dan 25 posyandu.

7) Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung)

Fasilitasi pemilihan kepala desa di Kota Banda Aceh dilaksanakan melalui kegiatan Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung). Selama tahun 2018 s/d 2022 data kegiatan Pilchiksung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 41
Data Partisipasi Masyarakat dalam Pilchiksung di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Desa Pelaksana Pilchiksung	Gampong	16	22	0	24	0
2	Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Orang	29,620	24,999	0	40.651	0
3	Jumlah Pemilih	Orang	18,067	17,058	0	25.513	0
4	Partisipasi Masyarakat	%	61	68,23	0	62,76	0

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh, 2023

Pada tahun 2020 dan 2022 tidak ada pemilihan Geuchiek secara langsung (pilchiksung) karena tahun ini adalah masa transisi untuk pemilihan serentak. Jadwal pemilihan Geuchiek untuk Kota Banda Aceh adalah tahun 2021, 2023, dan 2025. Dimasa penyesuaian pemilihan geuchiek maka ditunjuk pejabat sementara sebagai pelaksana tugas Geuchiek.

8) Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kota

Pemerintah Kota Banda Aceh telah memiliki gedung pemerintahan yang unik dan megah. Kemegahan tersebut diiringi dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang bersih dan berwibawa serta pelayanan yang optimal bagi warga kota. Sampai tahun 2018, sesuai dengan SOTK Baru Pemerintah Kota Banda Aceh telah memiliki 44 satuan kerja (termasuk 9 kecamatan).

Secara administratif Kota Banda Aceh terdiri atas 9 kecamatan, 90 gampong, dan 17 mukim, dari 90 gampong di Kota Banda Aceh, 16 gampong atau sekitar 17,78 persen terdapat di Kecamatan Meuraxa. Selanjutnya disusul Kecamatan Kuta Alam sebanyak 11 gampong (12,22 persen). Kemudian, tiga kecamatan masing-masing memiliki 10 gampong, meliputi Banda Raya, Baiturrahman, dan Syiah Kuala. Tiga

kecamatan lainnya, seperti Jaya Baru, Lueng Bata, dan Ulee Kareng, masing-masing memiliki 9 gampong. Adapun Kuta Raja hanya memiliki 6 gampong (6,67 persen).

Sebagaimana halnya kabupaten/ kota lainnya di Aceh, di Kota Banda Aceh terdapat pula mukim yang fungsinya dinilai penting dalam mendorong perkembangan aktivitas sosial-kemasyarakatan di gampong dan kecamatan. Dari 17 mukim yang ada di Banda Aceh, 3 mukim terdapat di Kecamatan Syiah Kuala. Di Kecamatan Lueng Bata dan Kuta Raja masing-masing memiliki 1 mukim dan kecamatan lainnya memiliki masing-masing 2 mukim. Secara lebih rinci, jumlah gampong dan mukim menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 42
Data Mukim Dalam Kota Banda Aceh

No	Kecamatan		Nama Mukim	Jumlah Gampong
1	2		3	4
1	Baiturrahman	1	Baiturrahman	5
		2	Putro Phang	5
2	Kuta Alam	3	Kuta Alam	5
		4	Lam Kuta	6
3	Meuraxa	5	Meuraxa	8
		6	Tgk. Chik Lamjabat	8
4	Syiah Kuala	7	Tgk. Syeh Abdurrauf	4
		8	Tgk.Chik di Lamnyong	2
		9	Kayee Adang	4
5	Lueng Bata	10	Lueng Bata	9
6	Kutaraja	11	Tgk. Dianjong	6
7	Banda Raya	12	Banda Jaya	4
		13	Lam Ara	6
8	Jaya Baru	14	Pos Blang	5
		15	Lambaro Banda	4
9	Ulee Kareng	16	Simpang Tujoh	4
		17	Poeteumeureuhom	5

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh Tahun 2022

9) Presentase Capaian Pengelolaan Keuangan Gampong yang baik

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada poin (b) lebih dikenal dengan nama Dana Desa (DD), sedangkan alokasi Dana Desa pada poin (d) untuk Provinsi Aceh dikenal dengan nama Alokasi Dana Gampong (ADG). ADG paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Sementara itu, untuk Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota poin (c) paling sedikit 10 persen dari pajak dan retribusi daerah. Besaran dana pembangunan untuk gampong periode tahun 2017 s/d tahun 2022 untuk Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 43
Fasilitasi Dana Pembangunan Untuk Gampong di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Alokasi Dana Gampong (ADG)	57.736.964.520	58.357.906.650	48.862.057.710	57.111.381.200	57.481.003.700
2	Dana Desa (DD)	64.464.666.000	74.192.333.000	75.977.398.000	77.702.442.000	70.100.703.000
3	Dana Bagi Hasil Pajak Daerah	6.336.885.233	6.993.885.233	6.064.790.652	5.142.160.652	2.565.987.274

4	Dana Bagi Hasil Restribusi Daerah	2.639.828.700	3.031.474.257	2.565.987.274	2.565.987.274	5.142.160.652
	Jumlah	131.178.344.453	142.575.599.140	133,470.233.636	142.521.971.126	135.289.854.626

Sumber: DPMG Kota Banda Aceh, 2023

Transfer bantuan keuangan baik dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Desa maupun Transfer dari Pemerintah Kota yang bersumber dari Alokasi Dana Gampong (ADG), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari Tahun 2018 hingga 2022 mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuatif, dimana pada Tahun 2018 merupakan transfer dana terendah dan pada tahun 2019 dengan transfer tertinggi.

Walaupun alokasi dana untuk gampong mengalami penurunan akibat pandemic, kemampuan gampong dalam mengelola dana gampong telah menjadi lebih baik dari tahun ke tahun sebagaimana tergambar pada tabel capaian pengelolaan keuangan gampong berikut ini.

Tabel 2. 44
Capaian Pengelolaan Keuangan Gampong yang Baik Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Capaian Pengelolaan Keuangan Gampong yang baik	30%	40%	47%	64,44%	66,67%

Sumber: DPMG Kota Banda Aceh, 2022

Pada awal periode capaian pengelolaan keuangan gampong relatif masih rendah. Kemampuan aparat gampong dalam mengelola dana gampong mengalami beberapa kendala dan belum mampu memenuhi kriteria cakupan yang baik yaitu Perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Kendala yang dialami antara lain dari segi perencanaan sering terlambat akibat ketidakharmonisan dengan tuha peut gampong; penatausahaan, kelengkapan berkas/dokumen pencairan; pelaksanaan, perubahan harga barang, menyebabkan perubahan proses pengadaan. Akibatnya mempengaruhi proses pertanggungjawaban. Pergantian Keuchik dapat menyebabkan kapasitas aparat yang juga berbeda dan bermasalah dengan proses

perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Untuk itu perlu upaya peningkatan kapasitas aparatur gampong di bidang pengelolaan keuangan gampong perlu dilaksanakan secara berkesinambungan. Upaya berkesinambungan ini kemudian berdampak kepada membaiknya capaian pengelolaan keuangan gampong yang hanya 25 persen di awal periode menjadi 66,67 persen pada tahun 2022.

Tabel 2. 45
Realisasi Penyaluran BLT Tahun 2020-2022

No.	Uraian	2020	2021	2022
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
1	Realisasi Penyaluran BLT (Rp)	26.637.300.000	26.258.400.000	29.865.600.000

Sumber: DPMG Kota Banda Aceh, 2023

Alokasi untuk peruntukan Bantuan Langsung Tunai (BLT) besarnya disesuaikan dengan persentase tranfer Dana Desa dari Pemerintah Pusat yang berpedoman pada arahan dari peraturan pemerintah/Menteri.

Pemerintah Gampong melalui transfer bantuan Pemerintah Pusat melakukan kegiatan penyaluran Paket Bantuan Kepada anak kurang mampu dalam rangka mengurangi dampak kemiskinan di Gampong yaitu berupa bantuan paket keperluan sekolah dengan realisasi bantuan seperti tabel di bawah :

Tabel 2. 46
Realisasi Penyaluran Paket Bantuan Anak Kurang Mampu Tahun 2020-2022

No.	Uraian	2020	2021	2022
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
1	Realisasi Penyaluran Paket Bantuan Rutin (Rp)	640.980.500	810.673.260	504.212.000

Sumber: DPMG Kota Banda Aceh, 2023

Tabel 2. 47
Realisasi Bantuan Tanggap Darurat Tahun 2020-2022

No.	Uraian	2020	2021	2022
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)

1	Realisasi Bantuan Tanggap Darurat (Rp)	4.109.682.411	4.773.291.483	999.240.391
---	--	---------------	---------------	-------------

Sumber: DPMG Kota Banda Aceh, 2023

Bantuan Tanggap Darurat ini disamping dana untuk mencegah dan bantuan terhadap bencana alam seperti kebakaran, banjir dan angin ribut juga termasuk bantuan dalam penanganan Covid-19.

10) Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dilaksanakan melalui fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dengan pemberian dana revolving. Pemerintah Kota Banda Aceh bekerja sama dengan BPRS Baiturrahman sejak tahun 2009 telah melaksanakan program PUEM dengan tingkat suku bunga 6% per tahun. Pada Tahun 2013 Program PUEM ini dihentikan dan digantikan dengan PUEM Al Qardul Hasan (pinjaman tanpa bunga) sejak tahun 2015. Untuk lebih jelasnya Jumlah Penyaluran Dana Bergulir dan jumlah penerima permodalan melalui program PUEM dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 48
Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil Melalui Program PUEM di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Penyaluran Dana Bergulir (Rp)	839.000.000	227.000.000	187.000.000	N/A	170.000.000
2	Jumlah Penerima (orang)	206	48	40	N/A	26

Sumber: Diskoperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, 2023

Pada tahun 2017-2018 permohonan masyarakat diajukan ke DPMG kemudian DPMG mendisposisikan ke BPRS Baiturrahman dan dilakukan studi kelayakan peminjaman, setelah verifikasi maka penerima disahkan dalam Surat Keputusan dari DPMG. Namun, Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Banda Aceh

mengalihkan dana Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) Al-Qardhul Hasan dari PT. BPRS Baiturrahman menjadi Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) Kota Banda Aceh dan disalurkan oleh PT. Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah milik Pemerintah Kota Banda Aceh bertujuan untuk mewujudkan sistim penyaluran dana PUEM lebih efektif dan efisien serta bermanfaat bagi masyarakat. Penempatan Dana Awal Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) Kota Banda Aceh sebesar Rp. 2.436.000.000,- (Dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang ditempatkan pada rekening angsuran pokok nomor : 121.01.00587 an. Pemerintah Kota Banda Aceh pada PT. LKMS Mahirah Muamalah dan rekening jasa bagi hasil nomor : 121.01.00590 untuk penyetoran jasa mengendap serta jasa bagi hasil dari debitur PUEM.

Adapun Jumlah permohonan yang diterima dari masyarakat pada DPMG Kota Banda Aceh sejak bulan Agustus 2019 s.d Desember 2022 jumlahnya sebanyak 149 debitur. Permohonan para debitur tersebut diproses dalam tahap 01 s.d 42, tahap pencairan tersebut terbagi dalam wilayah domisili pada 90 Gampong 9 Kecamatan dalam Kota Banda Aceh. Dana yang disalurkan dari tahun 2019 s.d 2022 sebesar Rp. 787.000.000,-

Penyaluran Dana Revolving Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) Kota Banda Aceh diperuntukan kepada pedagang, sektor perikanan, industri kecil, jasa dan usaha rumah tangga khususnya masyarakat kurang mampu dan memiliki usaha. Jumlah plafon pembiayaan awal yang dapat diberikan adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah,-) s.d Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah,-) per anggota kelompok atau perorangan dan jumlah plafon pembiayaan tahap selanjutnya dapat diberikan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah,-) s.d Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah,-) per anggota kelompok atau per orangan adapun masyarakat mengajukan permohonan bantuan modal usaha kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kota Banda Aceh, dengan mengisi fomulir yang telah disediakan oleh DPMG dengan melampirkan foto copy KTP, Kartu Keluarga (KK) dan foto copy surat jaminan/borok serta jasa pembiayaan kepada debitur ditetapkan setara 6% per tahun dengan pembagian 3% sebagai modal PUEM yang disetor ke rekening jasa bagi hasil dan 3% untuk

pendapatan pihak penyalur. Jangka waktu pembiayaan adalah 40 (empat puluh) minggu dengan akad pembiayaan dalam bentuk murabahah/ mudharabah.

Adapun permohonan tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Keuchik Gampong bersangkutan guna menghindari terjadinya tumpang tindih dengan dana PUEM-G dan dana lain yang telah disalurkan di masing–masing gampong. Permohonan tersebut diteliti dan diseleksi keabsahan dokumennya kemudian petugas LKMS Mahirah Muamalah meninjau langsung ke lokasi di gampong dan menganalisa kelayakan usahanya. Petugas LKMS Mahirah Muamalah mengadakan pertemuan dengan calon debitur di gampong sebanyak tiga kali pertemuan serta meninjau kelayakan usaha dan mengambil keputusan nama-nama yang layak menjadi debitur dan jumlah dana yang harus diberikan untuk penambahan modal usahanya.

Nama-nama debitur tersebut disampaikan kepada DPMG, kemudian DPMG membuat Surat Keputusan plafon dana yang ditandatangani oleh Walikota Banda Aceh untuk dicairkan kepada para debitur PUEM Kota Banda Aceh. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Penetapan Plafon dan Debitur Penerima Dana Bergulir Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, nama-nama debitur dan jumlah dana yang layak diberikan, SK tersebut dikirim kepada LKMS Mahirah Muamalah untuk proses pencairan dana. Petugas LKMS Mahirah Muamalah kemudian mencairkan dana sesuai dengan dana yang tercantum dalam Surat Keputusan Walikota Banda Aceh.

11) Presentase Capaian Pengelolaan Aset Gampong yang Baik

Definisi aset desa yang diuraikan dalam Undang-undang no 6 tahun 2014 dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Oleh karena itu kemampuan aparat gampong dalam

mengelola aset desa menjadi indikator penting dalam pembangunan di gampong. Capaian Pengelolaan Aset Gampong yang baik di Kota Banda Aceh periode 2018 - 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 159
Capaian Pengelolaan Aset Gampong yang baik Tahun 2018-2022 (dalam persen)

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Capaian Pengelolaan Aset Gampong yang baik	27	37	40	44,44	46,67

Sumber: DPMG Kota Banda Aceh, 2023

Capaian yang diraih pada awal periode belum begitu menggembirakan. Kapasitas aparat gampong dalam mengelola aset ini masih perlu untuk ditingkatkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kemampuan dalam inventarisir barang, laporan aset sangat kurang dilakukan oleh desa. Kemampuan ini terus diupayakan oleh DPMG sebagai OPD yang membantu gampong melalui program pelatihan pelaporan aset. Upaya ini kemudian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan aparat gampong yang terlihat dari meningkatnya capaian pengelolaan aset gampong diakhir periode yaitu tahun 2022 yang mencapai 46,67 persen. Namun, tentu belum dapat berpuas diri dengan capaian ini. Perlu upaya peningkatan kapasitas aparatur gampong di bidang pengelolaan aset gampong perlu dilaksanakan secara berkesinambungan.

12) Presentase Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/ Gampong yang baik

Administrasi Pemerintahan Mukim/Gampong merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan mukim/gampong. Penyusunan perencanaan gampong, pengelolaan keuangan dan aset gampong, penyusunan profil gampong, pembuatan produk hukum gampong dan pelaksanaan administrasi pemerintahan mukim/gampong akan dapat berjalan baik bila gampong memiliki SDM yang baik. Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/ Gampong yang baik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 50
Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/Gampong yang baik Tahun 2018-2022 (dalam persen)

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/Gampong yang baik	30	38	45	59,81	60,75

Sumber: DPMG Kota Banda Aceh, 2023

2.7. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) Persentase Koperasi Aktif

Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta, menyatakan bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia. Peran ini diberikan karena koperasi merupakan bentuk usaha yang mencerminkan sikap khas bangsa Indonesia yang saling tolong menolong dan selalu begotong royong. Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan untuk memfasilitasi masyarakat dalam menggiatkan koperasi. Kota Banda Aceh turut mendorong tumbuhnya dan aktifnya koperasi dalam pemberdayaan ekonomi anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Perkembangan jumlah koperasi selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 502 jumlah tahun 2018 menjadi 514 koperasi pada tahun 2022 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 51
Persentase Koperasi Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Koperasi Aktif	364	384	386	395	395
2	Jumlah Koperasi	502	506	507	513	514
3	Persentase Koperasi Aktif	72,51	75,88	76,13	76,69	76,84

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh 2023

Persentase koperasi aktif di kota Banda Aceh mengalami peningkatan tiap tahunnya dengan rata-rata persentase koperasi aktif per tahun 75,69 persen dari total koperasi yang dibentuk. Peningkatan jumlah koperasi aktif dari awal periode yaitu tahun 2018 adalah 72,51 persen bertambah menjadi 76,84 persen pada akhir periode tahun 2022.

2) Jumlah UMKM dan BPR/ LKM

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai sebuah lembaga keuangan telah mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi kota Banda Aceh bagi para pelaku ekonomi lemah, dimana pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada masyarakat tanpa peraturan yang ketat, yang menjadi permasalahan sekarang permodalan lembaga keuangan mikro sangat terbatas sementara masih banyak UMKM yang membutuhkan modal dari LKM. Dinas teknis dalam menyikapi hal tersebut menginisiasi melakukan penyaluran bantuan modal kerja berupa dana revolving Paopia Peduli dari salah satu pelaku usaha yang memiliki kelebihan dana dengan memberikan pinjaman tanpa bunga dan tanpa tanggungan kepada pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan dana tapi tidak memiliki tanggungan. Adanya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan dengan pola penjaminan dengan suku bunga pinjaman yang relatif rendah belum maksimal dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang disebabkan oleh persyaratan atau informasi yang tidak tersampaikan sehingga tahun 2022 masih ada sisa dana yang belum tersalurkan. Perkembangan jumlah BPR/ LKM dari Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 52
Jumlah UMKM dan BPR/LKM di Kota Banda Aceh Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah seluruh UMKM	10.944	12.012	15.107	16.970	17.308
2	Jumlah BPR/LKM	4	4	4	4	4

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh 2023

2.8. Pertanian

1) Produktivitas Padi Per Hektar

Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh merupakan kota yang berkembang pesat dan menjadi tujuan urbanisasi. Oleh sebab itu kegiatan ekonomi utama yang dimiliki adalah perdagangan dan jasa, sedangkan lahan pertanian semakin

lama semakin berkurang seiring dengan meluasnya area perkotaan. Kondisi ini telah mempengaruhi sektor pertanian di Kota Banda Aceh terutama pada tanaman padi. Luas tanam, luas panen, produksi dan produktifitas padi di Kota Banda Aceh tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 53
Luas Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas Padi di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas Tanam (Ha)	80,8	63,5	86,6	31,7	46,8
2	Luas Panen (Ha)	68,3	63,5	16	13,19	13
3	Produksi (Ton)	370,8	358,6	87	70,32	70
4	Produktivitas (Kw)	54,29	56,47	54,38	53,31	5,3

Sumber: DP2KP Kota Banda Aceh, 2023

Tabel di atas memperlihatkan telah terjadi pengurangan luas lahan tanam padi yang signifikan yang mempengaruhi turunnya jumlah produksi padi.

2) Cakupan Bina Kelompok Petani

Perkembangan kelompok binaan pertanian/peternakan dari tahun 2018 sampai 2022 terjadi fluktuasi karena pembinaan terhadap kelompok pertanian/ peternakan dipengaruhi oleh permintaan masyarakat pada tingkat Musrenbang dan juga ketersediaan lahan pertanian/ peternakan semakin berkurang serta ketersediaan dana terbatas. Permasalahan dalam pembinaan kelompok pertanian/peternakan yaitu kurangnya sarana dan prasarana.

Tabel 2. 54
Cakupan Bina Kelompok Pertanian Tahun 2018-2022

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	RUMUS	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	6	7	8	9	10	
Cakupan Bina Kelompok	Jumlah Kelompok petani yang mendapatkan Bantuan pemda tahun n _____ x 100%	Data yang tersedia hanya jumlah kelompok tani yang terealisasi bantuan PEMKO, tidak terdata jumlah totalan			18,75	5,4	3,24

Pertanian/ Peternakan	Jlh. Kelompok tani	kelompok Tani yang ada			
--------------------------	--------------------	---------------------------	--	--	--

Sumber: DP2KP Kota Banda Aceh, 2023

Energi dan Sumber Daya Mineral

Energi listrik di Kota Banda Aceh disediakan oleh PLN melalui pembangkit listrik yang terkoneksi ke system transmisi dan pembangkit listrik yang tidak terkoneksi ke sistem transmisi. Pembangkit listrik yang terkoneksi merupakan sambungan koneksi jaringan listrik dari Sumatera Utara. Seluruh kecamatan (9 kecamatan) dan 90 gampong di wilayah Kota Banda Aceh sudah dialiri oleh listrik. Secara lebih rinci kelistrikan Kota Banda Aceh sejak tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 55
Data Kelistrikan Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Produksi (kWh)	736.556.209	39.534.227	42.825.326	39.020.453	39.216.695
2	Penjualan (X Rp 1.000)	791.522.061	858.033.592	730.241	881526553	990565397
3	Gardu Hubung (Unit)	12	14	13	13	13
4	Trafo Distribusi (Buah)	2.712	2712	2.828	2.883	2.883
5	Panjang JTM (kms)	4.218,47	4.218,47	1.717,14	1.757	1.813
6	Panjang JTR (kms)	5.579,05	5.579,05	2.745,45	2.757	2.758
7	Pembangkit Non PLN (kVA)	-	-	-	-	-
8	Pelanggan (Orang)	232.622	246.451	259.149	269.958	281.351
9	Daya Tersambung (VA)	419.265.196	453.517.296	485.823,57	516.552	556.550
10	Terima (kWh Salur) (kWh)	736.556.209	792.105.366	791.834.788	819.603.379	878.405.005
11	Penjualan (kWh)	664.974.359	725.790.292	730.241.630	758.566.098	816.649.731
12	Daya Trafo Distribusi (kVA)	260.368	260.368	261.757	274.580	274.580
13	Jumlah Kecamatan Terlistriki	9	9	9	9	9
14	Jumlah Desa Terlistriki	90	90	90	90	90
15	Jumlah Desa Seluruhnya	90	90	90	90	90
16	Rata-rata tarif per Kwh	1.190	1.201	1.135	1.163	1.213

Sumber : BPS Kota Banda Aceh, 2023

2.9 Kelautan dan Perikanan

1) Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Pembinaan terhadap kelompok nelayan terus dilaksanakan secara berkelanjutan mengingat Kota Banda Aceh adalah kota yang dikelilingi lautan dan ramai masyarakat yang bekerja di sektor ini. Berikut cakupan binaan kelompok nelayan di Kota Banda Aceh periode tahun 2018-2022.

Tabel 2. 56
Cakupan Binaan Kelompok Nelayan Tahun 2018-2022

Bidang Urusan/ Indikator	Rumus	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	4	5	6	7	8
Cakupan Bina Kelompok Nelayan	$\frac{\text{Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan Bantuan pemda tahun n}}{\text{Jumlah Kelompok Nelayan}} \times 100\%$	61	133	107	115	10

Sumber :DP2KP Kota Banda Aceh Tahun 2023

2) Produksi Perikanan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya

Kota Banda Aceh merupakan Sentra terbesar pendaratan ikan yang terdapat di Provinsi Aceh. Hampir seluruh armada dengan berbagai jenis komoditi perikanan didaratkan, produksi perikanan dari tahun ketahun telah terjadi peningkatan, hal ini sangat didukung oleh armada dan teknik penangkapan ikan yang diterapkan oleh nelayan di Kota Banda Aceh, selain itu dukungan dari pemerintah pusat dan daerah dalam memberantas *Illegal Fishing* telah berdampak positif bagi usaha perikanan tangkap, meningkatnya ketersediaan sumber daya ikan di perairan laut Aceh. Penerapan teknologi usaha penangkapan ikan telah berhasil meningkatkan produksi perikanan di Kota Banda Aceh sehingga membantu nelayan dalam meningkatnya taraf hidup mereka.

Tabel 2. 57
Produksi Ikan Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022

Uraian		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Realisasi	235	251	340,3	399	431,522
	Target	228	233	243	243	248
Jumlah Produksi Hasil Perikanan Tangkap	Realisasi	9.825	10.715	27.203,63	582	11.233,39
	Target	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	Realisasi	52,1	54,81	174,71	NA	171,554
	Target	50,7	51,7	53,73	NA	54,74

Sumber :DP2KP Kota Banda Aceh Tahun 2023

2.10 Pariwisata

Untuk mengukur tingkat keberhasilan di bidang pariwisata telah ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu jumlah kunjungan wisata dan Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD Kota Banda Aceh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 58
Indikator Kinerja Daerah Bidang Pariwisata Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Wisatawan	393,400	503,992	143.801	251.836	328.169
2	Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD Kota Banda Aceh	%	12.80	15.70	5,5	5,4	32,60

Sumber :Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, Tahun 2023

2.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Keluarga merupakan unit terkecil dalam bernegara, tetapi merupakan unit yang utama dalam penentuan kesejahteraan. Perhatian terhadap perlindungan anak dan perempuan dalam rumah tangga telah menjadi sorotan utama dan menjadi faktor

penting dalam aspek kesejahteraan. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan capaian indikator Kota Layak Anak (KLA) tahun 2018-2022 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.59
Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tahun 2018=2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Perempuan	0,12	0,10	0,05	0,07	0,07
Anak	0,09	0,10	0,04	0,05	0,06

Sumber: DP3AP2KB Kota Banda Aceh, 2023

Tabel 2. 60
Indikator Kota Layak Anak (KLA) yang dicapai tahun 2018-2021

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022
1	3	4	5	6	7
Indikator KLA yang dicapai	645	664	664	693	788

Sumber: DP3AP2KB Kota Banda Aceh, 2023

BAB III

PROFIL KEMISKINAN DAERAH

3.1. Konsep Kemiskinan

3.1.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 1995). Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004).

Pengertian kemiskinan yang saat ini populer dijadikan studi pembangunan adalah kemiskinan yang seringkali dijumpai di negara-negara berkembang dan 22 negara-negara dunia ketiga. Persoalan kemiskinan masyarakat di negara-negara ini tidak hanya sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi telah meluas pada bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun politik (Suryawati, 2004). Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (inter region income gap) (Harahap, 2006). Studi pembangunan saat ini tidak hanya memfokuskan kajiannya pada faktor-faktor yang

menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga mulai mengindintifikasikan segala aspek yang dapat menjadikan miskin.

3.1.2 Definisi Kemiskinan Secara Umum

Definisi mengenai kemiskinan dibentuk berdasarkan identifikasi dan pengukuran terhadap sekelompok masyarakat/golongan yang selanjutnya disebut miskin (Nugroho, 1995). Pada umumnya, setiap negara termasuk Indonesia memiliki sendiri definisi seseorang atau suatu masyarakat dikategorikan miskin. Hal ini dikarenakan kondisi yang disebut miskin bersifat relatif untuk setiap negara misalnya kondisi perekonomian, standar kesejahteraan, dan kondisi sosial. Setiap definisi ditentukan menurut kriteria atau ukuran-ukuran berdasarkan kondisi tertentu, yaitu pendapatan rata-rata, daya beli atau kemampuan konsumsi rata-rata, status kependidikan, dan kondisi kesehatan.

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk 23 menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2004: 122). Kemampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup pada umumnya. Berdasarkan pengertian ini, maka kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementrian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar.

Definisi kemiskinan kemudian dikaji kembali dan diperluas berdasarkan permasalahan-permasalahan kemiskinan dan faktor-faktor yang selanjutnya menyebabkan menjadi miskin. Definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers adalah definisi yang saat ini mendapatkan perhatian dalam setiap 24 program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang dan dunia ketiga. Pandangan yang dikemukakan dalam definisi kemiskinan dari Chambers menerangkan bahwa kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (integrated concept) yang memiliki lima dimensi, yaitu:

1) Kemiskinan (Proper)

Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhankebutuhan pokok. Konsep atau pandangan ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pula pada kelompok yang telah memiliki pendapatan.

2) Ketidakberdayaan (Powerless)

Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (social power) dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3) Kerentanan menghadapi situasi darurat (State of emergency)

Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di mana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, situasi rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang relatif mahal, dan situasi-situasi darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat 25 mencukupinya. Kondisi dalam kemiskinan dianggap tidak mampu untuk menghadapi situasi ini.

4) Ketergantungan (dependency)

Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau

penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan baru. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber pendapatan.

5) Keterasingan (Isolation)

Dimensi keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan atau kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan.

3.1.3 Skema Terbentuknya Perangkat Kemiskinan

Skema terbentuknya kemiskinan yang didasarkan pada konsep yang dikemukakan oleh Chambers menerangkan bagaimana kondisi yang disebut miskin di sebagian besar negara-negara berkembang dan dunia ketiga adalah kondisi yang disebut memiskinkan. Kondisi yang sebagian besar ditemukan bahwa kemiskinan selalu diukur/diketahui berdasarkan rendahnya kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok berupa pangan, kesehatan, perumahan atau pemukiman, dan pendidikan. Rendahnya kemampuan pendapatan diartikan pula sebagai rendahnya daya beli atau kemampuan untuk mengkonsumsi.

Kemampuan pendapatan yang relatif terbatas atau rendah menyebabkan daya beli seseorang atau sekelompok orang terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok menjadi rendah (Nugroho, 1995: 17). Konsumsi ini terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan gizi dan kesehatan standar. Akibatnya, kemampuan untuk mencapai standar kesejahteraan menjadi rendah seperti:

- 1) Ketersediaan pangan tidak sesuai atau tidak mencukupi standar gizi yang disyaratkan sehingga beresiko mengalami mal gizi atau kondisi gizi rendah yang selanjutnya sangat rentan terhadap resiko penyaki menular.

- 2) Kesehatan relatif kurang terjamin sehingga rentan terhadap serangan penyakit dan kemampuan untuk menutupi penyakit juga relatif terbatas sehingga sangat rentan terhadap resiko kematian
- 3) Perumahan atau pemukiman yang kurang/tidak layak huni sebagai akibat keterbatasan pendapatan untuk memiliki/mendapatkan lahan untuk tempat tinggal atau mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kondisi ini akan berdampak mengganggu kesehatan.
- 4) Taraf pendidikan yang rendah. Kondisi ini disebabkan karena keterbatasan pendapatan untuk mendapatkan pendidikan yang diinginkan atau sesuai dengan standar pendidikan.

Kondisi-kondisi akibat keterbatasan atau rendahnya pendapatan di atas menyebabkan terbentuknya status kesehatan masyarakat yang dikatakan rendah (morbiditas) atau berada dalam kondisi gizi rendah. Kondisi seperti ini sangat rentan terhadap serangan penyakit dan kekurangan gizi yang selanjutnya disertai tingginya tingkat kematian (mortalitas).

Angka mortalitas yang tinggi dan keadaan kesehatan masyarakat yang rendah akan berdampak pada partisipasi sosial yang rendah, ketidakhadiran yang semakin tinggi, kecerdasan yang rendah, dan ketrampilan yang relatif rendah. Berikut ini adalah penjelasan mengenai masing-masing keadaan yang disebabkan oleh adanya mortalitas maupun morbiditas yang tinggi.

1) Tingkat Partisipasi Sosial Yang Rendah

Kondisi kesehatan maupun gizi yang rendah menyebabkan ketahanan fisik atau modal fisik yang diperlukan untuk partisipasi sosial menjadi rendah. Hal ini dikarenakan kesehatan yang terganggu tidak dapat menunjang partisipasi secara penuh baik di lingkungan kemasyarakatan maupun di lingkungan kerja. Sebagian besar golongan masyarakat miskin relatif jarang terlibat secara aktif dalam aktivitas sosial.

2) Absensi Meningkat

Faktor kualitas kesehatan yang rendah tidak mendukung adanya aspek kehadiran dalam aktivitas kemasyarakatan baik di lingkungan sosial, pendidikan, maupun pekerjaan. Akibatnya, ketidakhadiran atau absensi dalam segala aktivitas menjadi semakin meningkat sehingga tidak

memiliki kesempatan untuk berperan secara aktif dalam lingkungan sosial tersebut.

3) Tingkat Kecerdasan Yang Rendah

Faktor gizi buruk ataupun kualitas kesehatan yang rendah akan berdampak pada menurunnya kualitas intelektual. Seperti diketahui bahwa kinerja otak manusia yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah memerlukan gizi yang memadai atau ideal. Kekurangan gizi termasuk faktor yang paling utama terhadap adanya penurunan kualitas intelektual.

4) Ketrampilan Yang Rendah

Pada prinsipnya, ketrampilan merupakan salah satu bentuk dari adanya kreativitas. Aktivitas ini harus ditunjang dengan kondisi kesehatan yang mencukupi dan tentunya adalah kualitas intelektual yang memadai. Masyarakat yang mengalami kekurangan gizi ataupun rentan terhadap gangguan kesehatan relatif sulit untuk mengembangkan ketrampilannya. Hal ini dikarenakan dukungan kesehatan untuk menjunjang pengembangan kreativitas kerja relatif rendah sehingga tidak memiliki banyak kesempatan untuk meningkatkan kualitas ketrampilannya. 29 2.3. Bentuk dan Jenis Kemiskinan Dimensi kemiskinan yang dikemukakan

3.1.4 Bentuk dan Dimensi Kemiskinan

Dimensi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers memberikan penjelasan mengenai bentuk persoalan dalam kemiskinan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi yang disebut memiskinkan. Konsep kemiskinan tersebut memperluas pandangan ilmu sosial terhadap kemiskinan yang tidak hanya sekedar kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhankebutuhan pokok, akan tetapi juga kondisi ketidakberdayaan sebagai akibat rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, rendahnya perlakuan hukum, kerentanan terhadap tindak kejahatan (kriminal), resiko mendapatkan perlakuan negatif secara politik, dan terutama ketidakberdayaan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sendiri.

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah (Suryawati, 2004):

1) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

2) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

3) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

4) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.

Bentuk kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang paling banyak mendapatkan perhatian di bidang ilmu sosial terutama di kalangan negaranegara pemberi bantuan/pinjaman seperti Bank Dunia, IMF, dan Bank Pembangunan Asia. Bentuk kemiskinan struktural juga dianggap paling banyak menimbulkan adanya ketiga bentuk kemiskinan yang telah disebutkan sebelumnya (Jarnasy, 2004: 8-9). Setelah dikenal bentuk kemiskinan, dikenal pula dengan jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya. Adapun jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya adalah:

1) Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya atau ketiadaan pra sarana umum (jalan raya, listrik, dan air bersih), dan keadaan tanah yang kurang subur. Daerah-daerah dengan karakteristik tersebut pada umumnya adalah daerah yang belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.

2) Kemiskinan Buatan

Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata. Kemiskinan seperti ini adalah dampak negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan (*developmentalism*) yang umumnya dijalankan di negara-negara sedang berkembang. Sasaran untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi mengakibatkan tidak meratanya pembagian hasil-hasil pembangunan di mana sektor industri misalnya lebih menikmati tingkat keuntungan dibandingkan mereka yang bekerja di sektor pertanian.

Kedua jenis kemiskinan di atas seringkali masih dikaitkan dengan konsep pembangunan yang sejak lama telah dijalankan di negara-negara sedang berkembang pada dekade 1970an dan 1980an (Jarnasy, 2004: 8).

Persoalan kemiskinan dan pembahasan mengenai penyebab kemiskinan hingga saat ini masih menjadi perdebatan baik di lingkungan akademik maupun pada tingkat penyusun kebijakan pembangunan (Suryawati, 2004: 123). Salah satu perdebatan tersebut adalah menetapkan definisi terhadap seseorang atau sekelompok orang yang

disebut miskin. Pada umumnya, identifikasi kemiskinan hanya dilakukan pada indikator-indikator yang relatif terukur seperti pendapatan per kapita dan pengeluaran/konsumsi rata-rata. Ciri-ciri kemiskinan yang hingga saat ini masih dipakai untuk menentukan kondisi miskin adalah:

- 1) Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan ketrampilan yang memadai.
- 2) Tingkat pendidikan yang relatif rendah
- 3) Bekerja dalam lingkup kecil dan modal kecil atau disebut juga bekerja di lingkungan sektor informal sehingga mereka ini terkadang disebut juga setengah menganggur
- 4) Berada di kawasan pedesaan atau di kawasan yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan regional atau berada pada kawasan tertentu di perkotaan (slum area)
- 5) Memiliki kesempatan yang relatif rendah dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok yang mencukupi termasuk dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan standar kesejahteraan pada umumnya.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa ciri-ciri kemiskinan di atas tidak memiliki sifat mutlak (absolut) untuk dijadikan kebenaran universal terutama dalam menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan ataupun terbentuknya kemiskinan. Sifat-sifat kemiskinan di atas hanya merupakan temuan lapangan yang paling banyak diidentifikasi atau diukur.

3.1.5 Indikator-Indikator Mengenai Kemiskinan

Pengukuran mengenai kemiskinan yang selama ini banyak dipergunakan didasarkan pada ukuran atas rata-rata pendapatan dan rata-rata pengeluaran masyarakat dalam suatu daerah. Perluasan pengukuran dengan menyertakan pandangan mengenai dimensi permasalahan dalam kemiskinan mengukur banyaknya individu dalam sekelompok masyarakat yang mendapatkan pelayanan atau fasilitas untuk kesehatan dan pendidikan. Beberapa perluasan pengukuran lainnya adalah menyertakan dimensi sosial politik sebagai referensi untuk menerangkan terbentuknya kemiskinan. Keseluruhan hasil pengukuran ini selanjutnya dikatakan sebagai indikator-indikator kemiskinan yang digolongkan sebagai indikator-indikator sosial dalam pembangunan.

Adapun mengenai beberapa indikator-indikator kemiskinan akan diuraikan pada sub bab berikut ini.

3.1.5.1. Indikator Kemiskinan Berdasarkan Dimensi Ekonomi

Berdasarkan sudut pandang ekonomi, kemiskinan adalah bentuk ketidakmampuan dari pendapatan seseorang maupun sekelompok orang untuk mencukupi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar. Dimensi ekonomi dari kemiskinan diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan seseorang baik secara finansial maupun jenis kekayaan lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suryawati, 2004: 123). Dari pengertian ini, dimensi ekonomi untuk kemiskinan memiliki dua aspek, yaitu aspek pendapatan dan aspek konsumsi atau pengeluaran. Aspek pendapatan yang dapat dijadikan sebagai indikator kemiskinan adalah pendapatan per kapita, sedangkan untuk aspek konsumsi yang dapat digunakan sebagai indikator kemiskinan adalah garis kemiskinan.

1) Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita menyatakan besarnya rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah selama kurun waktu 1 tahun. Besarnya pendapatan per kapita (income per capita) dihitung dari besarnya output dibagi oleh jumlah penduduk di suatu daerah untuk kurun waktu 1 tahun (Todaro, 1997: 437). Indikator pendapatan per kapita menerangkan terbentuknya pemerataan pendapatan yang merupakan salah satu indikasi terbentuknya kondisi yang disebut miskin.

2) Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan yang menyatakan rata-rata pengeluaran makanan dan non-makanan per kapita pada kelompok referensi (reference population) yang telah ditetapkan (BPS, 2004). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marjinal, yaitu mereka yang hidupnya dikategorikan berada sedikit di atas garis kemiskinan. Berdasarkan definisi dari BPS, garis kemiskinan dapat diartikan sebagai batas konsumsi minimum dari kelompok masyarakat marjinal yang berada pada referensi pendapatan sedikit lebih besar daripada pendapatan terendah. Pada prinsipnya, indikator garis kemiskinan mengukur kemampuan pendapatan

dalam memenuhi 36 kebutuhan pokok/dasar atau mengukur daya beli minimum masyarakat di suatu daerah. Konsumsi yang dimaksudkan dalam garis kemiskinan ini meliputi konsumsi untuk sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan (Suryawati, 2004: 123).

3.1.5.2 Indikator Kemiskinan Berdasarkan Dimensi Peran Pemerintah

Pemerintah sebagai regulator sekaligus dinamisator dalam suatu perekonomian merupakan salah satu pihak yang memiliki peran sentral dalam upaya untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan. Di Indonesia, pelaksanaan penanggulangan permasalahan kemiskinan dikoordinasikan oleh Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan yang bekerja sama dengan Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial. Program penanggulangan masalah kemiskinan ini dibiayai melalui Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional (APBN) melalui pos pengeluaran untuk Program Pembangunan. Prinsip yang digunakan untuk program ini bahwa penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui upaya untuk meningkatkan pembangunan di bidang sumber daya manusia dan pemenuhan sarana maupun pra sarana fisik. Kedua bentuk pelaksanaan dalam APBN ini disebut juga investasi pemerintah untuk sumber daya manusia dan investasi pemerintah di bidang fisik.

1) Investasi Pemerintah di Bidang Sumber Daya Manusia

Investasi pemerintah di bidang sumber daya manusia ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang direalisasikan di bidang pendidikan, agama, kebudayaan, kesejahteraan, pembinaan wanita dan anak-anak, pengembangan kualitas tenaga kerja, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pendidikan agama. Keseluruh aspek di bidang sumber daya manusia di atas merupakan salah satu syarat dasar dalam program penanggulangan masalah kemiskinan.

2) Investasi Pemerintah di Bidang Fisik

Investasi pemerintah di bidang fisik atau disebut juga investasi fisik pemerintah adalah pengeluaran pemerintah yang secara umum ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat yang direalisasikan ke dalam pembangunan fisik. Pada APBN, pos pengeluaran untuk investasi fisik pemerintah ini adalah

keseluruhan pos pengeluaran pembangunan kecuali untuk bidang investasi sumber daya manusia.

3.1.5.3 Indikator Kemiskinan Berdasarkan Dimensi Kesehatan

Dari berbagai data kemiskinan yang dihimpun menyebutkan adanya keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas kesehatan masyarakat. Rendahnya kemampuan pendapatan dalam mencukupi/memenuhi kebutuhan pokok menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk menjangkau atau memperoleh standar kesehatan yang ideal/layak baik dalam bentuk gizi maupun pelayanan kesehatan yang memadai. Dampak dari kondisi seperti ini adalah tingginya resiko terhadap kondisi kekurangan gizi dan kerentanan atau resiko terserang penyakit menular. Kelompok masyarakat yang disebut miskin juga memiliki keterbatasan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan/pengobatan yang memadai sehingga akan menyebabkan resiko kematian yang tinggi.

Indikator pelayanan air bersih atau air minum merupakan salah satu persyaratan terpenuhinya standar hidup yang ideal di suatu daerah. Ketersediaan air bersih akan mendukung masyarakat untuk mewujudkan standar hidup sehat 39 yang layak. Dalam hal ini, ketersediaan air bersih akan mengurangi resiko terserang penyakit yang diakibatkan kondisi sanitasi air yang buruk. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka terdapat keterkaitan/hubungan antara ketersediaan pelayanan air bersih dan jumlah penduduk miskin di suatu daerah. Pada sisi permasalahan lain, ketersediaan air bersih sangat ditentukan oleh kemampuan pembangunan pra sarana air bersih dalam menjangkau lingkungan atau pemukiman masyarakat. Masyarakat yang kurang terjangkau oleh pelayanan air bersih/minum relatif lebih rendah kualitas kesehatannya dibandingkan masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan air bersih.

3.1.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin

1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Pada prinsipnya, PDRB per kapita merupakan konsep dari pendapatan per kapita yang diimplementasikan penjelasannya pada lingkup 40 regional/daerah. Besarnya pendapatan per kapita di suatu daerah mencerminkan aspek pemerataan pendapatan dengan menggunakan besarnya nilai rata-rata keseluruhan pendapatan

rumah tangga dalam perekonomian daerah. Pendapatan per kapita menggambarkan kemampuan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah. Konsep pendapatan per kapita seperti ini dianggap masih relevan untuk menerangkan terbentuknya jumlah penduduk miskin di daerah tersebut. Apabila pendapatan per kapita meningkat, maka kemampuan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah akan semakin meningkat. Ini berarti kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok di daerah tersebut juga akan semakin meningkat. Jika kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok meningkat, maka jumlah penduduk miskin di daerah tersebut akan berkurang. Sebaliknya, apabila pendapatan per kapita di daerah berkurang/menurun, maka akan menurun pula kemampuan pendapatan rata-rata masyarakat di daerah tersebut. Jika kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok menurun, maka jumlah penduduk miskin di daerah tersebut akan meningkat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin.

2) Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan

Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan merupakan faktor penentu jumlah penduduk miskin yang berasal dari sisi pendekatan anggaran pemerintah (Saleh, 2002). Pengeluaran tersebut meliputi keseluruhan pengeluaran untuk program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan, maka akan semakin tinggi pula taraf kesejahteraan yang dapat dicapai atau diperoleh penduduk di suatu daerah.

3) Angka Melek Huruf (AMH)

Salah satu indikator kesejahteraan di bidang pendidikan adalah indikator jumlah penduduk yang dinyatakan melek huruf. Indikator ini mencerminkan kemampuan penduduk di suatu daerah untuk mengakses fasilitas, layanan pemerintahan, dan sarana lainnya yang membutuhkan kemampuan untuk bisa membaca dan menulis, termasuk di antaranya adalah persyaratan dalam mencari kerja (Suryawati, 2004). Semakin tinggi jumlah penduduk yang melek huruf, maka akan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk mengakses fasilitas maupun sarana untuk dapat meningkatkan taraf kesejahtraannya.

4) Jumlah Penduduk Yang Tidak Mendapatkan Akses Air Bersih (RPA)

Air bersih atau air minum merupakan salah satu sarana publik yang cukup vital, sehubungan dengan manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik individu maupun keluarga (Harahap, 2006). Akses terhadap air bersih atau air minum akan menentukan kemampuan penduduk untuk mencukupi kebutuhan pokoknya yang terdiri atas kebutuhan atas makanan dan minuman, serta kebutuhan lain yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan. Semakin tinggi jumlah penduduk yang tidak mendapatkan akses atas air bersih, maka akan semakin tinggi pula jumlah penduduk miskin di daerah tersebut.

5) Jumlah Penduduk Yang Tidak Mendapatkan Akses Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan merupakan salah satu fasilitas publik yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan (Saleh, 2002). Fasilitas kesehatan sekarang ini tidak hanya berfungsi untuk memberikan layanan kesehatan, akan tetapi berperan pula untuk memberikan perbaikan gizi keluarga. Layanan kesehatan akan memberikan pencegahan dan pengobatan atas penyakit atau gangguan medis, sehingga akan mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Semakin tinggi jumlah penduduk yang tidak mendapatkan akses fasilitas kesehatan, maka akan semakin tinggi resiko penularan penyakit ataupun gizi buruk yang selanjutnya akan menjadi penyebab tingginya angka kematian dan buruknya kesehatan ibu dan bayi.

Mengenai daerah pemekaran baru dan keterkaitannya dengan jumlah penduduk miskin dijelaskan sebagai faktor kesejahteraan yang disebabkan adanya perubahan pada pengembangan administrasi wilayah (TMPK, 2005). Daerah pemekaran baru akan mengubah struktur administrasi atas pengaturan wilayah dan jumlah penduduk yang menempati suatu wilayah lama dan wilayah pemekaran baru. Ada dua pandangan, terkait dampak dari pemekaran wilayah baru terhadap jumlah penduduk miskin, yaitu:

1) Perubahan Struktur Kependudukan

Pemekaran wilayah baru akan menyebabkan terjadinya perubahan pada jumlah penduduk yang menempati di masing-masing wilayah tingkat kecamatan. Perubahan pada jumlah penduduk akan berdampak pula pada komposisi jumlah penduduk berdasarkan indikator sosialnya, seperti jumlah penduduk miskin,

jumlah penduduk usia sekolah, jumlah penduduk yang tidak mendapatkan akses air bersih, dan jumlah penduduk yang tidak mendapatkan fasilitas kesehatan. Saleh (2002) menerangkan bahwa konsentrasi kemiskinan di suatu daerah ditentukan pula oleh aspek regional seperti pemusatan jumlah penduduk miskin yang tidak menyebar di suatu daerah (tingkat kecamatan).

2) Perubahan Pada Kebijakan Kesejahteraan

Setiap daerah pemekaran di tingkat kabupaten/kota akan mendapatkan fasilitas dan kewenangan yang sama dengan daerah lainnya di tingkat kabupaten/kota. Salah satu kewenangan adalah pelimpahan wewenang untuk mengelola kebijakan, terutama kebijakan yang berorientasi untuk meningkatkan taraf kesejahteraan (Suwandi, 2002). Pelimpahan wewenang ini termasuk salah satunya adalah adanya tambahan alokasi dana dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan. Daerah pemekaran baru memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan, dibandingkan dengan daerah lain yang tidak mengalami pemekaran.

3.2 Kondisi Kemiskinan Daerah

Pada masa lalu, pembangunan lebih diorientasikan pada usaha pemerintah untuk mengejar dan mewujudkan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan cara menambah jumlah investasi-investasi baru yang pada akhirnya akan menyerap banyak tenaga kerja. Dengan cara ini, diharapkan akan terjadi "*Trickle Down Effects*" atau efek tetesan. Kesejahteraan diasumsikan akan menetes sampai kesemua level sosial ekonomi masyarakat. Namun pendekatan yang hanya terpusat pada pertumbuhan ekonomi ternyata memiliki dampak yang kurang baik. Peningkatan pendapatan nasional tidak otomatis berarti kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Yang terjadi kemudian adalah pendapatan terdistribusi secara tidak merata, sehingga meskipun secara nasional perhitungan pendapatan lebih tinggi, mayoritas rumah tangga tetap berada pada keadaan sosial ekonomi yang buruk.

Oleh karena itu, banyak kritik yang terlontar dan mengatakan bahwa pembangunan yang lebih menekankan pada sisi peningkatan PDB akan

berorientasi materialis dan mendorong masyarakat untuk terus memproduksi barang-barang tak berguna. Belajar dari pengalaman serta perkembangan pemikiran mengenai pengukuran keberhasilan pembangunan, maka *United Nation Development Programme* (UNDP) menyusun paradigma baru yang tidak hanya menonjolkan sisi material tetapi juga kemajuan-kemajuan yang terkait dengan sisi harkat kesejahteraan manusia. Kemudian dikenalkanlah paradigma pembangunan yang lebih berorientasi kepada *human development center*, UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimate end*) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Nilai IPM ini menunjukkan seberapa jauh wilayah tersebut telah mencapai sasaran yang ditentukan.

Gambar 3.1 IPM Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022



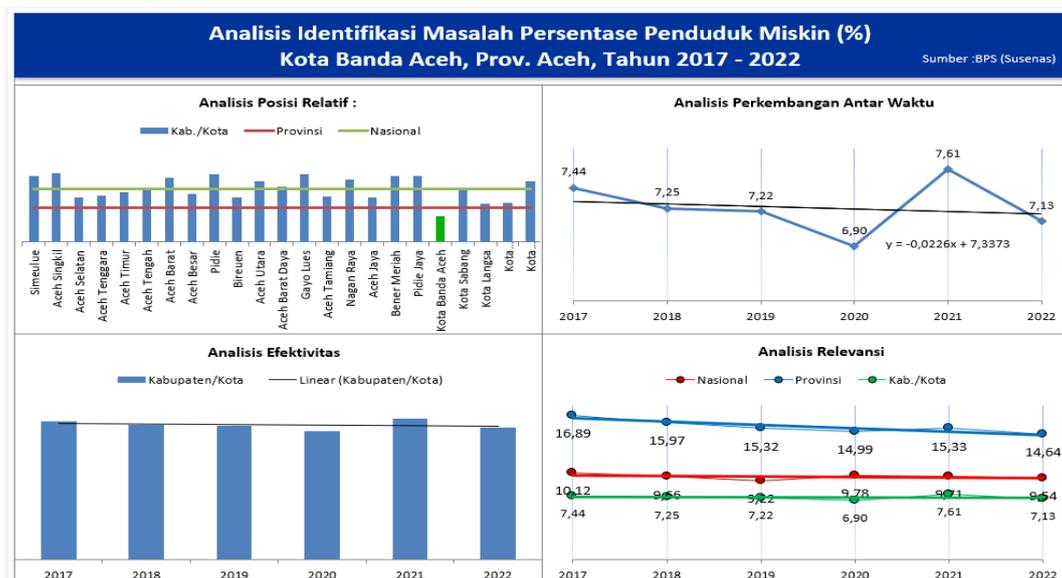
Di samping pergeseran paradigma dalam mengukur keberhasilan pembangunan, pemerintah juga terus memperbaiki kebijakan yang terkait dengan isu pencapaian kesejahteraan masyarakat. Untuk mengukur dan mengidentifikasi keberhasilan usaha mendorong sebanyak mungkin masyarakat ke tingkat kesejahteraan, maka pemerintah mengembangkan berbagai pendekatan perhitungan. Dalam usaha untuk melakukan pengukurannya tersebut, maka Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kebijakan dan program tersebut, maka digunakan beberapa indikator statistik kemiskinan umum diantaranya:

1. Persentase Penduduk Miskin (P0)

Tingkat Kemiskinan adalah indikator yang digunakan untuk memotret besaran porsi penduduk miskin pada suatu wilayah. Tingkat kemiskinan atau sering juga disebut sebagai persentase penduduk miskin merupakan nilai yang menunjukkan proporsi penduduk miskin terhadap total penduduk di suatu wilayah.

Gambar 3.2 Analisis Identifikasi Masalah Persentase Penduduk Miskin (%) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Tahun 2017-2022

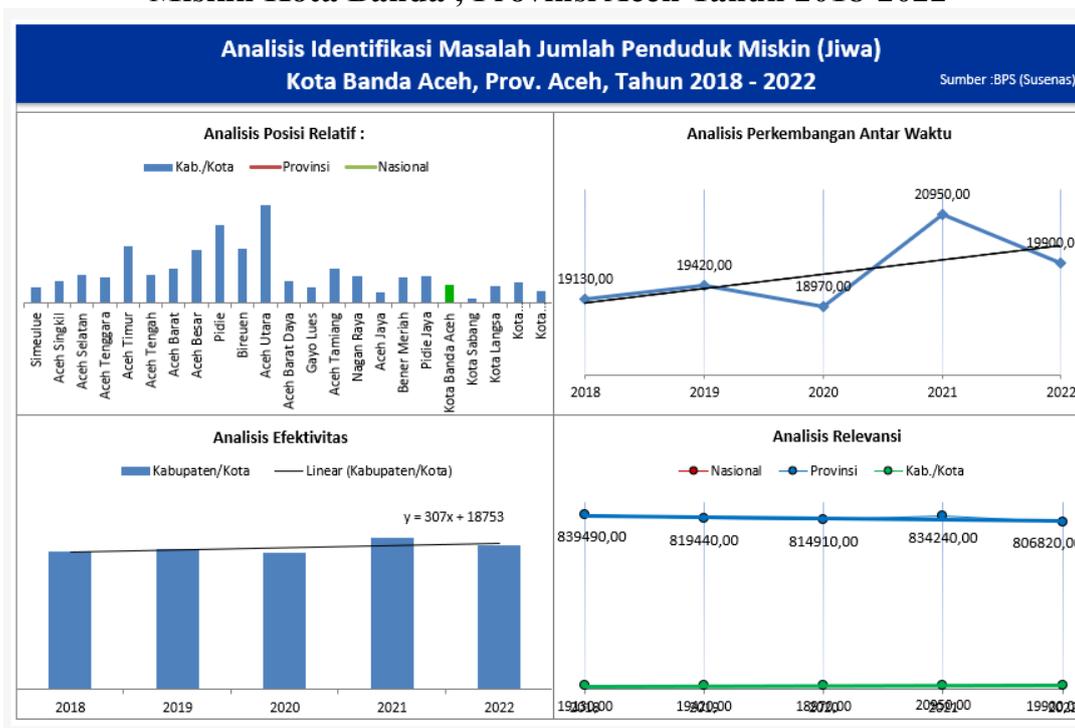


Meskipun terus menurun dalam beberapa tahun terakhir, namun terjadi perlambatan dalam penurunannya, bahkan sempat naik di tahun 2021. Proporsi penduduk miskin Kota Banda Aceh pada tahun 2022 adalah 7,13%. Ini menempatkan Kota Banda Aceh sebagai kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin terendah di Provinsi Aceh (14,64%) dan berada dibawah Nasional (9,54%). Angka tersebut merupakan hasil dari penurunan yang konsisten selama tahun 2017-2020. Meskipun terjadi kenaikan pada tahun 2021 (7,61%), namun demikian secara keseluruhan persentase penduduk miskin Kota Banda Aceh selama lima tahun terakhir membentuk tren linier yang menurun sebesar 0,023% sehingga kondisi yang ada saat ini dapat dijadikan basis untuk meneruskan penurunan kemiskinan pada tahun-tahun mendatang, dengan catatan bahwa Kota Banda Aceh dapat mempertahankan kecepatan penurunan persentase penduduk miskin dalam beberapa waktu terakhir.

2. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah tertentu dengan pengeluaran dibawah garis kemiskinan. Meskipun jumlah penduduk miskin Kota Banda Aceh pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 (dari 20.950 jiwa menjadi 19.900 jiwa), namun jumlah penduduk miskin kota Banda Aceh 5 tahun terakhir mengalami penambahan rata-rata 307 jiwa setiap tahunnya. Capaian penurunan jumlah penduduk miskin tertinggi dicapai pada tahun 2020 yaitu 18.970 jiwa.

Gambar 3.3 Analisis Identifikasi Masalah Jumlah Penduduk Miskin Kota Banda , Provinsi Aceh Tahun 2018-2022



Bertambahnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 diduga berasal dari penduduk yang semula termasuk pada kategori rentan miskin yaitu penduduk yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum sedikit di atas garis kemiskinan, di tahun 2021 ini menjadi penduduk yang tidak lagi dapat memenuhi batas minimal kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan (garis kemiskinan) akibat adanya pandemi Covid-19. Adanya pandemi Covid19 yang terjadi selama tahun 2021 menjadi penyebab stagnasi atau bahkan penurunan pendapatan penduduk (PDRB per-kapita), sementara Di sisi lain, nilai garis kemiskinan dari tahun ke tahun senantiasa meningkat.

Penurunan yang terjadi pada tahun 2022 patut diduga dikarenakan semakin membaiknya kondisi perekonomian dan peningkatan pendapatan masyarakat sehingga sebagian masyarakat yang sebelumnya berada dibawah garis kemiskinan mampu keluar dari garis kemiskinan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain pembagian beras bagi untuk masyarakat miskin, kenaikan upah, pemberdayaan masyarakat melalui UMKM, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan program-program pemerintah lainnya.

Sedangkan berdasarkan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan

Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, informasi 40% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan Nasional (Desil 1,2,3 dan 4) Tahun 2022 Kota Banda Aceh berjumlah 73.602 jiwa dengan ketentuan; Desil 1, penduduk dengan kesejahteraan 10% paling rendah sebesar 17.699 jiwa, desil 2 penduduk dengan kesejahteraan 11-20% sebesar 19.283 jiwa, desil 3 penduduk dengan kesejahteraan 21-30% sebesar 18.028 jiwa serta desil 4 penduduk dengan kesejahteraan 31-40 sebesar 18.592 jiwa.

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem, Miskin dan Rentan Miskin (Desil 1-4) Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh Tahun 2022

No.	Kecamatan	Keluarga				Individu					
		Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4
	Total (9)	16.740	3.619	4.308	4.190	4.623	73.602	17.699	19.283	18.028	18.592
1.	Baiturrahman	2.247	431	545	596	675	9.811	2.087	2.434	2.583	2.707
2.	Kuta Alam	2.986	636	847	689	814	13.156	3.103	3.764	2.979	3.310
3.	Meuraxa	2.172	397	542	592	641	9.990	2.047	2.571	2.728	2.644
4.	Syiah Kuala	1.705	449	443	407	406	7.171	2.116	1.871	1.637	1.547
5.	Lueng Bata	1.550	330	393	391	436	6.648	1.608	1.713	1.625	1.702
6.	Kuta Raja	1.416	399	362	316	339	6.280	1.985	1.631	1.339	1.325
7.	Banda Raya	1.678	408	423	418	429	7.343	1.972	1.880	1.773	1.718
8.	Jaya Baru	1.459	222	373	407	457	6.639	1.133	1.754	1.803	1.949
9.	Ulee Kareng	1.527	347	380	374	426	6.564	1.648	1.665	1.561	1.690

Berdasarkan Data P3KE tersebut, menunjukkan bahwa penduduk dengan 10% kesejahteraan paling rendah paling banyak di Kecamatan Kuta Alam sebesar 3.103 jiwa, dengan terbesar kedua ada di Kecamatan Syiah Kuala sebesar 2.1116 jiwa, sedangkan penduduk dengan 10% kesejahteraan paling rendah paling sedikit adalah di Kecamatan Jaya Baru dengan jumlah 1.133 jiwa. Demikian juga berdasarkan rumah tangga, rumah tangga dengan 10% kesejahteraan paling rendah paling banyak di Kecamatan Kuta Alam sebesar 636 rumah tangga, terbesar kedua rumah tangga desil 1 berada di Kecamatan Syiah Kuala, sedangkan kecamatan paling rendah rumah tangga desil 1 nya adalah Kecamatan Jaya Baru dengan jumlah 222 rumah tangga.

Berdasarkan keseluruhan data P3KE 40% tersebut (73.602 jiwa), dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 5.980 jiwa, maka terdapat

67.622 jiwa penduduk Kota Banda Aceh berada dalam kondisi rentan miskin atau sedikit saja di atas garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Banda Aceh pada tahun 2022 adalah 737.016 rupiah sebagai kebutuhan minimum perkapita perbulan.

3. Garis Kemiskinan (GK)

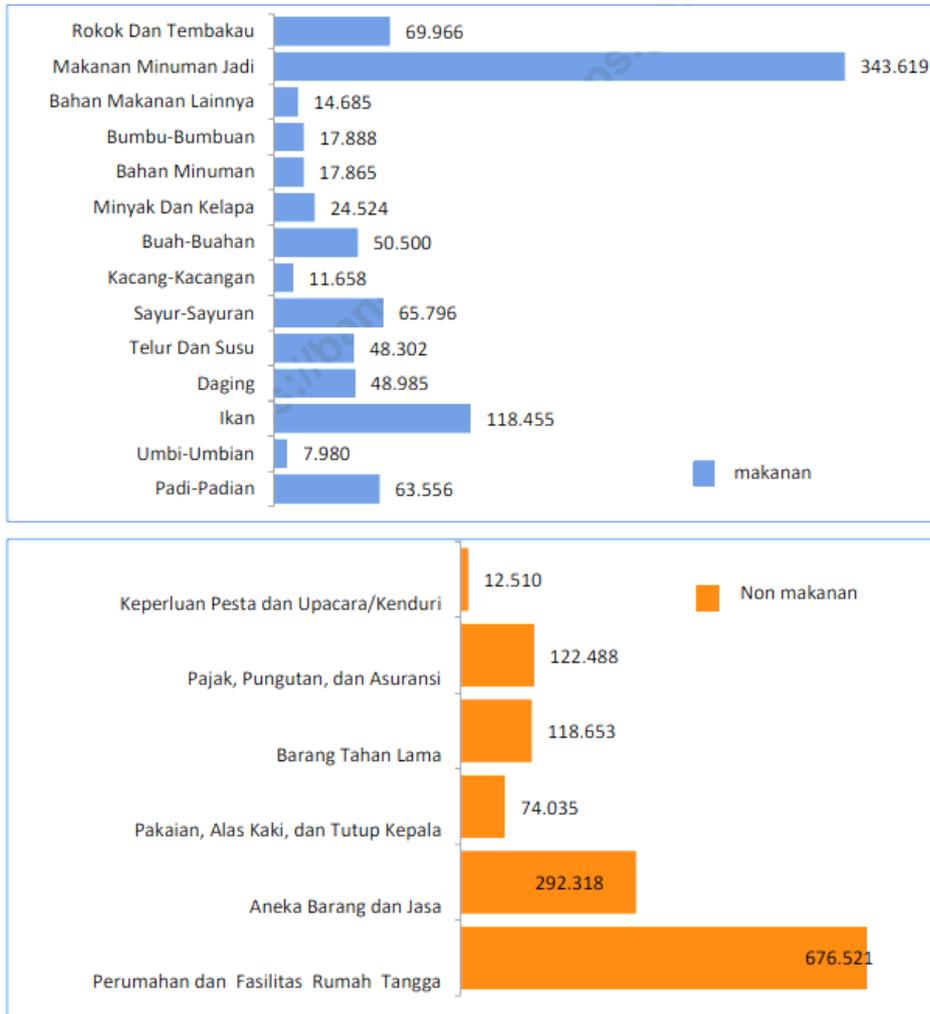
Garis Kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi. Garis Kemiskinan menurut BPS merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Non-Makanan.

Metode yang digunakan dalam perhitungan kemiskinan ini didasarkan atas Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Untuk Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Penghitungan GK dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan.

Gambar 3.4

Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Kelompok Makanan dan Non Makanan di Kota Banda Aceh (Rupiah), 2022



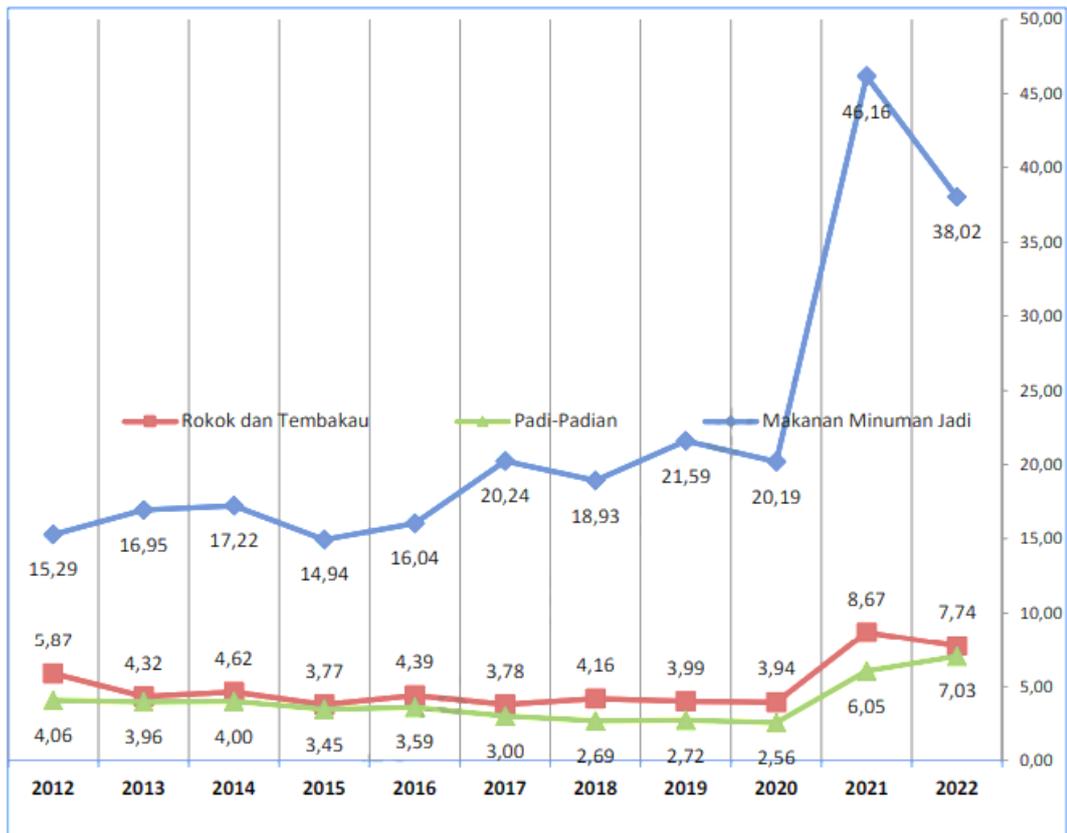
Sumber : BPS Kota Banda Aceh (SUSENAS 2022)

a) Pengeluaran Konsumsi Kelompok Makanan

Banyak faktor yang memengaruhi pola konsumsi pangan rumah tangga. Faktor yang memengaruhi pola konsumsi, di antaranya adalah : (1) Tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pendapatan biasanya sebanding dengan tingkat konsumsi yang tinggi; (2) Selera konsumen, orang berbeda akan memiliki keinginan yang berbeda dan akan memengaruhi pola konsumsi; (3) Harga barang, kenaikan harga berbanding terbalik dengan permintaan akan suatu barang; (4) Tingkat pendidikan masyarakat,

berpengaruh terhadap perilaku, sikap dan kebutuhan konsumsi; (5) Jumlah keluarga, besar kecilnya jumlah keluarga akan memengaruhi pola konsumsinya; (6) Lingkungan, keadaan dan kebiasaan lingkungan akan memengaruhi perilaku konsumsi pangan masyarakat setempat. Bagi masyarakat perkotaan seperti di Kota Banda Aceh, telah terjadi pergeseran pola pengeluaran konsumsi per kapita. Gaya hidup yang ingin instan tanpa perlu menghabiskan waktu dan tenaga serta didukung oleh kemudahan sistem pelayanan pembelian melalui pesan antar secara daring/online telah menyebabkan pengeluaran makanan dan minuman jadi semakin meningkat. Dapat dilihat pada Grafik 9.3, pengeluaran per kapita perbulan untuk pengeluaran makanan dan minuman jadi cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Bila di tahun 2012 seorang penduduk di Kota Banda Aceh baru mengalokasikan 15,29 persen bagian dari pengeluaran per kapita per bulannya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman jadi, alokasi ini terus meningkat menjadi 38,02 persen di tahun 2022. Secara spesifik, peningkatan terbesar tampak di tahun 2017 Peningkatan yang terjadi sampai 4,20 persen dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini terjadi karena mulai beroperasinya salah satu operator transportasi online yang salah satu pelayanan yang diberikan adalah layanan antar pembelian online, suatu bentuk kerjasama antar operator transportasi online dengan berbagai warung/kedai/restoran makanan dan minuman.

Gambar 3.5 Persentase Pengeluaran Perkapita Perbulan Komoditas Makanan Terpilih di Kota Banda Aceh, 2012-2022



Sumber : BPS Kota Banda Aceh (SUSENAS 2022)

Konsumsi rokok dan padi-padian (padi, jagung, ubi, tepung) pada tahun 2022 cenderung stabil meskipun terdapat sedikit penurunan. Patut diduga alokasi untuk kedua jenis komoditas makanan telah bergeser menjadi pengeluaran makanan dan minuman jadi.

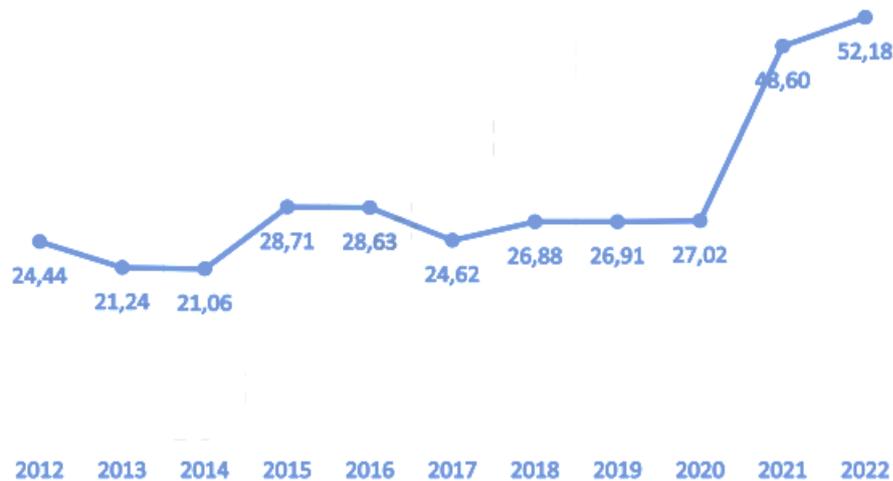
b) Pengeluaran Konsumsi Kelompok Non Makanan

Sejalan dengan kenaikan pendapatan per kapita, pola konsumsi berubah sehingga : (1) Pengeluaran rumah tangga untuk bahan makanan dan pakaian turun; (2) Belanja untuk barang konsumsi tahan lama meningkat; (3) Pengeluaran untuk jasa meningkat; (4) Pengeluaran untuk leisure meningkat

Pengeluaran Konsumsi Non Makanan biasanya mengalami kenaikan sejalan dengan tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tingginya proporsi pengeluaran untuk non makanan mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan semakin membaik.

Pengeluaran untuk makanan memiliki limitasi karena tidak mungkin perut seseorang terus bertambah seiring kenaikan pendapatan.

Gambar 3.6 Persentase Pengeluaran Perkapita Perbulan Kelompok Pengeluaran Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga di Kota Banda Aceh, 2012-2022

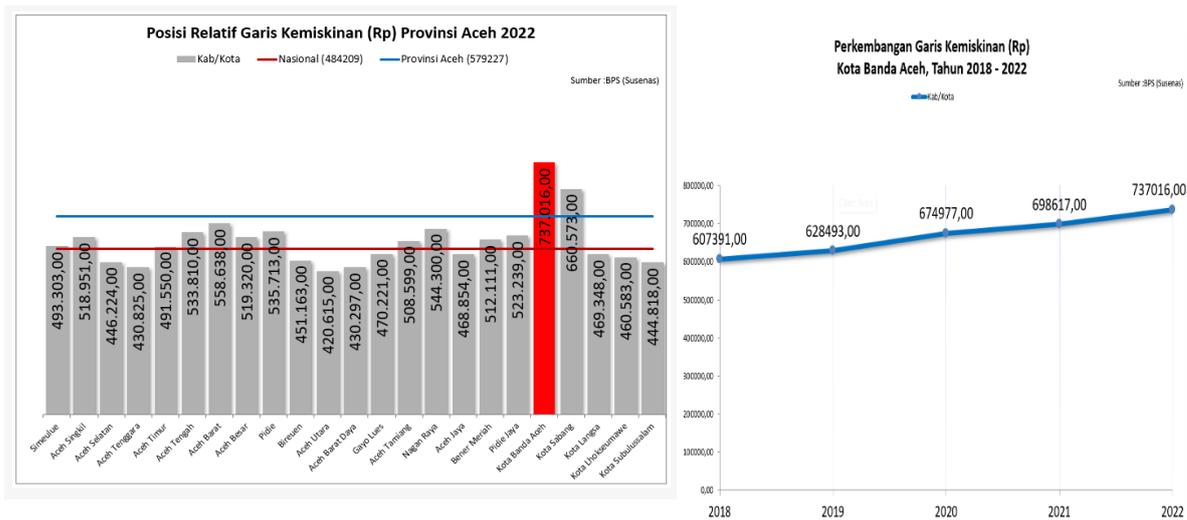


Masyarakat Kota Banda Aceh semakin menunjukkan pergeseran dari rural menuju urban. Kebutuhan pengeluaran yang besar terhadap perumahan, transportasi, dan komunikasi merupakan ciri-ciri masyarakat perkotaan. Pergeseran tersebut tampak pada pola pengeluaran perkapita untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga di Kota Banda Aceh. Pada tahun 2012, sebanyak 24,44 persen pengeluaran seorang penduduk Kota Banda Aceh dihabiskan setiap bulannya untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga. Di tahun 2022, proporsi tersebut meningkat menjadi 52,18 persen.

Berdasarkan rata-rata pengeluaran perkapita sebulan kelompok makanan dan kelompok non makanan, maka diperoleh garis kemiskinan. Dari garis kemiskinan ini kemudian akan diukur berapa banyak penduduk yang memiliki pengeluaran dibawah standar nilai tersebut. Perbandingan dalam persentase antara jumlah penduduk yang pengeluarannya berada dibawah GK terhadap jumlah keseluruhan penduduk disebut sebagai Tingkat Kemiskinan. Oleh karenanya, permasalahan kemiskinan harus menjadi perhatian serius bagi

pemerintah baik dipusat, maupun bagi pemerintah daerah. Berbagai kebijakan dan program disusun dalam upaya mendorong sebanyak mungkin masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan dan kerentanan kemiskinan.

Gambar 3.7. Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kota Banda Aceh Tahun 2022 dan Perkembangan Kemiskinan Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022



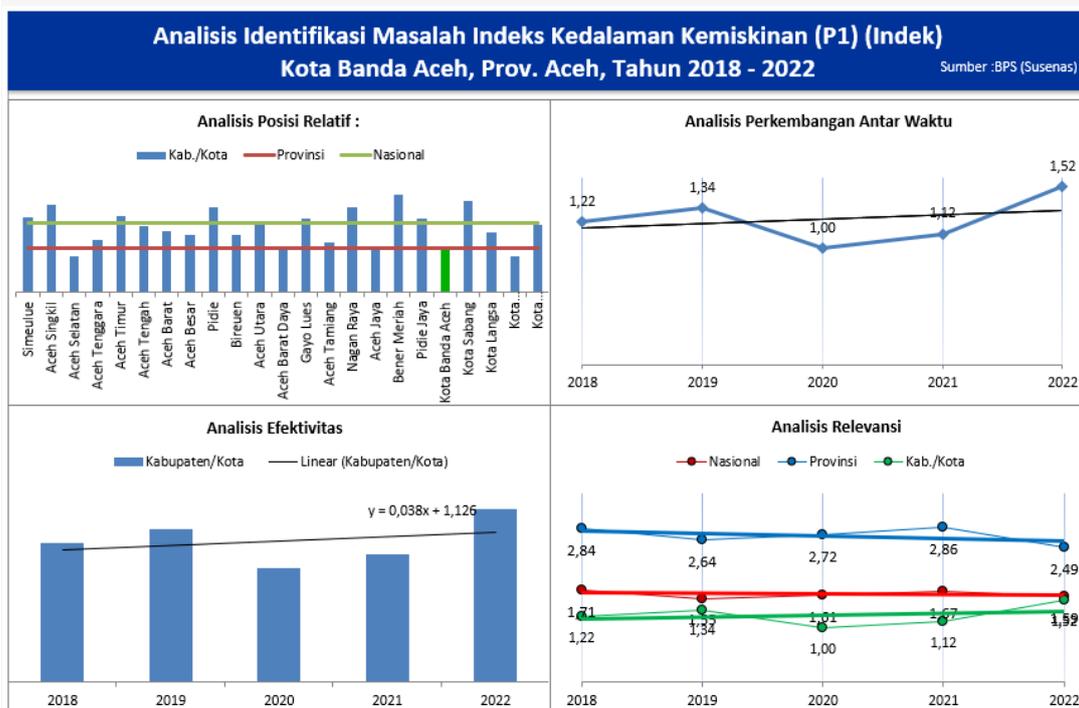
Garis kemiskinan (GK) Kota Banda Aceh merupakan garis kemiskinan tertinggi di Provinsi Aceh yaitu 737.016 rupiah dan setiap tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 garis kemiskinan sebesar Rp 607.391,-. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2018-2020), garis kemiskinan mengalami peningkatan sebesar Rp 129.625,,-. Garis Kemiskinan menunjukkan pendapatan minimum perkapita perbulan yang harus dicapai penduduk untuk dapat hidup. Meningkatnya garis kemiskinan disebabkan oleh inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa. Untuk memperoleh standar hidup yang layak maka daya beli masyarakat diusahakan untuk tidak menurun. Agar daya beli masyarakat tidak turun maka pendapatan harus naik sehingga garis kemiskinan juga naik.

4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan

pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indeks kedalaman kemiskinan Kota Banda Aceh mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2022 mencapai 1,52 meningkatkan dibandingkan dengan tahun 2021 (1,12). Kenaikan nilai P1 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar. Indeks kedalaman kemiskinan menjadi ukuran penting bagi pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah khususnya kabupaten/kota. Meskipun indeks kedalaman kemiskinan mengalami fluktuasi dari tahun 2018 hingga 2022, namun tendnya meningkat dengan rata-rata laju peningkatannya sebesar 0,038%.

Gambar 3.8 Analisis Identifikasi Masalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Kota Banda , Provinsi Aceh Tahun 2018-2022



Posisi Relatif Indeks kedalaman Kemiskinan Kota Banda Aceh jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh pada tahun 2022 berada pada posisi paling rendah ketiga, yaitu 1,52,

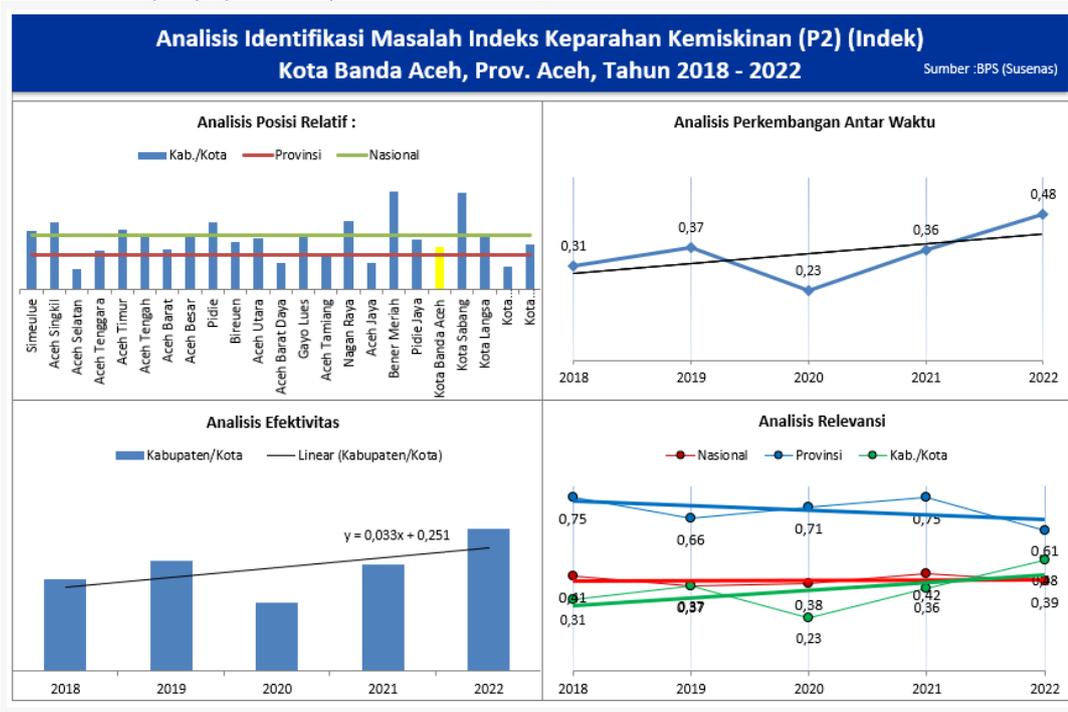
sedikit lebih tinggi dari Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Lhokseumawe. Angka ini juga berada dibawah indeks P1 nasional yaitu 1,59 dan indeks P1 provinsi Aceh yaitu 2,49. Indeks P1 tertinggi di Provinsi Aceh berada di Kabupaten Bener Meriah yaitu 3,54.

5. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Sejalan dengan indeks kedalaman kemiskinan, untuk indeks keparahan kemiskinan juga berfluktuatif dari tahun 2018-2022. Pada tahun 2018, Indeks keparahan kemiskinan Kota Banda Aceh mencapai 0,31. sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 0,48.

Gambar 3.9 Analisis Identifikasi Masalah Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Kota Banda , Provinsi Aceh Tahun 2018-2022



Berdasarkan analisis posisi relatif, perkembangan antar waktu, analisis efektivitas dan relevansi untuk indikator persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, kedalaman dan keparahan kemiskinan, permasalahan utama kemiskinan Kota Banda Aceh adalah:

1. Persentase penduduk miskin masih tinggi, belum sesuai target RPD.
2. Upaya penurunan angka kemiskinan belum berhasil dan bahkan jumlah penduduk miskin meningkat
3. Masih besarnya jumlah penduduk rentan miskin
4. Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) fluktuatif dan cenderung meningkat

3.3 Identifikasi Kemiskinan Multidimensi Kota Banda Aceh

Seperti yang telah dijelaskan pada sub sebelumnya, pengukuran kemiskinan diukur melalui Persentase Penduduk Miskin (PO), Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (PI) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Dimana kondisi kemiskinan yang ada di Kota Banda Aceh ini dapat diidentifikasi dari beberapa permasalahan per urusan yang ada yang juga menjadi pokok permasalahan dalam pembangunan daerah. Berikut akan dijelaskan permasalahan kemiskinan dari beberapa urusan di Kota Banda Aceh:

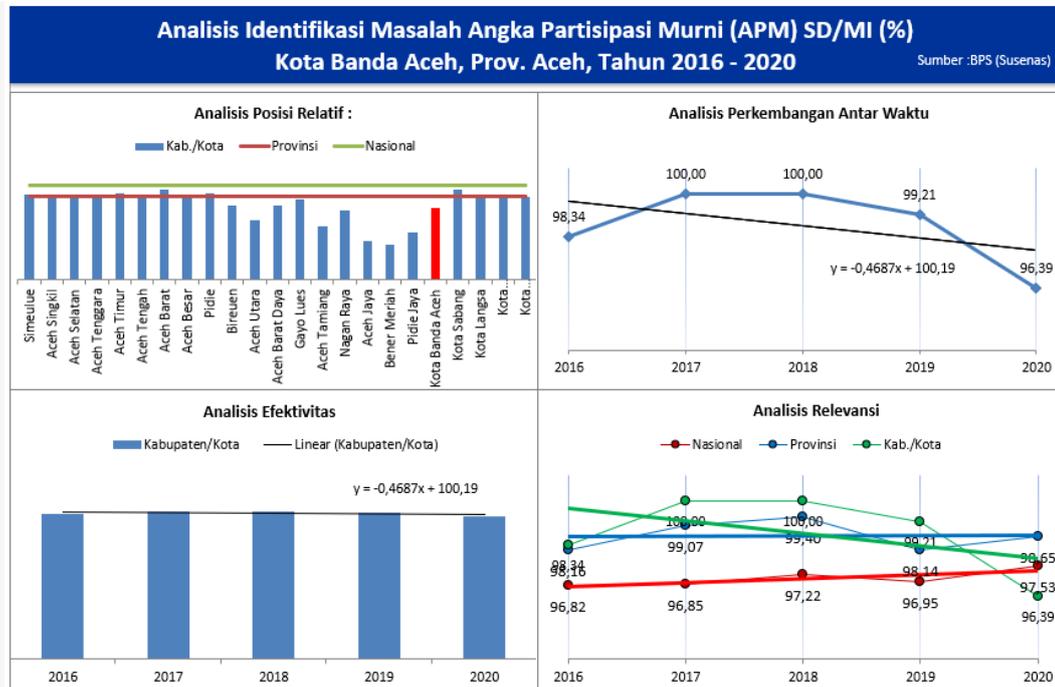
3.3.1 Bidang Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar untuk setiap manusia sehingga upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sangatlah penting, karena melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan.

Angka Partisipasi Murni SD/MI (APM SD/MI)

Angka Partisipasi Murni pendidikan merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usia, indikator ini akan menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya.

Gambar 3.10 Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kota Banda , Provinsi Aceh Tahun 2016-2022



Pada tahun 2020, capaian Angka Partisipasi Murni SD/MI (APM SD/MI) Kota Banda Aceh adalah 96,39%. Capaian ini masih dibawah capaian Provinsi Aceh (98,65%) maupun capaianan Nasional pada tahun yang sama (97,53%). Untuk provinsi Aceh sendiri, capaian APM SD/MI Kota Banda Aceh relatif lebih rendah dari kabupaten/kota lain dan berada di peringkat 17 dari 23 kabupaten/kota. Dilihat dari perkembangan antar waktu untuk indikator APM SD/MI Kota Banda Aceh, menunjak tren yang menurun dalam 5 tahun terakhir di 2016-2020. Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2019 dan 2020 dimana 2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 maupun 2018 yang mencapai angka 100%.

Tabel 3.2. Jumlah anak usia sekolah, 7-12 Tahun (SD/MI), 13-15 Tahun (SMP/MTs), 16-18 Tahun (SMA/MA) yang Bersekolah dan Tidak Bersekolah Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh Tahun 2022

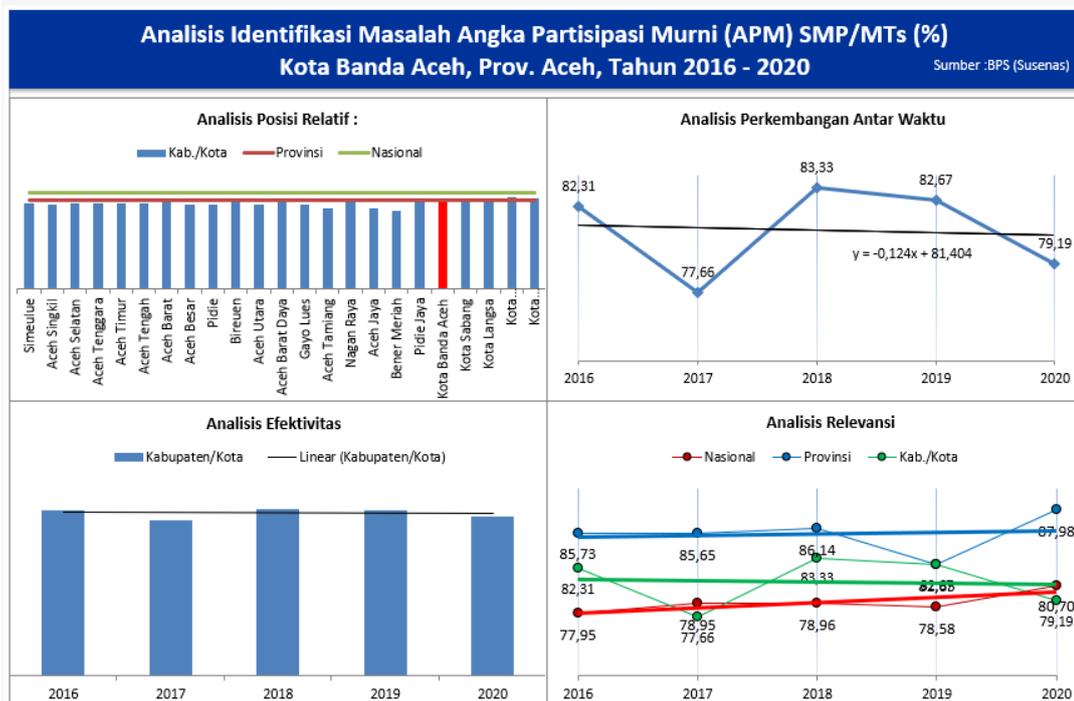
No	Kecamatan	Bersekolah				Tidak Bersekolah			
		Jumlah	7-12 tahun	13-15 tahun	16-18 tahun	Jumlah	7-12 tahun	13-15 tahun	16-18 tahun
	Total (9)	19.287	8.979	6.181	4.127	3.708	3.426	167	115
1.	Baiturrahman	2.339	1.057	710	572	469	413	31	25
2.	Kuta Alam	3.425	1.606	1.106	713	628	600	17	11
3.	Meuraxa	3.019	1.477	956	586	499	489	8	2
4.	Syiah Kuala	1.912	891	619	402	370	341	14	15
5.	Lueng Bata	1.638	716	554	368	255	236	12	7
6.	Kuta Raja	1.614	742	543	329	431	363	46	22
7.	Banda Raya	1.874	870	587	417	385	355	13	17
8.	Jaya Baru	1.850	868	610	372	362	333	18	11
9.	Ulee Kareng	1.616	752	496	368	309	296	8	5

Dari capaian Angka Partisipasi Murni SD/MI Kota Banda Aceh tahun 2020 adalah 96,39%, mengartikan bahwa, pada tahun tersebut, terdapat 3,61% anak usia 7-12 tahun (usia SD/MI) yang tidak bersekolah dan atau putus sekolah. Merujuk kepada data P3KE Kemenko PMK tahun 2022, menunjukkan bahwa terdapat 1.426 anak- anak dalam usia 7-12 tahun (SD/MI) di Kota Banda Aceh yang tidak bersekolah dan atau putus sekolah.

Dari sebaran kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa anak-anak usia 7-12 tahun yang paling banyak tidak bersekolah adalah di Kecamatan Kuta Alam (600 anak) diikuti oleh Kecamatan Meuraxa (489 anak), Kecamatan Baiturrahman (413 anak) dan seterusnya. Sedangkan kecamatan dengan angka putus sekolah terendah dalam usia 7-12 tahun adalah di Kecamatan Luengbata (236 anak).

Angka Partisipasi Murni SMP/MTs (APM SMP/MTs)

Gambar 3.11 Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kota Banda , Provinsi Aceh Tahun 2016-2022



Pada tahun 2020, capaian Angka Partisipasi Murni SMP/MTs (APM SMP/MTs) Kota Banda Aceh adalah 79,19%. Capaian ini masih dibawah capaian Provinsi Aceh (87,98%) maupun capaian Nasional pada tahun yang sama (80,70%). Untuk provinsi Aceh sendiri, capaian APM SMP/MTs Kota Banda Aceh masih relatif rendah dan berada di peringkat 9 dari 23 Kabupaten/kota. Dilihat dari perkembangan antar waktu untuk indikator APM SMP/MTs Kota Banda Aceh, menunjak tren yang menurun dalam 5 tahun terakhir, terutama di tahun 2019 dan 2020 yang terjadi penurunan bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2018 yang mencapai 83,33%.

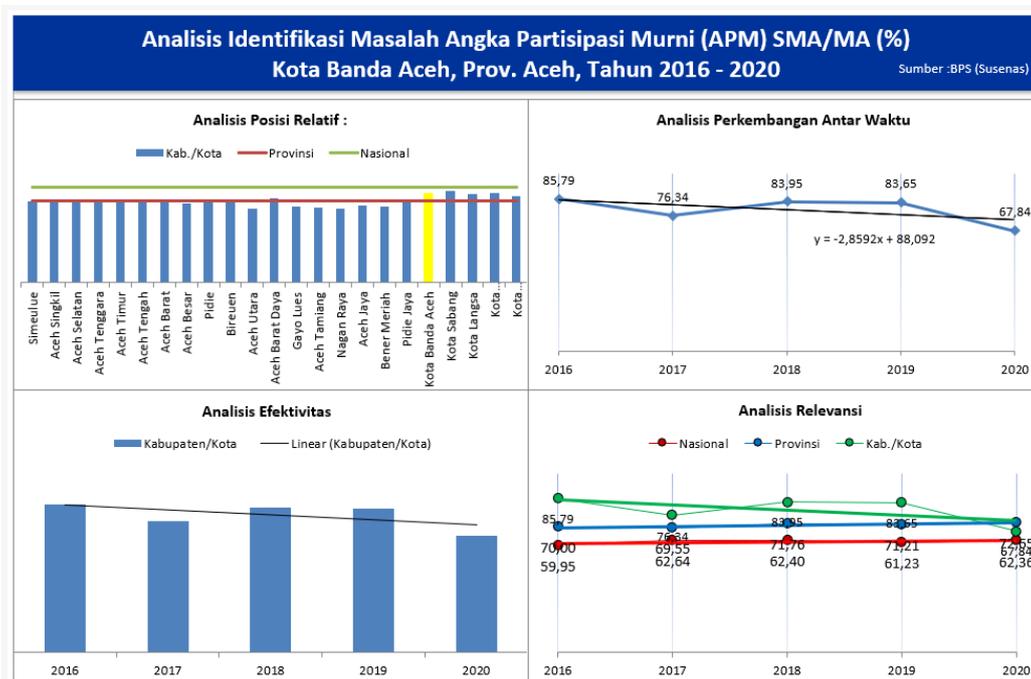
Dari capaian Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Kota Banda Aceh tahun 2020 yaitu 79,19%, mengartikan bahwa, pada tahun tersebut, terdapat 20,81% anak usia 13-15 tahun (usia SMP/MTs) yang tidak bersekolah dan atau putus sekolah. Merujuk kepada data P3KE Kemenko PMK tahun 2022, menunjukkan bahwa terdapat 167 anak-anak dalam usia 13-15 tahun (SMP/MTs) di Kota Banda Aceh yang tidak bersekolah dan atau putus

sekolah.

Dari sebaran kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa anak-anak usia 13-15 tahun yang paling banyak tidak bersekolah adalah di Kecamatan Kutaraja (46 anak) diikuti oleh Kecamatan Baiturrahman (31 anak), Kecamatan Jaya Baru (18 anak) dan seterusnya. Sedangkan kecamatan dengan angka putus sekolah terendah dalam usia 13-15 tahun adalah di Kecamatan Meuraxa dan Kecamatan Ulee Kareng (masing-masing 8 anak)

Angka Partisipasi Murni SMA/MA (APM SMA/MA)

Gambar 3.12 Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kota Banda , Provinsi Aceh Tahun 2016-2022



Pada tahun 2020, capaian Angka Partisipasi Murni SMA/MA (APM SMA/MA) Kota Banda Aceh adalah 67,48%. Capaian ini masih dibawah capaian Provinsi Aceh (72,65%) dan berada diatas capaianan Nasional pada tahun yang sama (62,36%). Untuk provinsi Aceh sendiri, capaian APM SMA/MA Kota Banda Aceh relatif tinggi dan berada di peringkat 3 dari 23 Kabupaten/kota setelah Kota Sabang dan Kota Lhokseumawe. Dilihat dari perkembangan antar waktu untuk indikator APM SMA/MA Kota Banda Aceh,

menunjuk tren yang menurun sebesar 2,86% dalam 5 tahun terakhir.

Dari capaian Angka Partisipasi Murni SMA/MA Kota Banda Aceh tahun 2020 yaitu 67,48%, mengartikan bahwa, pada tahun tersebut, terdapat 32,52% anak usia 16-18 tahun (usia SMA/MA) yang tidak bersekolah dan atau putus sekolah. Merujuk kepada data P3KE Kemenko PMK tahun 2022, menunjukkan bahwa terdapat 115 anak-anak dalam usia 16-18 tahun (SMA/MA) di Kota Banda Aceh yang tidak bersekolah dan atau putus sekolah.

Dari sebaran kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa anak-anak usia 16-18 tahun yang paling banyak tidak bersekolah adalah di Kecamatan Baiturrahman (25 anak), diikuti oleh Kecamatan Kuta Raja (22 anak), Kecamatan Banda Raya (17 anak) dan seterusnya. Sedangkan kecamatan dengan angka putus sekolah terendah dalam usia 16-18 tahun adalah di Kecamatan Meuraxa (2 anak).

3.3.2 Bidang Kesehatan

Kesehatan menjadi salah satu modal manusia (human capital) yang sangat diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas setiap manusia. Sehat merupakan suatu kondisi sejahtera secara sempurna fisik, mental dan sosial tidak terbatas pada bebas dari penyakit atau kelemahan saja. Peningkatan pelayanan kesehatan diharapkan dapat menghasilkan derajat kesehatan masyarakat lebih tinggi sehingga memungkinkan masyarakat hidup lebih produktif, baik secara ekonomi maupun sosial sehingga tercipta masyarakat sehat secara keseluruhan. Di samping itu, kondisi kesehatan merupakan salah satu fokus utama dalam pembangunan daerah yang dapat menjadi faktor meningkatnya kemiskinan daerah.

Terkait permasalahan kemiskinan dalam bidang kesehatan, fokus analisis akan dilakukan pada meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak, dengan tetap mempertimbangkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan penanganan penyakit.

Kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu isu utama pembangunan nasional di bidang kesehatan. Di dalam RPJMN 2020-2024, ada empat

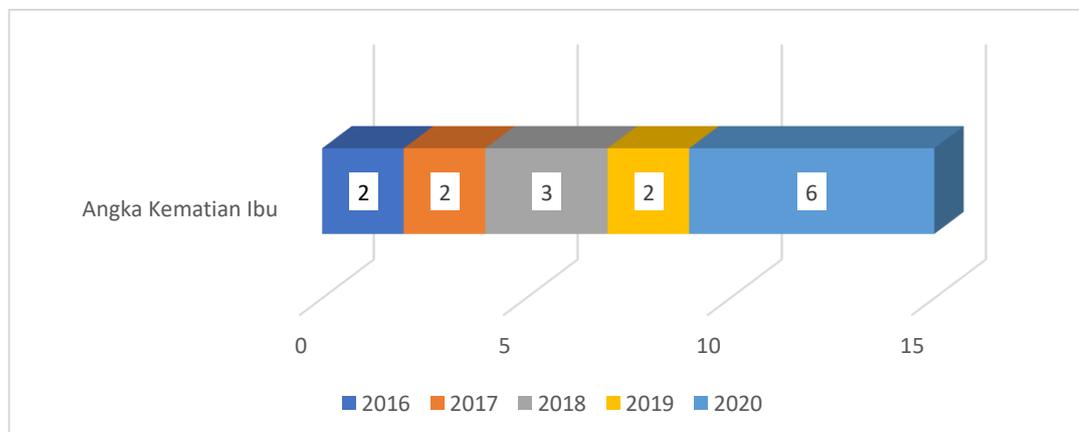
kelompok isu utama pembangunan nasional di bidang kesehatan, yaitu kesehatan ibu dan anak; status gizi; pengendalian penyakit; dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian neonatal merupakan pantauan terhadap kasus kematian bayi yang berumur kurang dari 1 bulan pada satu tahun tertentu dibagi dengan jumlah bayi lahir hidup dikalikan 1000. Di kota banda aceh, angka kematian neonatal ini hanya terdapat 3 kasus/kejadian atau 0.07% saja. Umumnya dikarenakan faktor gizi, kurangnya pemeriksaan pada periode kehamilan, adanya komplikasi sehingga bayi lahir dengan berat badan rendah.

Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu Melahirkan yang dilaporkan pada tahun 2020 cukup tinggi yakni sejumlah 6 kasus dari 100.000 kelahiran hidup. Hal ini dipengaruhi faktor masih kurangnya ibu-ibu yang memeriksakan kesehatan pasca melahirkan, sehingga berbagai faktor penyebab tidak terpantau dan dukungan suplemen yang tersedia tidak diakses. Hal ini juga dipengaruhi oleh adanya tata cara adat yang memberikan larangan atau pantangan-pantangan makanan bagi ibu pasca melahirkan sehingga menyebabkan suplai gizi yang sangat dibutuhkan untuk pemulihan ibu serta kesiapan menyusui menjadi kurang. Gambaran angka kematian ibu di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Profil Kesehatan Aceh, 2020

Gambar 3. 13
Angka Kematian Ibu di Kota Banda Aceh, 2016-2020

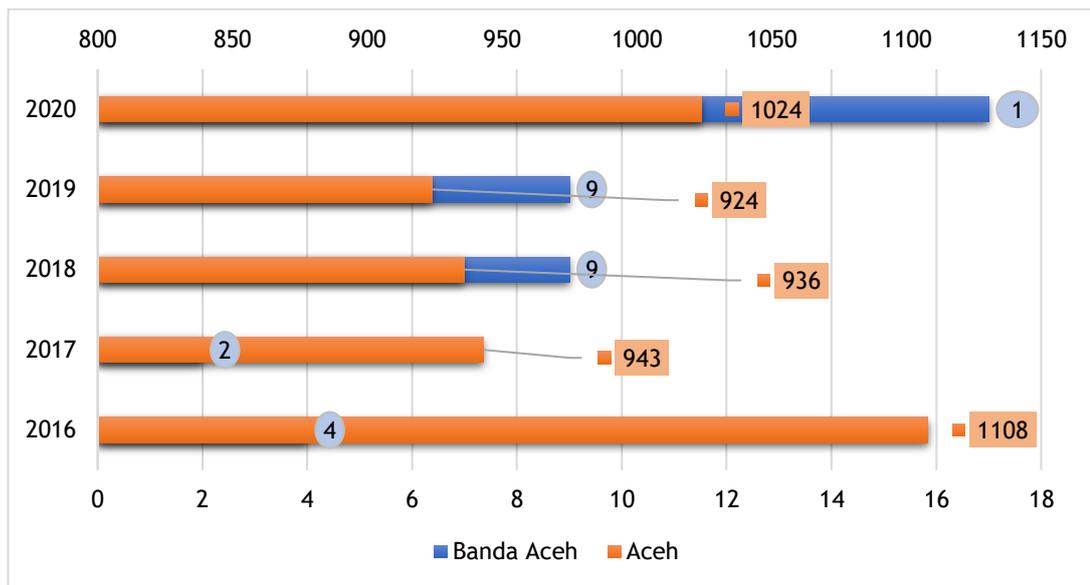
Gambar di atas menunjukkan angka kematian ibu di Kota Banda Aceh menunjukkan peningkatan dari 2016 sampai dengan 2020. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pihak terkait agar angka kematian ibu ini bisa menurun.

Angka Kematian Bayi (AKB)

Salah satu indikator utama kesehatan adalah Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB). Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan naik turunnya angka kematian bayi, diantaranya:

- 1) masih ada ibu dengan penyakit penyerta yang ingin hamil tanpa direncanakan dengan baik;
- 2) masih rendahnya kepedulian dan keterampilan petugas dalam penatalaksanaan ibu hamil dan bayi;
- 3) kurangnya kepedulian keluarga terhadap ibu hamil dan masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perawatan bayi;
- 4) wanita usia subur (WUS) yang menderita Kurang Energi Kronis (KEK) dan anemia kurang mendapat perhatian sehingga saat hali akan menimbulkan risiko bagi janin yang dikandung.

Sampai dengan akhir tahun 2020 Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Banda Aceh sebanyak 17 bayi per 1000 kelahiran hidup. Jumlah ini meningkat dibandingkan kasus kematian bayi tahun 2016 dimana AKB sebesar 4 per 1000 kelahiran hidup. Ada banyak faktor yang mempengaruhi AKB tetapi tidak mudah untuk menemukan faktor yang paling dominan. Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor aksesibilitas dan pelayanan kesehatan dengan tenaga medis yang terampil, serta kesediaan masyarakat untuk merubah kehidupan tradisional ke norma kehidupan modern dalam bidang kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat AKB.



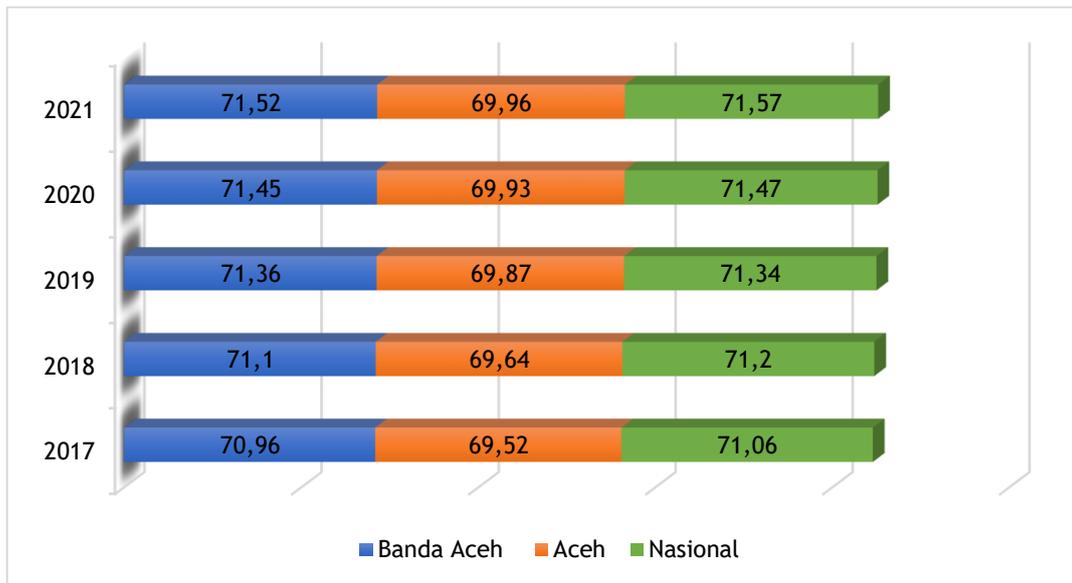
Sumber; Profil Kesehatan Aceh, 2021

Gambar 3.14
Perkembangan AKB Banda Aceh dan Aceh Tahun 2016 – 2020

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan angka kematian bayi di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan. Walaupun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan angka kematian bayi di Provinsi Aceh, namun angka trend yang meningkat ini perlu mendapat perhatian dari pihak terkait. Diperlukan usaha dari pihak terkait untuk terus berupaya menurunkan angka kematian bayi.

Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.



Sumber BPS Banda Aceh dan BPS Aceh, 2021

Gambar 3.15

Angka Harapan Hidup di Kota Banda Aceh Tahun 2017–2021

Angka harapan hidup di Kota Banda Aceh secara konstan mengalami peningkatan dari 70,96 tahun 2017 menjadi 71,52 tahun 2021. Peningkatan AHH sejak 2017 sampai dengan 2021 menunjukkan derajat kesehatan penduduk Kota Banda Aceh sudah membaik. Gambaran perbandingan perkembangan AHH antara Banda Aceh, Aceh, dan Nasional pada tahun 2017– 2021 terlihat Kota Banda Aceh masih dibawah nasional namun sudah diatas Provinsi Aceh. Namun pencapaian tersebut tetap harus terjaga dan diupayakan terus meningkat karena Kota Banda Aceh masih dibawah nasional. Oleh karenanya program-program peningkatan derajat kesehatan masyarakat harus tetap dijalankan.

Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi adalah jumlah bayi yang hidup per 1.000 bayi. Angka kelangsungan hidup bayi ini dihitung dari per-1.000 jumlah bayi dikurangkan jumlah kematian bayi. Semakin besar angka kelangsungan hidup bayi menunjukkan semakin baik indikator kesehatannya.

Tabel 3. 3
Tabel Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022

Tahun	Angka Kelangsungan Hidup Bayi
2018	998
2019	998
2020	998
2021	999
2022	

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2022

Dari tabel dapat disimpulkan bahwa Angka kelangsungan hidup bayi di kota Banda Aceh dalam 5 tahun terakhir stabil dan meningkat di tahun 2021 yang mencapai 999. Adanya peningkatan terhadap angka kelangsungan hidup bayi dapat tercapai di sebabkan oleh beberapa faktor, yang pertama meningkatkan mutu SDM kesehatan dengan pelatihan dan akreditasi fasilitas kesehatan, kedua dengan melakukan penguatan manajemen dan sistem informasi (seluruh kematian dilakukan audit), ketiga meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (melalui program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga /PIS-PK) dan hal lain peningkatan sistem rujukan, menjamin ter integrasinya pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier.

Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak balita. Jadi posyandu adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat. Posyandu dibentuk bertujuan untuk :

1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas)
2. Membudayakan NKKBS.

3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Tujuan pembentukan posyandu tersebut didukung dengan 5 kegiatan pokok posyandu, yaitu :

1. KIA
2. KB
3. Imunisasi
4. Gizi
5. Penanggulangan Diare

Tabel 3. 4
Perkembangan Rasio Pelayanan Posyandu Per-Satuan Balita di Kota Banda Aceh Tahun 2018 – 2021

Tahun	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio
2018	113	21.739	1 : 192
2019	114	20.838	1 : 182
2020	114	27.572	1 : 241
2021	114	11.323	1 : 99
2022			

Sumber Statistik Banda Aceh, 2022

Perkembangan rasio pelayanan posyandu di Kota Banda Aceh untuk per-satuan balita terus meningkat. Dari tahun 2017 yang hanya bisa melayani 1 posyandu untuk 182 balita, maka pada tahun 2001 sudah bisa melayani 1 posyandu untuk 99 balita. Jumlah ini sangat menggembirakan karena setiap gampong semakin sadar untuk berperan aktif untuk memantau dan menjaga terus kesehatana balita yang ada di lingkungannya melalui layanan Posyandu.

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk

Sistem pelayanan kesehatan di Indonesia meliputi pelayanan rujukan yang berupa:

1. Pelayanan Kesehatan Dasar

Pada umumnya pelayanan dasar dilaksanakan di puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan Pelayanan lainnya di wilayah kerja puskesmas selain rumah sakit.

2. Pelayanan Kesehatan Rujukan

Pada umumnya dilaksanakan di rumah sakit. Pelayanan keperawatan diperlukan, baik dalam pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan rujukan.

Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Pelayanan kesehatan dasar yang diterapkan di Indonesia memegang peranan penting dalam pemberian layanan kesehatan yang dapat menjangkau wilayah-wilayah pedesaan. Untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang terjangkau, maka sarana dan prasarana pelayanan kesehatan harus tersedia atau tersebar di setiap kecamatan. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang lebih baik. Kota Banda Aceh saat ini telah memiliki 11 puskesmas, 27 puskesmas pembantu, 34 polindes/poskedes, 114 posyandu, 54 klinik/balai kesehatan, dan 7 puskesmas keliling yang tersebar di 9 kecamatan dan 90 gampong. Gambaran fasilitas kesehatan di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5

Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2021

Fasilitas Kesehatan	2018	2019	2020	2021	2022
Rumah Sakit Umum	13	13	13	14	
Rumah Bersalin	7	7	7	7	
Puskesmas	11	11	11	11	
Puskesmas Pembantu	27	27	27	27	
Polindes/Poskedes	34	34	34	34	

Posyandu	113	114	114	114	
Klinik/Balai Kesehatan	33	39	39	54	
Puskesmas Keliling	7	7	7	7	

Sumber: Statistik Banda Aceh, 2021

Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan kesehatan dibidang pelayanan langsung seperti Rumah sakit, bertujuan untuk meningkatkan mutu, cakupan dan efisiensi pelaksanaan rujukan medik dan rujukan kesehatan secara terpadu serta meningkatkan dan memantapkan manajemen pelayanan kesehatan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian.

Pelayanan kesehatan rumah sakit di Kota Banda Aceh telah menunjukkan kinerja yang baik. Ketersediaan rumah sakit baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta sudah tersebar dan mencukupi untuk pelayanan kesehatan rujukan. Dengan adanya program BPJS dan JKA pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat sudah memberikan pelayanan yang maksimal.

Tabel 3.6
Perkembangan Rasio Rumah Sakit Per-Satuan Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Rumah Sakit (Umum + Swasta)	13	13	13	14	
Jumlah Penduduk	265,111	268,156	252,899	276,223	
Rasio	1 : 22	0,0628125	1 : 21	1 : 18	

Sumber Statistik Banda Aceh, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pelayanan kesehatan rumah sakit masih memenuhi standar rasio rumah per-satuan penduduk. Idealnya satu rumah sakit melayani seratus ribu penduduk, sementara data diatas menunjukkan rata-

rata rumah sakit melayani penduduk dibawah seratus ribu penduduk. Namun over capacity pelayanan dapat terjadi apabila banyaknya pasien dari luar wilayah Kota Banda Aceh yang dirujuk ke rumah sakit di Banda Aceh terutama rumah sakit pemerintah.

Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio Dokter per 100.000 Penduduk adalah Dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di suatu wilayah (di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain) per 100.000 penduduk. Ketersediaan jumlah dokter memberikan gambaran pelayanan kesehatan dari sisi kuantitas tenaga medis terhadap masyarakat. Pola hidup yang semakin berubah terutama diperkotaan menjadikan masyarakat rentan terhadap gejala penyakit maupun keluhan kesehatan lainnya yang membutuhkan penanganan dokter. Kota Banda Aceh sebagai pusat pelayanan kesehatan di Provinsi Aceh memiliki beban besar dalam pelayanan kesehatan terutama penyediaan tenaga medis. Tabel berikut menggambarkan kondisi pelayanan dokter terhadap penduduk di Kota Banda Aceh.

Tabel 3.7
Perkembangan Rasio Dokter Per-100.000 Penduduk di Kota Banda Aceh
Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Dokter (rumah sakit dan puskesmas)	585	637	469	697	
Jumlah Penduduk	265,111	268,156	276,304	276,223	
Rasio/100.000 penduduk	1 : 14	1 : 33	1 : 16	1 : 32	

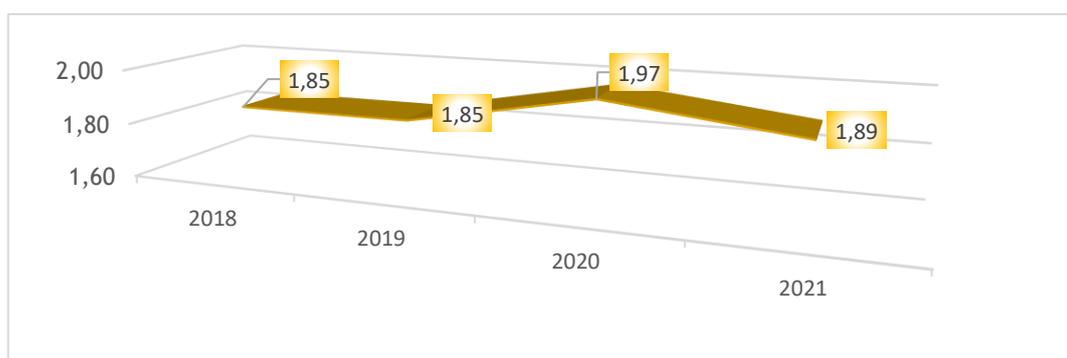
Sumber BPS Kota Banda Aceh dan Profil Kesehatan Kota Banda Aceh, 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah dokter yang tersedia di Kota Banda Aceh cenderung menurun sejak tahun 2017 sampai dengan 2021. Penurunan jumlah dokter terbesar terjadi pada tahun 2020 yang diakibatkan karena pandemi *Covid-19*. Namun, pada tahun 2021 jumlah dokter kembali meningkat. Jika dilihat dari rasio dokter per satuan penduduk di Kota Banda Aceh pada tahun 2017 sampai dengan 2021

menunjukkan jumlah dokter yang ada di Kota Banda Aceh sudah sangat cukup dalam melayani 100.000 penduduk. Bahkan rasio ini sangat kecil yang artinya di tahun 2021, 1 orang dokter melayani 32 penduduk.

Rasio Tenaga Medis di Puskesmas per Satuan Penduduk

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Salah satu pengelompokan tenaga kesehatan adalah tenaga medis. Rasio tenaga medis persatuan penduduk Tahun 2018 s/d 2021 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2021

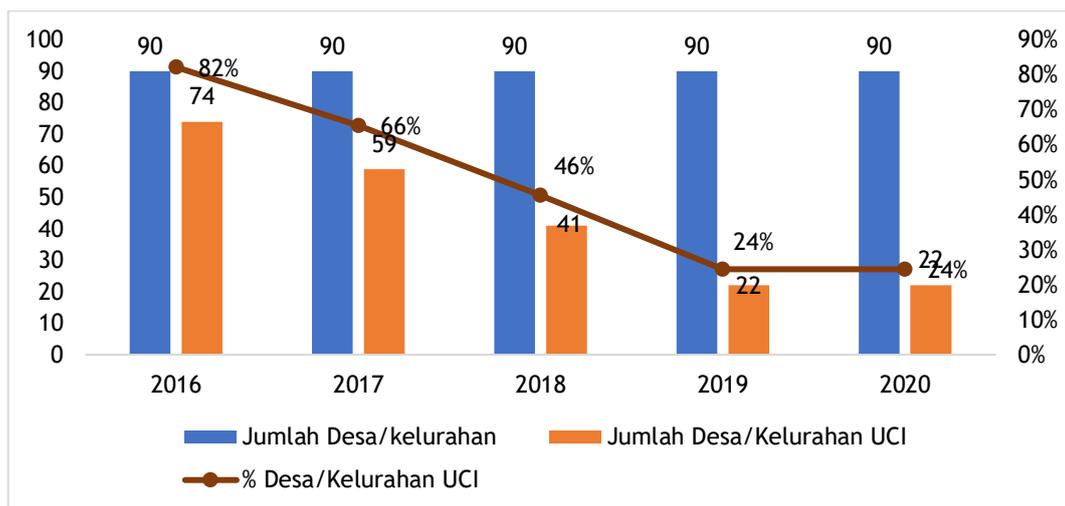
Gambar 3. 16
Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk Tahun 2018-2021

Rasio tenaga medis di Puskesmas Kota Banda Aceh Tahun 2017 adalah 1.85. Rasio ini terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2021 sebesar 1,89. Terjadi peningkatan rasio ini diakibatkan karena adanya penurunan jumlah tenaga medis yang melakukan pelayanan pada UPTD Puskesmas Kota Banda Aceh.

Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Imunisasi sangat penting untuk melindungi bayi dari penyakit berbahaya dan menular, imunisasi bersifat komunitas maknanya adalah imunisasi harus bersifat menyeluruh atau dalam kata lain keseluruhan anak harus diimunisasi, kalau ada anak yang tidak diimunisasi akan terlindungi dari anak yang di imunisasi di lingkungan nya yang ditarget dalam standar desa UCI (*universal child immunization*).

Sedangkan untuk desa UCI (Universal Child Immunization) yang bermakna suatu keadaan dimana suatu desa minimal bayi terimunisasi lengkap 80%. Namun persentase masyarakat yang melakukan imunisasi di desa menjadi lebih kecil. Pada tahun 2016 ada 74 desa (82%), pada tahun 2017 ada 59 desa (66%), pada tahun 2018 ada 41 desa (46%), pada tahun 2019 dan 2020 ada 22 desa (24%) dari 90 desa di Kota Banda Aceh. Target yang paling baik untuk desa UCI adalah 100%, dimana angka tersebut masih jauh dari pencapaian untuk Kota Banda Aceh.



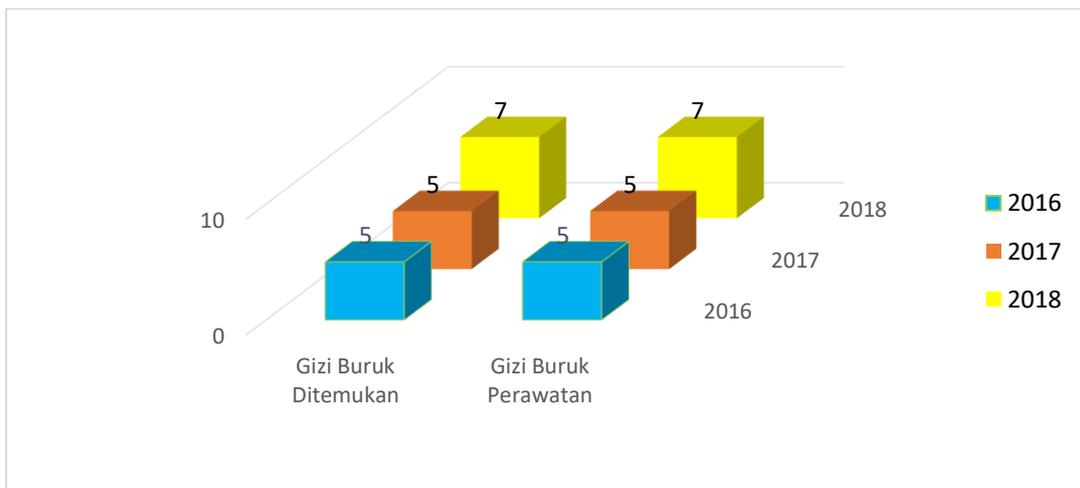
Sumber: Profil Kesehatan Aceh, 2021

Gambar 3.17
Cakupan Desa/ Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) Tahun 2016-2020 di Kota Banda Aceh

Dari hasil persentase cakupan desa UCI angkanya mengalami penurunan. Namun hal ini bukan langsung disebabkan karena keinginan masyarakat untuk melakukan imunisasi menjadi rendah. Hal yang menyebabkan penurunan ini bisa saja disebabkan karena sebagian masyarakat terutama masyarakat berpendapatan menengah keatas yang ada di Kota Banda Aceh melakukan imunisasi langsung ke rumah sakit atau praktek dokter. Berbagai telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan desa UCI seperti, sosialisasi dari program imunisasi dan dari ulama, peningkatan kapasitas petugas, sweeping langsung ke masyarakat dan lain-lain, supaya cakupan desa UCI bisa meningkat lebih baik.

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Gizi buruk atau malnutrisi adalah suatu bentuk terparah akibat kurang gizi menahun. Selain akibat kurang konsumsi jenis makanan bernutrisi seimbang, gizi buruk pada anak juga bisa disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan gangguan pencernaan atau gangguan penyerapan zat makanan yang penting untuk tubuh. Perkembangan kasus balita gizi buruk di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan di tahun 2018, namun kesemuanya mendapat perawatan sesuai standar kesehatan sehingga gizi buruk yang dialami tersebut dapat ditangani dengan baik. Grafik berikut memberikan gambaran perkembangan cakupan kasus gizi buruk dan yang mendapat perawatan di kota Banda Aceh tahun 2016 – 2018



Sumber: Profil Kesehatan Banda Aceh, 2021

Gambar 3.18
Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Penyakit demam berdarah *dengue* (DBD) adalah penyakit infeksi virus yang ditularkan oleh nyamuk aedes aegypti. Penyakit DBD masih merupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Hal ini bisa disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya tingginya curah hujan sehingga banyak terjadi genangan air pada wadah atau tempat yang dapat menampung air hujan sebagai tempat perindukan nyamuk DBD di lingkungan luar sekitar rumah, faktor yang lainnya juga dapat dilihat dari tingkat pengetahuan, pemahaman dan kepedulian serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat yang masih rendah, bisa dikarenakan tidak mengetahui ataupun tidak mempunyai kesempatan untuk memantau tempat-tempat

perindukan nyamuk DBD yang ada di dalam rumah, seperti ditempat penampungan air dispenser, kulkas, bak mandi, vas bunga, talang air yang tersumbat dan lain lain. Hal ini menjadi salah satu faktor berkembang biaknya nyamuk DBD secara cepat.

Tabel 3.8
Data Sebaran Kasus DBD Tahun 2018-2022

Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
Kuta Alam	13	49	14	3	44
Lueng Bata	7	34	9	1	23
Meuraxa	23	41	11	4	75
Syiah Kuala	15	60	15	0	26
Ulee Kareng	6	36	6	3	21
Banda Raya	11	31	14	1	61
Jaya Baru	13	42	15	0	59
Kuta Raja	11	13	2	0	19
Baiturrahman	17	38	12	0	39
Total	111	344	98	13	366

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2023

Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Banda Aceh pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jauh mengalami penurunan, dimana pada tahun 2017 (236 kasus), tahun 2018 (111 kasus), tahun 2019 mencapai angka tertinggi di 344 kasus yang dilaporkan. Namun di tahun 2021 menurun menjadi 19 kasus dan pada tahun 2022 menjadi 366 kasus.

Penanggulangan DBD yang masih sangat efektif adalah dengan melakukan Gerakan 3M Plus, yaitu Menguras, Menutup dan Mengubur serta Menghindari Gigitan Nyamuk. Pengasapan atau *fogging* hanya membunuh nyamuk dewasa saja, sedangkan jentik nyamuk DBD masih tetap bertahan hidup dan menjadi nyamuk dewasa setelah beberapa hari kemudian. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dan pemberantasan tempat-tempat perindukan nyamuk DBD dengan cara Pemberdayaan Masyarakat melalui Kader JUMANTIK = Juru Pemantau Jentik.

Jumlah Kasus Baru HIV

Pada tahun 2021, jumlah kasus baru positif HIV adalah 41 orang dan positif AIDS sebanyak 21 orang dengan proporsi kelompok umur pada usia 20-24 tahun dan terbanyak pada usia 25-49 tahun. Kasus ini sangat berkaitan dengan hubungan seksual yang berisiko atau bukan dengan pasangan yang sah, meski tidak tertutup kemungkinan penularan dengan cara-cara non seksual seperti penggunaan narkoba.

Tabel 3.9
Jumlah Kasus Baru HIV Tahun 2021

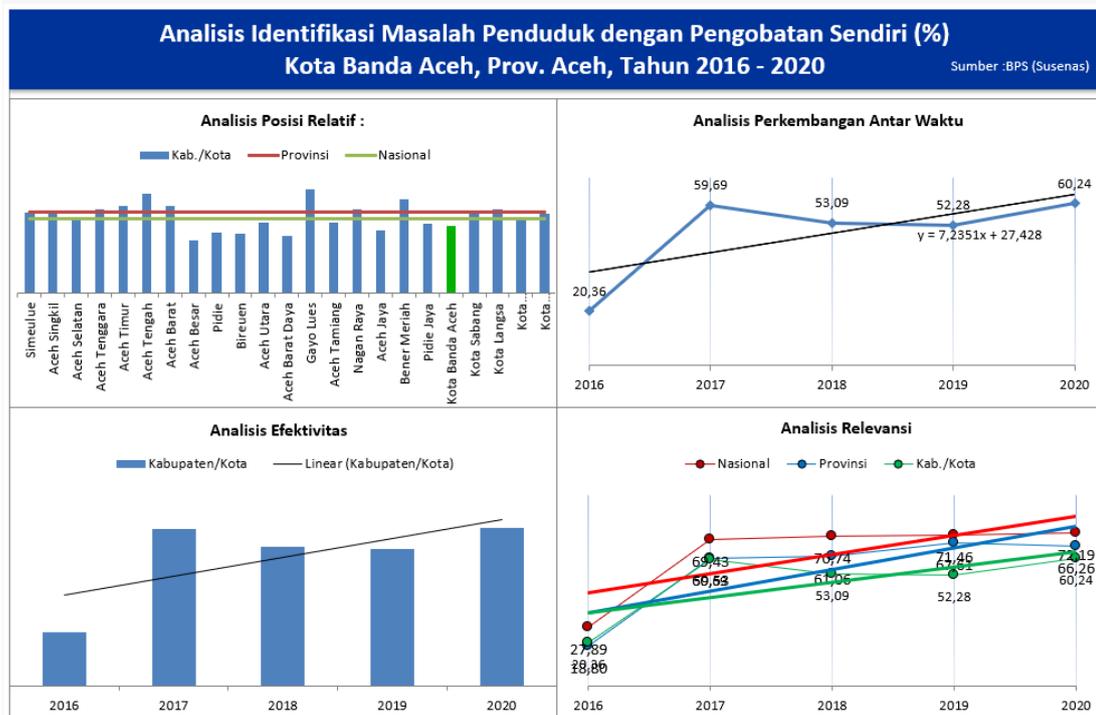
No	Kelompok Umur	HIV				Aids			
		L	P	L+P	Proporsi Kelompok Umur	L	P	L+P	Proporsi Kelompok Umur
1	≤ 4 Tahun	0	0	0	0,00	0	0	0	0.00
2	5 - 14 Tahun	1	0	1	0,00	0	0	0	0.00
3	15 - 19 Tahun	1	0	1	0,00	0	0	0	0.00
4	20 - 24 Tahun	15	0	15	0,00	1	0	1	0.00
5	25 - 49 Tahun	23	1	24	0,00	18	1	19	0.00
6	≥ 50 Tahun	0	0	0	0,00	1	0	1	0.00
Jumlah		40	1	41		20	1	21	

Sumber: Bidang P2PL Dinkes Kota Banda Aceh Tahun 2021

Penduduk dengan Pengobatan Sendiri

Penduduk dengan pengobatan sendiri merupakan perbandingan antar penduduk yang sakit yang diobati sendiri dengan jumlah penduduk yang mengalami keluhan yang menyebabkan kegiatannya terganggu, indikator ini memberikan informasi tentang persentase penduduk yang sakit tidak menggunakan fasilitas pemerintah dalam pengobatannya

Gambar 3.19 Analisis Identifikasi Masalah Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Kota Banda , Provinsi Aceh Tahun 2016-2022



Sejak tahun 2016 - 2020, penduduk dengan pengobatan sendiri di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan, walaupun menurun pada tahun 2019. Ini membuktikan bahwa dalam kurun waktu tersebut, secara umum penduduk Kota Banda Aceh melakukan upaya pengobatan sendiri jika ada keluhan sakit dan belum menggunakan fasilitas kesehatan dalam berobat. Berbagai pendekatan penanganan penduduk yang sakit agar menggunakan fasilitas kesehatan dalam berobat menunjukkan kondisi belum efektif. Peningkatan penduduk dengan pengobatan sendiri Kota Banda Aceh relevan dengan meningkatnya indikator ini secara nasional dan Provinsi Aceh.

Angka Morbiditas

Angka morbiditas merupakan angka yang menunjukkan tingkat kesakitan akibat gangguan struktur maupun fungsi tubuh seseorang yang merupakan derajat sakit, cedera maupun gangguan pada populasi yang merupakan penyimpangan dari status sehat atau kesejahteraan suatu masyarakat (BPS). Semakin tinggi morbiditas, menunjukan derajat kesehatan penduduk yang semakin buruk.

Hal ini bertujuan untuk menjamin kelayakan perumahan yang dihuni sehingga dapat memberikan rasa nyaman, aman, tentram dan sejahtera bagi penghuninya. Peran tersebut telah sesuai dengan peran pemerintah sebagai stabilisator, inovator, dan katalisator. Dalam mewujudkan perumahan yang layak huni, dukungan dan bantuan dari pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni menjadi penting. Gambaran jumlah rumah layak huni dari tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 10
Rumah Layak Huni Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Rumah	66.024	67.613	68.507	54.689	54.689
2	Jumlah Rumah Layak Huni	64.144	65.852	64.314	50.424	50.574
	Persentase	97,88	98,13	93,88	92,20	92,47

Sumber: Dinas Perkim Kota Banda Aceh, 2022

Jumlah rumah layak huni pada tahun 2017 telah mencapai 63.480 unit. Namun, jumlah rumah layak huni pada tahun 2021 menurun menjadi 50.424 unit. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan dalam mengidentifikasi rumah layak huni sebelum tahun 2020. Namun, ini tetap menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan oleh pemerintah melalui dinas terkait. Untuk tahun 2022, jika dibandingkan antara jumlah rumah dengan jumlah rumah layak huni yang ada di Kota Banda Aceh, maka masih ada 7,53 persen lagi rumah yang belum layak huni.

Persentase Permukiman yang Tertata

Pemukiman yang tertata adalah permukiman yang dibangun sesuai tata ruang wilayah dengan memperhatikan hal-hal dasar dalam sebuah kawasan permukiman, seperti rumah layak huni, akses jalan, jaringan drainase, sanitasi, air bersih, pengelolaan sampah, dan proteksi kebakaran. Persentase permukiman yang tertata dapat diukur dari perbandingan luas permukiman yang tertata dengan jumlah permukiman keseluruhan. Persentase permukiman yang tertata di Kota Banda Aceh terus meningkat, mulai 17,61% di tahun 2018 menjadi 79,82% di tahun 2022. Informasi persentase luas permukiman yang tertata di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 11
Persentase Luas Permukiman Tertata Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas Area Permukiman tertata (Ha)	464,23	480,39	620,56	1.485,83	1546,04
2	Luas Area Permukiman Keseluruhan (Ha)	2.635.99	2.635.99	2.635.99	1.936,83	1.936,83
	Persentase	17,61	18,22	23,54	76,71	79,82

Sumber: Dinas Perkim, 2023

Kawasan Permukiman Kumuh

Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi Aceh belum sepenuhnya terlepas dari permasalahan lingkungan bersih yang bebas dari kawasan kumuh. Keluhan yang paling sering disampaikan mengenai permukiman kumuh yang umumnya terjadi pada masyarakat miskin adalah rendahnya kualitas lingkungan dan kesehatan yang dianggap sebagai bagian kota yang harus disingkirkan. Terbentuknya permukiman kumuh, yang sering disebut sebagai *slump area* sering dilihat berpotensi menimbulkan banyak masalah perkotaan, karena bisa menjadi sumber timbulnya berbagai masalah lingkungan, kesehatan, dan perilaku menyimpang, seperti kejahatan, serta sumber penyakit sosial lainnya.

Tertatanya kawasan permukiman kumuh akan memberikan manfaat terhadap lingkungan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan mengurangi kekumuhan
2. Mengurangi dampak pencemaran lingkungan
3. Mengurangi tingkat bahaya pada saat bencana
4. Mengurangi dampak banjir yang kerap terjadi karena tidak tersedianya drainase lingkungan yang layak

Berdasarkan hasil Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) di Tahun Anggaran 2021, luas area permukiman kumuh mengalami penurunan dari 461,48 ha menjadi 451 ha. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan yang telah dilakukan di berbagai wilayah permukiman kumuh sudah baik. Namun perlu juga dilakukan upaya pencegahan agar tidak ada penambahan lokasi kumuh di Kota Banda Aceh. Diharapkan Kota Banda

Aceh bisa mewujudkan terciptanya kotaku (kota tanpa kumuh) sehingga target 0% daerah kumuh dapat terwujud.

Tabel 3. 12
Luas Kawasan Kumuh Kota Banda Aceh Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	485,29	485,29	461,48	451,40	451,40
2	Luas Wilayah (Ha)	59.002	59.002	59.002	59.002	59.002
3	Luas Penanganan (Ha)	464,23	16,16	4,90	73,09	60,61
4	Sisa Luas Kawasan (Ha)	21,06	4,90	456,58	451,40	390,79

Sumber: Dinas Perkim, 2023

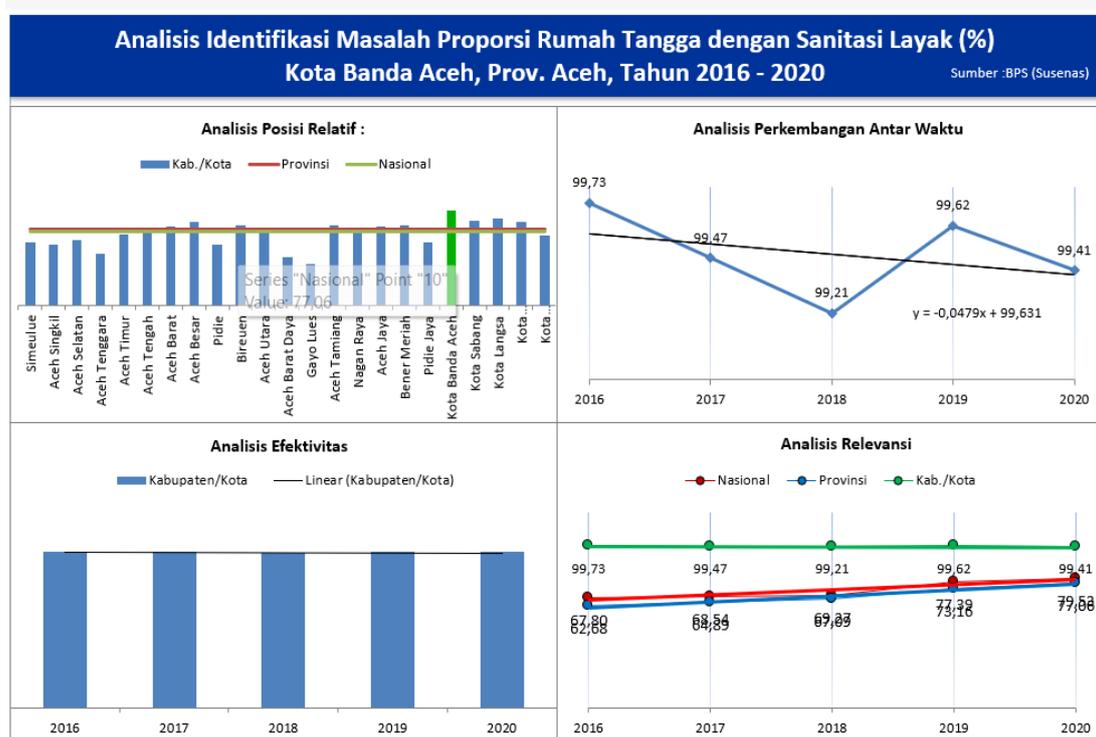
Tabel 2.10 menunjukkan luas kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Banda Aceh. Pada tahun 2017 luas kawasan kumuh mencapai 537,19 ha, kemudian terus menurun hingga 451,40 ha di tahun 2022. Luas Kawasan Kumuh (2022) ini hanya 0,76% dari luas wilayah Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan upaya-upaya pengurangan kumuh melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur permukiman, serta pembangunan dan peningkatan kualitas rumah. Luas kawasan yang telah ditangani mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga luas kawasan yang perlu penanganan kumuh tersisa 390,79 ha.

Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%)

Pengembangan sanitasi Kota Banda Aceh bertujuan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur serta pelayanan sanitasi menyeluruh sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Koordinasi mendalam antar dinas/ SKPD perlu dilakukan untuk dapat melaksanakan pengembangan sanitasi secara terpadu dan berkesinambungan sebagai bentuk percepatan pembangunan sanitasi kota.

Jumlah rumah tangga dengan sanitasi layak di Kota Banda Aceh menunjukkan trend penurunan dalam 5 tahun terakhir. Pada 2016 pernah mencapai 99,73 persen. Namun pada tahun 2020, jumlah rumah tangga dengan sanitasi layak turun menjadi 99,41 persen. Penurunan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2018

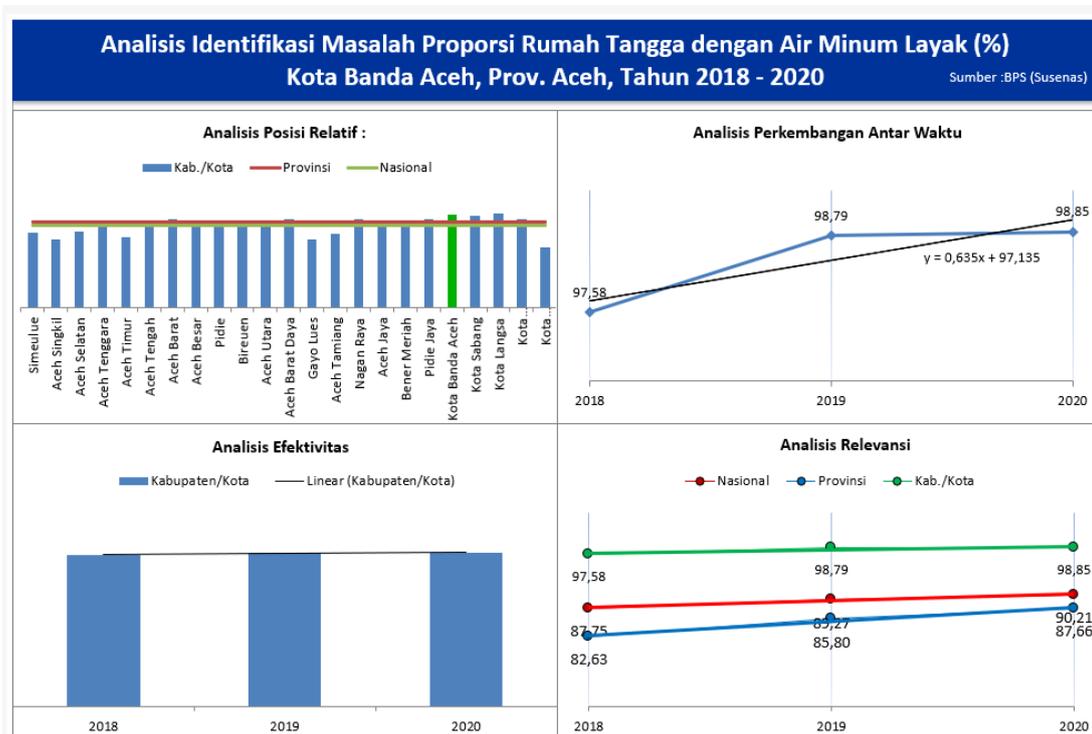
Gambar 3.21 Analisis Identifikasi Masalah Proporsi Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak (%) Kota Banda , Provinsi Aceh Tahun 2016-2022



mencapai 99,21%. Penurunan ini menjadi perhatian Kota Banda Aceh dan perlu ditingkatkan karena seharusnya jumlah rumah tinggal bersanitasi perlu untuk terus ditingkatkan per tahunnya, hingga mencapai 100 persen. Lebih jelasnya rincian jumlah rumah tangga berakses sanitasi ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak

Gambar 3.22 Analisis Identifikasi Masalah Proporsi Rumah Tangga Dengan Air Minum Layak (%) Kota Banda , Provinsi Aceh



Dari gambar di atas menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga dengan air minum layak di Kota Banda Aceh tahun 2020 adalah 98,85%. Capaian ini lebih baik dari

Sedangkan berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kemenko PMK, Tahun 2022, menunjukkan bahwa 40% rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah di Kota Banda Aceh berdasarkan sumber air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat berdasarkan kecamatan sebagai berikut :

Tabel 3. 13
Jumlah Rumah tangga di Kota Banda Aceh Berdasarkan Sumber
Air Minum Yang Dapat Dikonsumsi Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Air Kemasan / Isi Ulang	Leding / PAM	Sumber Terlindung	Sumber Tidak Terlindung	Lainnya
	Total (9)		13.228	2.682	784	23
1.	Baiturrahman		1.946	236	61	2
2.	Kuta Alam		1.874	1.038	62	2
3.	Meuraxa		2.030	81	58	2
4.	Syiah Kuala		1.318	318	67	2
5.	Lueng Bata		1.209	255	79	3
6.	Kuta Raja		1.002	395	14	2
7.	Banda Raya		1.225	178	266	6
8.	Jaya Baru		1.246	104	109	0
9.	Ulee Kareng		1.378	77	68	4

Rumah Tangga dengan Akses Listrik

Menurut data BPS persentase Rumah Tangga yang memiliki sambungan listrik PLN di Banda Aceh sudah mencapai 100%. Kondisi ini sudah dicapai sejak tahun 2011.

Berdasarkan data P3KE, dari 16.720 keluarga 40% penduduk miskin, masih terdapat 220 keluarga yang menggunakan listrik non PLN dan 10 keluarga menggunakan penerangan bukan listrik.

Tabel 3. 14
Jumlah Rumah tangga di Kota Banda Aceh Berdasarkan Sumber
Penerangan Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik
	Total (9)		16.510	220
1.	Baiturrahman		2.217	30
2.	Kuta Alam		2.956	30
3.	Meuraxa		2.164	6
4.	Syiah Kuala		1.667	37
5.	Lueng Bata		1.535	14
6.	Kuta Raja		1.389	26
7.	Banda Raya		1.671	7
8.	Jaya Baru		1.397	62
9.	Ulee Kareng		1.514	8

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2022 terdapat 1,38% keluarga penduduk Kota Banda Aceh yang belum memiliki sambungan listrik PLN dan ini perlu mendapatkan perhatian serius Pemerintah Kota Banda Aceh, artinya jika ditahun-tahun mendatang capaian rumah tangga dengan akses listrik ingin dicapai 100%, maka upaya melistriki rumah masyarakat tetap menjadi penting. Secara logika perencanaan, rumah tangga yang belum memiliki akses listrik adalah rumah tangga penduduk dengan kesejahteraan rendah (miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin), maka pemantauan data mikro untuk pensasaran melistriki rumah masyarakat menjadi sangat dibutuhkan.

Dari analisis dan *focus group discussion* yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, permasalahan kemiskinan dalam bidang infrastruktur dasar yang masih menjadi prioritas Pemerintah Kota Banda Aceh adalah:

1. Persentase rumah tangga dengan sanitasi layak
2. Persentase rumah tangga dengan air minum layak
3. Persentase rumah tangga dengan akses listrik

3.3.4 Bidang Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja merupakan penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja terbagi menjadi 2 bagian yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk usia kerja yang besar dapat menjadi sumber pembangunan daerah. Di sisi lain, penduduk usia kerja yang melimpah dan tidak dibekali dengan pengembangan *soft skill* serta lapangan pekerjaan yang memadai akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Kondisi tersebut tentunya akan mengganggu kestabilan ekonomi suatu daerah. Masalah ketenagakerjaan adalah masalah kemiskinan baik secara nasional, provinsi maupun di lingkup kabupaten/kota, permasalahan timbul karena tidak adanya perimbangan antara pertumbuhan jumlah tenaga kerja dari tahun ke tahun dengan perkembangan jumlah lapangan usaha yang menampung tenaga kerja tersebut.

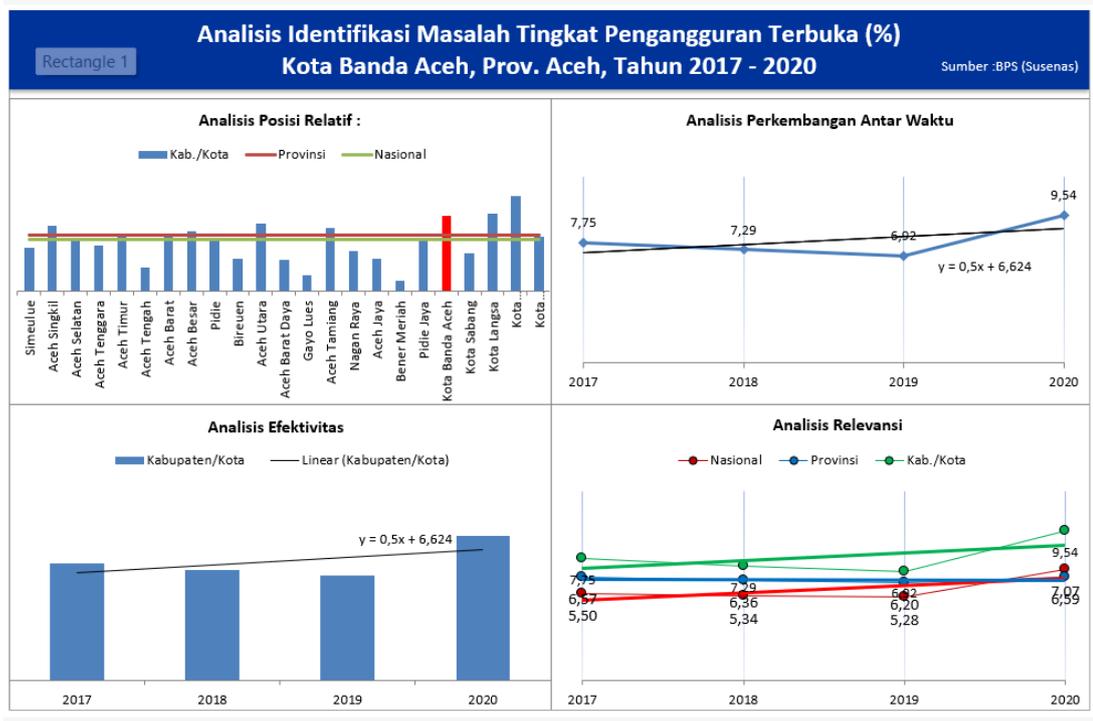
Sejalan dengan prioritas RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026, fokus permasalahan ketenagakerjaan meliputi: (1) Terbatasnya lapangan kerja, (2) Rendahnya daya saing tenaga kerja, (3) Daya serap tenaga kerja Orang Asli Aceh (OAP) masih sangat rendah. Permasalahan ketenagakerjaan beririsan langsung dengan isu kemiskinan, pekerjaan yang tidak punya, maka tidak ada pendapatan yang didapati. Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan dalam urusan ketenagakerjaan akan dianalisis pada beberapa indikator berikut:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2. Tingkat Kesempatan Kerja (%)
3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
4. Setengah Pengangguran (%)

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan salah satu indikator utama dalam bidang ketenagakerjaan, semakin rendah tingkat pengangguran terbuka, semakin besar kesempatan dan partisipasi angkatan kerja di sebuah daerah, demikian juga dengan Kota Banda Aceh, pada tahun 2020, berdasarkan data rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa capaian tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 adalah 9,54% jauh diatas capaian Provinsi Aceh (6,59%) dan capaian Nasional (7,07%), ini menandakan bahwa tingkat pengangguran terbuka Kota Banda Aceh lebih besar dari provinsi dan nasional pada tahun yang sama.

Gambar 3.23 Analisis Identifikasi Masalah Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kota Banda , Provinsi Aceh

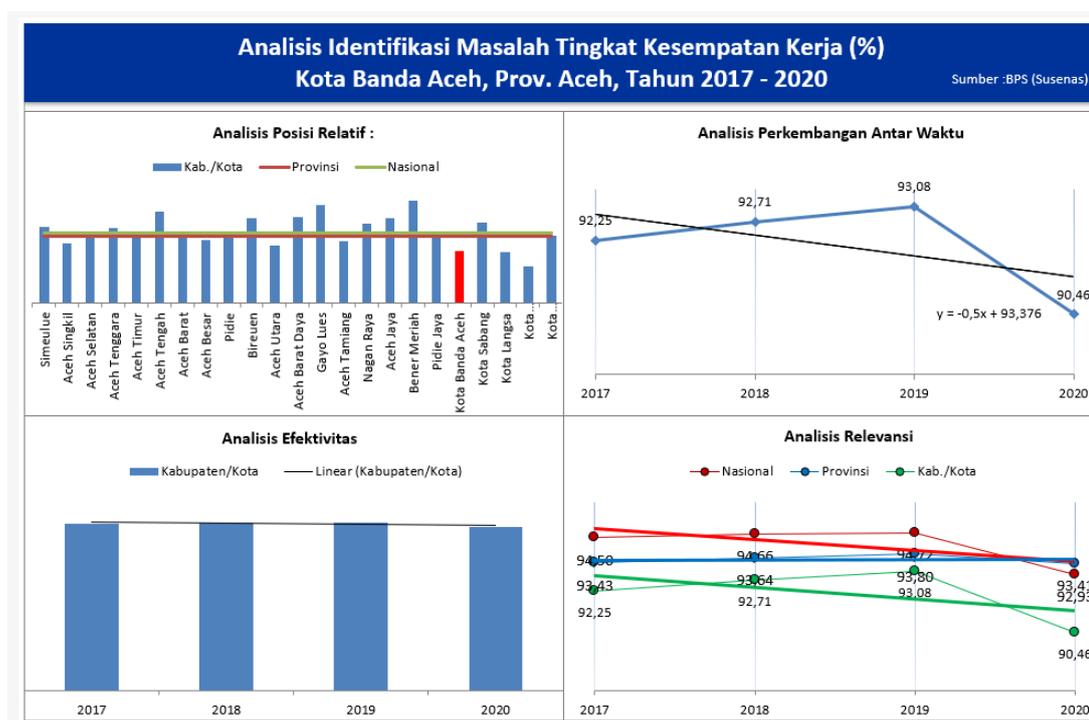


Jika ditinjau dari perkembangan antar waktu, data juga menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka Kota Banda Aceh menunjukkan trend meningkat dalam empat tahun terakhir (2017-2020). Rata-rata peningkatan indikator tingkat pengangguran terbuka Kota Banda Aceh sejak 2017 sampai 2020 adalah 0,50%.

Tingkat Kesempatan Kerja (%)

Tingkat Kesempatan Kerja merupakan salah satu indikator utama dalam bidang ketenagakerjaan, semakin tinggi tingkat kesempatan kerja, semakin besar kesempatan dan peluang bagi angkatan kerja untuk memiliki pekerjaan di sebuah daerah, demikian juga dengan Kota Banda Aceh, pada tahun 2020, berdasarkan data rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa capaian Tingkat Kesempatan Kerja tahun 2020 adalah 90,46,44%, dibawah capaian Provinsi Aceh (93,41%) dan Nasional (92,93%), ini menandakan bahwa Tingkat Kesempatan Kerja Kota Banda Aceh lebih buruk jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional pada tahun yang sama.

Gambar 3.24 Analisis Identifikasi Masalah Tingkat Kesempatan Kerja (%) Kota Banda , Provinsi Aceh Tahun 2017-2020



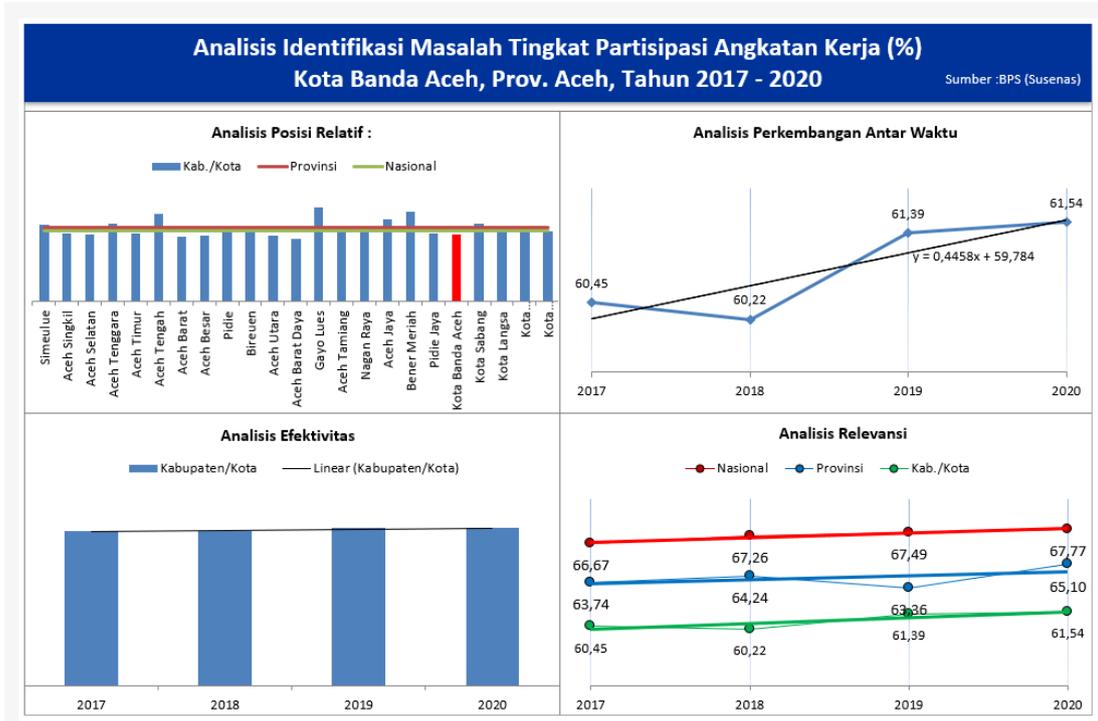
Jika ditinjau dari perkembangan antar waktu, data juga menunjukkan bahwa tingkat kesempatan kerja Kota Banda Aceh menunjukkan trend penurunan pada tahun 2017 – 2020. Rata-rata penurunan indikator tingkat kesempatan kerja Kota Banda Aceh sejak 2017 sampai 2020 adalah sebesar 0,5% setiap tahunnya.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu indikator utama dalam bidang ketenagakerjaan, semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja, semakin besar persentase penduduk usia kerja yang mendapatkan pekerja dan atau bekerja di sebuah daerah, demikian juga dengan Kota Banda Aceh, pada tahun 2020, berdasarkan data rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2020 adalah 61,54%, di atas capaian Provinsi Aceh (65,10%) dan di atas capaian Nasional (67,77%), ini menandakan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Banda Aceh masih dibawah capaian provinsi

dan nasional pada tahun yang sama.

Gambar 3.25 Analisis Identifikasi Masalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kota Banda , Provinsi Aceh Tahun 2017-2020



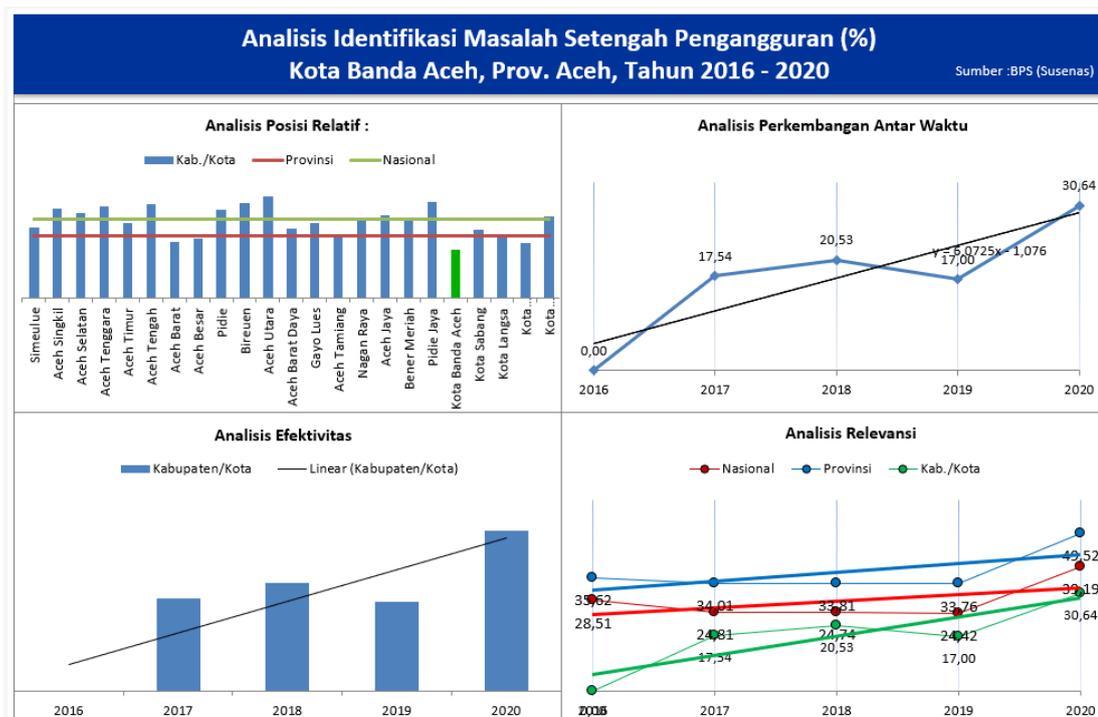
Jika ditinjau dari perkembangan antar waktu, data juga menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Banda Aceh konsisten meningkat dalam empat tahun terakhir (2017-2020). Rata-rata peningkatan indikator tingkat kesempatan kerja Kota Banda Aceh sejak 2017 sampai 2020 adalah sebesar 0,46% setiap tahunnya. Kondisi ini juga menandai bahwa, ketika Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Nasional dan Provinsi Aceh melambat perbaikannya, kondisi lebih baik ditunjukkan oleh Kota Banda Aceh dengan meningkatnya persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Setengah Pengangguran (%)

Setengah pengangguran merupakan salah satu indikator utama dalam bidang ketenagakerjaan, semakin rendah setengah pengangguran, semakin besar persentase penduduk usia kerja yang bekerja dan jumlah jam kerjanya semakin meningkat di sebuah daerah, demikian juga dengan Kota Banda Aceh, walaupun meningkat pada tahun 2020 (38,30%), namun dalam periode 2017 sampai 2019 menunjukkan trend penurunan setengah pengangguran.

Berdasarkan rilis resmi BPS bahwa capaian setengah pengangguran Kota Banda Aceh tahun 2020 adalah 38,30%, namun kondisi ini masih dibawah capaian Provinsi Aceh (51,73%) dan di bawah capaian Nasional (39,19%), ini menandakan bahwa setengah pengangguran Kota Banda Aceh lebih baik jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional pada tahun yang sama.

Gambar 3.26 Analisis Identifikasi Masalah Setengah Pengangguran (%) Kota Banda , Provinsi Aceh Tahun 2016-2020



Sedangkan berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghausan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Kemenko PMK 2022, menunjukkan bahwa 40% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah di Kota Banda Aceh berdasarkan data bekerja dan tidak bekerja berdasarkan kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 15
Jumlah Penduduk Miskin dengan Status Bekerja Tidak Bekerja Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	5-14 tahun			15-59 tahun			≥ 60 tahun		
		Jumlah	Bekerja	Tidak Bekerja	Jumlah	Bekerja	Tidak Bekerja	Jumlah	Bekerja	Tidak Bekerja
	Total (9)	20.395	100	20.295	45.825	18.893	26.932	3.218	1.871	1.347
1.	Baiturrahman	2.428	9	2.419	6.343	2.645	3.698	554	293	261
2.	Kuta Alam	3.544	29	3.515	8.382	3.648	4.734	656	420	236
3.	Meuraxa	3.248	8	3.240	5.822	2.363	3.459	210	136	74
4.	Syiah Kuala	1.983	8	1.975	4.448	1.800	2.648	380	228	152
5.	Lueng Bata	1.634	12	1.622	4.274	1.640	2.634	422	230	192
6.	Kuta Raja	1.841	13	1.828	3.834	1.613	2.221	163	112	51
7.	Banda Raya	2.031	11	2.020	4.580	1.864	2.716	291	161	130
8.	Jaya Baru	1.980	7	1.973	4.057	1.689	2.368	213	126	87
9.	Ulee Kareng	1.706	3	1.703	4.085	1.631	2.454	329	165	164

Berdasarkan usia 5-14 tahun, jumlah total penduduk bekerja dan tidak bekerja adalah 20.395 jiwa, dengan rincian 10 anak usia 5-14 tahun (usia sekolah) bekerja dan terdapat 20.295 jiwa (usia sekolah) tidak bekerja, idealnya memang harus demikian, dalam usia 5-15 tahun adalah usia sekolah dan tidak boleh bekerja.

Sedangkan dalam usia 15-59 tahun, usia 15 tahun sampai 18 tahun adalah usia sekolah SMP/MTs dan SMA/MA, selebihnya adalah usia produktif, berdasarkan informasi tersebut, jumlah total yang bekerja dan tidak bekerja adalah 45.825 jiwa dengan rincian yang bekerja sebanyak 18.893 jiwa dan tidak bekerja 26.932 jiwa.

Untuk usia 60 tahun ke atas, data menunjukkan bahwa jumlah total yang bekerja dan tidak bekerja adalah 3.218 jiwa dengan rincian 1.871 jiwa bekerja dan 1.347 jiwa tidak bekerja.

Informasi ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka meningkatkan partisipasi angkatan kerja, kesempatan kerja maupun upaya untuk penurunan tingkat pengangguran terbuka dengan memberikan dan melibatserta penduduk miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin yang tidak bekerja dalam program-program pemberdayaan, padat karya

dan pembukaan lapangan kerja di Kota Banda Aceh.

Dari analisis dan focus group discussion yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja bersama dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, permasalahan kemiskinan dalam bidang ketenagakerjaan yang masih menjadi prioritas Pemerintah Kota Banda Aceh adalah:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2. Tingkat Kesempatan Kerja (%)
3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
4. Setengah Pengangguran (%)

3.3.5 Isu Strategis Kemiskinan dalam Bidang Lainnya

Berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Kemenko PMK Tahun 2022, menunjukkan bahwa, terdapat 52.738 jiwa penduduk dengan 40% tingkat kesejahteraan terendah (miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin) tidak bekerja, sedangkan sektor paling banyak menampung tenaga kerja adalah wiraswasta dan pekerja lepas.

Tabel 3. 16
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Jenis Pekerjaan Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Tidak Bekerja	Petani	Nelayan	Pedagang	Pegawai Swasta	Wiraswasta	Pensiunan	Pekerja Lepas	Lainnya
	Total (9)	52.738	528	688	1.590	1.852	8.771	295	5.275	1.865
1.	Baiturrahman	6.864	57	7	187	237	1.310	47	808	294
2.	Kuta Alam	9.059	119	138	287	451	1.928	64	804	306
3.	Meuraxa	7.483	67	153	279	184	1.002	16	625	181
4.	Syiah Kuala	5.135	60	283	121	129	776	32	466	169
5.	Lueng Bata	4.766	45	16	126	184	778	34	549	150
6.	Kuta Raja	4.542	54	67	186	160	798	17	362	94
7.	Banda Raya	5.307	55	8	146	200	743	30	601	253
8.	Jaya Baru	4.817	38	12	141	160	883	23	354	211
9.	Ulee Kareng	4.765	33	4	117	147	553	32	706	207

Berdasarkan data tersebut, penajaman sasaran program dan intervensi oleh pemerintah Kota Banda Aceh agar dapat diarahkan kepada individu penduduk dengan 40% tingkat kesejahteraan terendah dengan informasi pekerjaan paling dominan

seperti dijelaskan diatas. Bidang prioritas lainnya seperti informasi tersebut mencakup: pegawai swasta, pedagang dan lainnya.

3.3.6 Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah telah menetapkan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai agenda prioritas. Penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan tujuan pertama dari Sustainable Development Goals (SDGs) yang harus dicapai pada tahun 2030. Penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan kebijakan baru yang disampaikan oleh Pemerintah pada awal tahun 2020. Tanggal 4 Maret 2020 Presiden RI dalam rapat terbatas telah memberikan arahan untuk penghapusan kemiskinan secara nasional menjadi 0% di akhir RPJMN tahun 2024, sedangkan berdasarkan rilis BPS, kemiskinan ekstrem nasional pada tahun 2022 adalah 2,04 persen

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai penduduk dengan pengeluaran 1,9 USD PPP sebagai standar yang diacu bersama oleh bangsa-bangsa berdasarkan standar world bank. Berdasarkan hitungan world bank persentase penduduk miskin ekstrem nasional tahun 2022 adalah 2,04%, sedangkan jumlah penduduk miskin nasional adalah 5.800.000 jiwa. BPS Pusat melakukan perhitungan untuk standarisasi 1,9 USD PPP untuk dikonversikan ke dalam rupiah, berdasarkan hitungan BPS bahwa 1,9 USD PPP perkapita perhari pada tahun 2022 adalah Rp. 10.739 per kapita perhari, jika dikalikan dengan 30 hari dalam sebulan, maka garis kemiskinan ekstrem pada tahun 2022 adalah 322.170/kepala/bulan dan berlaku secara nasional

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, telah memberikan amanat bagi seluruh lapis pemerintah sampai pemerintahan desa untuk meningkatkan sinergitas dan keterpaduan dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk dengan meraih dukungan dari unsur non pemerintah untuk terlibat dalam upaya intervensi. Arahan Presiden tersebut di antaranya:

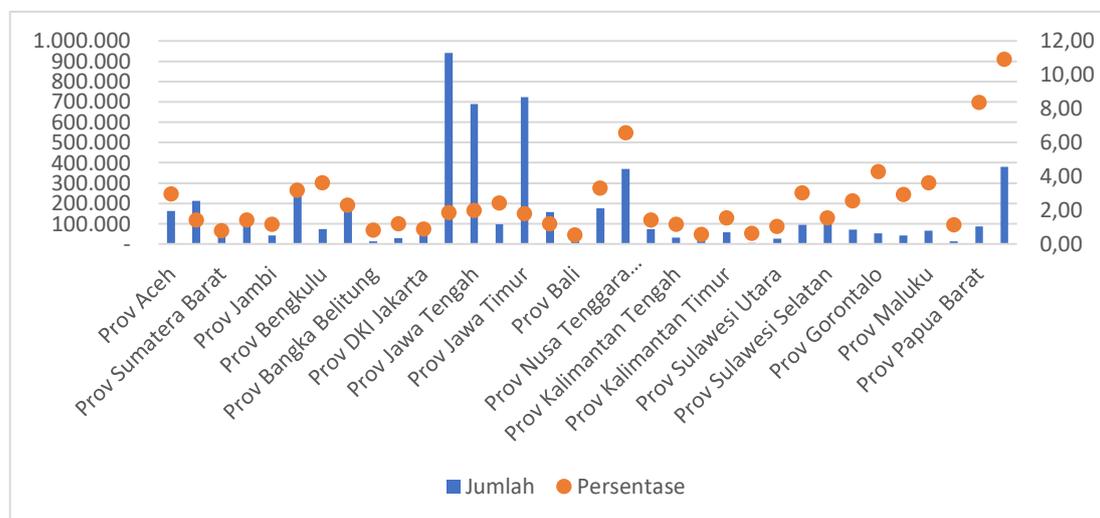
1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antarkementerian/lembaga dengan melibatkan

- peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:
 - a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat; dan
 - c. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan

Upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini, dilaksanakan dengan prinsip **Tepat sasaran**: Seluruh penduduk miskin ekstrem memperoleh program PPKE dengan menggunakan data sasaran yang terdapat status/tingkat kesejahteraan, akurat dan terkini, **Pendekatan multidimensi**: Pelaksanaan program PPKE dilakukan dengan tetap memperhatikan berbagai faktor, misalnya terkait kesetaraan gender, disabilitas, lanjut usia, kelompok rentan. **Keterpaduan dan sinergi**: Penduduk miskin ekstrem dapat menerima berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang bersumber dari APBN/P, APBD/P Provinsi, APBD/P Kabupaten/Kota, APBdes, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program yang diberikan tersebut dapat diberikan secara bersamaan dan saling melengkapi untuk mencukupi kebutuhan kelompok miskin ekstrem. **Tersampainya dan dipahaminya informasi**: Penyampaian informasi dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi secara intensif dan berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah hingga pemerintah desa/kelurahan dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk meningkatkan pemahaman kepada seluruh pihak terkait program PPKE. **Koordinasi dan kerja sama multipihak**: Pelaksanaan program PPKE memerlukan koordinasi dan kerja sama antarpemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan melibatkan unsur nonpemerintah serta **Terpantau dan terkendali**: Pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan dan program PPKE dilakukan secara berkala dengan menggunakan instrumen dan indikator yang relevan dan terukur.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh BPS, sebaran persentase penduduk miskin ekstrem berdasarkan provinsi pada periode Maret 2022 adalah sebagai berikut:

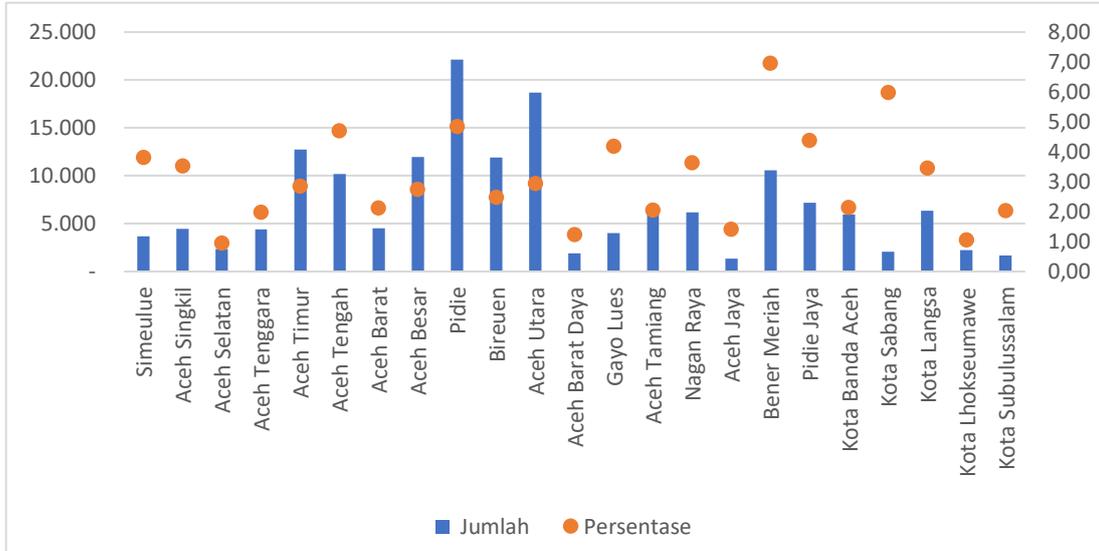
Gambar 3.27 Persentase Penduduk Miskin Ekstrem dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Menurut Provinsi Tahun 2022



Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan bahwa secara persentase, persentase penduduk miskin ekstrem paling tinggi ada di Provinsi Papua sebesar 10,92% dengan jumlah penduduk miskin ekstrem Provinsi Papua Tahun 2022 adalah 378.933 Jiwa. Namun secara jumlah berdasarkan Nasional, Provinsi Jawa Barat (941,860 jiwa), Jawa Timur (724,328 jiwa) dan Jawa Tengah (689,714 jiwa) merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin paling tinggi secara Nasional.

Sedangkan untuk level Provinsi Aceh, sebaran persentase penduduk miskin ekstrem dan jumlah penduduk miskin ekstrem berdasarkan kabupaten/kota tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.28 Persentase Penduduk Miskin Ekstrem dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2022



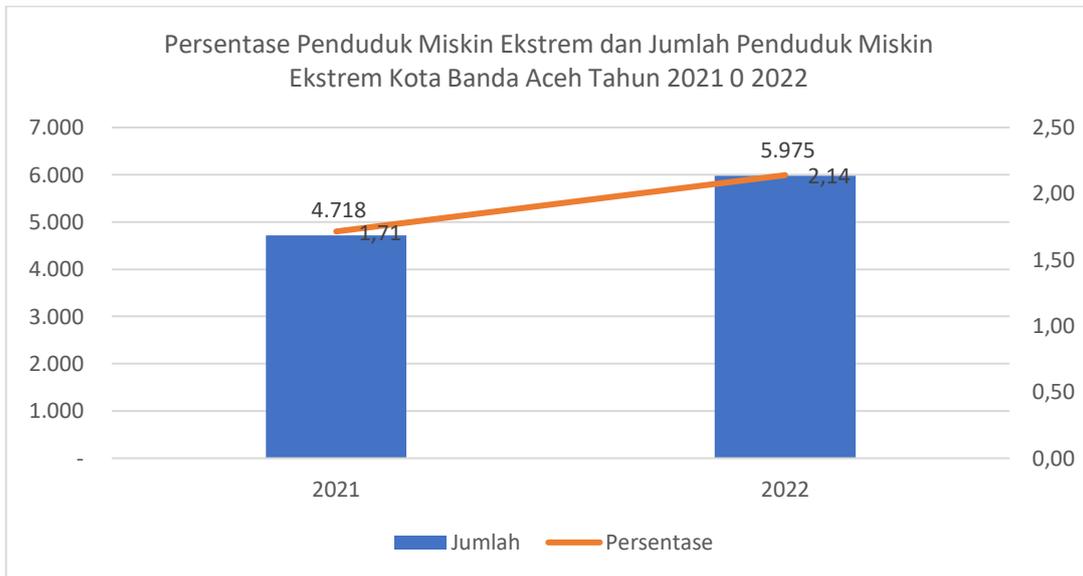
Kabupaten dengan persentase penduduk miskin ekstrem tertinggi adalah Kabupaten Bener Meriah 6,96% sedangkan yang paling rendah persentase penduduk miskin ekstrem adalah Kabupaten Aceh Selatan sebesar 0,94%. Sedangkan kabupaten dengan jumlah penduduk miskin ekstrem terbesar adalah Kabupaten Pidie sebesar 22.147 jiwa, dan kabupaten dengan jumlah penduduk miskin ekstrem terendah adalah Kota Subulussalam dengan jumlah 1.684 jiwa pada tahun 2022.

Kota Banda Aceh pada tahun 2022, persentase penduduk miskin ekstrem sebesar 2,14% dan jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 5.975 jiwa. Baik secara persentase dan jumlah penduduk miskin ekstrem di Kota Banda Aceh menunjukkan peningkatan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, dari 1,91% (2021) menjadi 2,14% (2022), atau dari 4.718 jiwa (2021) menjadi 5.975 jiwa (2022).

Berdasarkan data BPS, selain defenisi kemiskinan ekstrem menggunakan standar 1,9 USO PPP perkapita perhari, ada karakteristik umum yang dimiliki oleh penduduk miskin ekstrem, yang ditemui di hampir seluruh wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Demikian juga dengan Kota Banda

Aceh, memiliki karakteristik tersendiri untuk penduduk miskin ekstrem, diantaranya:

Gambar 3.29 Persentase Penduduk Miskin Ekstrem dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Kota Banda Aceh Tahun 2021-2022



BAB IV

PRIORITAS PROGRAM

4.1 Penyusunan Teori Perubahan (*Theory of Change*) atau Logika Program

Teori perubahan (*theory of change*) atau logika program adalah cara untuk menentukan outcome apa yang ingin diwujudkan dan bagaimana itu akan dicapai melalui intervensi program kebijakan. Alih-alih untuk memproyeksikan outcome dari rangkaian program, logika program membalik proses itu dimana outcome (tujuan) dirunut ke belakang kepada prakondisi untuk pencapaiannya. Dengan demikian, logika program akan menjelaskan alasan mengapa sebuah program atau kebijakan harus ditempuh. Sebagai sebuah peta-jalur (*road-map*) bagi pencapaian outcome, logika program tidak hanya berguna untuk menentukan program yang dibutuhkan, tetapi juga dapat menjadi basis untuk pemantauan dan evaluasinya.

Penyusunan teori perubahan dapat diawali dengan mengumpulkan dan mereview hasil-hasil kajian dan evaluasi yang pernah dilakukan. Dari bahan ini dapat diperkirakan apa yang akan terjadi jika intervensi yang sama diterapkan. Proses penyusunan logika program melibatkan langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah pertama. Menetapkan tujuan (*goals*) dan indikatornya. Pernyataan tujuan menjelaskan dampak (*impact*) akhir yang ingin dicapai oleh program atau kebijakan. Tujuan ini sebaiknya tujuan hanya mengandung satu atau dua inti pernyataan saja. Tujuan ini juga hendaknya menyatakan dampak langsung dari program atau kebijakan; bukan dampak yang terlalu jauh yang hanya mungkin terjadi setelah dampak langsung itu tercapai.

Langkah kedua. Mengidentifikasi capaian antara (*intermediate outcome*) dan indikatornya. Capaian antara adalah seluruh bentuk perubahan, yang dapat dibedakan satu sama lain, yang menjadi syarat atau prakondisi bagi tercapainya tujuan. Bentuk-bentuk perubahan itu harus cukup komprehensif sesuai kompleksitas program.

Langkah ketiga. Mengidentifikasi strategi atau program. Strategi atau program yang dimaksud di sini adalah semua rancangan kebijakan yang bisa membawa manfaat

secara langsung kepada penerimanya. Pernyataan strategi atau program ini harus menjelaskan apa yang hendak dituju oleh rancangan kebijakan itu.

Langkah keempat. Menarik anak panah hubungan sebab-akibat. Anak panah ini akan menunjukkan strategi atau program apa yang ditujukan untuk menghasilkan capaian antara tertentu.

Langkah kelima. Menjelaskan asumsi kunci. Faktor-faktor yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan intervensi, di setiap jalur hubungan sebab-akibat yang telah disusun, harus diidentifikasi sebagai asumsi. Asumsi yang dinilai sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan intervensi, yaitu asumsi kunci, perlu menjadi bagian dari aspek yang dievaluasi.

1. Logika Program (*Theory of Change*) Pendidikan

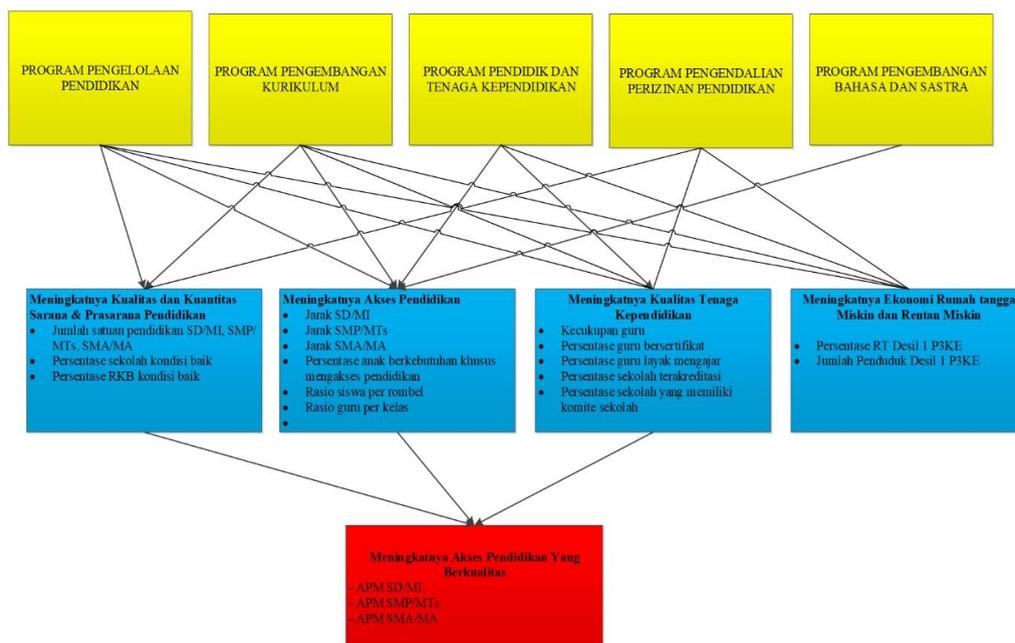
Dari beberapa isu strategis dan permasalahan pendidikan Kota Banda Aceh, Tim teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) mengambil fokus pada peningkatan partisipasi pendidikan dasar khususnya bagi penduduk usia sekolah dari rumah tangga miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin pada usia 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun yang tidak bersekolah. Logika program (*theory of change*) yang disusun oleh tim teknis tersebut menempatkan sasaran jangka panjang yang akan diperbaiki adalah meningkatnya partisipasi pendidikan dasar, dengan harapan penduduk usia 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun yang tidak bersekolah dapat menerima manfaat program paling besar.

Logika program (*theory of change*) untuk peningkatan partisipasi pendidikan tersebut memperlihatkan bahwa **meningkatnya partisipasi pendidikan** tersebut (*final outcome/goal*) memiliki empat determinan kunci yaitu **(1) meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan, (2) meningkatnya akses pendidikan, (3) meningkatnya kualitas tenaga kependidikan serta (4) meningkatnya kondisi ekonomi rumah tangga masyarakat miskin dan rentan miskin.**

Sedangkan intermediate outcomes atau sasaran antara dari keempat determinan kunci tersebut adalah:

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan, dengan indikator antara: jumlah satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, persentase sekolah dengan kondisi baik serta persentase ruang kegiatan belajar kondisi baik.
2. Meningkatnya akses pendidikan, dengan indikator antara: Jarak sekolah SD/MI, jarak sekolah SMP/MTs, jarak sekolah SMA/MA, persentase anak berkebutuhan khusus yang mengakses pendidikan, rasio siswa per rombel dan rasio guru per kelas
3. Meningkatnya kualitas tenaga kependidikan, dengan indikator antara: kecukupan guru, persentase guru bersertifikat, persentase guru layak mengajar, persentase sekolah terakreditasi dan persentase sekolah yang memiliki komite sekolah.
4. Meningkatnya kondisi ekonomi rumah tangga masyarakat miskin dan rentan miskin, dengan indikator antara: persentase penduduk desil 1 dari 40% dan jumlah rumah tangga desil 1 dari 40%.

Gambar 4. 1 Theory of Change untuk peningkatan partisipasi dan akses pendidikan dasar di Kota Banda Aceh



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Analisis Tim Teknis TKPK Kota Banda Aceh

Keterangan (program dan kegiatan): Program/kegiatan Prioritas dan pendukung

1. Penambahan ruang kelas sekolah
2. Kegiatan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan
3. Pemberian beasiswa siswa/santri
4. Penyediaan dana penunjang pendidikan
5. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
6. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
7. Penyediaan tambahan pembiayaan operasional sekolah
8. Pelatihan rencana pembelajaran bagi guru
9. Pelatihan kurikulum dan pembelajaran aktif kreatif efektif dan menyenangkan
10. Pelatihan manajemen berbasis sekolah
11. Peningkatan fungsi pengawas sekolah
12. Pembinaan Komite Sekolah
13. Penyaluran zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS) atau sejenisnya
14. Perluasan Program Indonesia Pintar
15. Penyediaan dana penunjang pendidikan
16. Penyediaan dukungan sarana transportasi pendidikan
17. Penyediaan dukungan sekolah satap (satu atap)
18. Penyediaan dukungan sarana rumah tinggal guru dan tenaga kependidikan
19. Penyediaan fasilitas pendukung sekolah bagi anak-anak kurang mampu dan miskin
20. Dukungan bantuan ekonomi bagi rumah tangga miskin ekstrem dan miskin
21. Dukungan program mengembalikan anak putus sekolah untuk kembali sekolah
22. Dukungan program sarjana mengajar
23. Distribusi guru dan tenaga kependidikan yang merata.

Program, kegiatan dan sub-sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh dan perangkat daerah terkait pendidikan pun perlu mempertimbangkan karakteristik pendidikan dari penduduk miskin ekstrem, diantara karakteristik tersebut adalah:

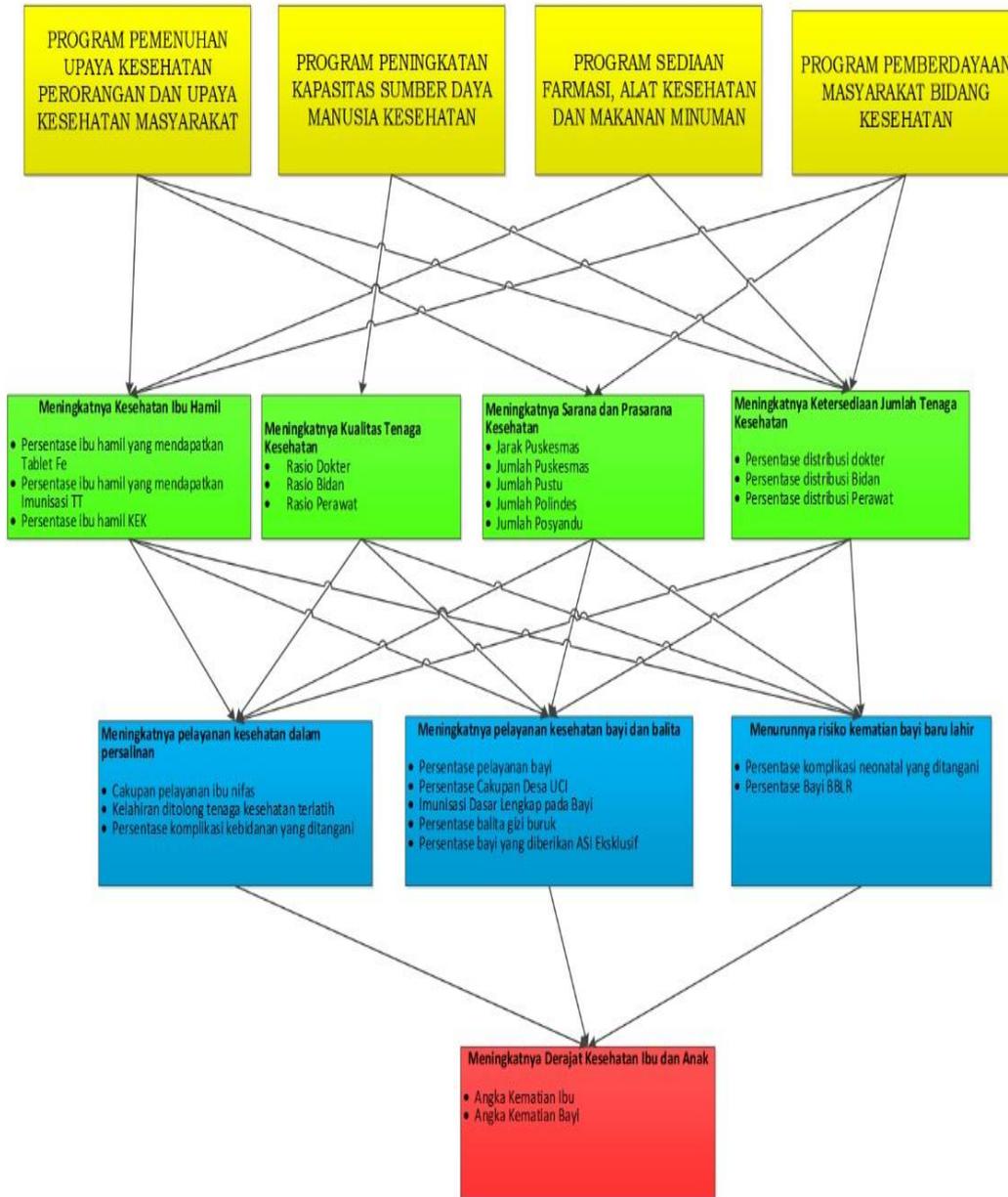
1. Rata-rata Lama Sekolah penduduk miskin ekstrem di Kota Banda Aceh selama 13,03 tahun, sementara di Aceh secara keseluruhan selama 9,44 tahun.
2. Angka Putus Sekolah usia 16-18 Tahun merupakan indikator utama yang perlu mendapatkan perhatian, hal ini disebabkan perbedaan capaian yang sangat besar dengan capaian nasional.
3. Di Kota Banda Aceh, Angka Putus Sekolah usia 16-18 Tahun mencapai 16,04 persen, sementara di Aceh secara keseluruhan sebesar 45,61 persen.
4. Tingginya jumlah kepala rumah tangga yang tidak bersekolah serta rendahnya tingkat kelulusan kepala keluarga hampir di setiap jenjang pendidikan menunjukkan rendahnya tingkat pendidikan rumah tangga.
5. Di Kota Banda Aceh, terdapat 32,64 persen kepala rumah tangga miskin ekstrem hanya lulusan SD dan 6,09 persen tidak bersekolah.

2. Logika Program (Theory of Change) Kesehatan

Logika program (*theory of change*) yang disusun oleh tim teknis TKPK Kota Banda Aceh untuk meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh mengambil fokus pada derajat kesehatan ibu dan anak sangat beralasan, berdasarkan RPD Kota Banda Aceh, rencana strategis dan profil kesehatan Kota Banda Aceh memberikan fokus pada derajat kesehatan ibu dan anak, dengan masih tingginya temuan jumlah kasus kematian ibu dan bayi dalam level provinsi, maka menjadi keharusan bagi daerah ini untuk melakukan intervensi khusus dalam penanganannya dan khususnya penanganan yang lebih riil bagi penduduk miskin dan rentan miskin untuk kasus kematian ibu dan bayi.

Logika program (*theory of change*) yang telah disusun oleh tim teknis TKPK Kota Banda Aceh memperlihatkan bahwa meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak dengan indikator angka kematian ibu dan bayi (final outcome/goal) memiliki tiga determinan kunci, yaitu (1) Meningkatnya pelayanan kesehatan dalam persalinan (2) Meningkatnya pelayanan kesehatan bayi dan balita dan (3) Menurunnya resiko kematian bayi baru lahir.

Gambar 4. 2 Theory of Change untuk meningkatnya kesehatan ibu dan bayi Kota Banda Aceh



Sumber: Dinas Kesehatan dan Analisis Tim Teknis TKPK Kota Banda Aceh

Keterangan (program dan kegiatan):

1. Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
2. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit
3. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
4. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
5. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
6. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
7. Penyelenggaraan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
8. Pelayanan kesehatan pada Bumil dan Bufas.
9. Pelayanan Kesehatan pada Bayi dan Balita
10. Pelayanan Kesehatan pada Usia Dini (PAUD)
11. Pelayanan Kesehatan pada Usia Sekolah Dasar
12. Pelayanan Kesehatan pada Usia Remaja
13. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
14. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lansia
15. Program pembinaan dan supervisi tentang 3T (terlambat mengambil keputusan, terlambat mendapat penanganan, terlambat ke fasilitas kesehatan) dan memaksimalkan rumah tunggu kelahiran
16. Program pemberian PMT Bumil KEK, pemantauan bumil anemi untuk minum tablet tambah darah
17. Program peningkatan kompetensi bidan dalam kegawat daruratan maternal
18. Peningkatan komitmen stakeholder dalam upaya penemuan kematian ibu dan bayi
19. Optimalisasi peran Pokja kelangsungan hidup anak dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
20. Peningkatan kompetensi perawatan NICU dalam menangani kegawatdaruratan
21. Peningkatan kompetensi bidan dalam kegawatdaruratan neonatal, peningkatan cakupan bayi mendapat inisiasi menyusui dini (IMD)
22. Peningkatan cakupan bayi mendapat ASI Eksklusif
23. Peningkatan cakupan Imunisasi dasar lengkap dan
24. Menerapkan MTBS di layanan kesehatan.

Sedangkan intermediate outcomes atau sasaran antara dari ketiga determinan kunci tersebut adalah:

- 1) Meningkatnya kesehatan ibu hamil, dengan indikator: persentase ibu hamil yang mendapatkan FE, persentase ibu hamil yang mendapatkan imunisasi TT dan persentase ibu hamil yang KEK.
- 2) Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan, dengan indikator: rasio dokter, rasio bidan dan rasio perawat.
- 3) Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan, dengan indikator: jarak puskesmas, jumlah puskesmas, jumlah pusku, jumlah polindes serta jumlah posyandu.
- 4) Meningkatnya ketersediaan jumlah tenaga kesehatan, dengan indikator: persentase distribusi dokter, persentase distribusi bidan dan persentase distribusi perawat.

Program, kegiatan dan sub-sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dan perangkat daerah terkait kesehatan pun perlu mempertimbangkan karakteristik kesehatan dari penduduk miskin ekstrem, di antara karakteristik tersebut adalah:

1. Prevalensi balita kerdil (stunting) di Aceh menurun di tahun 2022 dibandingkan 2021. Data BPS menunjukkan angka prevalensi anak stunting di Aceh tahun 2022 turun menjadi 31,2% dibanding tahun 2021 sebesar 33,2%.
2. Sedangkan prevalensi balita kerdil (stunting) di Kota Banda Aceh pada tahun 2022 naik menjadi 25,21% dibandingkan tahun 2021 sebesar 23,40%
3. Angka ini relatif tinggi karena melebihi ambang batas yang ditetapkan WHO yakni 20%.
4. Desa-desa di Banda Aceh cenderung tidak mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan, baik rumah sakit bersalin, puskesmas maupun klinik yang sudah banyak tersebar di Kota Banda Aceh.

Tabel 4.1
Akses Fasilitas Kesehatan (%) Tahun 2021

Kemudahan Akses Desa/Kelurahan Menuju	Banda Aceh	Aceh	Indonesia
Rumah Sakit Umum	14		
Rumah Bersalin	7		
Puskesmas	11		
Poliklinik Swasta	54		

Sumber: PODES 2022, BPS

3. Logika Program (*Theory of Change*) Infrastruktur Dasar

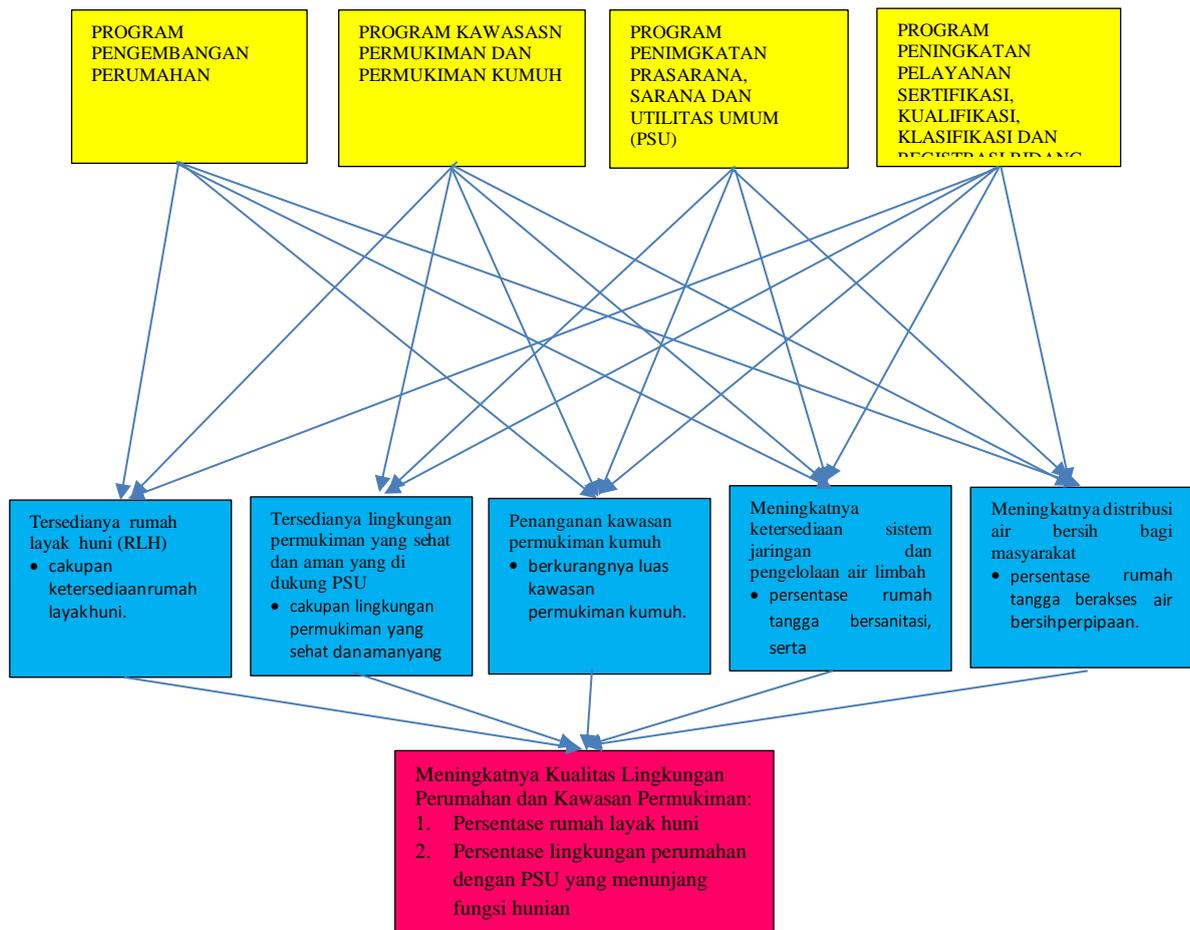
Logika program (*theory of change*) yang disusun oleh tim teknis TKPK Kota Banda Aceh untuk pemenuhan infrastruktur dasar mengambil fokus pada meningkatnya kualitas perumahan dan Kawasan permukiman. Hal ini pun sesuai dengan target RPD Kota Banda Aceh 2023-2026, Rencana Strategis dan Profil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Masih relatif rendahnya peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, masih relatif rendah persentase rumah tangga dengan sanitasi layak, dan rendah persentase rumah tangga dengan air minum layak, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah Kota Banda Aceh untuk melakukan intervensi khusus dalam pencapaiannya, khususnya upaya lebih riil bagi penduduk miskin dan rentan miskin di Kota Banda Aceh.

Logika program (*theory of change*) yang telah disusun oleh tim teknis TKPK Kota Banda Aceh memperlihatkan bahwa meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman (final outcome/goal) dengan indikator sanitasi layak, air minum layak dan akses listrik memiliki enam determinan kunci, yaitu:

- 1) Tersedianya rumah layak huni, dengan indikator: cakupan ketersediaan rumah layak huni.
- 2) Tersedianya lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang di dukung PSU, dengan indikator: cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang di dukung PSU
- 3) Penanganan kawasan permukiman kumuh, dengan indikator berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh.

- 4) Meningkatnya ketersediaan sistem jaringan dan pengelolaan air limbah, dengan indikator: persentase rumah tangga bersanitasi, serta
- 5) Meningkatnya distribusi air bersih bagi masyarakat, dengan indikator: persentase rumah tangga berakses air bersih perpipaan.

Gambar 4. 3 Theory of Change untuk meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman Kota Banda Aceh



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Analisis Tim Teknis TKPK Kota Banda Aceh

Keterangan (program dan kegiatan):

1. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha;
3. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota;
4. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Pelaksanaan Program, kegiatan dan sub-sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh dan perangkat daerah lainnya terkait perumahan dan permukiman pun perlu mempertimbangkan karakteristik prasarana dasar penduduk miskin ekstrem, karakteristik tersebut antara lain:

1. Penduduk miskin ekstrem di Kota Banda Aceh masih memiliki keterbatasan akses.
2. Tempat tinggal penduduk miskin ekstrem di Kota Banda Aceh ada 15,66 persen yang tidak memiliki rumah.
3. Masih terdapat 15,16 persen rumah tangga miskin ekstrem di Kota Banda Aceh yang tidak menikmati Akses air minum layak, serta yang 7,69 persen tidak memiliki toilet.

Tabel 4. 2 Infrastruktur Dasar, Tahun 2020 (%)

Indikator	Banda Aceh	Aceh	Nasional
RT Tidak Memiliki Rumah		36,49	40,46
RT Tidak memiliki listrik	0	0,61	2,27
RT Berlantai Tanah			
RT Tidak memiliki sanitasi yang layak (%)	0,59	22,94	20,47
RT tidak memiliki akses air minum layak (%)	1,15	22,34	9,79

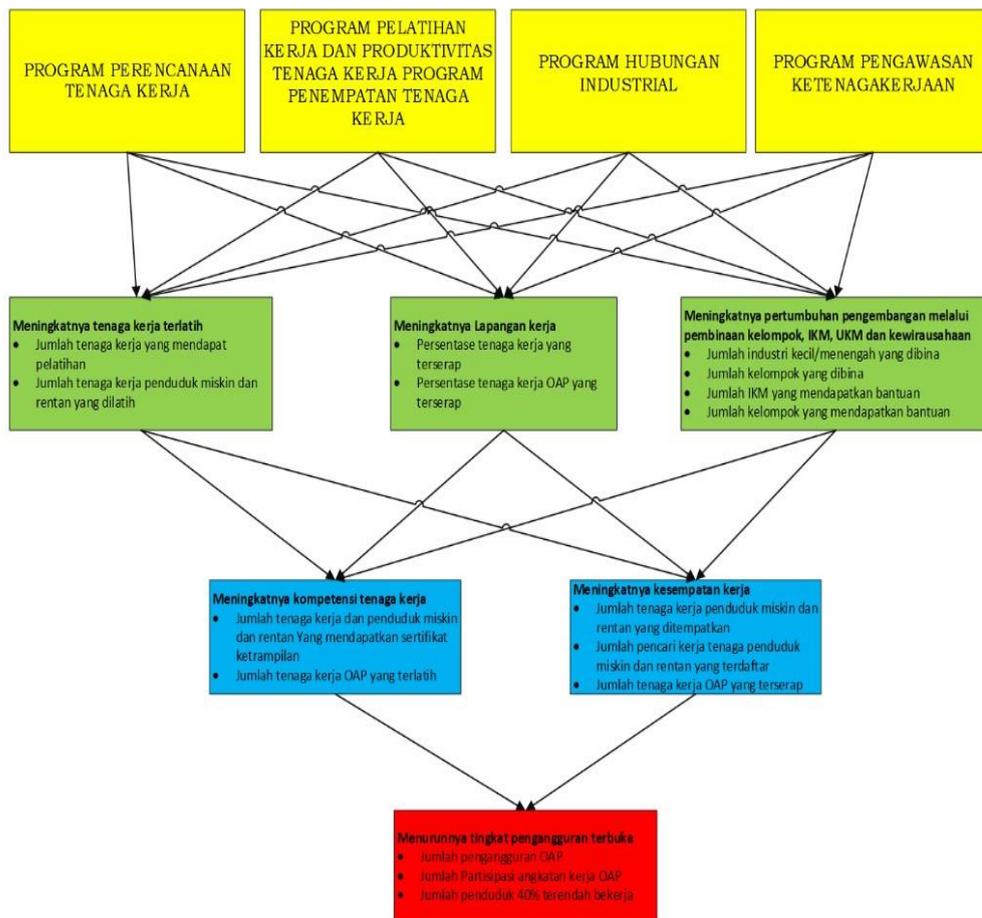
4. Logika Program (Theory of Change) Ketenagakerjaan

Logika program (*theory of change*) yang disusun oleh tim teknis TKPK Kota Banda Aceh untuk bidang ketenagakerjaan, mengambil fokus pada menurunnya tingkat pengangguran, maka sudah barang tentu menjadi keharusan

bagi Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh untuk melakukan intervensi khusus dalam perbaikannya, khususnya upaya lebih riel menysasar penduduk miskin dan rentan miskin di Kota Banda Aceh dalam isu ketenagakerjaan.

Logika program (*theory of change*) yang telah disusun oleh tim teknis TKPK Kota Banda Aceh memperlihatkan bahwa menurunnya tingkat pengangguran terbuka (final outcome/goal) memiliki dua determinan kunci, yaitu (1) meningkatnya kompetensi tenaga kerja dan (2) meningkatnya kesempatan kerja.

Gambar 4. 4 Theory of Change untuk menurunnya tingkat pengangguran terbuka



Sumber: Dinas Tenaga Kerja serta Analisis Tim Teknis TKPK Kota Banda Aceh

Keterangan (program dan kegiatan):

1. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
2. Program peningkatan kualitas tenaga kerja
3. Program peningkatan kesempatan kerja
4. Program penciptaan lapangan kerja baru
5. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
6. Program pengembangan industri kecil dan menengah
7. Program pengembangan iklim investasi
8. Program penciptaan iklim UKM yang kondusif
9. Program pengembangan kewirausahaan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah
10. Meningkatnya aliran modal investasi, dalam kerangka optimalisasi potensi sumber daya alam
11. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
12. Program promosi penanaman modal
13. Program pelayanan penanaman modal
14. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal

Sedangkan intermediate outcomes atau sasaran antara dari kedua determinan kunci tersebut adalah:

1. Meningkatnya tenaga kerja terlatih, dengan indikator: jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan dan jumlah tenaga kerja penduduk miskin dan rentan miskin yang dilatih
2. Meningkatnya Lapangan kerja, dengan indikator: persentase tenaga kerja yang terserap dan persentase tenaga kerja OAP yang terserap tenaga kerja
3. Meningkatnya pertumbuhan pengembangan melalui pembinaan kelompok, IKM, UKM dan kewirausahaan, dengan indikator: jumlah industri kecil/menengah yang dibina, jumlah kelompok yang dibina, jumlah IKM yang mendapatkan bantuan serta jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan

Pelaksanaan Program, kegiatan dan sub-sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan perangkat daerah yang memiliki kaitan dengan isu

ketenagakerjaan di Kota Banda Aceh perlu mempertimbangkan karakteristik ketenagakerjaan penduduk miskin ekstrem, diantara karakteristik tersebut adalah:

1. Di Kota Banda Aceh, anggota rumah tangga miskin ekstrem usia produktif sebesar 65,10%, sementara di Aceh secara keseluruhan sebesar 68,62%. Kondisi ini menunjukkan potensi tenaga kerja penduduk miskin ekstrem yang melimpah.
2. Jika dilihat dari sumber penghasilan utama kepala rumah tangga miskin ekstrem, terdapat 40,53% wiraswasta, 22,2% pekerja lepas, 7,74% pedagang serta 9,3% tidak bekerja.

Tabel 4. 3 Status Pekerjaan Kepala Keluarga 40% Penduduk Miskin Ekstrem, 2022

No	Kecamatan	Tidak Bekerja	Petani	Nelayan	Pedagang	Pegawai Swasta	Wiraswasta	Pensiunan	Pekerja Lepas	Lainnya
	Total (9)	1.553	222	638	1.296	1.033	6.785	262	3.716	1.235
1.	Baiturrahman	256	14	7	146	126	969	40	491	198
2.	Kuta Alam	243	43	123	231	238	1.386	54	487	181
3.	Meuraxa	141	32	143	235	132	877	16	463	133
4.	Syiah Kuala	173	30	266	97	64	594	29	345	107
5.	Lueng Bata	191	16	15	105	98	591	29	412	93
6.	Kuta Raja	97	29	64	155	88	648	15	249	71
7.	Banda Raya	156	25	6	118	128	593	28	453	171
8.	Jaya Baru	106	17	10	115	89	679	21	276	146
9.	Ulee Kareng	190	16	4	94	70	448	30	540	135

Tabel 4. 4 Status Bekerja Penduduk Miskin Ekstrem Usia 15-59 (dalam persen), 2022

Indikator	Banda Aceh	Aceh	Indonesia
Bekerja	41,2	46,9	53,5
Tidak Bekerja	58,8	53,1	46,5

5. Bidang Strategis lainnya

Berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Kemenko PMK Tahun 2022, menunjukkan bahwa, terdapat 52.738 jiwa (71,65%) penduduk dengan 40% tingkat kesejahteraan terendah (miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin) tidak bekerja, sedangkan sektor paling dominan pekerjaan penduduk 40% ini adalah wiraswasta (8.771 jiwa), pekerja lepas (5.275 jiwa), lainnya (1.865 jiwa), pegawai swasta (1.852 jiwa), pedagang (1.590 jiwa), nelayan (688 jiwa), petani (528 jiwa), serta pensiunan (295 jiwa).

Tabel 4. 5 Informasi 40% Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Berdasarkan Pekerjaan Individu Menurut Kecamatan Kota Banda Aceh, Tahun 2022

No	Kecamatan	Tidak Bakerja	Petani	Nelayan	Pedagang	Pegawai Swasta	Wiraswasta	Pensiunan	Pekerja Lepas	Lainnya
	Total (9)	52.738	528	688	1.590	1.852	8.771	295	5.275	1.865
1.	Baiturrahman	6.864	57	7	187	237	1.310	47	808	294
2.	Kuta Alam	9.059	119	138	287	451	1.928	64	804	306
3.	Meuraxa	7.483	67	153	279	184	1.002	16	625	181
4.	Syiah Kuala	5.135	60	283	121	129	776	32	466	169
5.	Lueng Bata	4.766	45	16	126	184	778	34	549	150
6.	Kuta Raja	4.542	54	67	186	160	798	17	362	94
7.	Banda Raya	5.307	55	8	146	200	743	30	601	253
8.	Jaya Baru	4.817	38	12	141	160	883	23	354	211
9.	Ulee Kareng	4.765	33	4	117	147	553	32	706	207

Berdasarkan data tersebut, penajaman sasaran program dan intervensi oleh pemerintah Kota Band Aceh agar dapat diarahkan kepada individu penduduk dengan 40% tingkat kesejahteraan terendah dengan informasi pekerjaan paling dominan seperti dijelaskan diatas, yaitu (1) Wiraswasta, (2) Pekerja Lepas, (3) Buruh dan tenaga lepas lainnya serta (4) Pegawai Swasta, (5) Pedagang, serta (6) Nelayan/Petani.

Adapun program kegiatan yang dapat diarahkan untuk bidang-bidang strategis lainnya dari 40% penduduk dengan kesejahteraan terendah desil 1, 2, 3, 4 adalah program dan kegiatan yang mengarah kepada:

- 1) Pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin, dengan strategi:
 - a) Memastikan kelompok miskin ekstrem memperoleh berbagai program-program perlindungan sosial.
 - b) Meningkatkan koordinasi K/L dan pemerintah daerah untuk mendorong komplementaritas program perlindungan sosial pusat dan daerah.
 - c) Mengembangkan dan melaksanakan inovasi kebijakan dan program perlindungan sosial terutama untuk kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, pekerja informal dan perempuan).
 - d) Melibatkan komunitas, lembaga nonpemerintah, dan swasta.
 - e) Meningkatkan akses masyarakat miskin ekstrem ke dokumen kependudukan (Akta Kelahiran dan NIK).

- 2) Peningkatan pendapatan dan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin, dengan strategi:
 - a) Melalui peningkatan pendapatan/ akses terhadap pekerjaan dan penyediaan infrastruktur dasar.
 - b) Melalui peningkatan kapasitas SDM
 - c) Melalui peningkatan kapasitas UMKM.
 - d) Melalui peningkatan akses pembiayaan UMKM.
- 3) Pengurangan jumlah kantong-kantong kemiskinan yang menysasar penduduk miskin ekstrem, dengan strategi:
 - a) Melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar
 - b) Meningkatkan konektivitas antar wilayah.
 - c) Mendorong konvergensi anggaran
 - d) Mendorong konsolidasi program
 - e) Meningkatkan peran daerah dan pemangku kepentingan.

Program, kegiatan dan sub-sub kegiatan yang dirumuskan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh pun, perlu mempertimbangkan karakteristik penduduk miskin ekstrem dan miskin terkait isu strategis. Diantara karakteristik umum penduduk miskin ekstrem dan miskin adalah proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) mayoritas buruh tani, buruh dagang, buruh industri, mengurus rumah tangga, dan kepala rumah tangga perempuan, mayoritas bekerja di sektor pertanian sebagai buruh dan berstatus informal.

Dengan karakteristik penduduk miskin ekstrem seperti yang sudah dijelaskan diatas, usulan konvergensi program kegiatan intervensi oleh dinas-dinas terkait yang direkomendasikan diantaranya:

1. Untuk Kepala Rumah Tangga berpendidikan rendah sebagai buruh tani
 - Melibatkan penduduk miskin ekstrem dalam program padat karya yang dilaksanakan setelah musim tanam dan sebelum musim panen. Misal pembuatan perpipaan air pada wilayah sulit air (mayoritas penduduk miskin)
2. Untuk Kepala Rumah Tangga perempuan, berpendidikan rendah, usia produktif

- Melibatkan penduduk miskin ekstrem dalam program pengembangan dan pemanfaatan pekarangan, pelatihan keterampilan dll, termasuk pelaksanaan program P2WKSS
 - Melibatkan penduduk miskin ekstrem dalam pemberdayaan ekonomi kelompok
3. Untuk Rumah Tangga dengan sanitasi, air minum dan rumah tidak layak
 - Melibatkan penduduk miskin ekstrem dalam program padat karya pembangunan sarana sanitasi (WC Komunal), air minum (sumber air minum bersama), dan tenaga bantu renovasi rumah
 4. Untuk Anggota Rumah Tangga usia produktif berpendidikan rendah
 - Melibatkan penduduk miskin ekstrem dalam pelatihan keterampilan, budidaya, sumber daya alam setempat menjadi bahan bakuMelibatkan penduduk miskin ekstrem dalam pemberdayaan ekonomi kelompok
 5. Untuk Cakupan Imunisasi dasar lengkap pada Balita
 - Melibatkan penduduk miskin ekstrem dalam program bantuan PMT balita kepada posyandu/PKM untuk menstimulasi kehadiran imunisasi di posyandu/PKM

4.2 Analisis Anggaran Untuk Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh

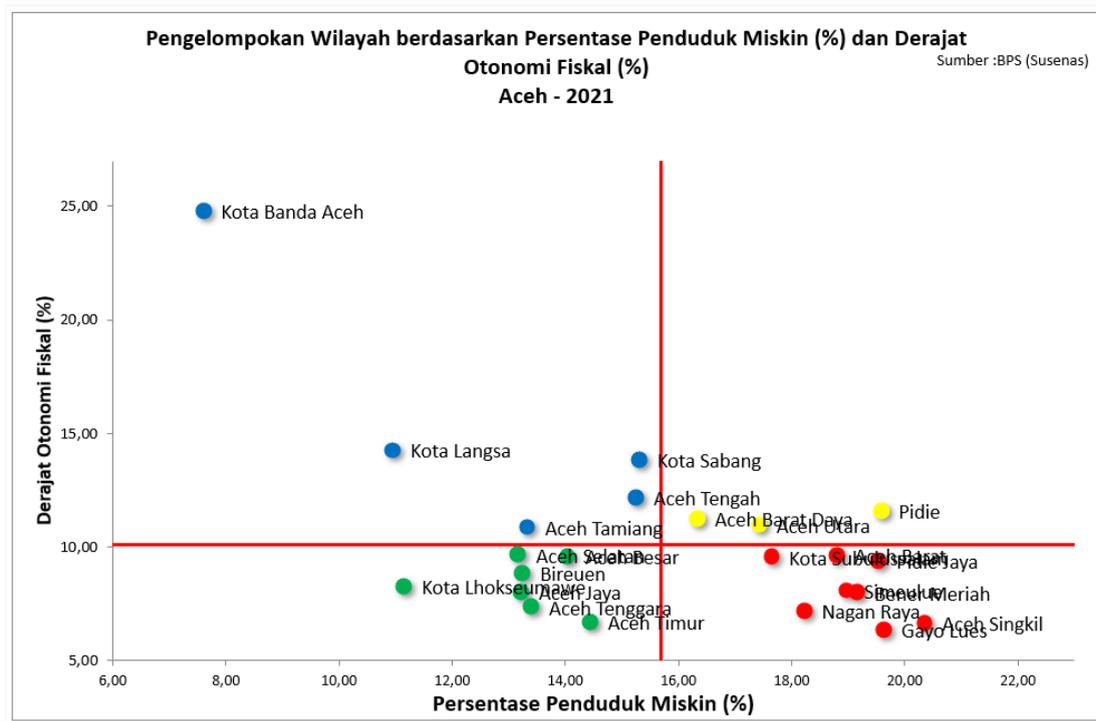
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu instrumen bagi Pemerintah dalam rangka melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat. Selain APBN dan APBD, Pemerintah dapat mengupayakan pembiayaan dari sumber-sumber yang sah, tidak mengikat dari non pemerintah untuk bersinergi dengan APBN dan APBD dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian juga pemerintah daerah, selain APBD, pemerintah daerah dapat mengupayakan pembiayaan dari sumber-sumber yang sah, tidak mengikat dari non pemerintah untuk bersinergi dengan APBD dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat ditingkat daerah.

Untuk menilai kesehatan anggaran bagi Pemerintah Daerah, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengetahui derajat otonomi fiskal dan ruang fiskal.

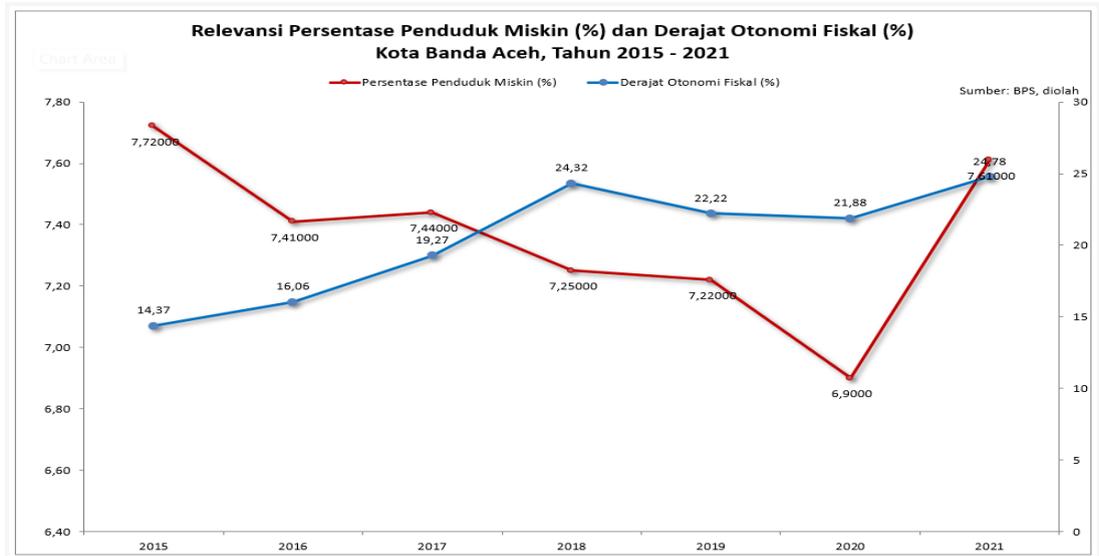
Derajat otonomi fiskal merupakan gambaran kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain. Derajat desentralisasi fiskal merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD. Sedangkan ruang fiskal merupakan merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJKP) Kementerian Keuangan pada Tahun 2021 yang diolah bersama dengan data Kemiskinan Susenas-BPS pada tahun 2021, berikut adalah gambaran kuadran wilayah antara derajat otonomi fiskal, ruang fiskal dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh Tahun 2021.

Gambar 4.5 Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin (%) dan Derajat Otonomi Fiskal (%) Provinsi Aceh Tahun 2021



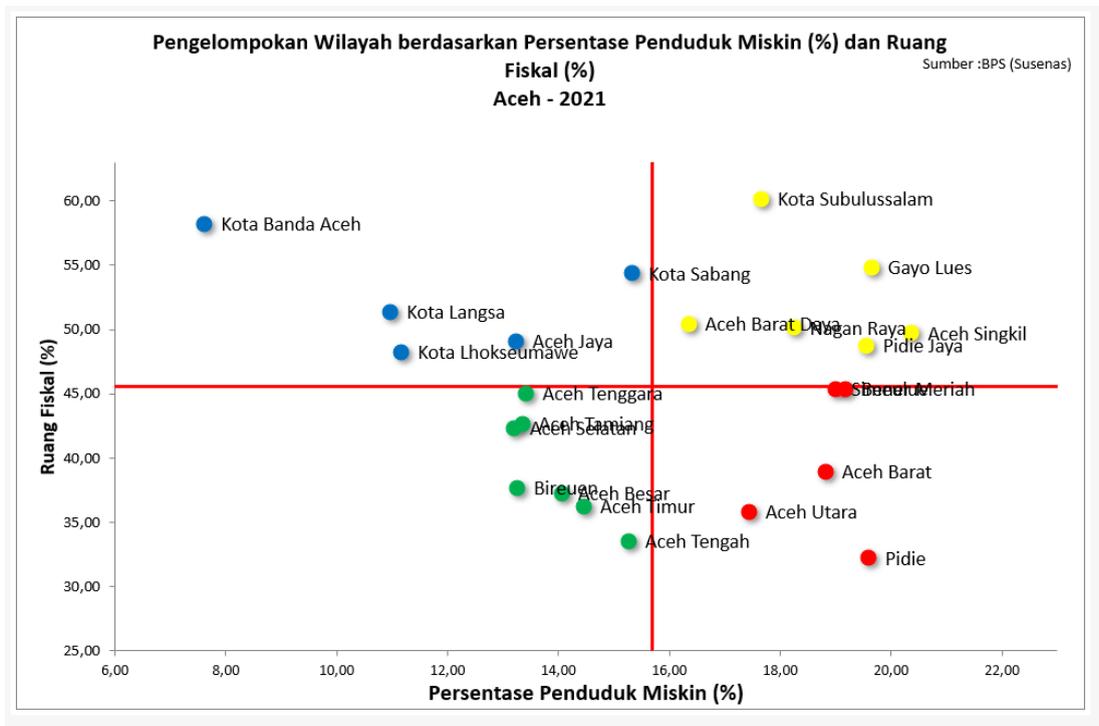
Kuadran wilayah menunjukkan bahwa, posisi Kota Banda Aceh pada tahun 2021 dengan persentase kemiskinan 7,61% dengan derajat otonomi fiskal sebesar 24,78%. Menempatkan Kota Banda Aceh pada kuadran kiri atas yang berarti Kota Banda Aceh merupakan daerah dengan persentase kemiskinan relatif rendah dengan

Gambar 4.6 Relevansi Persentase Penduduk Miskin (%) dan Derajat Otonomi Fiskal (%) Kota Banda Aceh Tahun 2015-2021



derajat otonomi fiskal relatif tinggi. Artinya total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh relatif besar dalam total pendapatan APBD dibandingkan kabupaten/kota lain di provinsi Aceh.

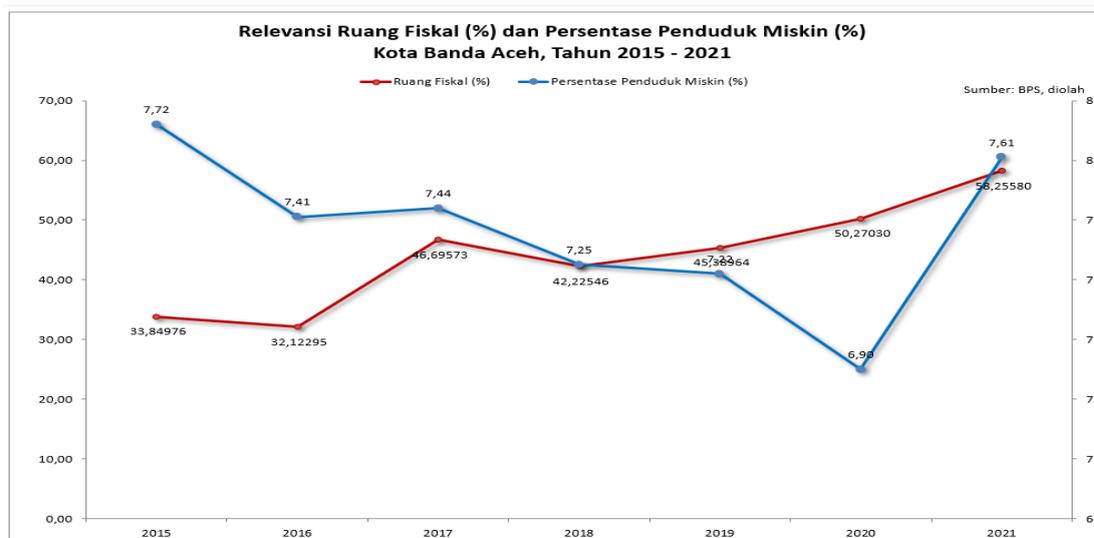
Gambar 4.7 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin (%) dan Ruang Fiskal (%) Aceh Tahun 2021



Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa, dalam kurun waktu 2015 – 2021, tren derajat otonomi fiskal Kota Banda Aceh dalam tren meningkat sampai 2018, sempat menurun di tahun 2019 dan 2020 dan kembali meningkat di 2022. Sedangkan dari sisi persentase penduduk miskin Kota Banda Aceh sejak 2019 sampai 2021 menunjukkan tren penurunan meskipun sempat meningkat di tahun 2021.

Kuadran wilayah menunjukkan bahwa, posisi Kota Banda Aceh pada tahun 2021 dengan persentase kemiskinan 7,61% dengan ruang fiskal sebesar 58,26%. Menempatkan Kota Banda Aceh pada kuadran kiri atas yang memiliki arti Kota Banda Aceh merupakan daerah dengan persentase kemiskinan relatif rendah juga secara ruang fiskal relatif tinggi. Artinya fleksibilitas APBD untuk membiayai program- program prioritas Kota Banda Aceh relatif tinggi.

Gambar 4.8 Relevansi Persentase Penduduk Miskin (%) dan Ruang Fiskal (%) Kota Banda Aceh Tahun 2015-2021

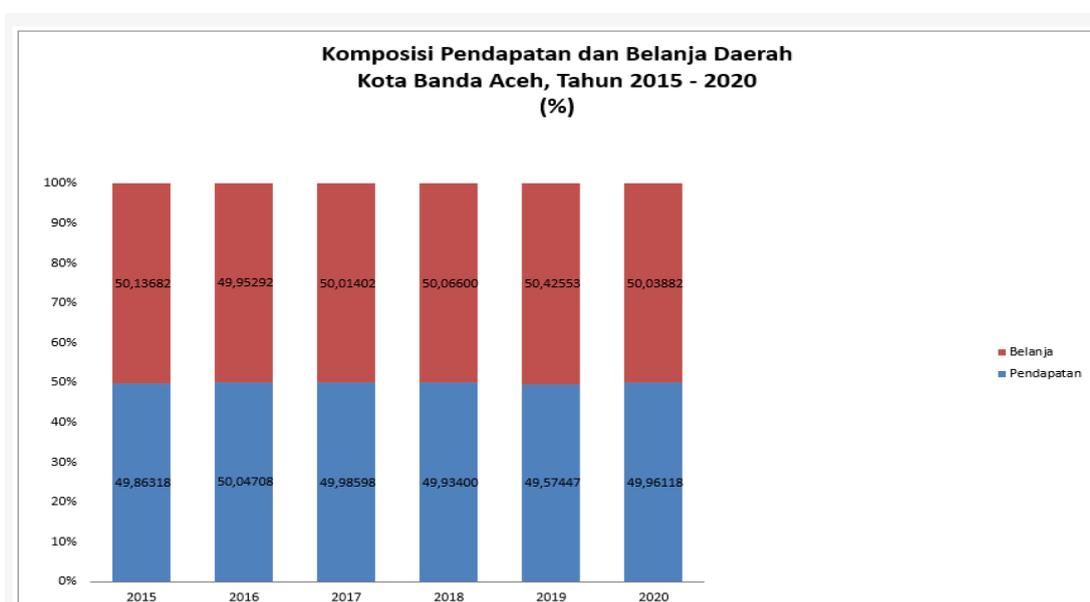


Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa, dalam kurun waktu 2015 – 2021, tren perkembangan ruang fiskal Kota Banda Aceh menunjukkan trend kenaikan sampai 2017 dan sempat anjlok di tahun 2018 dan meningkat kembali 2019-2021. Sedangkan dari sisi persentase penduduk miskin Kota Banda Aceh sejak 2015 sampai 2021 menunjukkan tren penurunan meskipun sempat naik pada tahun 2020.

Komposisi Pendapatan dan Belanja

Berdasarkan data dan informasi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan tahun 2020, menunjukkan bahwa komponen pendapatan Kota Banda Aceh sebesar 49,96% dengan total komponen belanja sebesar 50,04%. Sejak tahun 2015 sampai 2020, komponen pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh rata-rata hampir berimbang (49,9% : 50,1%)

Gambar 4.9 Komposisi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2015-2020



Untuk secara detail melihat rincian pendapatan dan rincian belanja Kota Banda Aceh pada tahun 2015 sampai 2020, dapat dilihat pada gambar dibawah, komponen terbesar pendapatan Kota Banda Aceh secara rata-rata bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

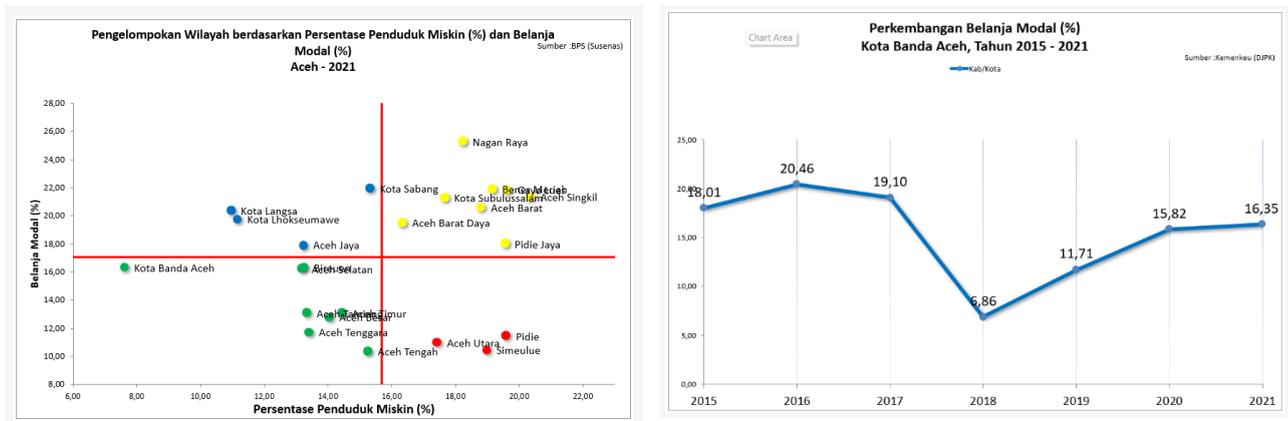
Sedangkan untuk komponen belanja, belanja barang jasa, belanja modal dan belanja pegawai tidak langsung merupakan tiga komponen terbesar pembiayaan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam beberapa waktu terakhir.

Gambar 4.10 Rincian Pendapatan (Semua Belanja) Kota Banda Aceh Tahun 2015-2020 (%)



Berdasarkan komponen belanja Pemerintah Kota Banda Aceh, komponen belanja modal Kota Banda Aceh mengalami fluktuasi dan cenderung menunjukkan trend kenaikan dari tahun 2018 hingga 2020. Semakin tinggi belanja modal mengindikasikan akan semakin besar peluang pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh jika dibelanjakan secara tepat untuk pertumbuhan ekonomi.

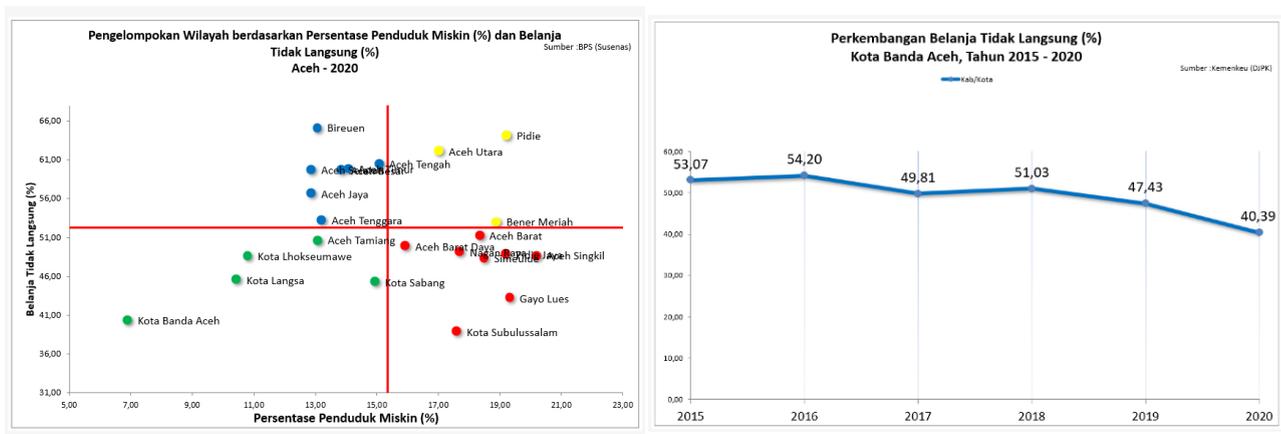
Gambar 4.11 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Penduduk Miskin (%) dan Belanja Modal (%) Aceh Tahun 2021 dan Perkembangan Belanja Modal Kota Banda Aceh Tahun 2015-2021



Sementara berdasarkan komponen belanja pegawai tidak langsung Kota Banda Aceh pada tahun 2021 sebesar 27,45%, relatif sedikit meningkat jika

dibandingkan dengan tahun 2020 (27,28%), semakin rendah komponen belanja pegawai tidak langsung dalam komponen APBD, maka peluang untuk meningkatkan alokasi untuk belanja modal akan semakin meningkat, demikian juga sebaliknya, jika komponen belanja pegawai tidak langsung semakin meningkat, maka proporsi belanja modal akan semakin mengecil dan peluang pertumbuhan ekonomi sekalipun akan mengecil.

Gambar 4.12 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Penduduk Miskin (%) dan Belanja Tidak Langsung (%) Aceh Tahun 2020 dan Perkembangan Belanja Tidak Langsung Kota Banda Aceh Tahun 2015-2020

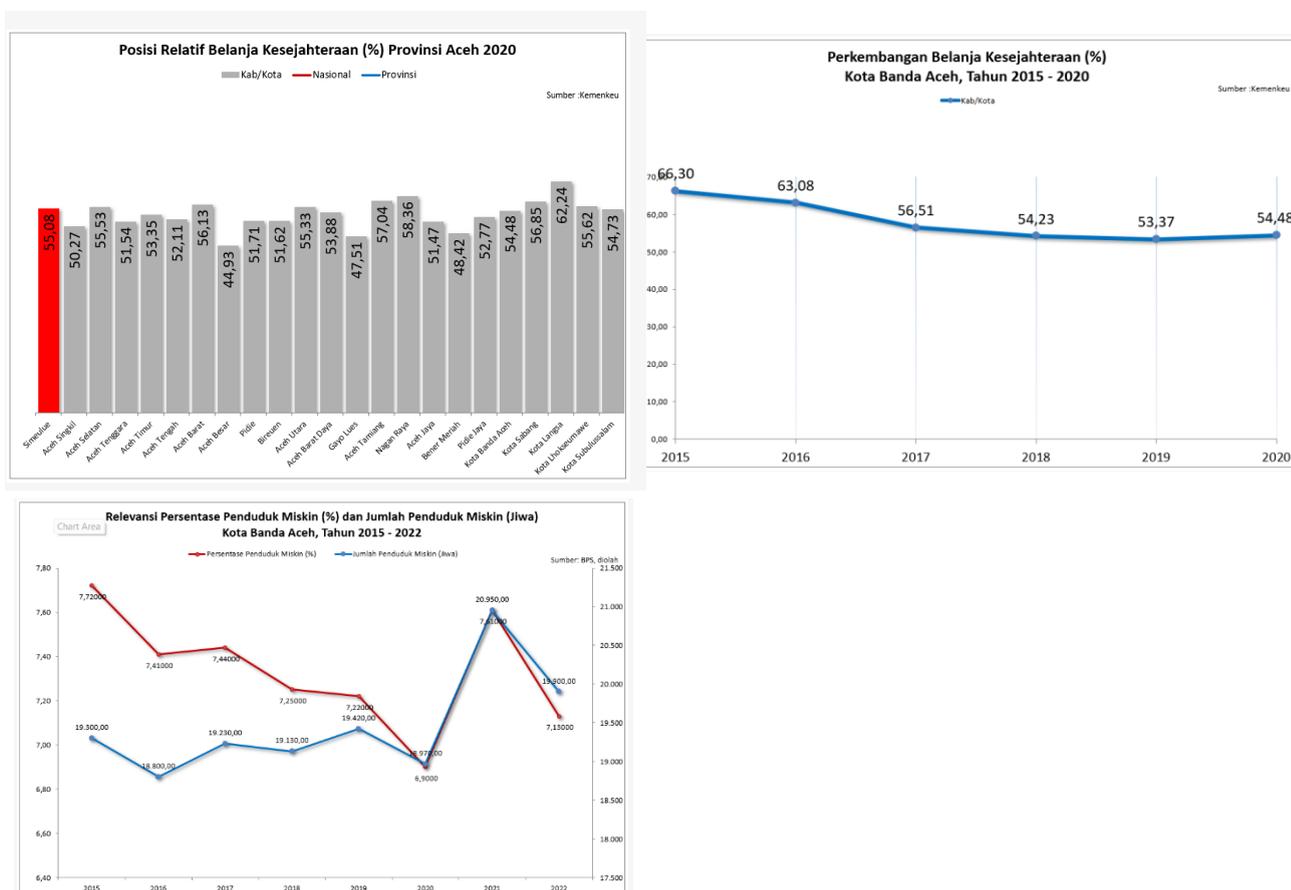


Belanja Menurut Fungsi Terkait Penanggulangan Kemiskinan

a. Belanja Menurut Fungsi Kesejahteraan

Persentase alokasi belanja kesejahteraan Kota Banda Aceh relatif tinggi, Persentase alokasi belanja kesejahteraan merupakan salah satu instrumen bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Persentase alokasi belanja kesejahteraan merupakan total APBD menurut fungsi perlindungan sosial, fungsi pendidikan, fungsi kesehatan serta fungsi fasilitas umum dan perumahan. Dalam kurun lima tahun terakhir (2015-2020), Persentase alokasi belanja kesejahteraan cenderung menurun, pada tahun 2015 (66,30%), terus turun hingga menjadi 53,37% pada tahun 2019 dan naik sedikit pada tahun 2020 (54,48%). Persentase belanja publik yang relatif tinggi selama enam tahun terakhir di Kota Banda Aceh, telah berkontribusi sangat positif pada penurunan persentase penduduk miskin secara khusus dalam periode 2019-2020.

Gambar 4.13 Posisi Relatif Belanja Kesejahteraan (%) Aceh 2020, Perkembangan di Kota Banda Aceh Tahun 2015-2020 Serta Relevansi Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin Kota Banda Aceh Tahun 2015-2020

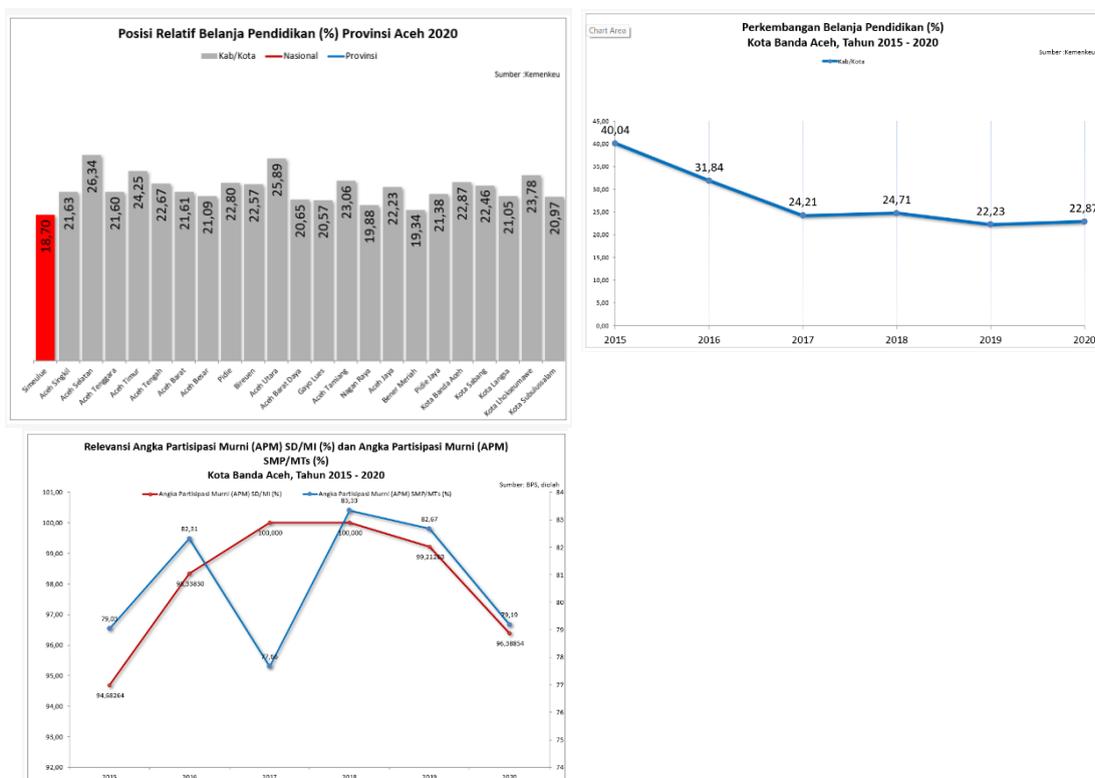


b. Belanja Menurut Fungsi Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu dimensi kemiskinan. Amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49 ayat 1 telah mengatur agar alokasi untuk sektor pendidikan di masing-masing daerah minimal 20% harus teralokasikan dari total APBD, berdasarkan ketentuan tersebut, untuk Kota Banda Aceh dalam kurun waktu enam tahun terakhir cenderung menurun, namun masih diatas 20%. Tahun 2015 alokasi belanja pendidikan mencapai 40,04% dan terus menuruh hingga hanya 22,87% pada tahun 2020. Sasaran utama dari besarnya alokasi tersebut adalah pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar wajib belajar dua belas tahun. Data capaian Kota Banda Aceh untuk Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dari tahun 2015

cenderung naik hingga 2017, namun dari tahun 2018 hingga 2020 cenderung menurun, sedangkan APM SMP/MTs fluktuatis dan terus menurun sejak tahun 2018 hingga 2020.. Secara rata-rata capaian APM SD/MI dan SMP/MTs dari tahun 2015 ke tahun 2020 cenderung menurun.

Gambar 4.14 Posisi Relatif Belanja Pendidikan (%) Aceh 2020, Perkembangan di Kota Banda Aceh Tahun 2015-2020 Serta Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kota Banda Aceh Tahun 2015-2020



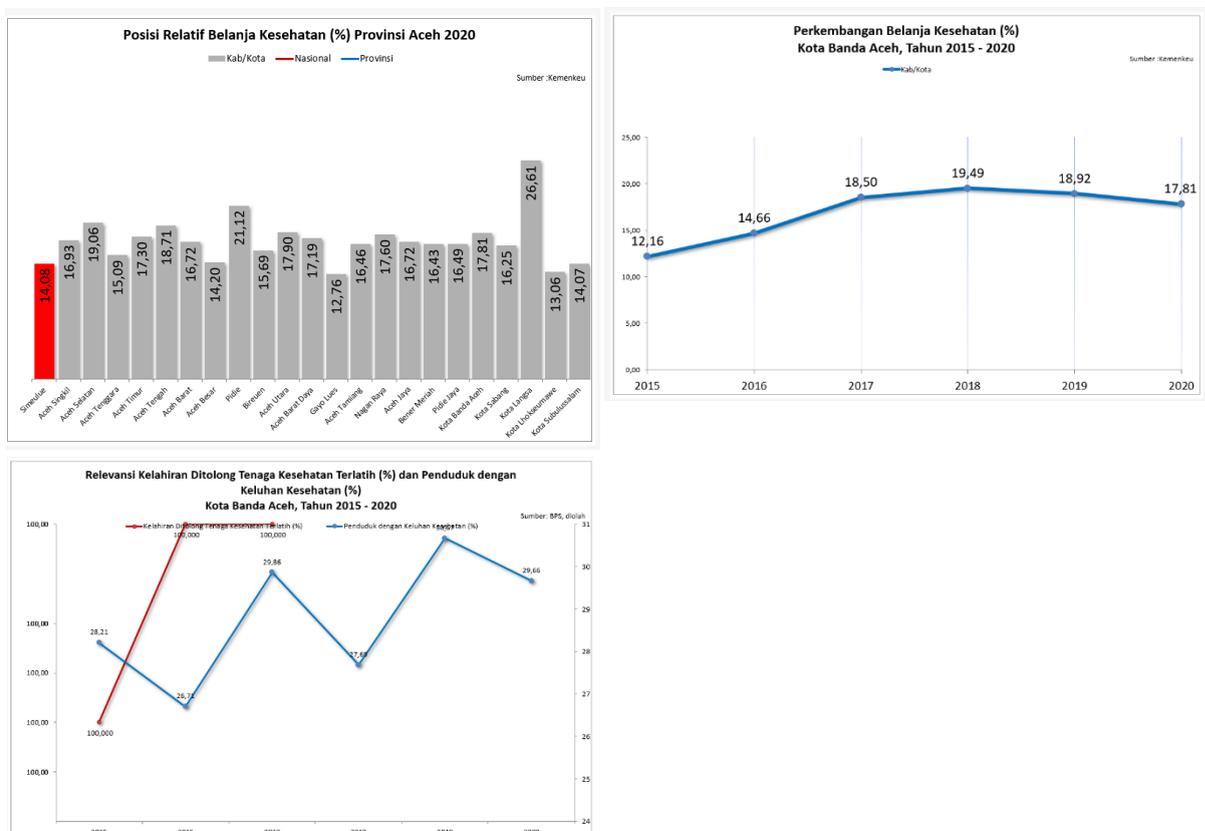
c. Belanja Menurut Fungsi Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu dimensi kemiskinan. Seperti halnya pendidikan, sektor kesehatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari isu kemiskinan itu sendiri, karena prioritasnya isu kesehatan tersebut, undang-undang telah mengatur agar alokasi APBD minimal sekurang-kurangnya 10% harus terpenuhi untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar sektor kesehatan. Kota Banda Aceh merespon ketentuan tersebut dengan terus meningkatkan alokasi belanja kesehatan, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya persentase alokasi belanja kesehatan dari

tahun ke tahun, pada tahun 2015 alokasi belanja kesehatan sebesar 12,16% menjadi 19,49% pada tahun 2018, walaupun pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 17,81%.

Sasaran utama dari peningkatan alokasi anggaran kesehatan adalah perbaikan indikator-indikator kunci kesehatan seperti kesehatan ibu dan anak, peningkatan kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih, angka morbiditas, perbaikan penduduk dengan keluhan kesehatan dan lain-lainnya. Secara rata-rata dalam periode enam tahun yang lalu, ketika alokasi anggaran kesehatan terus meningkat, kondisi ini diikuti dengan semakin membaiknya indikator pendudukan dengan keluhan kesehatan yang semakin menurun, semakin meningkatnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.

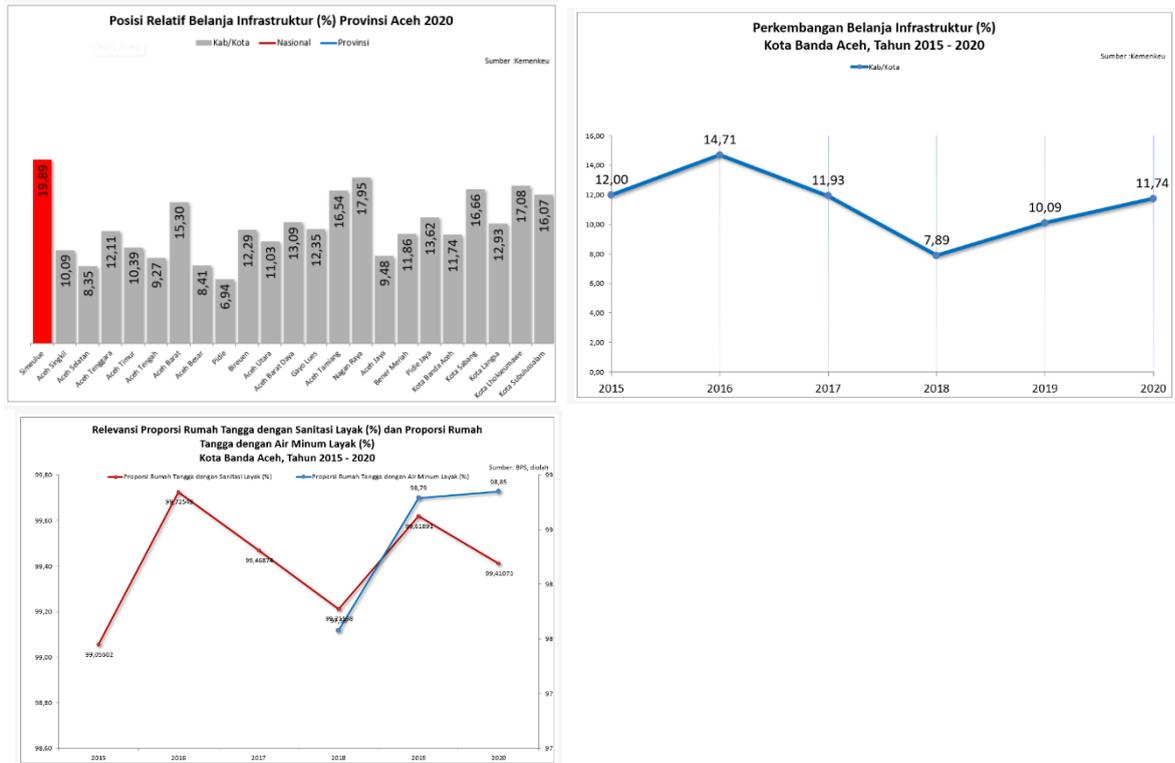
Gambar 4.15 Posisi Relatif Belanja Kesehatan (%) Aceh 2020, Perkembangan di Kota Banda Aceh Tahun 2015-2020 Serta Relevansi Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) dan Penduduk dengan Keluhan Kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2015-2020



d. Belanja Menurut Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum

Infrastruktur dasar merupakan salah satu dimensi kemiskinan. Seperti halnya pendidikan dan kesehatan, pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar merupakan bagian tidak terpisahkan dari isu kemiskinan, karena prioritasnya isu pemenuhan infrastruktur dasar, maka alokasi anggaran APBD pun harus tersedia untuk perbaikan indikator-indikator terkait, selain itu, Pemerintah juga memiliki program sanitasi berbasis masyarakat dan 100-0-100 dengan target 100% pemenuhan air bersih, 0 kumuh dan 100% sanitasi layak. Kota Banda Aceh merespon ketentuan tersebut dengan terus meningkatkan alokasi belanja perumahan dan fasilitas umum setiap tahun dalam APBD, hal ini terlihat dari besarnya persentase alokasi belanja infrastruktur di Kota Banda Aceh dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di provinsi Aceh. Walaupun demikian trend belanja infrastruktur dalam enam tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 alokasi anggaran perumahan dan fasilitas umum sebesar 12,00% meningkat menjadi 14,71% pada tahun 2016, namun jika lihat sepanjang tahun 2015-2020, maka alokasi tahun 2016 merupakan alokasi tertinggi dan pada tahun 2020 berada pada angka 11,74%. Sasaran utama dari peningkatan alokasi anggaran infrastruktur dasar adalah perbaikan indikator-indikator kunci perumahan dan fasilitas umum seperti proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak, air minum layak, proporsi rumah tangga dengan akses listrik dan lainnya. Secara rata-rata dalam periode enam tahun, ketika alokasi anggaran perumahan dan fasilitas umum terus meningkat, kondisi ini juga diikuti dengan semakin membaiknya indikator seperti proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak dan proporsi rumah tangga dengan air minum layak, demikian juga untuk proporsi rumah tangga dengan akses listrik.

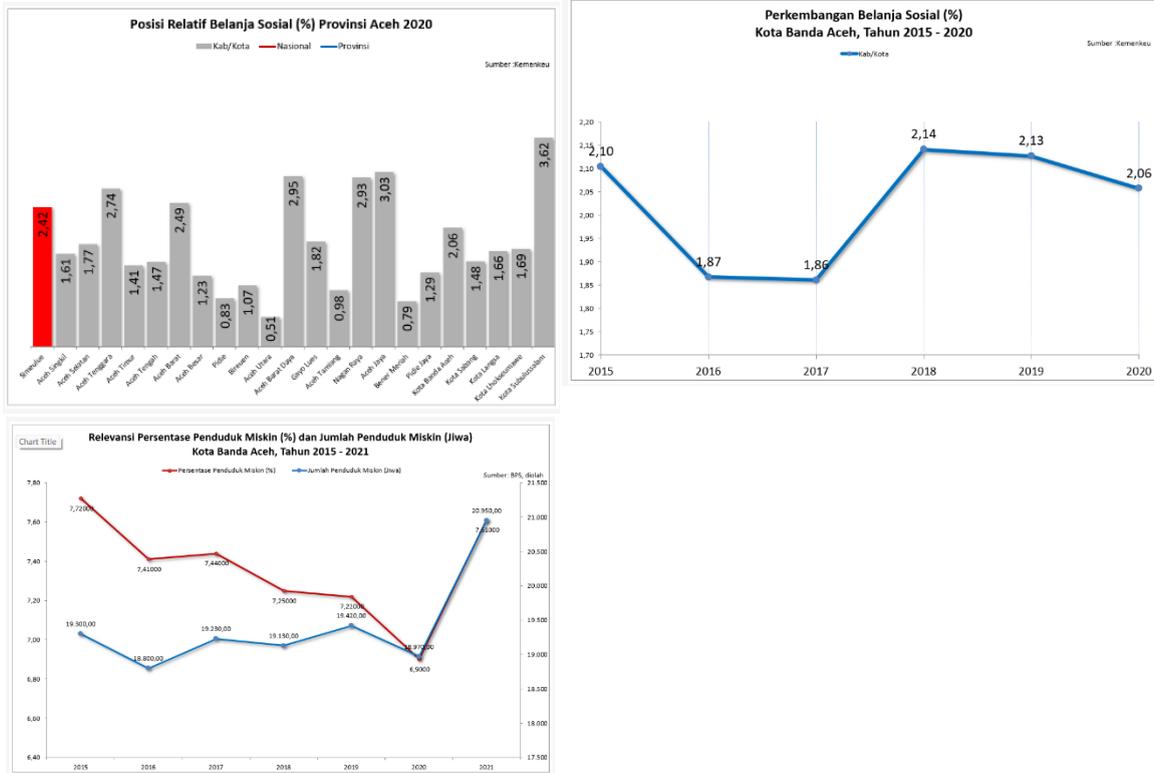
Gambar 4.16 Posisi Relatif Belanja Infrastruktur (%) Aceh 2020, Perkembangan di Kota Banda Aceh Tahun 2015-2020 Serta Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) dan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kota Banda Aceh Tahun 2015-2020



e. Belanja Sosial

Persentase alokasi belanja sosial Kota Banda Aceh relatif rendah, Persentase alokasi belanja sosial merupakan salah satu instrumen bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat. Namun dalam kurun waktu 2015-2020, alokasi persentase belanja sosial masih cukup rendah dengan rata-rata di proporsi 2,10% di tahun 2015, turun menjadi 1,87% tahun 2016, dan 1,86% tahun 2017 dan meningkat Kembali tahun 2018 menjadi 2,14% dan turun Kembali menjadi 2,06% di tahun 2020. Langkah konkrit yang diperlukan adalah meningkatkan alokasi persentase belanja sosial dalam APBD Kota Banda Aceh. Perlindungan sosial bagi masyarakat Kota Banda Aceh selama ini lebih bertumpu kepada program-program Pemerintah Pusat seperti Program BPNT, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Sehat (PIS), Program Indonesia Pintar (PIP), BPUM, BST dan program Sembako.

Gambar 4.17 Posisi Relatif Belanja Sosial (%) Aceh 2020, Perkembangan di Kota Banda Aceh Tahun 2015-2020 Serta Relevansi Penduduk Miskin (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Kota Banda Aceh Tahun 2015-2021



**Tabel 4. 6 ALOKASI ANGGARAN KEMISKINAN PROGRAM PRIORITAS DAN PENDUKUNG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023-2026**

No.	Urusan/bidang urusan/program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/kegiatan /sub kegiatan	Pagu indikatif penanggulangan kemiskinan Kota Banda Aceh (RP)				Sumber Pendanaan
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
	Beasiswa PIP Tingkat SD		4.518.900.000				APBN
	Beasiswa PIP Tingkat SMP		2.607.750.000				APBN
	Beasiswa Yatim, Piatu dan Yatim Piatu Tingkat SD		2.287.200.000				APBA
	Beasiswa Yatim, Piatu dan Yatim Piatu Tingkat SMP		2.366.400.000				APBA
	Perlengkapan Sekolah untuk Anak Yatim Paud, SD dan SMP		50.000.000				APBA
	Bantuan Pengadaan peralatan anak sekolah yang kurang mampu		100.000.000				APBA
	Pengadaan Bantuan Baju Seragam Sekolah Anak SD		100.000.000				APBA
	Pengadaan Baju Seragam SD Kecamatan		150.000.000				APBA

	Baiturrahman dan Kecamatan Lueng Bata						
	Bantuan Perlengkapan Sekolah untuk Anak Yatim		50.000.000				APBA
	Pengadaan Baju Seragam SMP Kecamatan Baiturrahman dan Kecamatan Lueng Bata		150.000.000				APBA
	Pengadaan Baju Seragam TK-PAUD Kecamatan Baiturrahman dan Kecamatan Lueng Bata		150.000.000				APBA
	Pengadaan Mobiler untuk PAUD		50.000.000				APBA
	Asupan Makanan dan Nutrisi Ibu Hamil, Menyusui, Balita dan Bayi		783.848.485				
	Program Keluarga Harapan (PKH)		11.421.625.000				APBN
	Program Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)		23.023.200.000				APBN
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		800.000.000				APBK
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		662.000.000				APBK

	Bantuan Faqir Konsumtif		2.000.000.000				APBK
	Bantuan Faqir Uzur		3.072.000.000				APBK
	Bantuan Faqir perseorangan		160.000.000				APBK
	Bantuan faqir santunan medis		288.000.000				APBK
	Senif Miskin						APBK
	Bantuan Miskin Konsumtif		1.886.400.000				APBK
	Bantuan modal usaha		1.050.000.000				APBK
	Bantuan biaya pembangunan rumah faqir/ miskin		3.150.000.000				APBK
	Bantuan pelatihan keterampilan ,toolkit, magang		336.900.000				APBK
	Bantuan Disabilitas		300.000.000				APBK
	Bantuan Disabilitas (lumpuh layu dan sejenis nya)		120.000.000				APBK
	Bantuan Miskin perseorangan		171.000.000				APBK

	Bantuan kekerasan terhadap perempuan dan anak		45.000.000				APBK
	Senif Muallaf		20.000.000				APBK
	Senif Gharim						APBK
	Bantuan musibah kebakaran		60.000.000				APBK
	Bantuan bagi yang terhutang		30.000.000				APBK
	Senif Fisabillah						APBK
	Bantuan beasiswa SD/MIN,SMP/MTsN,MA		1.380.000.000				APBK
	Bantuan santri dayah		462.000.000				APBK
	Bantuan basiswa 1/2 penuh		1.260.000.000				APBK
	Bantuan SPP Mahasiswa Politeknik		131.000.000				APBK
	Bantuan pendidikan anak miskin,santri dayah dan perguruan tinggi		225.000.000				APBK
	Bantuan Fisabilillah perseorangan		19.500.000				APBK
	Bantuan beasiswa tahfiz		180.000.000				APBK
	Bantuan beasiswa anak muallaf		72.000.000				APBK

	Senif Ibnu Sabil		20.000.000				APBK
	Senif Infaq						APBK
	Bantuan biaya renovasi rumah faqir/miskin		600.000.000				APBK
	Bantuan infaq beras		200.000.000				APBK
	Bantuan musibah bencana, pembinaan dan monev BMG		114.630.000				APBK
	Bantuan santunan anak yatim		120.000.000				APBK
	Kegiatan Kemiskinan di Gampong		1.150.000.000				APBN
	BLT Dana Desa		29.865.600.000				APBN
	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni		242.334.550				APBN
	Ketahanan Pangan		11.769.583.317				APBN
	Pelatihan Manajemen Usaha bagi Perempuan		25.330.125				APBK
	Pelatihan Speaking di Kota Banda Aceh		25.330.125				APBK

	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus Balee Inong Kota Banda Aceh		100.000.000				APBK
	Pelatihan Parenting Pengurus Balee Inong Kota Banda Aceh		75.000.000				APBK
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan		50.000.000				APBK
	Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis POKTAN		185.500.000				APBN
	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		4.192.006.851				APBK
	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		1.881.864.580				APBN/ APBK
	Pelatihan berbasis kompetensi		669.024.000				APBN
	Job Fair/bursa Kerja		165.479.992				APBN
	Bantuan Kelompok Usaha catering, Alat Kue, Becak Barang, Rak Steling, Kedai Kopi Usaha Pelaminan, Rental Komputer dll		10.440.010.642				APBK

	Pasar Murah		1.986.000.000				APBA
	Kegiatan Perkarangan Pangan Lestari (P2L) (Fokir DPR RI)		150.000.000				APBN
	Kegiatan Perkarangan Pangan Lestari (P2L) (DAK non fisik)		240.000.000				APBN
	Program Kawasan Permukiman						
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.		531.730.000				APBK
	Pembangunan Rumah Layak Huni.		494.000.000				APBK
	Pembangunan Baru (DAK Integrasi)		5.950.000.000				APBK
	Peningkatan Kualitas (DAK Integrasi)		320.000.000				APBK
	Pembangunan Jalan Lingkungan		2.958.288.532				APBK
	Pembangunan Drainase Lingkungan		1.508.078.436				APBK
	Pengawasan		58.800.000				APBK

	Program Pembiayaan Revolving Gampong		727.166.608				CSR/CSO
	Total		142.505.481.243				

BAB V

PRIORITAS WILAYAH

5.1. Isu Strategis

Isu strategis adalah isu-isu yang dianggap prioritas untuk ditangani sebagai hasil dari seluruh analisis program percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh yang telah dilakukan pada proses analisis perencanaan dan penganggaran seperti yang telah dijabarkan pada bab 3 dan bab 4. Satu isu strategis dapat memuat beberapa indikator utama dalam satu bidang, di mana isu-isu strategis tersebut menjadi fokus yang harus dicapai melalui program-program yang telah direncanakan.

Berbagai isu strategis dan permasalahan yang dialami masyarakat miskin harus diselesaikan secara komprehensif dan terkonsolidasi bukan parsial. Berikut ini isu-isu strategis dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh:

a. Isu Strategis Bidang Pendidikan

Peningkatan kualitas dan angka partisipasi pendidikan dasar, melalui peningkatan sarana prasarana, tenaga pendidik dan kejar paket dengan memprioritaskan pada wilayah-wilayah yang sulit terjangkau, pesisir dan terpencil.

b. Isu Strategis Bidang Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan dasar, melalui peningkatan sarana prasarana kesehatan untuk perluasan akses layanan dengan prioritas pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, untuk pencegahan stunting, dan balita gizi buruk.

c. Isu Strategis Bidang Infrastruktur Dasar

Peningkatan aksesibilitas antar wilayah, melalui peningkatan sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman dengan memprioritaskan pada rumah tangga miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin.

d. Isu Strategis Bidang Ketenagakerjaan

Peningkatan penyediaan lapangan pekerjaan melalui peningkatan investasi, peningkatan keterampilan SDM dan penyerapan tenaga kerja dengan memprioritaskan penduduk asli Aceh.

e. Isu Strategis Bidang Ekonomi

Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha sektor UMKM melalui pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan baik tata kelola keuangan maupun peningkatan omset pemasaran baik online maupun offline serta mengikut sertakan dalam berbagai kegiatan pameran dan study banding guna mewujudkan UMKM naik kelas.

Dengan memperhatikan isu-isu strategis tersebut dilakukan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah diantaranya dilakukan dengan:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui kelompok program sebagai berikut:

1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil
4. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

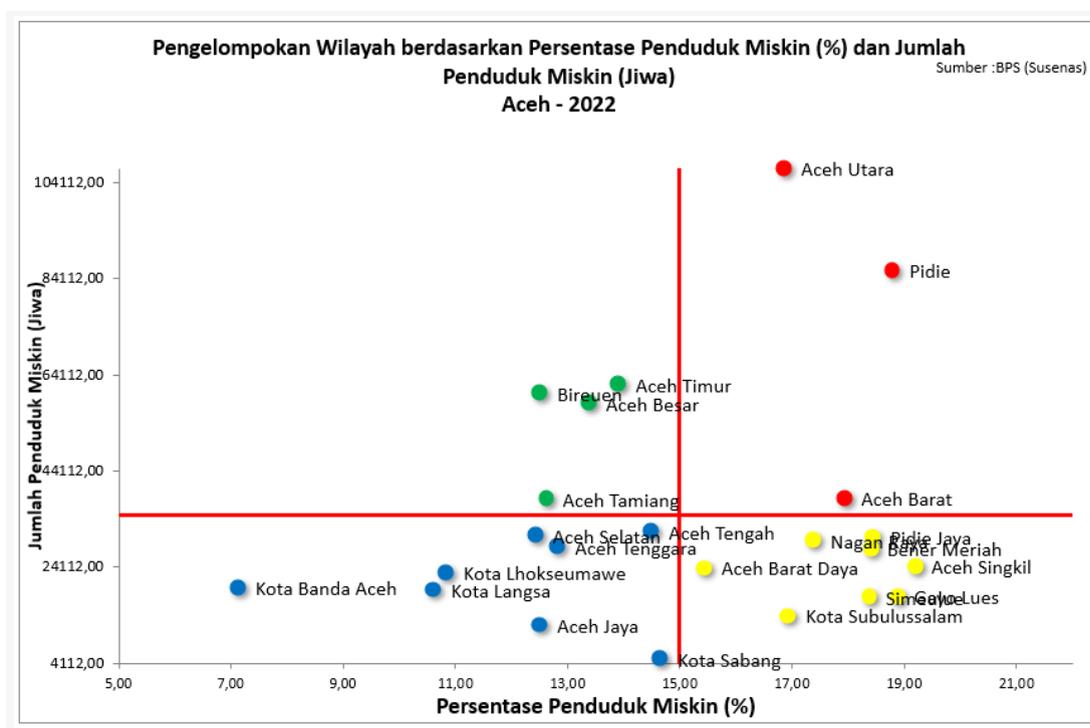
5.2. Analisis Kuadran Prioritas Wilayah

Penentuan prioritas wilayah dilakukan dengan menyandingkan data capaian tujuan (goal) kecamatan pada *Theory of Change* (TOC) masing-masing bidang dengan data capaian kecamatan salah satu intermediate outcome atau prakondisi yang dirasa memiliki pengaruh terhadap tujuan dimaksud kedalam sebuah kuadran. Dari kuadran prioritas wilayah tersebut, dapat dilihat wilayah kecamatan-kecamatan mana

yang capaian kedua indikatornya relatif buruk dibandingkan dengan capaian antar kecamatan lainnya sehingga harus menjadi wilayah yang diprioritaskan dalam pelaksanaan intervensi program dan kegiatan. Pada tataran wilayah prioritas makro untuk penanggulangan kemiskinan di Provinsi Aceh tahun 2021, maka wilayah prioritas perlu diarahkan kepada:

Prioritas Pertama	Aceh Utara, Pidie, Aceh Barat
Prioritas Kedua	Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Pidie Jaya, Bener Meriah, Singkil, Gayo Lues, Kota Subulussalam, Simelue
Prioritas Ketiga	Aceh Timur, Bireun, Aceh Besar Aceh Tamiang
Prioritas Keempat	Kota Banda Aceh, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, Aceh Jaya, Kota Langsa, Kota Sabang

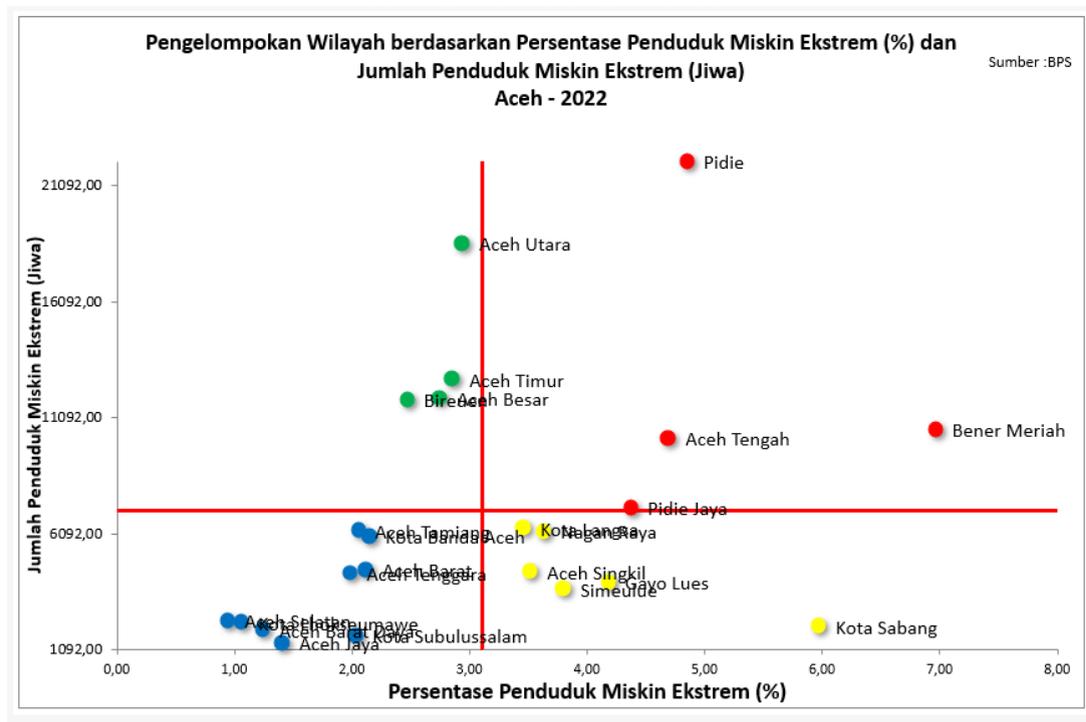
Gambar 5.1 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Provinsi Aceh Tahun 2022



Sedangkan untuk wilayah prioritas makro penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi Aceh tahun 2022, maka wilayah prioritas perlu diarahkan kepada:

Prioritas Pertama	Pidie, Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie Jaya
Prioritas Kedua	Kota Sabang, Simelue, Gayo Lues, Aceh Singkil, Kota Langsa, Nagan Raya
Prioritas Ketiga	Aceh Timur, Aceh Barat, Bireun, Aceh Besar Aceh Tamiang
Prioritas Keempat	Aceh Jaya, Kota Subulussalam, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Lhokseumawe, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Tamiang, Kota Banda Aceh

Gambar 5.2 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin Ekstrem (%) dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (jiwa) Provinsi Aceh Tahun 2022

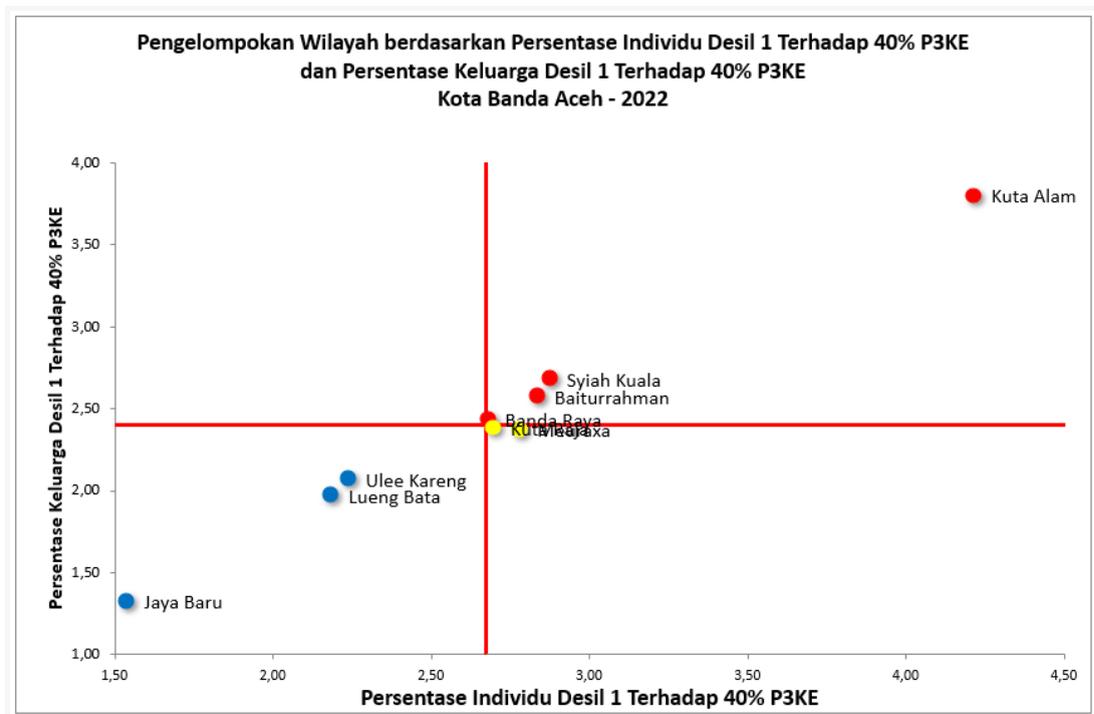


5.2.1. Wilayah Prioritas Kemiskinan Kota Banda Aceh

1. Kecamatan priorotas berdasarkan persentase penduduk Desil 1 terhadap 40% P3KE dengan persentase keluarga desil 1 terhadap 40% P3KE

Prioritas Pertama	Kuta Alam, Syiah Kuala, Baiturrahman, Banda Raya
Prioritas Kedua	Kutaraja, Meuraxa
Prioritas Ketiga	
Prioritas Keempat	Ulee Kareng, Luengbata, Jaya Baru

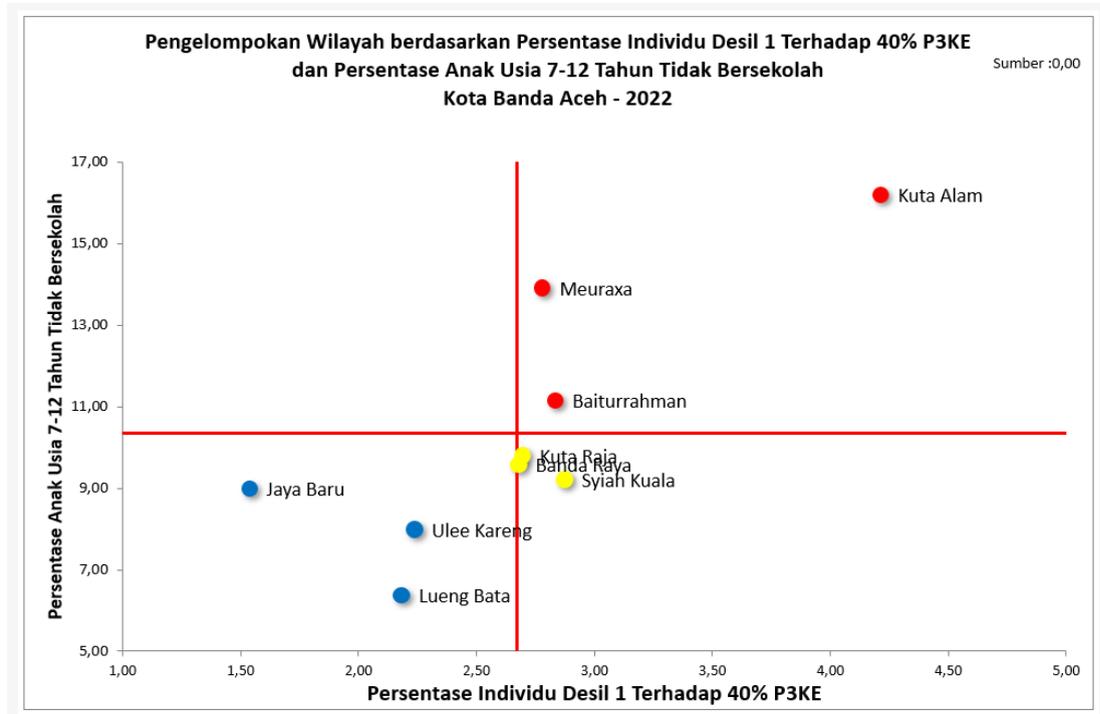
Gambar 5.3 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Individu Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Persentase Keluarga Desil 1 Terhadap 40% P3KE) Kota Banda Aceh Tahun 2022



2. Kecamatan prioritas berdasarkan persentase penduduk Desil 1 terhadap 40% P3KE dengan persentase anak usia 7-12 tahun tidak bersekolah

Prioritas Pertama	Kuta Alam, Meuraxa, Baiturrahman
Prioritas Kedua	Kutaraja, Bandaraya, Syiah Kuala
Prioritas Ketiga	
Prioritas Keempat	Ulee Kareng, Luengbata, Jaya Baru

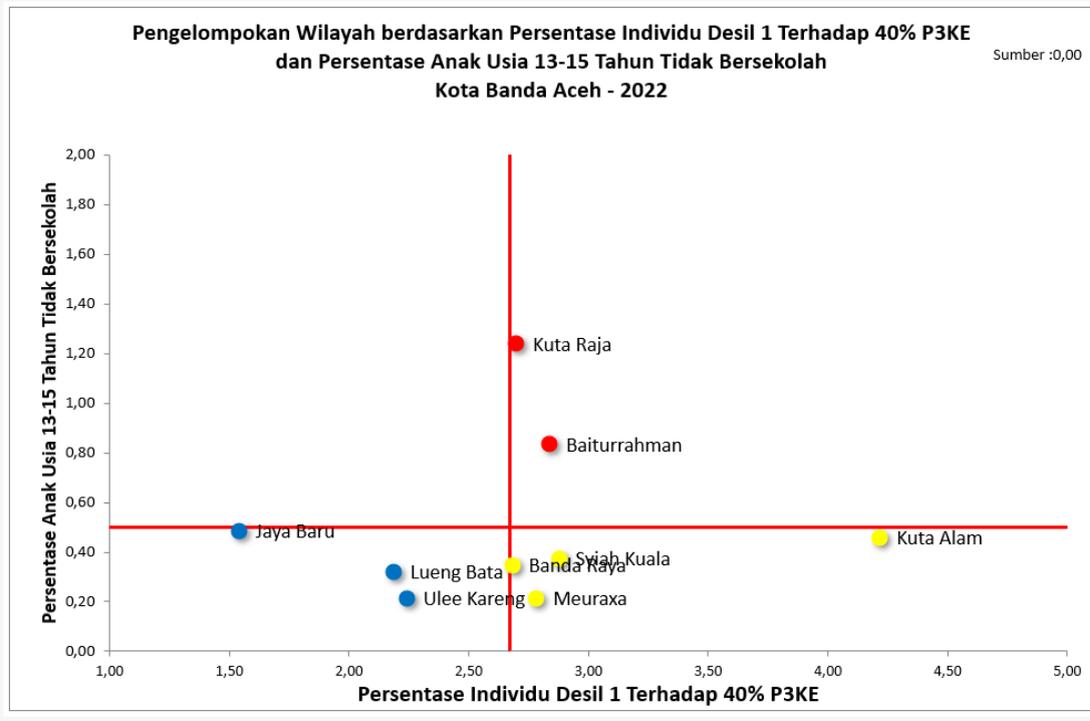
Gambar 5.4 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Individu Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Persentase Anak Usia 7-12 Tahun Tidak Bersekolah Kota Banda Aceh Tahun 2022



3. Kecamatan prioritas berdasarkan persentase penduduk Desil 1 terhadap 40% P3KE dengan persentase anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah

Prioritas Pertama	Kutaraja, Baiturrahman
Prioritas Kedua	Kuta Alam, Syiah Kuala, Banda Raya, Meuraxa
Prioritas Ketiga	
Prioritas Keempat	Ulee Kareng, Luengbata, Jaya Baru

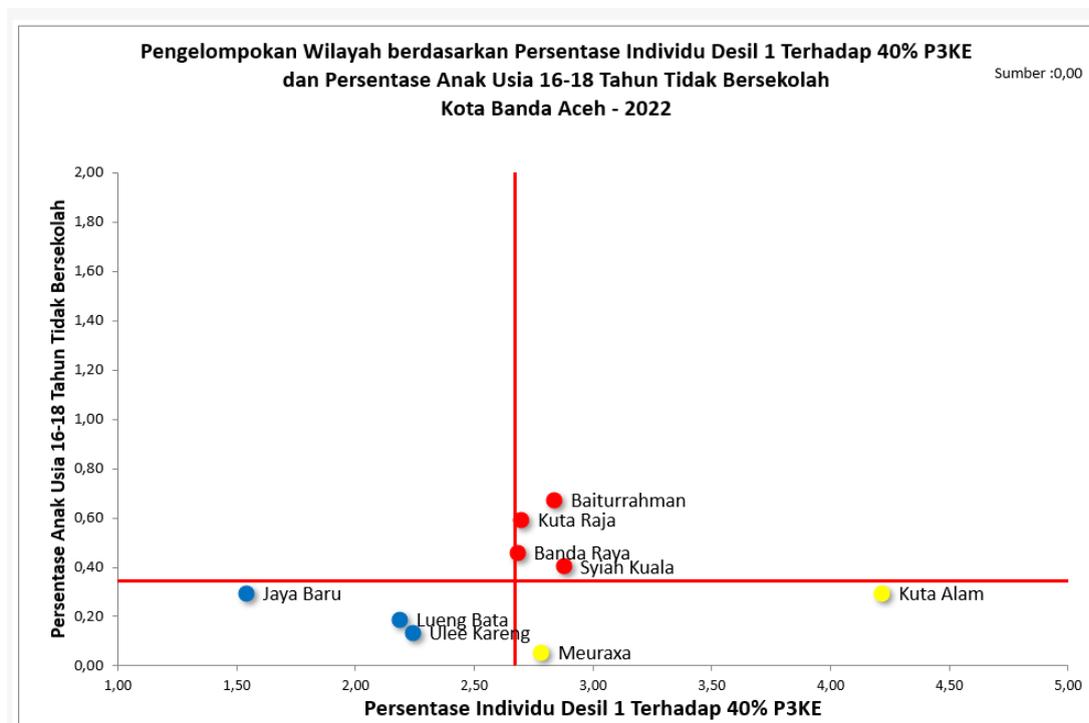
Gambar 5.5 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Individu Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Persentase Anak Usia 13-15 Tahun Tidak Bersekolah Kota Banda Aceh Tahun 2022



4. Kecamatan prioritas berdasarkan persentase penduduk Desil 1 terhadap 40% P3KE dengan persentase anak usia 16-18 tahun tidak bersekolah

Prioritas Pertama	Baiturrahman, Kutaraja, Banda Raya, Syiah Kuala
Prioritas Kedua	Kuta Alam, Meuraxa
Prioritas Ketiga	
Prioritas Keempat	Ulee Kareng, Lueng Bata, Jaya Baru

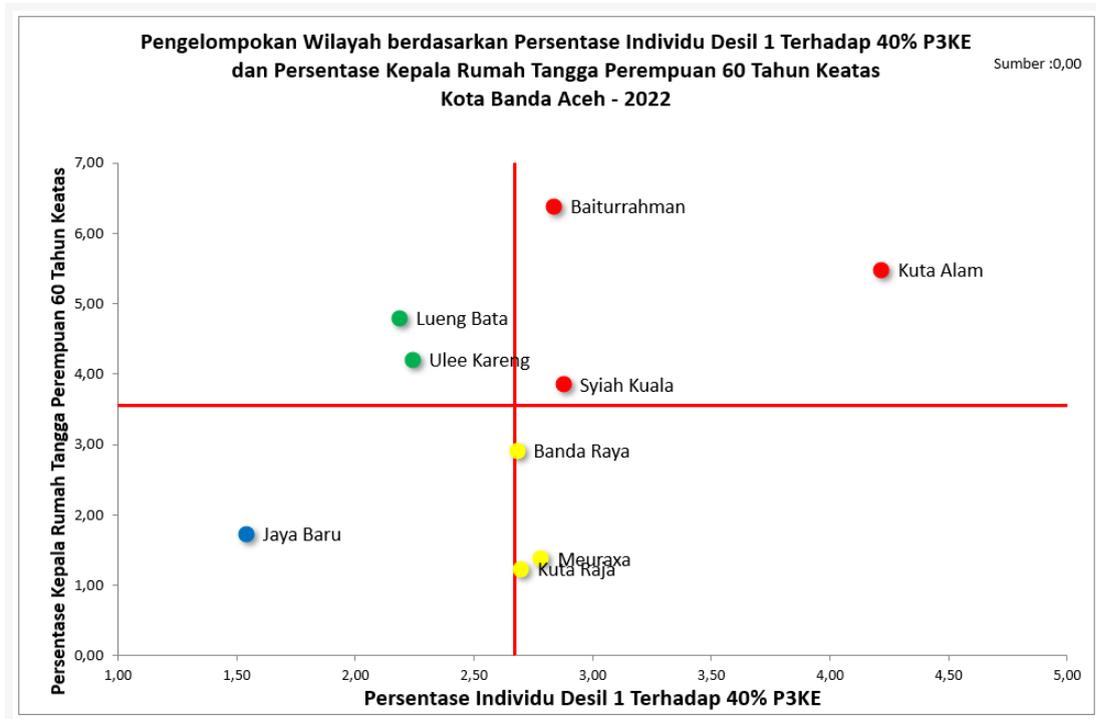
Gambar 5.6 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Individu Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Persentase Anak Usia 16-18 Tahun Tidak Bersekolah Kota Banda Aceh Tahun 2022



5. Kecamatan prioritas berdasarkan persentase penduduk Desil 1 terhadap 40% P3KE dengan persentase kepala keluarga perempuan 60 tahun ke atas

Prioritas Pertama	Baiturrahman, Kuta Alam, Syiah Kuala
Prioritas Kedua	Banda Raya, Meuraxa, Kuta Raja
Prioritas Ketiga	Lueng Bata, Ulee Kareng
Prioritas Keempat	Jaya Baru

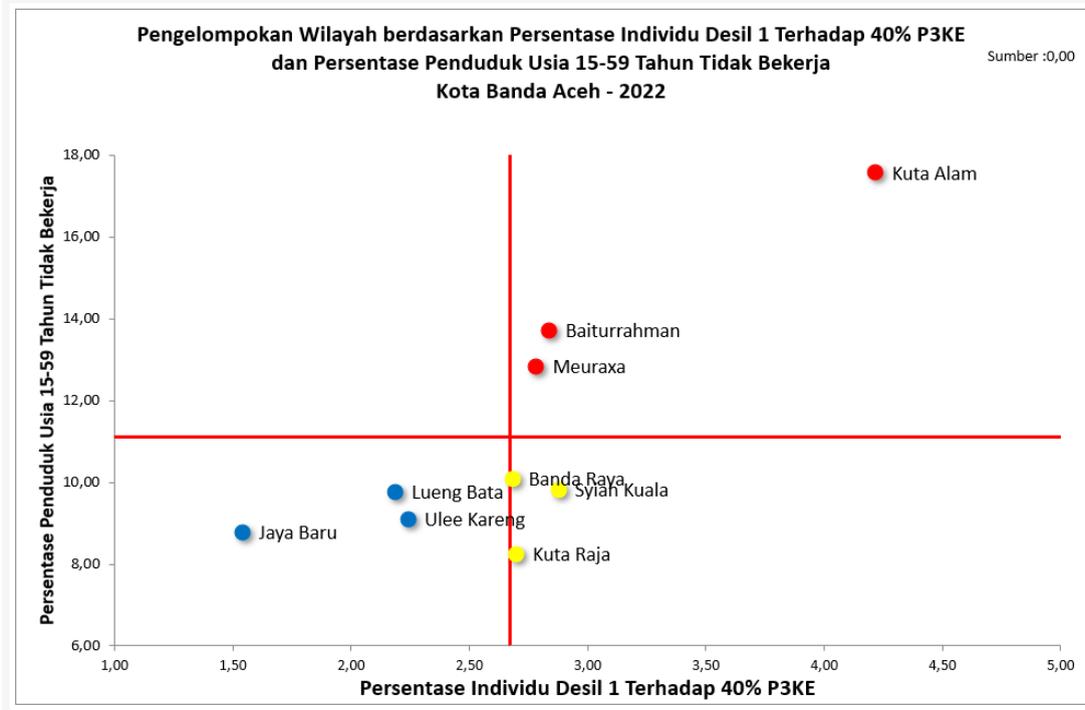
Gambar 5.7 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Individu Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan 60 Tahun Keatas Kota Banda Aceh Tahun 2022



6. Kecamatan prioritas berdasarkan persentase penduduk Desil 1 terhadap 40% P3KE dengan persentase penduduk usia 15-59 tahun tidak bekerja

Prioritas Pertama	Kuta Alam, Baiturrahman, Meuraxa
Prioritas Kedua	Banda Raya, Syiah Kuala, Kuta Raja
Prioritas Ketiga	
Prioritas Keempat	Jaya Baru, Lueng Bata, Ulee Kareng

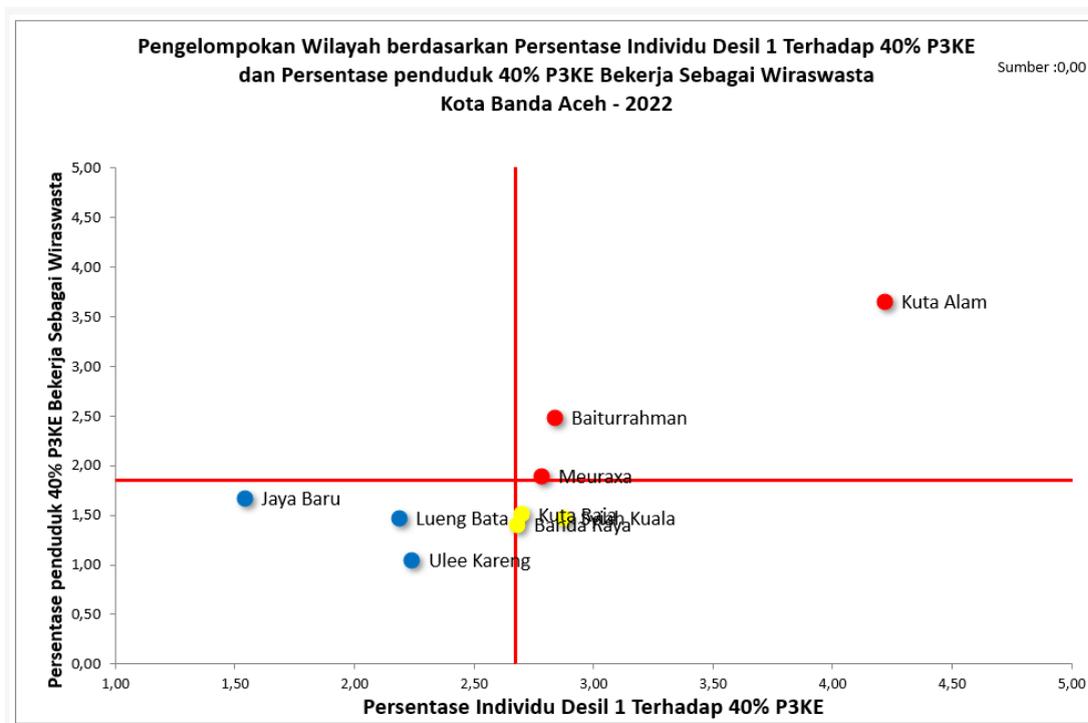
Gambar 5.8 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Individu Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Persentase Penduduk Usia 15=59 Tidak Bekerja Kota Banda Aceh Tahun 2022



7. Kecamatan prioritas berdasarkan persentase penduduk Desil 1 terhadap 40% P3KE dengan persentase penduduk 40% P3KE bekerja sebagai wiraswasta tahun 2022

Prioritas Pertama	Kuta Alam, Baiturrahman, Meuraxa
Prioritas Kedua	Syiah Kuala, Banda Raya, Kuta Raja
Prioritas Ketiga	
Prioritas Keempat	Jaya Baru, Lueng Bata, Ulee Karfeng

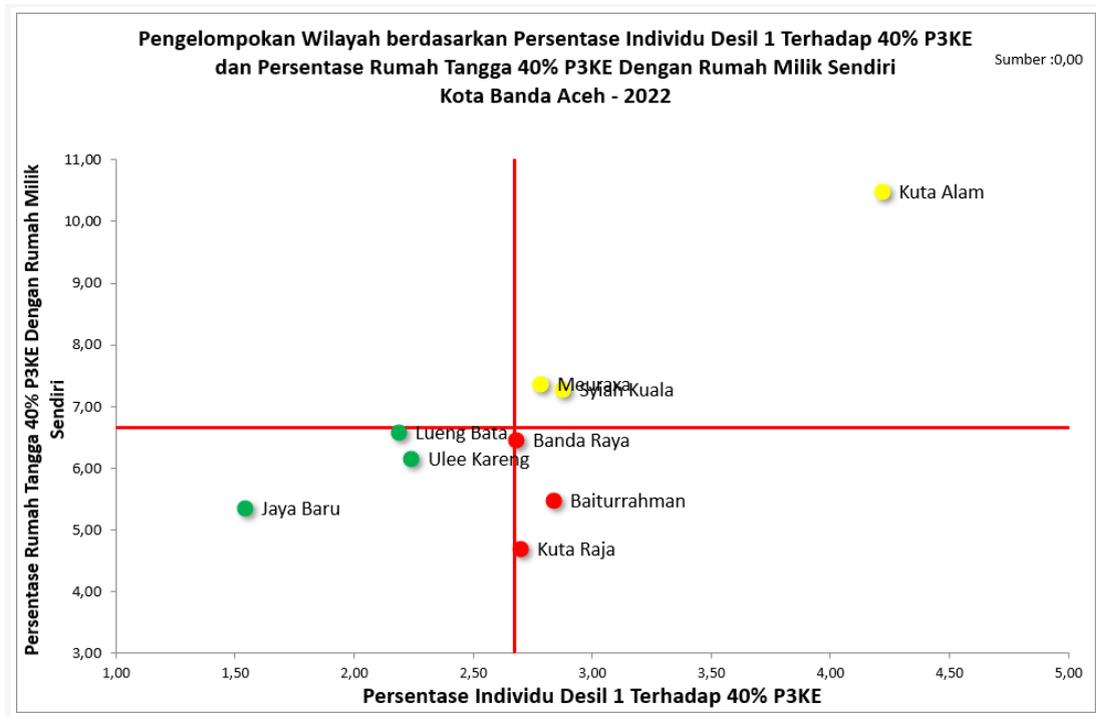
Gambar 5.9 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Individu Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Persentase Penduduk 40% P3KE Bekerja Sebagai Wiraswasta Kota Banda Aceh Tahun 2022



8. Kecamatan prioritas berdasarkan persentase penduduk Desil 1 terhadap 40% P3KE dengan persentase rumah penduduk dengan milik sendiri Tahun 2022

Prioritas Pertama	Banda Raya, Baiturrahman, Kuta Raja
Prioritas Kedua	Kuta Alam, Meuraxa, Syiah Kuala
Prioritas Ketiga	
Prioritas Keempat	Lueng Bata, Ulee Kareng, Jaya Baru

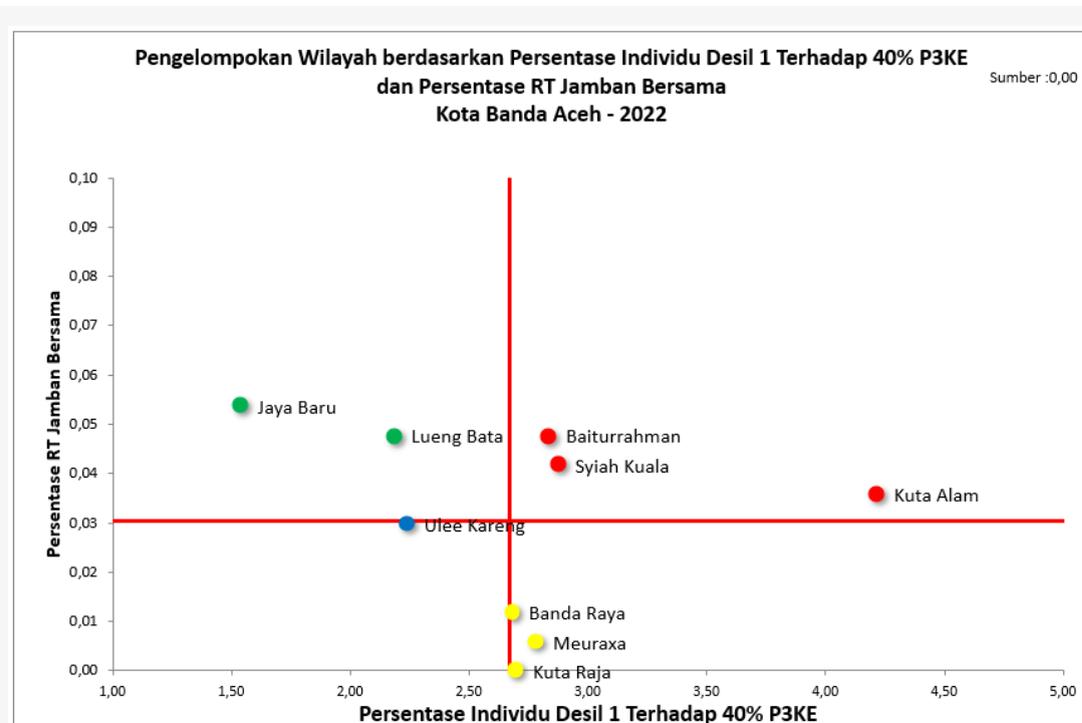
Gambar 5.10 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Individu Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Persentase Rumah Tangga 40% P3KE Dengan Rumah Milik Sendiri Kota Banda Aceh Tahun 2022



9. Kecamatan prioritas berdasarkan persentase penduduk Desil 1 terhadap 40% P3KE dengan persentase rumah tangga dengan jamban bersama Tahun 2022

Prioritas Pertama	Syiah Kuala, Baiturrahman, Kuta Alam
Prioritas Kedua	Banda Raya, Meuraxa, Kuta Raja
Prioritas Ketiga	Jaya Baru, Lueng Bata
Prioritas Keempat	Ulee Kareng

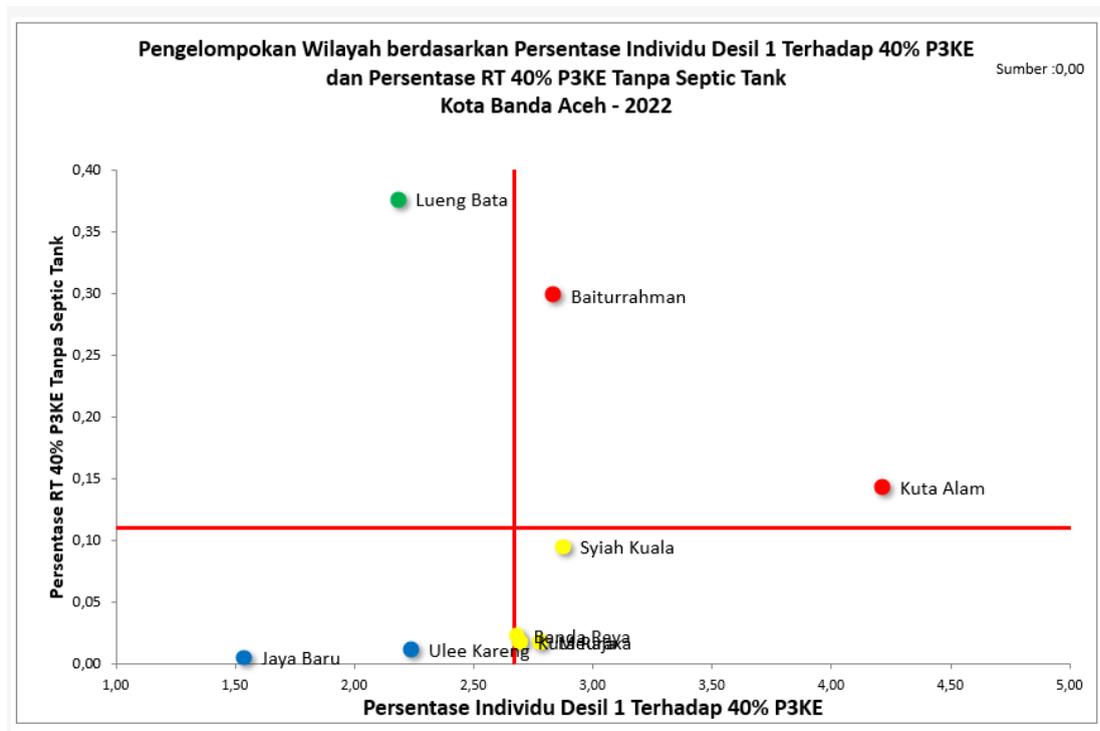
Gambar 5.11 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Individu Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Persentase Rumah Tangga Jamban Bersama Kota Banda Aceh Tahun 2022



10. Kecamatan prioritas berdasarkan persentase penduduk Desil 1 terhadap 40% P3KE dengan persentase rumah tangga tidak memiliki jamban Tahun 2022

Prioritas Pertama	Baiturrahman, Kuta Alam
Prioritas Kedua	Syiah Kuala, Banda Raya, Ulee Kareng, Kuta Raja
Prioritas Ketiga	Lueng Bata
Prioritas Keempat	Ulee Kareng, Jaya Baru

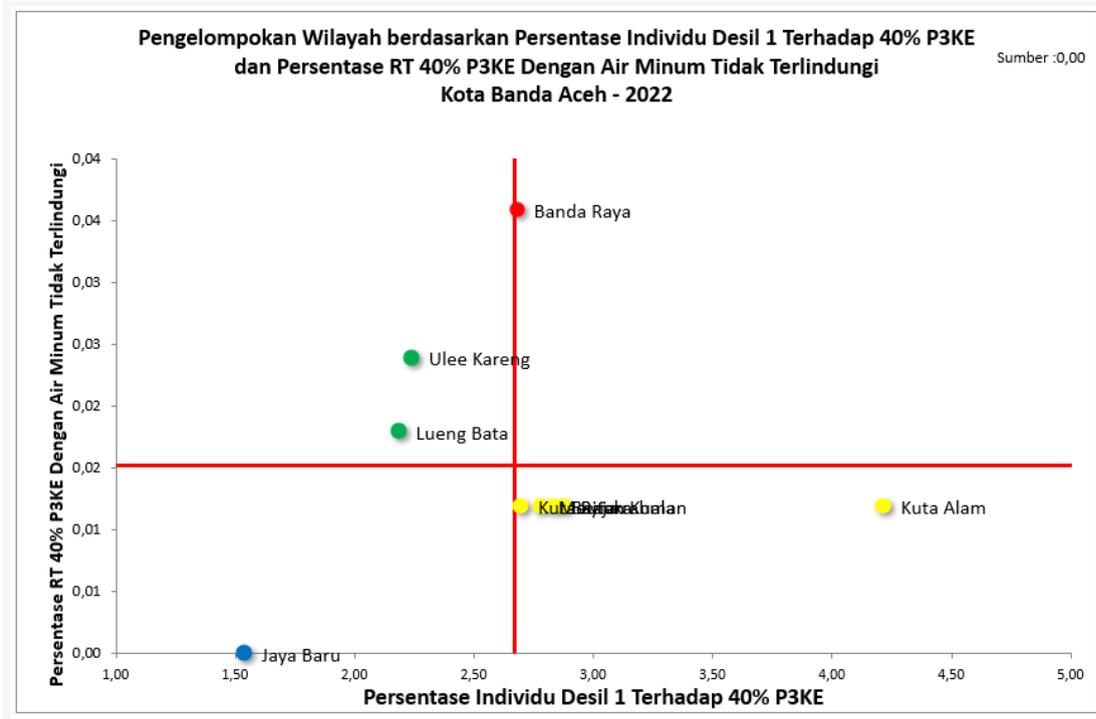
Gambar 5.12 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Individu Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Persentase Rumah Tangga 40% P3KE Tanpa Septic Tank Kota Banda Aceh Tahun 2022



11. Kecamatan prioritas berdasarkan persentase penduduk Desil 1 terhadap 40% P3KE dengan persentase rumah tangga dengan sumber air minum tidak terlindungi Kota Banda Aceh Tahun 2022

Prioritas Pertama	Banda Raya
Prioritas Kedua	Kuta Raja, Syiah Kuala, Baiturrahman, Meuraxa, Kuta Alam
Prioritas Ketiga	Lueng Bata, Ulee Kareeng
Prioritas Keempat	Jaya Baru

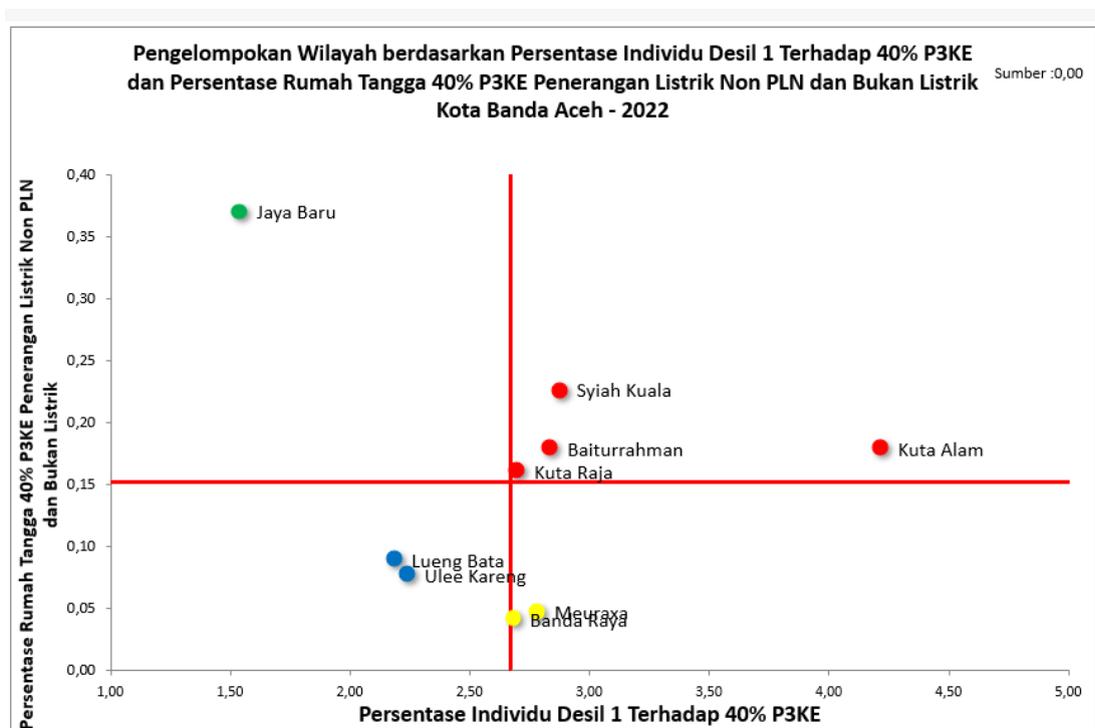
Gambar 5.13 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Individu Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Persentase Rumah Tangga 40% P3KE Dengan Air Minum Tidak Terlindungi Kota Banda Aceh Tahun 2022



12. Kecamatan prioritas berdasarkan persentase penduduk Desil 1 terhadap 40% P3KE dengan persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik non PLN Dan bukan listrik Kota Banda Aceh Tahun 2022

Prioritas Pertama	Syah Kuala, Baiturrahman, Kuta Alam, Kuta Raja
Prioritas Kedua	Meuraxa, Banda Raya
Prioritas Ketiga	Jaya Baru
Prioritas Keempat	Lueng Bata, Ulee Kareng

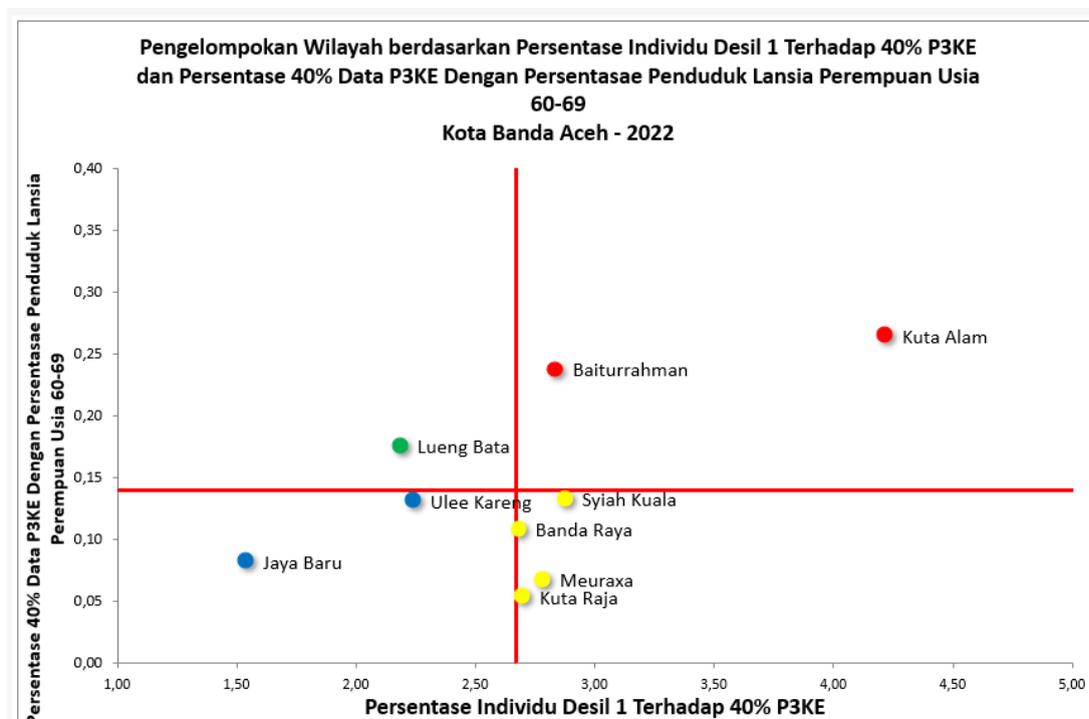
Gambar 5.14 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Individu Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Persentase Rumah Tangga 40% P3KE Penerangan Listrik Non PLN dan Bukan Listrik Kota Banda Aceh Tahun 2022



13. Kecamatan prioritas berdasarkan persentase penduduk Desil 1 terhadap 40% P3KE dengan persentase penduduk lansia perempuan usia 60-69 Tahun 2022 Kota Banda Aceh Tahun 2022

Prioritas Pertama	Kuta Alam, Baiturrahman
Prioritas Kedua	Syiah Kuala, Banda Raya, Meuraxa, Kuta Raja
Prioritas Ketiga	Lueng Bata
Prioritas Keempat	Ulee Kareng, Jaya Baru

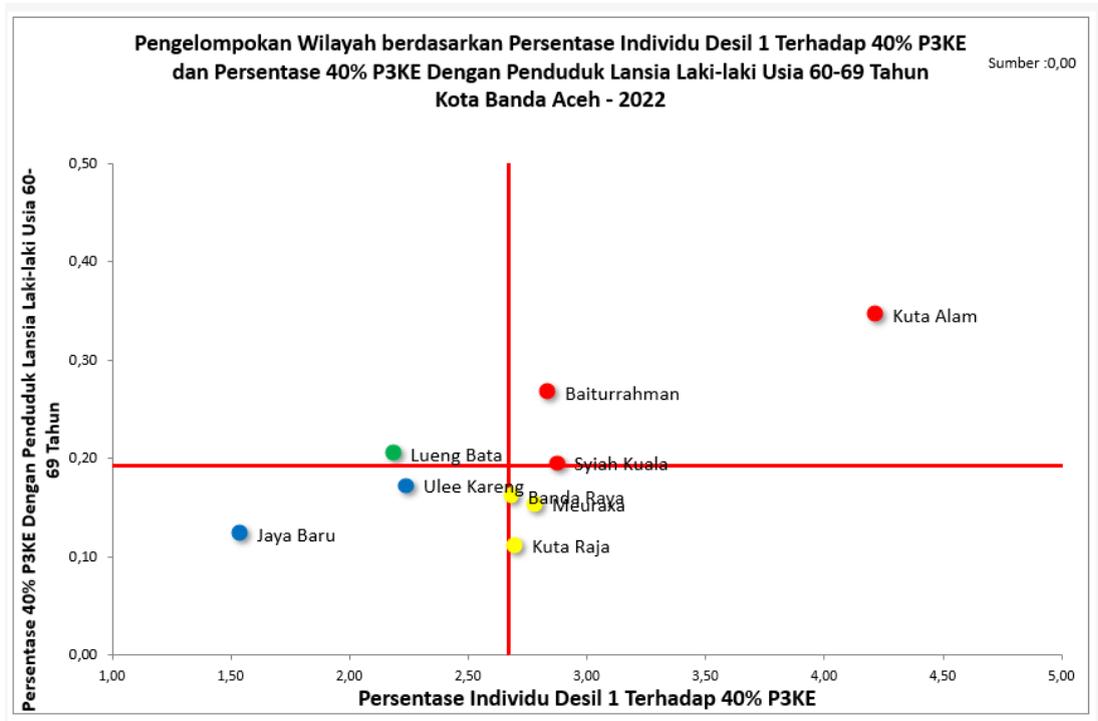
Gambar 5.15 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Individu Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Persentase 40% Data P3KE Dengan Persentase Penduduk Lansia Perempuan Usia 60-69 Kota Banda Aceh Tahun 2022



14. Kecamatan prioritas berdasarkan persentase penduduk Desil 1 terhadap 40% P3KE dengan persentase penduduk lansia laki-laki usia 60-69 Tahun 2022 Kota Banda Aceh Tahun 2022

Prioritas Pertama	Kuta Alam, Baiturrahman, Syiah Kuala
Prioritas Kedua	Banda Raya, Meuraxa, Kuta Raja
Prioritas Ketiga	Lueng Bata
Prioritas Keempat	Ulee Kareng, Jaya Baru

Gambar 5.16 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Individu Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Persentase 40% P3KE Dengan Penduduk Lansia Laki-Laki Usia 60-69 Kota Banda Aceh Tahun 2022



5.3. Rekomendasi Kebijakan

5.3.1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

- Dukungan politik, komitmen dan kesungguhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi syarat utama dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- Kepemimpinan langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi syarat utama dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- Meningkatkan efektivitas setiap nilai rupiah, program dan anggaran oleh seluruh perangkat daerah agar menjawab apa masalah, menjawab akar masalah, menjawab di mana masalah itu terjadi dan memastikan ketepatan individu dan rumah tangga penerima manfaat secara tepat dan benar.

- Meningkatkan sinergitas dan keterpaduan pelaksanaan program oleh seluruh perangkat daerah.
- Pemerintah daerah melakukan upaya pengendalian inflasi dan memastikan harga komoditi-komoditi yang dikonsumsi oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin agar murah, tersedia dan terjangkau. Menggunakan data P3KE dalam penjangkauan dan penajaman sasaran intervensi oleh seluruh perangkat daerah.
- Memperkuat peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) untuk dalam meningkatkan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan.
- Memastikan program perlindungan sosial yang digulirkankan oleh pemerintah pusat dapat diterima secara tepat oleh masyarakat sasaran.

5.3.2. Kebijakan Pendidikan

- Perlunya perhatian pemerintah Kota Banda Aceh untuk terus meningkatkan partisipasi pendidikan usia sekolah melalui program pemberian beasiswa kepada siswa miskin dan rentan.
- Meningkatkan dan mengoptimalkan program penjangkauan anak putus sekolah melalui program Kejar Paket A dan Paket B dalam meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun.
- Mengarustamakan intervensi program pendidikan inklusif terutama bagi yang berkebutuhan khusus.
- Perlu dipertimbangkan adanya kebijakan melakukan regrouping atau penggabungan beberapa sekolah yang tidak dapat memenuhi standar minimal pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya operasional layanan pendidikan, meningkatkan mutu dan produktivitas proses belajar mengajar di kelas, meningkatkan minat dan semangat anak untuk hadir dan belajar di sekolah, memaksimalkan pengawasan terhadap sejumlah sekolah, dan terjadinya pemerataan guru
- Melakukan pemerataan tenaga pendidik terutama guru pengajar, baik guru yang berstatus pegawai tetap maupun honorer, khususnya di daerah-daerah pelosok

- Meningkatkan persentase alokasi anggaran kegiatan yang mendukung peningkatan mutu kualitas pendidikan dasar seperti peningkatan fasilitas sarana-prasarana sekolah, terutama pembangunan laboratorium, perpustakaan, serta pengadaan buku dan alat praktik.
- Alokasi anggaran pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan lebih diarahkan pada bentuk kegiatan untuk peningkatan mutu kompetensi.
- Mengalokasikan anggaran kegiatan untuk meningkatkan peran dan fungsi dari Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan
- Meningkatkan alokasi anggaran untuk proses penilaian akreditasi sekolah khususnya di daerah-daerah terpencil atau daerah dengan akses infrastruktur yang terbatas Memprioritaskan alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan wilayah (kecamatan dan kampung), sehingga tidak dilakukan dengan pola bagi rata di seluruh wilayah.
- Perlu dilakukannya pemuktahiran data dalam Profil Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh yang dilakukan setiap tahun dan dapat diakses oleh publik melalui media online (website pemerintah daerah).

5.3.3. Kebijakan Kesehatan

- Memperkuat basis pelayanan Kesehatan, Ibu dan Anak (KIA) dalam jaminan kesehatan. Dimana pemerintah menanggung premi asuransi bagi masyarakat tidak mampu. Selain itu, cakupan pelayanan ibu hamil, melahirkan, pasca melahirkan dan pelayanan kesehatan anak juga tersedia dalam skema jaminan kesehatan.
- Melakukan evaluasi kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan untuk mengetahui sejauh mana tenaga medis dan fasilitas kesehatan terdistribusi secara merata dan berkualitas antar kecamatan atau desa, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, dan pelayanan (SOP) kesehatan terutama di puskesmas, pustu, polindes, posyandu, dan rumah sakit.
- Meningkatkan pelayanan antar-jemput gratis persalinan terutama penduduk yang tinggal di wilayah terpencil, disertai dengan peningkatan akses infrastruktur terutama jalan menuju tempat persalinan terdekat.

- Penguatan sistem rujukan internal baik untuk maternal maupun neonatal terutama kepada pasien pasca operasi di RSUD
- Penguatan sosialisasi oleh seluruh puskesmas dan puskesmas pembantu mengenai pentingnya kesadaran ibu hamil agar melahirkan di tempat fasilitas kesehatan dengan bantuan tenaga kesehatan terlatih/embangkan sistem deteksi dan kewaspadaan dini penyakit/wabah dengan melibatkan peran serta dari masyarakat di lingkungan setempat, terutama pada ibu hamil, bayi dan balita.
- Meningkatkan pelaksanaan kegiatan supervisi fasilitatif bidan koordinator di tingkat puskesmas kabupaten hingga tingkat desa, dengan pembinaan aspek klinis, non klinis, logistik dan manajemen KIA
- Meningkatkan kompetensi bidan dalam penatalaksanaan pemeriksaan kehamilan/Antenatal Care (ANC) terpadu sehingga tidak hanya mampu mendeteksi dini ibu hamil dengan risiko tinggi tetapi juga mampu mengetahui faktor risiko penyebab komplikasi
- Penguatan sistem rujukan balik dari rumah sakit ke puskesmas sehingga setiap kasus neonatal yang terjadi di rumah sakit terdeteksi dengan cepat oleh bidan puskesmas.
- Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi dengan melakukan pelacakan kasus neonatal risiko tinggi.
- Revitalisasi program Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan sosialisasi penundaan usia perkawinan.
- Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan melakukan implementasi kegiatan prioritas untuk penurunan AKI, AKB, dan AKBA. Sehingga anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD dapat terealisasikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran dengan mengalokasikan lebih besar porsi anggaran kepada program-program dan kegiatan prioritas untuk penurunan AKI, AKB, dan AKBA.
- Perlunya peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin untuk meningkatkan perilaku hidup

bersih dan sehat. Upaya ini dilakukan dengan memperluas sosialisasi pentingnya PHBS dan lingkungan sehat oleh dinas-dinas terkait.

5.3.4. Kebijakan Infrastruktur Dasar

- Revitalisasi sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang kurang memadai terutama di berbagai kantong wilayah kumuh perkotaan, seperti: penyaluran air bersih, pengolahan limbah, sistem pengelolaan sampah, saluran drainase dan penanggulangan banjir, dan perbaikan kondisi jalan.
- Penajaman ketepatan dan sasaran penerima manfaat program pembangunan rumah layak huni termasuk pengembangan rumah sehat, pipanisasi air bersih, dan air minum bagi rumah tangga miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin.
- Program dan kegiatan infrastruktur yang telah diagendakan dan dialokasikan dalam anggaran APBD sedapat mungkin segera direalisasikan agar pemenuhan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat dengan kurangnya sarana dan prasarana.
- Peningkatan kualitas perencanaan, kebijakan dan penyelenggaran pembangunan kawasan permukiman kumuh berdasarkan pada evidence based dan data yang tersedia.
- Meningkatkan alokasi anggaran untuk pemenuhan sanitasi layak, air minum layak, akses listrik, rumah layak huni setiap tahun dalam APBD Kota Banda Aceh.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam revitalisasi kawasan permukiman kumuh, dimana masyarakat dilibatkan pada setiap tahapan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemanfaatan, pengawasan dan pemeliharaan.

5.3.5. Kebijakan Pertanian dan Perkebunan

- Perlunya dukungan dan perhatian khusus Pemerintah Kota Banda Aceh bagi peningkatan kesejahteraan petani dengan berfokus pada

peningkatan penghasilan petani miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin.

- Perlunya melakukan identifikasi terhadap penduduk miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin yang bekerja sebagai buruh tani, kondisi ini dibutuhkan untuk memastikan agar manfaat program pertanian dan perkebunan juga diterima oleh buruh tani dengan status miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin sehingga tidak hanya berfokus pada kelompok tani.
- Revitalisasi sarana dan prasarana pendukung sektor pertanian dan perkebunan yang kurang memadai terutama bagi kecamatan-kecamatan dengan luas lahan dan produksi sektor pertanian dan perkebunan tinggi serta kecamatan-kecamatan penduduk miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin bekerja di sektor pertanian dan perkebunan juga tinggi.
- Penajaman ketepatan dan sasaran penerima manfaat program pembagian alat dan mesin pertanian bantuan bibit, bantuan pupuk, pelatihan petani bagi penduduk tangga miskin dan rentan yang bekerja di sektor pertanian dan perkebunan.
- Peningkatan kualitas perencanaan, kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan sektor peningkatan kesejahteraan petani dapat dilakukan berdasarkan pada evidence based dan data-data mikro yang tersedia
- Meningkatkan alokasi anggaran untuk peningkatan kesejahteraan petani dan tersedia setiap tahun dalam APBD Kota Banda Aceh, dengan memperbesar porsi untuk kebermanfaatan yang lebih besar bagi penduduk miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin yang bekerja sebagai buruh dan petani.
- Perlunya peningkatan penajaman program, kegiatan dan anggaran pada kecamatan-kecamatan dengan status sosial, ekonomi dan kesejahteraan rendah dengan penduduk miskin tinggi bekerja sebagai buruh dan petani miskin.

5.3.6 Kebijakan UMKN

Perlunya penetapan Pelaku Usaha Mikro yang termasuk dalam katagori miskin, kondisi ini dibutuhkan untuk memastikan ketepatan sasaran dalam

memberikan bantuan dan pendampingan sehingga terwujudnya peningkatan pendapatan UMKM dalam waktu singkat dan program UMKM naik kelas dapat terwujud.